

Dr. Hartoyo, M.Si

CARA BARU PETANI MENGGUGAT KEBIJAKAN AGRARIA

(Potret Konflik Pertanahan dan
Dinamika Gerakan Petani
di Lampung Pasca Orde Baru)



Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Cara Baru Petani Menggugat Kebijakan Agraria

**(Potret Konflik Pertanahan dan Dinamika Gerakan
Petani di Lampung Pasca Orde Baru)**

Dr. Hartoyo, M.Si

AURA
PUBLISHING

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**CARA BARU PETANI MENGGUGAT KEBIJAKAN AGRARIA
(Potret Konflik Pertanahan dan Dinamika Gerakan Petani
di Lampung Pasca Orde Baru)**

Penulis :

Dr. Hartoyo, M.Si

Desain Cover & Layout

Kang Yanto

Cetakan Pertama : Januari 2015

xvi + 225 hal :

15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

ISBN :978-602-1297-70-4

Penerbit

CV. Anugrah Utama Raharja (AURA)

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng - Bandar Lampung

Telp. 0721-758 3211 - HP. 0812 8143 0268

E-mail : aura_print@ymail.com

Website : www.aura-publishing.com

ISBN : 978-602-1297-70-4



9 78 602 1297 70 4



Prakata

Aksi-aksi kolektif petaniterorganisir yang marak dilancarkan pasca Orde Baru, khususnya di Lampung, secara umum sebagai wujud dari gerakan agraria, dan secara khusus sebagai wujud dari gerakan petani. Fenomena ini terjadi, antara lain, akibat banyaknya konflik penguasaan tanah pertanian antara petani dengan negara (pemerintah) dan swasta (perusahaan). Agenda utamanyasecara umum adalah perubahan struktur sosial agrariayang mendasar dan lebih baik (*agrarian reform*), dan secara khusus ditujukan untuk merubah kebijakan agraria (*land reform*) dalam kerangka perubahan struktur sosial agraria tersebut.

Penjelasan tentang gerakan petani tidak terlepas dari obyek representasinya, yaitu organisasi tani, dari yang sederhana (tradisionnal) sampai dengan yang kompleks (moderen). Sama dengan organisasi gerakan sosial pada umumnya, bahwa organisasi tani dalam melancarkan aksi-aksinya memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Untuk mencapai tujuan jangka pendek dilakukan melalui gerakan sosiopolitik, sedangkan untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui gerakan sosiokultural.

Buku berjudul "*Cara Baru Petani Menggugat Kebijakan Agraria: Potret Konflik Pertanahan dan Dinamika Gerakan Petani di Lampung Pasca Orde Baru*" ini selain memuat teori-teori gerakan sosial, juga memuat rangkaian hasil karya penulis dan data-data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang belum termuat dalam beberapa karya penulis yang ada. Beberapa tulisan ilmiah yang penulis dihasilkan dan menjadi rujukan utama dalam penulisan buku ini adalah Disertasi (Hartoyo, 2010), makalah Lokakarya (2011) dan makalah yang dimuat dalam beberapa jurnal ilmiah (Hartoyo, 2006; Hartoyo, dkk., 2008; Hartoyo, dkk., 2010; Hartoyo, 2011; dan Hartoyo, 2013).

Secara garis besar, buku ini menjelaskan 5 (lima) persoalan utama yang terbagi menjadi 8 (delapan) Bab. Pertama, menjelaskan bagaimana realitas hubungan sosial agraria dikonstruksi, sehingga menjadi prakondisi utama munculnya konflik-konflik agraria dan berkembangnya gerakan petani. Realitas hubungan sosial agraria ini berhubungan dengan derajat ketegangan struktural (*structural strains*) dan mengandung kondisi-kondisi yang mendukung atau

memberi peluang (*structural condusiveness*) dilakukan aksi-aksi kolektif petani dalam rangka menggugat kebijakan agraria.

Secara khusus, pada bagian pertama buku ini difokuskan pada penguasaan petani atas tanah pertanian yang berbenturan dengan kepentingan negara (pemerintah) dan swasta (perusahaan). Benturan kepentingan di antara ketiga elemen aktor dalam sistem sosial agraria tersebut mengakibatkan munculnya konflik-konflik pertanahan, secara masif, akumulatif dan berkepanjangan. Berbagai upaya petani telah dilakukan dalam menyelesaikan konflik pertanahan tersebut, baik melalui jalur insititusional maupun non institusional. Tetapi masih bersifat lokal dan dengan carasederhana, sehingga banyak yang menemui jalan buntu dan gagal. Situasi konfliktual terus berlangsung dan diaktifkan terus menerus sehingga mengkristal menjadi sub kultur oposisi petani.

Kedua, menjelaskan kondisi-kondisi utama yang mendukung munculnya aksi-aksi kolektif petani. Lebih rinci, pada bagian ini dijelaskan tiga faktor utama munculnya gerakan petani yang saling terkait. Ketiga faktor tersebut adalah terbukanya struktur peluang politik, struktur mobilisasi sumberdaya, dan pembingkaiian (*framing*) kolektif.

Ketiga, menjelaskan urgensi gerakan petani dalam menuntut (tanpa atau dengan tekanan dan paksaan) perubahan kebijakan agraria, atau secara khusus terhadap kebijakan pertanahan. Penjelasan pada persoalan ini berhubungan dengan kondisi-kondisi utama yang menunjukkan kemampuan organisasi tani dalam mencapai tujuan gerakan, sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan, dan sejalan dengan garis perjuangan. Analisis terhadap persoalan ini mencakup proses dinamis mulai dari sebelum sampai dengan sesudah dilakukan aksi-aksi kolektif petani. Berkaitan dengan penjelasan persoalan ini, juga dijelaskan dua urgensi perjuangan petani, yaitu: 1) dalam mencapai tujuannya sesuai dengan kekuatan sumberdaya yang dimiliki; dan 2) arah kecenderungan aktivitas dalam mencapai tujuan-tujuannya sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan.

Keempat, menjelaskan beberapa strategi utama yang telah dilakukan oleh para aktor gerakan dalam mengkonstruksi arah baru gerakan petani. Penjelasan tentang persoalan ini berhubungan dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok aktor dalam mencapai kepentingannya, baik yang sejalan maupun yang tidak sejalan dengan kepentingan substantif petani. Masing-masing strategi diproduksi berbasis pada ideologi gerakan yang berbeda, ada yang sejalan dan ada yang berbenturan, sehingga berpengaruh terhadap keberlanjutan dan arah gerakan petani itu sendiri.

Kelima, berisi usulan tentang arah baru gerakan petani yang perlu dikonstruksi ulang. Usulan ini didasarkan pada posisi petani di dalam sistem sosial agraria yang antagonis dan kegagalan organisasi tani dan organisasi gerakan sosial lain yang mendukung petani dalam mencapai kepentingan substantif petani. Petani sebagai elemen sistem telah mengalami disfungsi, sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan keseimbangan sistem sosial agraria itu sendiri.

Tersusunnya buku ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun kelembagaan. Semoga amal baik semuanya mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya, penulis menyatakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena keberhasilan apapun yang penulis peroleh dari buku ini tidak terlepas dari petunjuk dan bimbingannya. Dialah Maha Pencipta, Maha Berilmu, Maha Kuasa dan berkehendak atas segalanya. Semoga buku ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang gerakan sosial pada umumnya dan gerakan petani di Indonesia pada khususnya, serta bermanfaat bagi semua khalayak yang semakin banyak mencintai ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Januari 2015

Penulis



Daftar Isi

Prakata	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Singkatan	xiv
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1. Persoalan Struktural Agraria.....	1
1.2. Konsepsi Petani Dalam Analisis Gerakan Sosial.....	5
1.3. Gerakan Sosial dan Gerakan Petani.....	8
1.4. Kondisi Petani Dalam Lingkaran Persoalan Agraria.....	11
1.5. Petani Menggugat Kebijakan Agraria.....	15
1.6. Stagnasi Gerakan dan Rekonstruksi Arah Baru Gerakan Petani.....	18
1.7. Ruang Lingkup Bahasan Buku Ini.....	22
BAB 2 Gerakan Petani: Sintesis Teori-Teori Gerakan Sosial	25
2.1. Pendahuluan.....	25
2.2. Teori-Teori Psikososial.....	25
2.2.1. Teori Deprivasi Relatif.....	26
2.2.2. Perspektif Konstruksionis Sosial.....	29
2.2.2.1. Pembingkai Kolektif (Collective Framing)	30
2.2.2.2. Identitas Kolektif (Collective Identity).....	34
2.3. Teori-Teori Struktural Gerakan Sosial.....	34
2.3.1. Teori Perilaku Kolektif.....	34
2.3.2. Teori Nilai Tambah (Value-Added).....	35
2.3.3. Teori Mobilisasi Sumberdaya dan Struktur Peluang Politik.....	37
2.3.3.1. Mobilisasi Sumberdaya.....	41
2.3.3.2. Struktur Peluang Politik.....	42
2.4. Pendekatan Sintesis.....	44
2.5. Organisasi Gerakan Sosial dan Organisasi Gerakan Petani	49
2.5.1. Organisasi Gerakan Sosial.....	49
2.5.2. Organisasi Gerakan Petani.....	55
2.6. Perkembangan Organisasi Gerakan Petani.....	59

BAB 3 Kontradiksi dan Negasi Struktural: Mainstream Sistem Sosial Agraria Dominan	63
3.1. Pendahuluan	63
3.2. Pola Dasar Sistem Sosial Agraria.....	65
3.3. Formasi Sosial Agraria Sebagai Proses Konstruksi Sistem Sosial Agraria	69
3.4. Akar Konflik Agraria Bersifat Struktural dan Sistemik	75
3.5. Perkembangan Kesadaran Sosial Petani	80
3.5.1. Kesadaran Proaktif	82
3.5.2. Kesadaran Sosial Konflikual	85
3.5.3. Kesadaran Sisiopolitik	87
BAB 4 Ketegangan Struktural Agraria dan Penguatan Sub Kultur Oposisi Petani	91
4.1. Pendahuluan	91
4.2. Ketegangan Struktural	91
4.3. Sumber Utama Ketegangan Struktural	96
4.3.1. Pola Penguasaan Tanah Pertanian dan Konflik Pertanahan	97
4.3.2. Menurunnya Kondisi Kehidupan Petani	105
4.3.3. Sulitnya Perjuangan Petani di Era Orde Baru	108
4.4. Berkembangnya Sub Kultur Oposisi Petani	115
4.5. Sumber Utama Ketegangan Struktural dan Tahapan Perjuangan Petani	116
BAB 5 Gerakan Petani Dalam Kerangka Gerakan Sosiopolitik .	119
5.1. Pendahuluan	119
5.2. Konstruksi Sumberdaya Mobilisasi	120
5.2.1. Konstruksi Gerakan dari Atas	120
5.2.2. Konstruksi Gerakan dari Bawah	122
5.3. Anatomi Gerakan Petani	123
5.4. Respon Petani Terhadap Terbukanya Struktur Peluang Politik	126
5.5. Mobilisasi Sumberdaya Dalam Aksi-Aksi Kolektif Petani ..	129
5.5.1. Determinan Gerakan Petani	130
5.5.2. Rekrutmen dan Pengorganisasian Petani Basis	132
5.5.3. Penguatan Struktur Mobilisasi Sumberdaya Pendukung	134
5.6. Aksi-Aksi Kolektif Petani dan Efeknya	135
BAB 6 Fragmentasi Gerakan Petani.....	141
6.1. Pendahuluan	141
6.2. Dekonstruksi Struktur Gerakan Petani	142
6.2.1. Konflik dan Fragmentasi Gerakan Petani	143

6.2.2. Berebut Sumberdaya Mobilisasi.....	145
6.2.3. Pertarungan Garis Perjuangan Kelompok Pendukung	148
6.3. Decoupling Antara Persoalan Substantif Petani Dengan Kepentingan Para Elit Aktor Gerakan.....	152
6.4. Stagnasi Gerakan Petani.....	154
6.4.1. Pengeroposan Dari Dalam	155
6.4.2. Penyumbatan Dari Luar.....	158
6.4.3. Stagnasi Gerakan Petani	160
BAB 7 Pergeseran Arah Perkembangan Gerakan Petani	167
7.1. Pendahuluan.....	167
7.2. Makna Konsep Involusi Dalam Analisis Perkembangan Gerakan Petani.....	168
7.3. Strukturasi Internal: Persoalan Siklus Gerakan Petani.....	172
7.4. Pola Hubungan Kekuasaan Dalam Struktur Gerakan Petani.....	177
7.5. Kuat dan Kenyalnya Sistem Agraria Dominan.....	178
7.6. Disinstitusionalisasi Program Gerakan.....	181
7.7. Arah Perkembangan Organisasi Gerakan Petani	183
BAB 8 Rekonstruksi Arah Baru Gerakan Petani: Sebuah Usulan Hasil Refleksi	189
8.1. Pendahuluan	189
8.2. Kondisi Petani Dalam Sistem Sosial Agraria Dominan.....	190
8.3. Kegagalan Organisasi Gerakan Dalam Memperjuangkan Kepentingan Substantif Petani.....	192
8.4. Solusi Alternatif Penguatan Gerakan Petani.....	194
Daftar Pustaka	201
Glosarium.....	213
Indeks Subyek	219
Indeks Nama	222



Daftar Tabel

Tabel 1.	Dimensi Konseptual Petani Dalam Analisis Gerakan Sosial.....	8
Tabel 2.	Perbedaan Prinsip Struktural Antar Elemen Sistem Sosial Agraria.....	66
Tabel 3.	Konstruksi Sistem Sosial Antagonis Terhadap Petani....	78
Tabel 4.	Unsur-Unsur Gerakan Konsensus.....	111
Tabel 5.	Sumber Utama Ketegangan Struktural Agraria dan Perjuangan Petani.....	117
Tabel 6.	Anatomi Gerakan Petani Sebagai Gerakan Sosiopolitik.	125
Tabel 7.	Ciri-Ciri Perkembangan Organisasi Gerakan Petani.....	164
Tabel 8.	Tipe Aktor Gerakan Petani dan Orientasinya	166
Tabel 9.	Arah Perkembangan Organisasi Gerakan Petani di Lampung	186
Tabel 10.	Strategi Gerakan Agraria Mendatang.....	200



Daftar Gambar

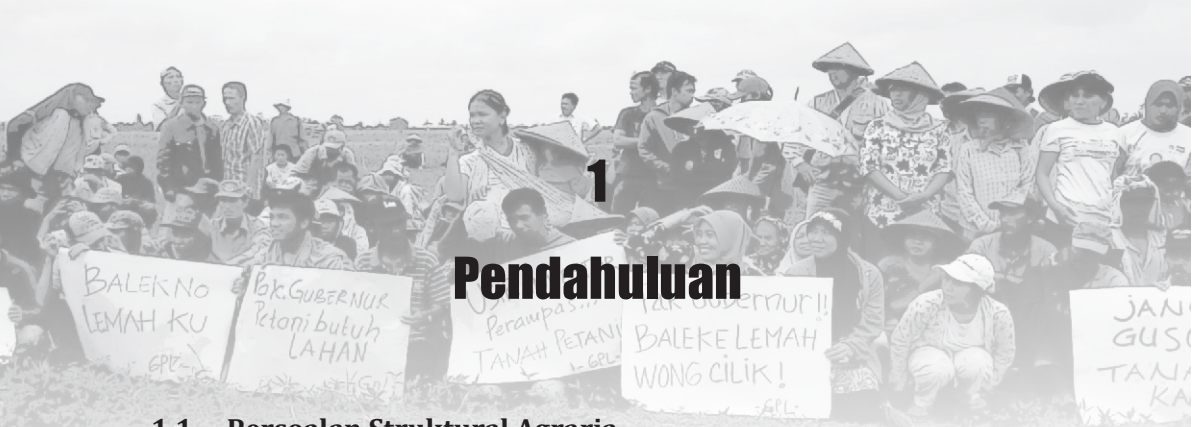
Gambar 1.	Keterkaitan Antara Struktur Mobilisasi, Peluang Politik dan Proses Framing dalam Gerakan Sosial.....	46
Gambar 2.	Pola Dasar Sistem Sosial Agraria.....	68
Gambar 3.	Prinsip-Prinsip Struktural Sistem Sosial Agraria	69
Gambar 4.	Formasi Sosial Agraria.....	71
Gambar 5.	Praktek Struktural dalam Sistem Sosial Agraria	74
Gambar 6.	Hubungan Antar Elemen Sistem Sosial Agraria	79
Gambar 7.	Perkembangan Kesadaran Sosial Petani.....	87
Gambar 8.	Determinan Aksi-Aksi Kolektif dalam Gerakan Petani ..	132
Gambar 9.	Strukturasi Internal Gerakan Petani.....	176

Daftar Singkatan



ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
APL	: Areal Penggunaan Lain
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPP	: Badan Pimpinan Pelaksana
BPS	: Badan Pusat Statistik
BSMI	: Barat Selatan Makmur Investindo
BTI	: Barisan Tani Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMS	: Badan Usaha Milik Swasta
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DPP	: Dewan Pimpinan Petani
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DRL	: Dewan Rakyat Lampung
DTL	: Dewan Tani Lampung
GPL	: Gerakan Petani Lampung
HAM	: Hak Asasi Manusia
HKTI	: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
HTI	: Hutan Tanaman Industri
IHHBK	: Iuran Hasil Hutan Bukan Kayu
IPL	: Ikatan Petani Lampung
KK	: Kepala Keluarga
Korwil	: Koordinator Wilayah
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: Non Government Organization
OTL	: Organisasi Tani Lokal
PETANI	: Persatuan Tani Nasional Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PNBK	: Partai Nasional Banteng Keadilan
PNBK	: Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
PO	: <i>Peasant Organizer</i>
Posko	: Pos Komando
PRD	: Partai Rakyat Demokratik
PRRMB	: Posko Reformasi Rakyat dan Mahasiswa Bersatu

RTI	: Rakyat Tani Indonesia
SAKTI	: Sarikat Kaum Tani Indonesia
SKT	: Surat Keterangan Tanah
SPL/SPI	: Serikat Petani Lampung/ Serikat Petani Indonesia
STII	: Serikat Tani Islam Indonesia
STN	: Serikat Tani Nasional
TKAD	: Tim Koordinasi Antar Desa
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
UUPMA	: Undang-Undang Penanaman Modal Asing



1 Pendahuluan

1.1. Persoalan Struktural Agraria

Secara etimologis, konsep agraria berasal dari bahasa Latin "ager" (bahasa Inggris "acre") yang berarti sebidang tanah. Kata "agrarius" berarti yang ada hubungannya dengan sebidang tanah, pembagian atas tanah terutama tanah-tanah umum, dan bersifat rural (Wiradi, 1984:286). Konsep agraria dalam perkembangannya, mempunyai pengertian yang luas, tidak hanya menunjuk pada makna "pertanian" (*agriculture*), atau lebih sempit pada makna "tanah pertanian" (*land*) saja, tetapi juga termasuk perdusunan, bukit, wilayah, dan segala sesuatu (kekayaan alami dan kehidupan sosial) yang terkandung di dalamnya.

Dalam pembahasan buku ini, konsep agraria secara khusus menunjuk pada makna penguasaan tanah pertanian.¹ Meskipun demikian, tidak dapat dihindari ketika dalam hal-hal tertentu juga menunjuk pada maknanya yang lebih luas sebagai sumberdaya agraria, karena di dalam tanah itu mengandung sumberdaya alam. Ada tiga institusi sosial yang menguasai tanah pertanian dimaksud, yaitu negara (*state*) yang direpresentasikan oleh pemerintah, swasta atau pasar (*market*) yang direpresentasikan oleh perusahaan, dan petani sebagai suatu masyarakat sipil (*civil society*) yang diikat dalam wadah organisasi tani. Oleh karena itu, dimaksud dengan "petani" dalam buku ini bukan menunjuk pada makna status perseorangan, tetapi menunjuk pada maknanya sebagai suatu institusi sosial, yaitu "komunitas atau masyarakat petani".

Ketiga institusi sosial tersebut dipandang sebagai organisasi system sosial agraria yang secara substantif memiliki makna dualitas, yaitu sebagai struktur sekaligus sebagai agensi aktor. Masing-masing

¹ Memang di Provinsi Lampung terdapat tanah-tanah bukan termasuk kategori tanah pertanian yang juga menjadi obyek konflik. Tanah-tanah tersebut sebelumnya dikuasai oleh warga masyarakat, tetapi dengan alasan untuk kepentingan pemerintah dan perusahaan, kemudian tanah-tanah tersebut diambil alih melalui pola hubungan yang tidak seimbang atau "secara paksa". Konflik-konflik pertanahan dan perjuangan warga masyarakat dalam kasus ini tidak termasuk lingkup bahasan dalam buku ini, meskipun dalam beberapa kasus terdapat unsur-unsur yang sama dalam kerangka gerakan sosial.

institusi sosial tersebut memiliki karakteristik yang khas dan pada esensinya sebagai elemen institusional dari suatu sistem sosial agraria.

Tanah pertanian merupakan kekayaan alami berposisi sebagai sumberdaya atau obyek agraria, sedangkan pemerintah, perusahaan, dan petani berposisi sebagai subyek agraria. Tanah pertanian memiliki posisi sentral bagi manusia karena mawadahi keseluruhan kekayaan alami, kehidupan sosial dan kultural (Sitorus, 2004:111). Hubungan antara manusia dengan tanah pertanian dalam penggunaan dan pemanfaatan disebut “hubungan teknis agraria”, sedangkan hubungan antar manusia dalam penguasaan tanah pertanian (dalam arti luas, seperti pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan) disebut “hubungan sosial agraria”. Menurut Tap MPR No. IX Tahun 2001 Pasal 2, konsep “pemilikan” menunjuk pada status hukum seseorang atas sebidang tanah pertanian, merupakan penguasaan formal atau sering disebut dengan “*land tenure*”. Konsep “penguasaan” menunjuk pada kepentingan ekonomi, yaitu akses seseorang dalam memanfaatkan sebidang tanah pertanian, merupakan penguasaan efektif atau sering disebut “*land tenancy*”. Sedangkan konsep “penggunaan” dan “pemanfaatan” menunjuk pada bagaimana tanah pertanian itu dimanfaatkan secara fisik. Jika dilihat dari pola relasi dalam struktur hubungan agraria antara pemerintah, perusahaan, dan petani, maka pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah pertanian lebih dominan terkait dengan dimensi kekuasaan atas sumberdaya politik dan ekonomi.

Dalam rentang sejarah agraria di Indonesia pada umumnya, dan di Lampung pada khususnya, bahwa persoalan struktural yang terkait dengan kelangsungan hidup petani dapat digolongkan menjadi empat aspek, yaitu kebijakan agraria yang tidak konsisten dan tidak memihak kepada petani, pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang timpang, konflik penguasaan dan penggunaan tanah pertanian, dan degradasi sumberdaya tanah. Dua jenis konflik yang sering muncul adalah antara petani dengan negara dan dengan perusahaan. Keterlibatan perusahaan dimulai dari lahirnya Undang-Undang Agraria 1870 (*Agrarische Wet*) yang mengundang para pengusaha swasta menanamkan modalnya terutama dalam usaha perkebunan. Sedangkan permasalahan kerusakan sumberdaya agraria tercantum dalam Tap MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Dalam menelisik banyak kasus persoalan bekerjanya struktur sosial agraria di Indonesia, para analisis sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi ketimpangan struktural secara terus menerus dan berkelanjutan dalam setiap episode kekuasaan rezim. Pola kerjayang

terkonstruksi secara sistemik di dalam struktur sosial agraria tersebut memperlihatkan bahwa petani selalu berada pada posisi ter subordinasi dan kepentingannya selalu terpinggirkan (Tauhid, 1952; Zakaria, 2001; Fakhri, 1995; Malik, dkk., 2003; Fauzi, 1999; Razif, 1991; Suhartono, 1991).

Sesuai dengan pandangan Miall (2000), bahwa persoalan struktural dalam struktur sosial agraria tersebut di dalamnya melekat hubungan sosial agraria yang asimetris antara negara dan perusahaan pada satu pihak dengan petani pada pihak lain. Persoalan struktural agraria yang demikian hanya dapat diselesaikan dengan merubah struktur sosial yang ada menjadi seimbang. Ini berarti bahwa persoalan struktural agraria yang asimetris terhadap petani hanya dapat diselesaikan dengan cara memperkuat posisi tawar petani itu sendiri. Cara ini menuntut perubahan mendasar dalam tata hubungan agraria atau disebut dengan transformasi struktural agraria.

Untuk melakukan perubahan transformatif, dengan memperkuat posisi tawar petani, tidak dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik-konflik sosial, meskipun di dalam konflik-konflik tersebut tidak harus terjadi kekerasan dan merusak. Disini petani dengan segenap elemen pendukungnya harus mampu bekerja secara sinergis dan berjuang secara terus menerus. Transformasi struktural di bidang agraria yang diyakini lebih baik, pada tataran makro, berarti berkaitan langsung dengan perubahan paradigma dari paradigma *developmentalism* yang lebih bersifat teknokratis menjadi paradigma partisipatoris.

Konsep *developmentalism* menurut Pieterse (dalam Schrijvers, 2000: 25) berakar pada suatu filsafat yang terkandung dalam teori kemajuan linier, perkembangan evolusioner, teori modernisasi dan pemikiran pembangunan. Produksi pengetahuan merupakan bagian integral dari hasil produksi dalam kerangka paradigma pembangunan. Oleh sebab itu, setiap konsep yang digunakan selalu mengacu pada paradigma tersebut dan dimanfaatkan untuk mendukungnya. Para pendukung paradigma pembangunanisme menyakini pentingnya pembangunan berbasis teknologi moderen dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi, meskipun konsekuensinya banyak memakan korban di pihak rakyat bawah, termasuk petani.

Gugus pengetahuan moderen tersebut terpusat pada upaya perubahan mendasar yang diarahkan pada saling keterkaitan antara aspek sosial, politik, ekonomi, dan kultural. Konstruksi paradigma pembangunan terlekat di dalam struktur *schemata* aktor yang diyakini sebagai solusi tepat untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan politik yang ditinggalkan oleh rezim Orde Baru. Menurut Fakhri (2004), konsisten dengan upaya perubahan "mendasar" tersebut, kemudian

diproduksi gugus pengetahuan tentang pertumbuhan ekonomi yang didukung pengetahuan tentang sistem politik, sistem birokrasi dan sistem modernisasi sosiokultural. Caranya antara lain dengan melakukan serangkaian transfer ilmu pengetahuan dan teknologi melalui jalur pendidikan formal.

Kemudian lahirlah pengetahuan agraria yang lebih bersifat teknokratis daripada partisipatif. Pengetahuan tersebut melekat kuat di dalam struktur *schemata (mindset)* para aktor pembangunan yang berpusat pada kompetensi para teknokrat. Teknokrasi lahir karena kompetensi (kemampuan dan keahlian dalam bekerja) tanpa konstituensi (jumlah orang yang memilih seseorang untuk mewakili mereka). Pertama, para teknokrat mendapat suatu jabatan politik karena keahlian dan kemampuannya dalam suatu bidang teknis, dan karena itu tidak memerlukan konstituensi yang mendukungnya. Kedua, teknokrasi cenderung percaya pada suatu elitisme intelektual yang mengandaikan bahwa soal-soal ekonomi politik dan sosial politik dalam suatu negara moderen harus dipegang oleh seorang yang kompeten (Kleden, 2004:4-5). Sistem pengetahuan yang dikonstruksi dalam suatu mekanisme teknokrasi seperti itu sangat mempengaruhi konstruksi struktur sosial agraria. Struktural agraria yang dikonstruksi merupakan perwujudan dari suatu sistem sosial agraria dominan yang eksis dan terlembagakan di dalam setiap episode kekuasaan rezim.

Oleh karena itu, secara logis dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu yang lama posisi petani di dalam proses rekonstruksisistem sosial agraria dominan, selalu sesuai atau sejalan dengan kerangka paradigma *developmentalism*. Posisi petani sangat dominan sebagai obyek atau subyek pembangunan yang pasif. Dominasi sistem sosial agraria berbasis kompetensi ternyata benar-benar tidak memberi peluang kepada petani untuk berpartisipasi aktif di dalam reproduksi prinsip-prinsip struktural sistem sosial agraria. Entitas tanah pertanian mengalami komodifikasi, yakni berubah menjadi komoditas yang dominan berfungsi ekonomi daripada fungsi sosial. Petani kemudian diposisikan sebagai salah satu faktor produksi dan dalam struktur hubungan agraria berada pada posisi subordinat dan termarginalkan. Struktur hubungan ini dikonstruksi secara sistematis dan terus menerus dalam rentang waktu yang sangat lama. Secara historis, tampak jelas bahwa posisi dan nasib petani yang tidak berubah membaik secara berarti tersebut selalu dijumpai secara berulang dalam setiap episode kekuasaan rezim. Bahkan berbagai konflik tanah pertanian dan perjuangan petani selalu muncul yang pada intinya bertujuan sama, yaitu menggugat kebijakan agraria yang tidak memihak kepada kepentingan substantif petani.

Dalam setiap episode kekuasaan rezim, rekonstruksi struktur sosial agraria tetap didominasi oleh para elit politik dan ekonomi. Meskipun landasan ideologis dan yuridis di dalam setiap produk peraturan perundangan tentang agraria adalah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, secara sosiologis atau realitasnya bahwa struktur sosial agraria cenderung mengarah pada kapitalisme semu (Wiradi, 2000:173). Akibatnya, petani tidak memiliki kekuatan kontrol yang memadai atas sumber-sumber agraria. Sebagai negara bekas jajahan, atau sudah lama merdeka, ternyata ruh kolonialisme tidak bisa hilang begitu saja dan masih tetap menjadi bagian dari praktik-praktik pembangunan.²Sama dengan masa kekuasaan Orde Lama, ketika Orde Baru berkuasa maka otoriterianisme masih tetap diberlakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Oleh karena pembangunan dianggap masih belum selesai, maka petani dipaksa harus membatasi hak-hak demokrasiya agar memberi ketenangan politik bagi pertumbuhan ekonomi (Kleden, 2004:32).

Konsisten dengan sikap tersebut, maka kontrol negara terhadap petani selama episode kekuasaan rezim terus diperkuat dengan menggunakan berbagai pendekatan. Contohnya, dalam kebijakan politik nasional Orde Baru telah dikembangkan pendekatan 'depolitisasi', 'deideologisasi', dan massa mengambang (*floating mass*) (Baharudin dan Subhan, 1999: 21). Akibatnya adalah tersumbatnya saluran komunikasi politik bagi petani untuk menyampaikan aspirasinya. Dampaknya yang lebih luas adalah, petani menjadi teralienasi secara politik, ekonomi dan kultural. Sudah sering terjadi bahwa dalam dinamika politik lokal hingga nasional, petani selalu dijanjikan akan diperhatikan nasibnya hanya ketika dirinya diperlukan sebagai instrumen mobilisasi, terutama untuk kepentingan politik oleh para elit. Setelah itu, janji-janji tersebut tidak pernah dipenuhi secara berarti, dan petani terus menerus terperosok dalam lubang kehidupan yang sama.

1.2. Konsep Petani Dalam Lingkup Analisis Gerakan Sosial

Konsep petani oleh Wolf dan Shanin dibedakan antara *farmer* dan *peasant*. *Farmer* menunjuk pada petani kecukupan, berada pada lapisan atas, memiliki dan menguasai faktor produksi (tanah) dalam jumlah yang lebih dari cukup. Mereka mampu mengakumulasi surplus ekonomi, memiliki akses kedekatan politik dengan elit penguasa

² Di Lampung kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) masih mengacu pada kebijakan agraria produk kolonial. Di Sulawesi juga ditemukan kasus tafsir yang berlaku umum atas UU Kehutanan (UU No. 41/1999) dan UU Pelestarian Hutan (UU No. 5/1990) yang masih merujuk pada azas *Domain Verklaaring* warisan pemerintah kolonial (Sitorus, 2006:24).

daerah setempat, dan cenderung mengadopsi gaya hidup kelas atas. Sedangkan *peasant* menunjuk pada petani miskin yang memiliki atau menguasai tanah relatif sempit, bahkan sebagian sebagai buruh tani dengan tidak memiliki atau menguasai tanah pertanian. Gaya hidup dan pandangan hidup *peasant* juga berbeda dengan *farmer*, karena mereka berada pada lingkungan strata masyarakat tersendiri (Shanin, 1979:50-68)

Tetapi, lazim dinyatakan bahwa petani sebagai elemen sistem sosial agraria memiliki prinsip-prinsip strukturalnya yang khas dan berbeda dengan prinsip-prinsip struktural negara (pemerintah) dan swasta (perusahaan). Petani, pertama, memiliki hubungan khusus dengan tanah dengan ciri spesifik produksi pertanian berakar pada keadaan khususnya; kedua, usaha petani keluarga merupakan satuan dasar pemilikan produksi dan konsumsi serta kehidupan sosial petani; ketiga kepentingan pokok pekerjaan dalam menentukan kehidupan sosial; keempat, peranan dan kepribadian petani dikenal secara baik oleh masyarakat yang bersangkutan; kelima, struktur sosial desa merupakan keadaan khusus bagi daerah tertentu dan waktu tertentu; dan keenam, masyarakat petani merupakan sebuah kesatuan sosial praindustri yang memindahkan unsur-unsur spesifik struktur sosial ekonomi dan kebudayaan lama ke dalam masyarakat kontemporer (Nurhasim, 1997: 80).

Lebih khusus bahwa pada petani kontemporer sudah mampu berhubungan dengan lingkungan sosial yang lebih luas (jauh di luar desa) terkait dengan struktur relasi kekuasaan di sektor pertanian. Karakteristik dasarnya menurut Kurtz (2000: 101-102) adalah: pertama, produksinya berbasis pada keluarga pertanian; kedua, suatu ekonomi pertanian yang tingkat spesialisasinya rendah; ketiga, kultur tradisionalnya secara khusus berhubungan dengan tata kehidupan pedesaan kecil; dan keempat, berada dalam hubungan dominasi dengan pihak luar yang dapat diperkuat melalui penguasaan tanah, tekanan fisik langsung, dan perlakuan tidak fair melalui kekuatan pasar.

Ini berarti bahwa petani saat ini sebagian besar sudah hidup di dalam dua lingkungan yang berbeda, yakni dalam lingkungan pertanian tradisional dan moderen. Hanya saja di antara mereka lebih condong berada pada garis kontinum tertentu, apakah pada lingkungan pertanian tradisional atau modern. Pada kondisinya yang relatif tertutup, kehidupan petani bersifat spesifik, subsisten, tradisional, menggunakan tenaga kerja rumah tangga, memiliki perangkat sosiokultural yang khas, memiliki pola, referensi dan logika hidup sendiri. Sedangkan pada kondisinya yang terbuka, maka petani

lebih bersifat utilitarian dan memiliki kapasitas pilihan yang lebih rasional dalam setiap tindakan yang diambilnya.³ Jika mengacu pada garis kontinum antara dua lingkungan struktural yang berbeda, yakni lingkungan prakapitalis (pertanian tradisional) dan struktur kapitalisme (pertanian moderen), maka asumsi teori formal menyatakan bahwa penetrasi kapitalisme akan mengikis karakteristik tradisional petani dan akan semakin berkembang karakteristiknya ke arah sistem kapitalistik (Hashim, 1984:21).

Kterkaitan antara konsepsi petani dengan gerakan sosial, dan dalam maknanya yang berkembang menjadi beragam, secara umum ditunjukkan pada Tabel 1. Sebagian studi menunjuk pada (1) petani penggarap pedesaan (*rural cultivators*), tetapi sebagian yang lain memahami petani lebih dari itu, menunjuk pada tiga kemungkinan lain, yaitu: (2) memiliki kontrol atas tanah yang digarap, dan atau (3) tersubordinasi secara sosial terhadap kelas dominan pedesaan, dan atau (4) secara khusus dicirikan oleh praktik kultural pada komunitas yang berbeda (Kurtz, 2000: 94-97).

Dari keempat atribut tersebut dapat diidentifikasi lima aliran pemikiran utama yang memberikan perbedaan definisi konsep kaum tani (*peasantry*) dalam menganalisis gerakan sosial. Kelima aliran pemikiran utama tersebut adalah aliran Weberian, Marxian, Antropologikal, Moral Ekonomi, dan aliran Minimalis. Meskipun tampak berbeda secara kategoris, tetapi realitasnya antara aliran pemikiran yang satu dengan aliran pemikiran yang lainnya saling terkait satu sama lain.

Data pada Tabel 1 menyajikan suatu gambaran bahwa tradisi pemikiran Marxian memfokuskan pada kombinasi antara pemilikan tanah dan subordinasi sosial. Mengikuti konsepsi Marx, bahwa petani sebagai elemen masyarakat yang dieksploitasi dan rentan diperas oleh kelompok dominan. Hubungan di antara individu petani bersifat lokalistik dan terpisah-pisah, sehingga sulit dipersatukan dalam kesatuan gerakan sosial dalam wilayah yang lebih luas, ke dalam organisasi politik, tidak mampu menegakkan kepentingan kelasnya sendiri secara politik, dan karena itu mereka harus diwakili. Posisi petani berada dalam struktur dominasi dalam proses produksi pertanian. Petani mengalami pemerasan dan penghisapan oleh para aktor yang berada pada institusi supra desa. Oleh karena itu, dalam pendekatan moral ekonomi memasukkan ciri subordinasi sosial dalam fokusajiannya pada integritas komunitas petani. Pada sisi lain, dalam pendekatan minimalis memahami petani hanya memfokuskan pada

³ Penjelasan tersebut sebagai bentuk klasifikasi antara pandangan Wolf (1967) dan Scott (1976) di satu pihak dan Popkin (1979), Lichbach (1994), dan Bates (1984) di pihak lain.

statusnya sebagai petani penggarap pedesaan. Pendekatan minimalis ini digunakan oleh tradisi pemikiran pilihan rasional atau ekonomi politik dalam menganalisis gerakan petani.

Tabel 1. Dimensi Konseptual Petani Dalam Analisis Gerakan Sosial

Aspek	Aliran Pemikiran				
	Minimalis	Antropological	Moral Economy	Marxian	Weberian
Rural cultivators Peasant communities characterized by distinct cultural practices	Yes	Yes	Yes	yes	Yes
High levels of rural subordination	-	-	Yes	Yes	Yes
Peasants control and/or own land	-	-	-	Yes	Yes
Range of case covered	Very large	Large	Moderate	Moderate	Very small
Examples	Popkin (1979), Lichbach (1994), Bates (1984, 1988)	Redfield (1955) Kroeber (1948) Banfield (1958)	Wolf (1967), Scott (1976), Magagna (1991), Kerkvliet (1977)	Wolf (1967) Paige (1975)	Moore (1966) Shanin (1982)

Sumber: Marcus J. Kurtz, 2000: 96.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka konsepsi petani dalam hubungannya dengan analisis tentang gerakan sosial (lebih khususnya pada gerakan petani) dapat dilihat dari beberapa ciri utamanya, yaitu sebagai petani penggarap pedesaan, sebagai komunitas yang memiliki sifat-sifat struktural yang berbeda dengan negara dan swasta, berhubungan dengan institusi supra desa, berada dalam posisi ter subordinasi, dan memiliki kontrol atau penguasaan tanah pertanian yang lemah. Akan tetapi, baik dalam literatur klasik maupun kontemporer banyak analisis yang berkesimpulan bahwa petani miskin (*peasants*) dengan segenap ciri-cirinya tidak mampu bergerak secara terorganisir jika tidak dipelopori oleh petani kecukupan dan didukung sepenuhnya oleh segenap masyarakat sipil yang lain (aktor non petani kelas menengah yang biasanya dari kota).

1.3. Gerakan Sosial dan Gerakan Petani

Dalam banyak literatur, di antara para ahli terdapat keragaman definisi tentang gerakan sosial. Keragaman definisi tersebut antara lain

dipengaruhi oleh fokus, obyek, lingkungan, dan ruang lingkup kajiannya.

1. Anthony Giddens (1997:511) mendefinisikan gerakan sosial sebagai *“a collective attempt to further a common interest or secure a common goal, through collective action outside the sphere of established institutions.”*
2. Charles Tilly (Kriesi, 1988:352), mendefinisikan gerakan sosial sebagai *“rangkaiannya interaksi berkelanjutan (sustained series of interactions)”* antara pemegang otoritas dengan para penantangannya yang membuat tuntutan-tuntutan berdasarkan kepentingan konstituen dengan preferensi khusus.
3. Della Porta dan Diani (Lockie, 2004:47), mendefinisikan gerakan sosial: *“asinformal networks, based on shared beliefs and solidarity, which mobilise out of conflictual issues, through, the frequent use of various forms of protest.”*

Menurut McAdam dan Snow (1997:xviii) terdapat 5 (lima) karakteristik dasar suatu gerakan sosial, yaitu: (1) sebagai tindakan kolektif atau bersama; (2) tujuannya berorientasi pada perubahan; (3) memiliki derajat organisasi; (4) memiliki derajat kontinuitas temporer; dan (5) berupa tindakan kolektif ekstrainstitusional, atau paling tidak berupa campuran antara aksi protes (ekstrainstitusional) dan aktivitas lobi politik.

Terlepas dari perbedaan atas keragaman definisi konsep gerakan sosial, pada dasarnya suatu gerakan sosial memiliki beberapa karakteristik khusus yaitu: (1) merupakan upaya sekelompok aktor yang secara sadar bertindak bersama melalui jaringan (informal atau formal); (2) berorientasi atau berbasis isu konflikual; (3) berada di ruang kelembagaan yang mapan; (4) dilakukan untuk melanjutkan kepentingan bersama atau menjamin tujuan bersama; dan (5) menggunakan berbagai bentuk protes dalam rangkaian interaksi berkelanjutan dengan pihak lawan.

Gunawan Wiradi lebih khusus menunjuk pada makna konsep *“gerakan agraria”* atau *“gerakan petani”*. Menurut Wiradi (2000:196) gerakan agraria dimaknai sebagai suatu usaha, upaya, dan kegiatan yang dilakukan secara kolektif atau bersama, dengan tujuan untuk merombak tata sosial di bidang agraria, karena tata yang ada dianggap tidak adil dan tidak sesuai sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Secara khusus, dalam buku ini konsep *“gerakan agraria”* yang dalam pembahasan selanjutnya disebut atau yang dimaksud adalah sama dengan *“gerakan petani”*. Konsep gerakan petanidimaknai sebagai proses tindakan kolektivitas aktor yang bertindak bersama

melalui wadah organisasi tani berbasis isu ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang berorientasi pada perubahan tatanan agraria yang adil dan demokratis, dengan menggunakan saluran non-institusional. Gerakan petani dalam jangka pendek disebut gerakan sosiopolitik, sedangkan dalam jangka panjang disebut gerakan sosiokultural.

Sebagai suatu gerakan sosial, maka gerakan-gerakan petani yang dimaksud dalam buku ini tidak hanya difahami sebagai perilaku kolektif *"by product"* sesuai dengan perspektif teori psikososial dan struktural fungsional klasik, tetapi juga difahami sebagai tindakan kolektif *"by design"*. Gerakan petani sebagai tindakan kolektif *"by design"* merupakan gejala yang normal, direncanakan, terorganisir dengan baik dan memiliki tujuan yang jelas, menggunakan strategi dan taktik gerakan, dan dilakukan dengan sadar berdasarkan metodologi dan analisis sosial yang memadai.⁴ Selain itu, difahami juga bahwa gerakan petani: (1) merupakan suatu bentuk gerakan sosial yang mengusung agenda perubahan norma (struktural) dan nilai (kultural) agraria; dan (2) dominan aktornya adalah petani dan didukung kuat oleh aktor-aktor non petani dari berbagai elemen masyarakat sipil.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan "gerakan petani" adalah termasuk sebagai gerakan sosial terdiri atas aktor petani dan non petani yang mbingkai isu atau mengusung agenda perubahan tatanan agraria secara mendasar dan lebih baik dengan basis massa utamanya adalah petani.

Beberapa hal lain yang juga penting dikemukakan dalam buku ini adalah bahwa:

1. Penggunaan istilah "gerakan petani" disamakan artinya dengan "gerakan agraria".
2. Istilah "gerakan petani" dan "gerakan agraria" dalam bahasan selanjutnya digunakan secara bergantian sesuai dengan konteksnya.
3. Dimaksud dengan istilah "agraria" lebih ditujukan pada persoalan "tanah pertanian" dalam konteks perebutan kuasa atas tanah pertanian, khususnya antara petani dengan pemerintah dan dengan perusahaan.

Selain menjadi suatu konsepsi untuk menjelaskan realitas, maka gerakan petani dalam buku ini juga difahami sebagai suatu institusi yang selalu berusaha bagaimana sistem sosial agraria yang diharapkan dapat terwujud. Oleh karena itu, konsep gerakan petani tidak dapat terlepas dari obyek representasinya, yakni organisasi tani sebagai organisasi gerakan agraria. Banyak ahli yang sepakat bahwa "gerakan

⁴ Definisi yang sama juga digunakan oleh Mansour Fakhri dalam menganalisis gerakan masyarakat sipil dalam melakukan transformasi sosial (Fakhri, 2004: 58-59).

sosial sebagai organisasi dan aktivitas terorganisir”. Sosiolog politik awal seperti Lenin (1929) dan Michels (1949) menempatkan dimensi organisasional gerakan sosial sebagai topik utama kajian. Kemudian McCarthy dan Zald’s (1973, 1977) dalam mengembangkan perspektif mobilisasi sumberdaya meletakkan dimensi organisasional sebagai tahapan sentral dan organisasi gerakan sosial menjadi *focal unit of analysis*. Sejak itu, kemudian berlangsung perdebatan tentang peranan sentral organisasi formal dalam gerakan sosial dan apakah organisasi formal tersebut memfasilitasi atau justru sebagai perintang dalam upaya mencapai tujuan gerakan (Gamson, 1990; Melluci, 1989; Piven dan Cloward, 1977). Dalam perkembangan lebih lanjut Tarrow (1994) membedakan antara gerakan sosial sebagai organisasi formal dan organisasi aksi kolektif. Meskipun perbedaan ini penting, tetapi terasa sulit jika dipergunakan untuk memahami operasi dan dinamika gerakan sosial, termasuk hampir semua gerakan berhubungan dengan aksi-aksi kolektif, tanpa merujuk pada organisasi dan karakteristik organisasional (McAdam dan Snow, 1997:xxii).

Mengacu pada penjelasan di atas, maka organisasi gerakan petani betapapun sederhananya tetap memiliki visi, misi dan mengidentifikasi tujuan-tujuannya dengan pilihan terhadap suatu gerakan sosial. Upaya yang dilakukan adalah berusaha mencapai tujuan-tujuannya secara konsisten dalam kerangka melakukan perubahan sistem sosial agraria. Konsisten tindakannya dilakukan baik untuk mencapai tujuan jangka pendek (dalam bentuk gerakan sosiopolitik) maupun tujuan jangka panjang (dalam bentuk gerakan sosiokultural) (Johnston and Klandermans, 1995).

Sejalan dengan kedua konsepsi tentang gerakan sosial tersebut, Gramsci membedakan antara apa yang disebut dengan “perang manuver” (*war of manuver*) sama dengan gerakan sosiopolitik dan “perang posisi” (*war of position*) sama dengan gerakan sosiokultural. Perang manuver berupa perjuangan mencapai perubahan jangka pendek dalam mengubah kondisi untuk memenuhi kebutuhan praktis, sedangkan “perang posisi” berupa perjuangan kultural dan ideologis yang dilakukan dalam jangka panjang (Fakih, 2004:66).

1.4. Kondisi Petani Dalam Lingkaran Persoalan Agraria

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sumberdaya agraria yang dikuasakan oleh rakyat kepada negara dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada Pasal 33 Ayat (3) dengan jelas menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penjabarannya ada pada Pasal 2 Ayat (1) UUPA, yaitu: “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Amanah konstitusi tersebut oleh rezim Orde Baru diterjemahkan dalam konteks persoalan ekonomi, politik, dan kultural. Persoalan tersebut diyakini dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan *developmentalism*⁵ atau modernisasi pembangunan.⁶ Sebagai landasan utama dalam penguasaan sumberdaya agraria, kemudian dibangun struktur kebijakan pertanahan yang berorientasi mekanis dan ekonomis sesuai dengan kepentingan pasar yang lebih luas. Hal ini berarti bahwa atas nama negara, maka pemerintah Orde Baru telah membangun struktur kebijakan pertanahan terpusat yang cenderung berpihak kepada ekonomi pasar. Sentralisasi politik dibuktikan bahwa selama empat Pelita (1969/1970-1984/1985), Pembangunan Nasional telah dirancang dari pusat berbasis pada pengetahuan teknokratis.

Dalam kurun waktu 20 tahun (1967-1987) memang terbukti bahwa di Indonesia secara agregat telah terjadi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pemerataan pendapatan, dan jumlah penduduk miskin yang menurun (White, 1996). Produksi pertanian (dan kehutanan) mampu menjadi andalan utama peningkatan devisa sektor non migas. Bahkan ketika boom minyak menurun justru sektor ini menjadi andalan substitusi ekspor. Hingga awal dasawarsa 1990-an tanah yang dikuasai negara tetap berada pada koridor sebagai komoditas strategis bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional.⁷

Struktur kebijakan pertanahan yang pro ekonomi pasar tersebut, pada sisi lain, menyebabkan ketimpangan penguasaan lahan, terjadi penetrasi modal kuat ke pedesaan, pemiskinan kaum tani, dan konflik pertanahan yang cenderung tidak menurun. Semuanyamengancam kelangsungan hidup petani karena orientasinya jelas mengabaikan

⁵ Konsepsi “*developmentalism*” berakar pada suatu filsafat yang terkandung dalam teori kemajuan linier, perkembangan evolusioner, teori modernisasi dan pemikiran pembangunan (Schrijvers, 2000: 25).

⁶ Abercrombie, Hill and Turner. 1988. *Dictionary of Sociology*. Australia: The Penguin Group., halaman 158. Dalam *Encyclopedia of the Social Sciences* (1968) istilah “*modernisasi*” mencakup “... sekularisasi; komersialisasi; industrialisasi; peningkatan standar hidup materi; penyebaran melek huruf; pendidikan media massa, persatuan nasional, dan perluasan keterlibatan rakyat dalam partisipasi (Fakih, 2004: 72).

⁷ Indikasinya adalah dikeluarkan Paket Oktober (Pakto) 23 tahun 1993 untuk menarik investor asing yang membutuhkan tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang tata cara penetapan ganti rugi terkait dengan pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

upaya untuk menciptakan sistem sosial agraria yang egaliter.⁸ Oleh karena itu, proses dan hasilnya menjadi kontraproduktif dan bertentangan dengan hakekat pembangunan itu sendiri. Persoalan pertanahan menjadi semakin menyentuh wilayah otonomi kultural dan prinsip keadilan bagi petani. Kondisi ini berakibat semakin banyak petani yang mengalami tekanan dan penderitaan secara struktural.⁹ Posisi petani secara ekonomi terus termarginalkan, secara politik tidak memiliki keterwakilan suara di parlemen, dan secara kultural sebagai elemen masyarakat yang terancam.¹⁰

Akumulasi persoalan pertanahan di pedesaan tersebut menjadi indikasi bahwa telah terjadi proses pendangkalan pembangunan sosial.¹¹ Komunikasi dialogis antar elemen struktural tersumbat rapat berjalan seiring dengan semakin terkikisnya tatanan tradisional akibat modernisasi. Sistem sosiokultural pedesaan kemudian masuk ke dalam setting kapitalisme yang tidak responsif terhadap kepentingan petani.¹² Kondisi seperti ini meminjam istilah Sajogyo (1973) bahwa telah terjadi "modernisasi tanpa pembangunan". Sebagai gambaran, berdasarkan Sensus Pertanian 1993, dari keseluruhan jumlah rumah tangga pertanian (21,7 juta rumah tangga) sebanyak 6,1 juta (28 %) di antaranya adalah rumah tangga petani yang tidak menguasai tanah (*landless*) atau menguasai tanah sangat sempit (kurang dari 0,1 hektar). Pada tahun 2000 keadaannya tidak bertambah baik, di mana dari 25,6 juta rumah tangga pertanian di Indonesia sebanyak 20,4 juta (80%) di antaranya termasuk kategori petani gurem (dengan penguasaan alahan kurang dari 0,5 hektar). Selain itu, selama 32 tahun (1970-2001) petani di pedesaan terus terjerat persoalan kemiskinan

⁸ Meskipun UUPA/1960 oleh Mendagri (1978) dinyatakan tetap berlaku, tetapi dalam prakteknya "dikooptasi", tidak diindahkan dan dilanggar tanpa adanya sanksi (Adiwibowo, Sanito dan Kolopaking, 2008:100).

⁹ Petani tunakisma meningkat tajam; banyak penduduk pedesaan yang tidak mendapatkan pekerjaan; petani kaya lebih mampu memperbaiki nasibnya berdasarkan aset tanah dan modal yang dimilikinya dibandingkan petani kecil; tekanan demografis dan fragmentasi tanah menguat; dan terjadi polarisasi penguasaan tanah yang menumpuk pada petani kaya dalam arti yang lebih ekonomis (PAU-Sosial Sosial Universitas Gadjah Mada, 1989).

¹⁰ Posisi petani dalam sistem sosial agraria tersebut menurut Stephan (1992) termasuk di dalam konsepsi "*popular*" (Brohman, 1996:258).

¹¹ Menurut BPN RI (2007:iii-iv), bahwa masyarakat pedesaan masih dihadapkan pada persoalan tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, tingkat konsentrasi aset agraria pada sebagian kecil masyarakat, tingginya konflik pertanahan yang menyebar, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan energi rumah tangga, semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, dan lemahnya akses sebagian besar masyarakat terhadap hak-hak dasar rakyat termasuk terhadap sumber-sumber ekonomi keluarga. Bahkan realitas menunjukkan bahwa hingga saat ini permasalahan agraria struktural masih belum terselesaikan secara tuntas di lapangan.

¹² Sebagaimana sudah dijelaskan di muka bahwa dalam asumsi teori formal dinyatakan bahwa penetrasi kapitalisme akan mengikis ciri tradisional masyarakat pedesaan (petani) dan akan semakin berkembang ciri-cirinya ke arah sistem kapitalistik (Hashim, 1984:21).

dan konflik pertanahan yang tidak pernah diselesaikan secara mendasar.¹³

Statistik pertanian tahun 2003 juga memperlihatkan peningkatan jumlah rumah tangga tani dari 20,8 juta pada tahun 1993 menjadi 25,6 juta pada tahun 2003. Peningkatan yang sama juga terjadi pada populasi petani gurem (pemilik lahan kurang dari setengah hektar), yakni dari 10,8 juta (1993) menjadi 13,7 juta (2003). Angka 13,7 juta itu tersebar 74,9% di Jawa dan 25,1% di luar Jawa. Setahun berikutnya, yakni pada tahun 2004, angka kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 16,6%. Namun di balik penurunan itu, pada bulan September 2006, BPS mengumumkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia telah meningkat dari 16,0 persen pada bulan Februari 2005 menjadi 17,75 persen pada bulan Maret 2006.¹⁴

Jika persoalan pertanahan tersebut di atas kita tarik dalam ruang yang lebih sempit, yakni pada wilayah provinsi ternyata kondisinya tidak jauh berbeda, bahkan nampak lebih nyata di mana banyak petani yang secara langsung berkonflik dengan pemerintah dan perusahaan. Di provinsi Lampung pada tahun 1995 tanah yang menjadi obyek konflik seluas 110.737, 50 hektar (Suhendar dan Winarni, 1998), dan pada tahun 2002 meningkat drastis menjadi 398.425 hektar (259,8%) (Sunarto, 2007:183). Bahkan dalam lima tahun terakhir (2008-2012), konflik-konflik pertanahan yang melibatkan petani masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di Provinsi Lampung, seperti di Register 45, sampai akhir tahun 2012 masih terjadi konflik vertikal antara petani dengan perusahaan. Konflik tersebut belum terselesaikan secara tuntas di lapangan yang berorientasi pada kesejahteraan petani. Penyelesaian yang tidak tepat dan komprehensif akan berpengaruh pada munculnya konflik-konflik pertanahan di tempat lain, baik dalam konflik vertikal maupun konflik horizontal.

Pada kondisi yang demikian, maka petani akan terus menerus terjebak di dalam ruang-ruang sosiopolitik dan ekonomi dalam berebut kuasa atas tanah pertanian melawan kekuatan negara dan swasta. Oleh karena itu, selama proses pembangunan berlangsung maka kondisi petani dalam hubungannya dengan penguasaan atas

¹³ Dalam Data Base KPA per 31 Desember 2001 tercatat sebanyak 1.753 kasus konflik pertanahan dan sebanyak 344 kasus (19,62%) di antaranya adalah konflik yang terjadi di areal perkebunan besar yang luasnya mencapai 1.311.971 hektar dengan jumlah korban sebanyak 257.686 jiwa (Leonela dan Zakaria, 2002: 25).

¹⁴ Policy Paper RUU Desa, Juli 2007. *Masukan untuk perumusan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*. Jakarta: Kerjasama antara Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan Democratic Reform Support Program (DRSP-USAID). Download dari Policy_Paper_RUU_Desa, pdf.-adobe reader., halaman 52-54.

tanah pertanian (hubungan sosial agraria) secara substantif masih tidak berubah secara berarti.

1.5. Petani Menggugat Kebijakan Agraria

Suatu hal yang wajar ketika petani terancam kelangsungan hidupnya dan diperlakukan tidak adil, kemudian mereka berjuang melakukan perlawanan menggugat kebijakan agraria. Akan tetapi, kekuatan perjuangan petani melalui wadah organisasi tani pada masa Orde Baru tidak dapat berkembang karena dikontrol ketat oleh negara. Kebijakan politik yang mengarah pada sentralisasi birokrasi terus dilakukan untuk memperkuat program '*deideologisasi*' dan '*depolitisasi*' serta diperkuat dengan '*floating mass*' yang dapat menekan berkembangnya kekuatan perjuangan petani (Burhanuddin dan Subhan, 1999:21). Pada sisi lain negara mengarahkan petani berorganisasi melalui desain *state corporatism*, yakni hanya mengalirkan aspirasi ke dalam kanal-kanal lembaga sosial dan politik bentukan pemerintah.¹⁵ Partisipasi politik petani kemudian menjadi semu, karena kepentingan mereka telah diarahkan dan disalurkan lewat organisasi tani yang dianggap mewakili yang dibentuk dan dikontrol ketat oleh negara. Pada posisinya yang demikian itu, maka petani secara nyata tidak berdaya, tertekan oleh *otoritarianism*, dan sistem politik yang dibangun cenderung sebagai alat dominasi para pemegang otoritas dan berfungsi sebagai penekan kebebasan.

Tidak heran, jika sistem politik seperti itu berasosiasi sebagai pentas mobilisasi, menumbuhkembangkan kesadaran palsu, sebagai ajang represi, praktik kooptasi dan manipulasi. Ruang gerak petani dibatasi dan diawasi dengan berbagai cara. Stigma politik sebagai pengacau keamanan dan berideologi kiri (PKI, BTI) sering diberikan kepada mereka yang dianggap membangkang, dan cara ini lebih efektif dalam membungkam suara-suara kritis dan menekan aktivitas petani dan segenap pendukungnya. Organisasi tani yang dibuat oleh pemerintah diposisikan ibarat boneka yang dapat dimainkan oleh para penguasa yang bertindak sebagai dalang selama episode kekuasaan rezim Orde Baru. Pada situasi ini orientasi nafsu kekuasaan adalah bagaimana menjinakkan kesadaran petani, bukan pada peningkatan kesejahteraan petani secara berdaulat. Petani menjadi rebutan sebagai sumberdaya mobilisasi dalam memperoleh kekuasaan; dikontrol secara ketat melalui wadah organisasi tani yang diciptakan, disalurkan aspirasinya melalui "Klompencapir" dan dibius kesadarannya melalui

¹⁵ Korporatisme negara dalam konteks pembingkaiian kepentingan kaum tani disini menunjuk pada organisasi tani seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang menjadi derivasi institusi negara di tingkat informal, yakni sebagai agen kepentingan negara (Nasikun, 1997: 58-67).

lagu “Modernisasi Desa”, yang terus menerus dikumandangkan melalui media radio dan televisi negara.

Pada satu sisi, yakni dalam perspektif teori struktural fungsional, bahwa sosialisasi dan kontrol ketat yang dilakukan oleh negara terhadap pandangan, sikap dan perilaku petani, yang lekat dengan ideologi pembangunanisme tersebut merupakan bagian dari proses pembangunan menuju pencapaian kesejahteraan masyarakat ke depan yang lebih baik. Tetapi, menurut perspektif teori kritis, upaya negara tersebut merupakan bentuk penekanan kesadaran kritis petani dan upaya mengekang aktivitas petani agar tidak keluar dari jalur institusional dan menjadi “duri dalam daging” dalam pelaksanaan pembangunan. Praktek-praktek pembangunanisme justru semakin kontraproduktif terhadap makna hakiki dari pembangunan itu sendiri yang mengabaikan makna substantif kehidupan petani.

Pendekatan keamanan yang digunakan dan pencitraan sistemik yang dibangun oleh rezim Orde Baru juga semakin mengaburkan akar persoalan petani. Oleh karena itu, sangat wajar jika gerak perjuangan petani pada masa itu meskipun tetap muncul tetapi menemui banyak kesulitan. Perjuangan mereka banyak mengalami tekanan seperti intimidasi, teror, pembabatan atau pembakaran tanaman, pembakaran atau perusakan rumah, penangkapan, penculikan, penembakan, pembunuhan, penganiayaan, dan tekanan lainnya (Soetarto, 2005: 17-18). Pada situasi ini, perjuangan petani dengan mengandalkan bantuan jejaring pada lokus nasional saja tidak cukup, mereka harus memanfaatkan isu-isu global dan berjejaring dengan lembaga-lembaga transnasional (Rochman, 2002).

Bersamaan dengan tumbangnya kekuatan politik otoritarian Orde Baru maka lembaga-lembaga kenegaraan juga sedang mengalami krisis dan goncangan yang kuat. Ini juga berarti bahwa struktur peluang politik pusat telah terbuka secara paksa terhadap tuntutan-tuntutan perubahan. Lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif yang seharusnya mengakomodir tuntutan masyarakat, semua sedang mengalami krisis legitimasi. Lembaga-lembaga negara tersebut tidak mampu merespon dinamika masyarakat yang sedang berkembang sangat cepat, dan menanggung beban moral yang begitu berat akibat peran mereka selama rezim Orde Baru, sehingga kehilangan orientasi dan daya adaptasinya (Wijardjo dan Perdana, 2001: 3-4).

Kompleksitas persoalan yang dialami petani dalam penguasaan tanah pertanian yang kemudian menyebabkan mereka menggugat negara sebenarnya sudah terjadi sejak lama, bersifat akumulatif dan menyebar. Selama 32 tahun (1970-2001) telah terjadi sebanyak 1.753 kasus konflik pertanahan dengan jumlah korban sebanyak 257.686

jiwa (Leonela dan Zakaria, 2002:25). Hingga 2003 di sektor perkebunan saja terdapat 575 kasus konflik tanah baik di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) maupun di perkebunan besar swasta (PBS) dengan luas sekitar 330.000 hektar. Sampai akhir tahun 2014 konflik lahan di Register 45 Provinsi Lampung antara petani dengan perusahaan masih belum terselesaikan secara tuntas. Petani dengan organisasi taninya masih kuat dalam mempertahankan tanah pertanian yang berhasil didudukinya.

Pasca tumbangannya rezim Orde Baru yang berarti masuknya era reformasi tahun 1998 maka peluang politik terbuka bagi petani untuk melakukan aksi-aksinya guna merubah kebijakan agraria yang merugikan mereka. Suatu yang wajar jika tuntutan kaum tani terhadap perubahan sistem sosial agraria yang setara dan adil dalam kerangka demokrasi muncul sebagai agenda penting untuk segera diperjuangkan bersama dengan segenap elemen pendukungnya. Aksi-aksi protes petani kemudian terjadi di mana-mana, ke atas dengan gencar mendesak tuntutan-tuntutannya dan ke bawah melakukan aksi-aksi reklamings. Sebagian besar analis menilai bahwa maraknya protes petani pada awal-awal reformasi merupakan kelanjutan atau efek dari gerakan demokrasi yang dimainkan oleh unsur-unsur masyarakat sipil seperti kelompok mahasiswa, cendekiawan, dan Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) dalam menumbangkan otoriterianisme rezim Orde Baru.

Seperti yang terjadi di Lampung dalam kurun waktu lima tahun (1998-2002) tercatat ratusan kasus konflik pertanahan¹⁶ yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota,¹⁷ sebagian besar (327 kasus/90,8%) diikuti dengan aksi-aksi reklamings.¹⁸ Status tanah yang paling banyak berkonflik adalah lahan usaha agro industri, yakni seluas 159.640 Hektar (40,07%). Lahan tersebut terutama yang berada di bawah penguasaan dan pengelolaan perusahaan swasta dan BUMN atau BUMS. Kemudian lahan yang berstatus sebagai kawasan hutan lindung seluas 121.250 Hektar (30,43%), dan lahan usaha tambak moderen seluas 78.650 Hektar (19,74%) (Sunarto, 2007:183). Aksi-

¹⁶ Menurut Surat Kabar Mingguan "Koridor", Edisi 178/Th. IV. Tanggal 13 Oktober 2002, halaman 4, tercatat sebanyak 360 kasus, sedangkan menurut catatan BPN Provinsi Lampung pada tahun 2002 terdapat sebanyak 445 kasus.

¹⁷ Dari 327 kasus reklamings tersebut sebanyak 80 kasus terjadi Kabupaten Tulang Bawang, 50 kasus di Kabupaten Lampung Selatan, 46 kasus di Kota Bandar Lampung, 33 kasus di Kabupaten Lampung Tengah, 32 kasus di Kabupaten Way Kanan, 24 kasus di Kabupaten Lampung Timur, 23 kasus di Kabupaten Lampung Utara, 19 kasus di Kabupaten Tanggamus, 18 kasus di Kabupaten Lampung Barat, dan 2 kasus di Kota Metro (Surat Kabar Mingguan "Koridor", 2002).

¹⁸ Biro Tata Pemerintahan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 2001. Menurut harian Radar Lampung hingga tahun 2000 tercatat sebanyak 385 kasus konflik pertanahan di Lampung (Harian Radar Lampung, edisi Kamis, 17 September 2000).

aksi reklamings sebagian dilakukan secara terorganisir dalam skala provinsi. Diperkirakan selama lima tahun (1998-2002) terdapat puluhan ribu hektar lahan yang berhasil diduduki oleh petani secara sistematis.¹⁹

Dalam perkembangan kemudian berdiri berbagai organisasi tani sebagai organisasi gerakan pada skala provinsi dan berjejaring dengan organisasi gerakan skala nasional. Bahkan dalam spektrum yang lebih luas berjejaring dengan organisasi gerakan transnasional.²⁰ Gelombang timbal balik antara gerakan lokal dan global tersebut, kemudian di dalam wacana gerakan masyarakat sipil berkembang dua slogan, yakni: “*think globally act locally*” atau “*think locally act globally*” (Widjajanto, dkk., 2007). Meskipun pada skala mikro-lokal gerakan petani lebih ditujukan pada penguasaan kembali tanah pertanian yang dikuasai secara paksa dan “pembohongan” oleh pemerintah dan perusahaan, tetapi pada setting skala meso gerakan petani, yakni pada skala provinsi, mampu mempertemukan antara orientasi material dan postmaterial. Oleh karena itu, ketika gerakan petani di daerah mampu berjejaring kuat secara nasional merupakan indikasi bahwa telah terjadi arus balik pengaruh gerakan petani tingkat lokal ke spektrum wilayah provinsi dan nasional. Para aktor strategis gerakan agraria harus mampu mengartikulasikan isu-sisu dan fenomena yang terjadi di tingkat nasional ke tingkat wilayah dan lokal, dan sebaliknya dari tingkat lokal ke tingkat wilayah dan nasional.

1.6. Stagnasi Gerakan dan Rekonstruksi Arah Baru Gerakan Petani

Berangkat dari kegagalan pembangunan Orde Baru yang sangat merugikan petani tradisional, maka tidak heran jika gerakan petani di awal-awal reformasi sangat kuat diarahkan berhadapan dengan negara (dan perusahaan). Kelemahannya, ketika kekuatan negara sudah dapat dilemahkan dan tanah-tanah berhasil direklamings berarti sudah tidak ada lagi musuh bersama (*common enemy*). Akan tetapi, gerakan petani tersebut tidak dapat dikatakan berhasil jika kemudian distribusi tanah-tanah pertanian hasil reklamings tidak sampai kepada yang berhak menerimanya (petani penggarap). Apalagi jika dalam perjalanannya hingga saat ini masing-masing organisasi tani berjalan sendiri-sendiri

¹⁹ Perkiraan luas lahan yang berhasil direklamings tersebut menurut catatan Dewan Rakyat Lampung (DRL) dan Serikat Petani Lampung (SPL), sekitar 47.000 hektar baik yang berhasil maupun yang gagal.

²⁰ Aksi-aksi kolektif yang dilakukan oleh Serikat Petani Lampung (SPL) berhubungan timbal balik dengan organisasi gerakan tingkat nasional, seperti “Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)” dan berjejaring dengan organisasi gerakan transnasional “La Via Campesina”.

dan tidak memiliki *common platform*.²¹ Oleh karena itu, gerakan petani hingga saat ini justru rentan terhadap beberapa persoalan yang berpotensi lepas dari kerangka gerakan akar rumput, sehingga mengalami peluruhan (pelemahan) dan stagnan (tetap berjalan di tempat, tidak mampu bergerak maju).

1. Proses pengorganisasian petani basis sejak awal dilakukan lebih bersifat sporadis, memanfaatkan terbukanya peluang politik. Kerja-kerja pengorganisasian menguat ketika ada kasus-kasus yang menantang heroisme dan kemudian melemah ketika kasus-kasus tersebut selesai atau tidak kunjung terselesaikan. Pengorganisasian petani basis belum dapat diarahkan dan dilakukan secara sistematis untuk membangun tatanan kehidupan baru petani yang lebih baik dari tatanan yang ada (Nurhayati, 2007).
2. Eksistensi organisasi gerakan petani semakin kurang mendapat dukungan petani basis karena kurang mendapat pemeliharaan dan penguatan melalui program-program pemberdayaan. Pada konteks ini berarti gerakan petani semakin tercerabut dari akarnya.
3. Komitmen, spirit dan daya juang para aktor strategisnya mengalami pasang surut dan cenderung semakin mengendur. Ini berarti kondisi batang tubuh gerakan petani telah melemah.
4. Jaringan pendukung semakin berkurang dan melemah. Ini berarti bahwa jejaring eksternal gerakan petani (*lingking social capital*) semakin melemah.
5. Meskipun isu-isu kritis gerakan petani tidak pernah beranjak dari persoalan klasik (penguasaan tanah pertanian), tetapi sudah tidak nampak terjadi perkembangan. Ini berarti bahwa gerakan petani masih berkuat pada gerakan sosiopolitik daripada gerakan sosiokultural.
6. Ketika orientasi praktis gerakan petani semakin berjarak dengan orientasi strategisnya, karena antar elemen aktor saling berebut kepentingan dan mengabaikan unsur bermediasi, maka keberadaan petani basis berpotensi menjadi korban mobilisasi sumberdaya. Peluang komodifikasi terhadap petani basis menjadi terbuka ketika bersinggungan dengan kepentingan praktis (ekonomi dan politik) para aktor strategisnya.
7. Penguatan kembali struktur politik negara sejalan dengan semakin sempitnya ruang gerak (peluang politik) bagi berkembangnya gerakan petani. Ini dibuktikan dengan semakin menurunnya aksi-

²¹ Dimaksud dengan *common platform* adalah sebuah konsensus bersama untuk mengawal proses pencapaian tujuan perubahan dalam jangka pendek dan jangka panjang, yang diwujudkan dalam berbagai inovasi strategi kerja dan agenda kerja yang telah disepekat bersama (Kompas, 2004:10-11).

aksi protes petani di tingkat lokal dan tingkat daerah yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tani (Situmorang, 2007:6).

Semua unsur tersebut memperkuat dugaan bahwa kondisi petani tetap berada pada atau tidak beranjak dari pusaran arus kepentingan integratif negara dan pasar yang lebih luas. Gerakan petani hanya berjalan ditempat, tidak kemana-mana, tidak maju ke suatu titik yang dengan jelas menjanjikan peningkatan kesejahteraan petani. Bahkan diduga gerakan petani berpotensi menjadi *diffuse*, yakni menyebar ke berbagai penjurus, sehingga tidak fokus pada persoalan agraria lagi.

Pada awal reformasi, organisasi tani tumbuh subur dan berkembang di berbagai daerah, berjejaring dengan organisasi gerakan skala nasional dan bahkan supra nasional. Tetapi, dalam realitasnya konflik-konflik pertanahan masih banyak terjadi dan tanah negara yang terlantar masih luas tidak dapat diakses oleh petani miskin dan penggarap. Paling tidak, realitas tersebut sebagai pertanda bahwa urgensi organisasi gerakan dalam memperjuangkan nasib petani patut dipertanyakan. Secara lebih rinci data terakhir yang berhasil dicatat oleh BPN RI (2007:2) terdapat 2.810 kasus konflik pertanahan. Tanah-tanah yang menjadi obyek konflik banyak yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini merupakan *opportunity loss* dan menutup akses bagi petani penggarap.

Dilihat dari kacamata sosiologis tidak dapat diabaikan pentingnya mencari penjelasan tentang dinamika gerakan petani di era reformasi. Secara umum, gerakan petani dengan berbagai wadah organisasi tani yang dibuatnya telah hadir sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil. Oleh karena itu, perlu juga dicari penjelasan tentang urgensi organisasi tani dan gerakan-gerakan yang dilakukan dalam memprotes kebijakan agraria (pertanahan) yang merugikan petani atau dalam melakukan reforma agraria, sebagai wujud nyata dalam memperjuangkan nasib petani.

Gerakan petani merupakan suatu gerakan sosial yang secara khusus muncul dan berkembang berakar pada konflik-konflik pertanahan. Karakteristiknya juga berbeda dibandingkan dengan gerakan petani yang terjadi sebelumnya, baik dilihat dari bentuk mobilisasi, organisasi dan kepemimpinan, isu-isu yang disuarakan, hingga pada bentuk-bentuk aksi yang dilancarkan (Webster, 2004; Petras, 1998). Misalnya, para pemimpin gerakan pada masa pra kemerdekaan berasal dari golongan elit desa (pemuka agama, kaum ningrat atau orang-orang dari golongan terhormat) (Kartodirdjo, 1984:16), tetapi sekarang diisi oleh para kaum intelektual kota yang aktif dalam berbagai organisasi non pemerintah. Para elit desa tetap

berperan penting dalam gerakan, tetapi kurang berposisi sebagai aktor utama yang memberi preferensi nilai dan visi perjuangan seperti dulu.

Diakui bahwa munculnya gerakan petani di era reformasi hingga saat ini, selain merupakan efek dari terbukanya peluang politik juga merupakan produk dari kesadaran baru bagian dari gerakan masyarakat sipil. Persoalannya, meski gerakan petani di Indonesia secara historis bukan sesuatu hal yang baru sama sekali, dan telah dikaji secara ilmiah, tetapi perhatian berbagai kalangan terhadap masalah itu secara formal belum mendapat tempat yang memadai dalam pendekatan studi-studi sosiologi di Indonesia, khususnya di dalam mengembangkan teori gerakan sosial. Kurangnya perhatian terhadap fenomena gerakan petani di era reformasi didasarkan pada beberapa hasil penelitian sebelumnya, yang terfokus pada gerakan masyarakat sipil, atau yang secara khusus berkaitan dengan komunitas lokal di pedesaan atau berkaitan dengan komunitas petani sebagai basis konstituen (Rochman, 2002; Culla, 2006; Fakih, 2004; Wahyudi, 2005; Silaen, 2006; Dewi, 2006; dan Mustain, 2007).

Salah satu elemen penting (yang menjadi obyek representasi) dari gerakan petani adalah organisasi tani. Wadah petani ini dilihat dari ciri utamanya, merupakan organisasi yang memiliki orientasi penguatan dan pemberdayaan petani dalam memprotes kebijakan pertanahan. Klaim ini secara substansial berkaitan erat dengan gagasan dan praksis dari gerakan petani itu sendiri. Disebut sebagai "organisasi gerakan petani" karena betapapun sederhananya memiliki visi, misi dan program gerakan yang jelas dan mengidentifikasi tujuan-tujuannya dengan pilihan terhadap suatu gerakan sosial serta berusaha mencapai tujuan-tujuannya.

Sebagaimana diketahui bahwa entitas organisasi gerakan petani bukan sebagai suatu realitas sosio-politik yang baru di Indonesia. Kehadirannya dapat ditelusuri sejak masa kolonial dengan merujuk pada organisasi gerakan berbasis pada ideologi tertentu dan berusaha melakukan perubahan kebijakan agraria yang kurang responsif terhadap kepentingan petani. Organisasi-organisasi petani sebagai organisasi gerakan secara nyata muncul pada masa Orde Lama seperti BTI, RTI, SAKTI, PETANI dan STII. Tetapi semuanya dilahirkan dan berada di bawah kontrol partai politik. Pada masa Orde Baru mereka ditekan habis dan dijinakkan melalui strategi korporasi dan kemudian oleh negara dibentuk wadah HKTI.

Setelah kekuasaan razim Orde Baru runtuh, kemudian berbagai organisasi tani tumbuh dan berkembang bagaikan jamur di musim penghujan. Mereka mengusung isu kesetaraan dan keadilan dalam kerangka demokrasi agraria. Melalui momentum reformasi, ruang

publik terbuka (era demokratisasi), maka kehadiran organisasi-organisasi tani menjadi penting sebagai wadah gerakan agrarian. Keberadaannya sangat penting karena memiliki kapasitas yang memadai dalam mendorong peningkatan kesadaran partisipatif petani lebih inklusif ketimbang yang selama ini diperankan oleh lembaga-lembaga formal seperti parlemen atau lembaga semi pemerintah seperti Komnas HAM, partai politik, dan berbagai kelompok kepentingan lainnya.

Sangat wajar jika muncul rasa ingin tahu banyak orang tentang eksistensi dan aktivitas organisasi tani sebagai organisasi gerakan petani, dan sejauh mana urgensi organisasi gerakan tersebut dalam memprotes kebijakan agraria di Indonesia pada era reformasi. Sayangnya, studi tentang peran aktor reforma agraria tersebut masih sangat sedikit. Bahkan para akademisi dan peminat kajian sosiologis tentang gerakan petani masih mengabaikan eksistensi dan urgensinya di dalam memprotes kebijakan agraria. Padahal lawan petani bukan hanya berada pada tataran lokal dan kongkrit, tetapi juga berada pada tataran nasional (bahkan global) dan abstrak. Pasca maraknya aksi-aksi protes petani justru terjadi penguatan organisasi-organisasi tani lokal pada tingkat wilayah provinsi dan berjejaring dengan organisasi gerakan tingkat nasional dan transnasional.

Namun demikian, adanya gejala semakin melemahnya gerakan petani hingga saat ini, maka menjadi sangat penting dan menarik untuk dicari penjelasan tentang bagaimana kekuatan struktur hubungan agraria yang terkonstruksi sebelumnya, bagaimana perjuangan petani dilakukan, dan bagaimana konstruksi struktur hubungan agraria yang dikehendaki pada masa mendatang. Beberapa pertanyaan utama yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur hubungan sosial agraria terkonstruksi sehingga menjadi prakondisi utama munculnya konflik-konflik pertanahan ?
2. Kondisi-kondisi utama apa saja yang mendukung dilancarkannya aksi-aksi kolektif petani dalam menggugat kebijakan agraria ?
3. Sejauh mana urgensi gerakan petani dalam menggugat kebijakan agraria untuk mencapai kepentingan substantif petani ?
4. Bagaimana dinamika organisasi tani sebagai organisasi gerakan agraria dalam memperjuangkan nasib petani ?
5. Bagaimana merekonstruksi arah baru gerakan petani ?

1.7. Ruang Lingkup Bahasan Buku Ini

Secara umum buku ini berusaha menjelaskan dinamika dan proses gerakan dan organisasi gerakan petani (prakondisi, muncul,

beroperasi, modifikasi struktur, konflik dan fragmentasi, dan melemah gerakan petani) pada lokus supra lokal (wilayah provinsi). Sejalan dengan permasalahan tersebut di atas, maka secara umum buku ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan kondisi-kondisi hubungan sosial agraria antara petani dengan negara dan swasta akibat kebijakan agraria yang diskriminatif terhadap petani, yakni tidak setara dan tidak adil. Kondisi hubungan sosial agraria yang antagonis terhadap petani ini mulai berlangsung pada masa Orde Baru sampai dengan pasca Orde Baru. Sering muncul perkataan bahwa "*Orde Baru secara fisik sudah mati, tetapi rohnya masih hidup dan melekat di dalam schemata para penguasa.*" Kondisi ini menjadi pemicu utama munculnya konflik-konflik agraria di berbagai wilayah di Provinsi Lampung, dan kemudian berkembang menjadi gerakan petani berjalan seiring dengan jatuhnya rezim Orde Baru.
2. Menjelaskan saling keterkaitan antara kondisi-kondisi utama yang mendukung dilancarkannya aksi-aksi protes dan reklamasi dalam suatu gerakan petani melalui wadah organisasi tani. Mereka menggugat kebijakan agraria, khususnya kebijakan pertanahan (penguasaan tanah pertanian) yang merugikan kelangsungan hidup petani.
3. Menjelaskan arah perkembangan gerakan-gerakan petani, yang ditampilkan oleh bekerjanya organisasi tani, dalam memprotes kebijakan agraria.
4. Menjelaskan pentingnya penguatan struktur gerakan petani dalam sesuai arah baru gerakan petani mendatang.

Penjelasan terhadap permasalahan pertama, berhubungan dengan derajat ketegangan struktural (*structural strains*) agraria yang mengandung suatu kondisi yang mendorong atau memberi peluang (*structural conduciveness*) bagi dilakukannya berbagai aksi kolektif petani menggugat kebijakan agraria. Secara khusus, bagian ini difokuskan pada kepentingan penguasaan petani atas tanah pertanian yang berbenturan dengan kepentingan pemerintah dan perusahaan. Dalam bagian ini, termasuk di dalamnya menjelaskan berbagai upaya petani melakukan tekanan terhadap pemerintah dan perusahaan terkait dengan gugatan petani terhadap kebijakan agraria atau secara khusus terkait dengan perjuangan petani dalam melakukan perubahan kebijakan penguasaan tanah pertanian.

kedua difokuskan pada kondisi-kondisi utama yang mendukung munculnya aksi-aksi kolektif petani. Terdapat tiga faktor utama yang saling terkait bagi munculnya aksi kolektif dalam rangkaian gerakan petani, yaitu struktur peluang politik, struktur mobilisasi sumberdaya,

dan pembingkai kolektif (*collective framing*). Struktur peluang politik difahami sebagai derajat keterbukaan politik yang memungkinkan dilakukan aksi-aksi kolektif petani. Struktur mobilisasi sumberdaya merupakan proses di mana suatu organisasi tani dapat menjamin mampu mengontrol sumberdaya gerakan. Berkaitan dengan upaya merubah kebijakan agraria difahami sebagai suatu proses interpretasi bersama dan sebagai suatu proses konstruksi sosial gerakan yang dilakukan oleh para aktor yang berfungsi menjadi mediasi antara faktor peluang politik dan aksi-aksi kolektif petani.

Penjelasan permasalahan ketiga berhubungan dengan kondisi-kondisi utama yang menunjukkan kemampuan organisasi tani sebagai organisasi gerakan agraria dalam mencapai tujuannya sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan atau sesuai dengan garis-garis perjuangan organisasi tani. Analisis terhadap persoalan ini mencakup proses-proses dinamis gerakan petani mulai dari sebelum sampai dengan sesudah dilakukan berbagai aksi protes. Oleh karena itu, disini terdapat dua urgensi gerakan petani, yakni dalam mencapai tujuan-tujuannya sesuai dengan kekuatan sumberdaya yang dimiliki, dan arah kecenderungan aktivitas gerakan dalam mencapai tujuannya sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan.

Penjelasan permasalahan keempat berhubungan dengan gagasan utama, dalam bentuk kerangka konseptual, yang diusulkan dalam menguatkan struktur gerakan petani melalui seperangkat tindakan yang perlu dilakukan untuk menciptakan struktur sosial agraria yang secara sistemik bekerja secara simbiosis terhadap petani.

Realitasnya, gerakan petani tidak hanya difahami sebagai gerakan "*by product*", tetapi juga sebagai gerakan "*by design*". Meskipun gerakan petani secara struktural lazim dilihat dari sisi dinamika dan perkembangannya, tetapi di dalam prosesnya dapat dilihat dari perspektif mikro. Oleh karena itu, dalam kaca mata sosiologis pendekatan integratif atau sintesis antara perspektif makro dan mikro atau antara dimensi struktur dan proses dalam gerakan sosial, lebih khusus dalam gerakan petani tidak dapat diabaikan. Pada tataran teoritis, pendekatan sistesis tersebut secara rinci dijelaskan pada Bab 2.

Gerakan Petani: Sintesis Teori-Teori Gerakan Sosial

2.1. Pendahuluan

Pada masa lalu, banyak teori-teori gerakan sosial klasik yang dipergunakan untuk menganalisis gerakan sosial, termasuk gerakan petani. Tetapi, sesuai dengan perkembangan fenomena konflik dan gerakan sosial di negara-negara maju dan negara-negara berkembang yang semakin kompleks, termasuk Indonesia, maka pengembangan teori-teori gerakan sosial sebagai suatu keharusan. Sampai saat ini, teori-teori gerakan sosial sudah berkembang cukup beragam dan bersifat akumulatif sesuai dengan perkembangan fenomena gerakan sosial atau lebih khusus pada gerakan petani itu sendiri.

Dalam lingkup kajian sosiologi, perspektif teori gerakan sosial yang relevan dipertimbangan untuk menganalisis gerakan petani adalah perspektif teori psikososial (mikro) dan teori struktural (makro). Pentingnya perhatian ini sejalan dengan perkembangan fenomena gerakan sosial di Indonesia, khususnya yang terjadi di Provinsi Lampung. Lebih khusus bahwa gerakan petani di Lampung banyak yang terorganisir, tidak hanya merupakan fenomena gerakan "by product" tetapi juga "by design". Oleh karena itu, penjelasan tentang gerakan petani di Lampung tidak lagi dominan berada pada salah satu perspektif teori gerakan sosial makro maupun mikro, tetapi keduanya perlu diintegrasikan atau disintesakan.

2.2. Teori-Teori Psikososial

Teori-teori psikososial dalam menjelaskan fenomena gerakan sosial menfokuskan pada hubungan antara kondisi-kondisi sosial, disposisi-disposisi psikologis, dan munculnya gerakan sosial. Meskipun terdapat beragam penjelasan teori psikososial, teori deprivasi relatif dan perspektif konstruksionis sosial (*social constructionist perspective*) atau *social constructionism* adalah yang penulis anggap relevan dalam menjelaskan fenomena gerakan sosial, khususnya gerakan petani.

2.1.1. Teori Deprivasi Relatif

Pendekatan psikososial yang populer dalam mengkaji gerakan sosial dan perilaku kolektif adalah yang berhubungan dengan derajat deprivasi dan frustrasi yang mendasari keputusan individu berpartisipasi dalam perilaku kolektif. Asal munculnya pendekatan *deprivasi-frustrasi-agresi* ini dapat dilacak paling tidak dari pandangan Aristoteles, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan atau kesenjangan dapat menyebabkan terjadinya frustrasi dan karena itu yang menyebabkan terjadinya kerusuhan. Tiang menyangga yang lebih moderen dari pendekatan ini adalah teori *frustrasi-agresi*. Teori ini dikembangkan pada akhir tahun 1930-an oleh psikolog John Dollard dan kawan-kawannya. Teori ini menyatakan bahwa perasaan frustrasi menyebabkan terjadinya tindakan agresi dan tindakan agresi dihasilkan dari perasaan frustrasi (Barkan and Snowden, 2001:17)

Pada awal tahun 1960-an, Davies (1962, dalam Barkan and Snowden, 2001) mendasarkan pada pandangan tersebut untuk mengembangkan teori perilaku kolektif yang didasarkan pada hubungan antar konsep-konsep yang didasarkan pada meningkatnya harapan-harapan dan deprivasi relatif. Menurut Davies, ketika kondisi sosial meningkat, maka orang-orang yang mengalami deprivasi mulai berharap adanya peningkatan kehidupannya. Jika kondisi peningkatan ini kemudian berhenti, maka mereka merasa bahwa harapannya dihancurkan. Kekecewaan yang dihasilkan itu menyebabkan mereka frustrasi dan kemudian sampai terjadi perilaku kolektif. Jadi, kondisi ini bukan deprivasi absolut tetapi deprivasi relatif yang mereka rasakan sebagai sumber penting dari keputusan individual mereka untuk bekerjasama terlibat dalam perilaku kolektif.

Beberapa tahun setelah Davies menghadirkan teorinya, kemudian Gurr menerbitkan bukunya berjudul *Why Men Rebel* (1970) dan ternyata mendapat banyak sambutan. Setelah menyatakan pentingnya teori frustrasi-agresi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Gurr menyatakan bahwa munculnya rasa frustrasi berasal dari perasaan deprivasi relatif. Gurr (1970:24) mendefinisikan deprivasi relatif "...as actors perception of discrepancy between their value expectations and their value capabilities." Deprivasi relatif muncul ketika terjadi kesenjangan yang berarti antara nilai yang diharapkan dengan nilai yang dihasilkan, atau dalam bahasa yang sederhana antara yang diharapkan dengan yang diperoleh, atau terjadi pertentangan yang dirasakan seseorang antara yang diharapkan dengan realitas (kenyataan yang dihadapi).

Meningkatnya deprivasi relatif menyebabkan seseorang lebih merasa frustrasi, meningkatnya rasa frustrasi menyebabkan

meningkatnya derajat kemarahan, dan meningkatnya derajat kemarahan menyebabkan perilaku kolektif lebih keras. Dalam diskusi tentang deprivasi relatif ini, maka konsep "persepsi" menjadi sangat penting. Gurr mencatat bahwa tidak setiap orang dalam situasi obyektif yang sama mengalami deprivasi relatif. Seseorang mungkin merasa cukup senang dengan, atau paling tidak berhenti pada situasinya itu, sedangkan yang lain mungkin merasa mengalami deprivasi dan bahkan merasa kecewa karena yang harapannya tidak dapat dicapai. Beberapa sarjana menyatakan bahwa deprivasi relatif adalah suatu kekuatan motivasi seseorang dalam membangkitkan gerakan sosial (Toch, 1965; Harper, 1989, Barkan dan Snowden, 2001).

Berbeda dengan deprivasi relatif, deprivasi absolut mencakup deprivasi material seperti rasa lapar, rasa sakit, dan kurang aman yang menjadikan orang dekat dengan kondisi-kondisi minimal untuk bertahan. Para analisis ini menyatakan bahwa perubahan-perubahan dalam kondisi sosial obyektif, seperti kemiskinan ekstrim dan meningkatnya harga pangan, menjadi sebab terjadinya perilaku kolektif dan gerakan sosial. Namun jelas bahwa sampai saat ini, deprivasi absolut barangkali dialami oleh banyak orang, tetapi banyak juga di antara mereka yang mengalami kondisi tersebut tetapi tidak menghasilkan tindakan kolektif dan gerakan sosial.

Realitas menunjukkan bahwa meskipun banyak aktivitas gerakan sosial yang secara tidak langsung diarahkan untuk mengurangi deprivasi absolut, tetapi lebih banyak gerakan sosial yang disebabkan oleh perasaan subyektif, yaitu keadaan seseorang yang relatif merasa masih kekurangan dari keadaan yang diharapkan. Berdasarkan pertimbangan lain dan berdasarkan realitas tersebut menyebabkan beberapa sarjana menolak kondisi-kondisi obyektif atau deprivasi obyektif sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan sosial. Gurr (1970) menyatakan bahwa deprivasi relatif (atau deprivasi subyektif) lebih diakui sebagai kondisi psikologis yang menjadi dasar munculnya gerakan sosial.

Teori deprivasi relatif juga mensiratkan pentingnya kelompok-kelompok referensi, yang menjadi sumber munculnya harapan-harapan itu. Jadi, orang merasa terpuasi atau kekurangan dengan membandingkan kondisi-kondisi yang dialami dengan kategori-kategori yang berhubungan dengan orang lain. Teori deprivasi relatif menjelaskan (1) mengapa aksi-aksi protes tetap sering muncul selama periode berlangsungnya peningkatan kondisi-kondisi obyektif (munculnya harapan-harapan dengan cepat), dan (2) mengapa orang-orang yang sering terlibat di dalam gerakan sosial adalah bukan dari mereka yang paling mengalami deprivasi obyektif.

Gurr mencari bukti penjelasan umum tentang "kekerasan politik." Kekerasan politik mencakup perlawanan kolektif terhadap aktor politik utama – khususnya agen-agen negara – di dalam suatu komunitas tertentu. Sebagai ganti mengelaborasi teori mengenai bagaimana komunitas politik beroperasi, bagaimanapun, Gurr mengkonsentrasikan pada pengalaman individu dan kemudian terakumulasi ke dalam tindakan massa (Tilly, 1978:22). Argumen sentral Gurr berkaitan dengan proses psikologis, yaitu para individu marah ketika mereka merasa adanya kesenjangan yang besar antara apa yang senyatanya mereka dapatkan dengan yang mereka anggap layak mendapatkannya. Ini dapat terjadi karena adanya penurunan dari apa yang mereka peroleh, atau meningkatnya apa yang mereka anggap layak memperolehnya. Dengan adanya peluang atau kesempatan, maka kemarahan mereka dapat diwujudkan dalam bentuk pemberontakan. Ketika banyak orang mengalami hal yang sama, yakni meningkatnya deprivasi relatif, ditambah terbuka lebarnya peluang untuk berontak pada waktu yang sama, maka situasi tersebut mensaratkan terjadinya kekerasan politik. Argumen Gurr (Tilly, 1978: 22-23) dapat diringkas sebagai berikut:

<p>Magnitude of political violence</p>	$= RD + (RD \times JUST \times BALANCE) + \epsilon$
--	---

"dimana, RD adalah lingkup dan intensitas deprivasi relatif (ketidakpuasan) di dalam suatu populasi; JUST menunjuk pada lingkup dan intensitas kepercayaan di dalam populasi itu tentang hal yang dapat dibenarkan dan kegunaannya yang tampak di dalam konflik terbuka; BALANCE menunjuk pada keseimbangan organisasi dan derajat paksaan di antara mereka yang tidak setuju dan regim; dan ϵ menunjuk pada kesalahan."

Selama dasawarsa 1960-an teori deprivasi relatif ini telah digunakan untuk menjelaskan perkembangan aksi-aksi protes yang dilakukan oleh orang Amerika kulit hitam. Kendati telah terjadi peningkatan kondisi-kondisi sosial obyektif mereka, tetapi masih terjadi kesenjangan dengan orang kulit putih, dan persepsi tentang kesenjangan tersebut terjadi sangat intensif di antara orang-orang kulit hitam "kelas menengah". Menurut Pettigrew (Harper, 1989: 131) selama tahun 1950-an orang kulit hitam mengalami situasi yang kontras dengan orang kulit putih meskipun tingkat pendidikan mereka sama, dibandingkan dengan latar historis orang kulit hitam tentang perbudakan dan deprivasi ekstrim. Jadi, "pendekatan ini memfokuskan

pada deprivasi komparatif di antara kelompok-kelompok. Menurut Wood and Jackson (1982:37), masing-masing kelompok layak menjadi kaya dalam hal memiliki kekayaan, kekuasaan, dan prestise, namun secara relatif masing-masing masih merasa kurang dibandingkan dengan kelompok lainnya. Ketika kondisi ini terjadi, maka kelompok-kelompok yang merasa serba kekurangan (*underprivileged*) tersebut ada kemungkinan mereka melakukan protes.

Pendekatan deprivasi relatif terhadap gerakan sosial menjadi cepat populer selama tahun 1960-an, tetapi kemudian setelah itu mengalami penurunan. Ternyata pendekatan tersebut memiliki beberapa kelemahan atau keterbatasan. Pendekatan deprivasi relatif lebih relevan untuk menganalisis gerakan protes politik daripada untuk menganalisis gerakan sosial ekspresif, yang juga tidak menghasilkan perubahan. Selain itu, ketika beberapa analis melihat bahwa deprivasi relatif sebagai alat penjelasan yang cukup (dengan penuh prediksi) mengenai kemunculan gerakan sosial, maka kesimpulan ini tidak diikuti oleh bukti munculnya gerakan sosial (Harper, 1989: 131).

Meringkas hasil-hasil kajian yang dilakukan pada tahun 1960-an, McPhail menyimpulkan bahwa "disitu terdapat alasan yang pantas dipertimbangkan untuk menolak gagasan bahwa deprivasi relatif dan frustrasi yang dialami kemudian, menjadi sebab terjadinya gerakan sosial. Penilaian tahun 1980-an menurut Gurney and Turney dari bukti penelitian menemukan bahwa frustrasi hanya sebagai faktor pendukung campuran dari teori deprivasi relatif. Tetapi, meskipun tidak sepopuler yang lain, perspektif teori deprivasi relatif secara terus menerus menarik perhatian para analis gerakan sosial dengan beberapa alasan: (1) secara konseptual lebih jelas daripada argumen-argumen lama tentang "*mass discontent*"; (2) perspektif teori ini tidak mencakup pandangan yang bersifat merendahkan para partisipan sebagai orang-orang urakan yang digairahkan oleh irasionalitas perilaku kerumunan; dan (3) pendekatan ini dipandang memiliki beberapa kegunaan ketika dikombinasikan dengan pendekatan lainnya, tetapi tidak dilihat sebagai penjelasan yang cukup atau komplisit tentang sebab munculnya gerakan sosial (Harper, 1989: 131; Wood and Jackson, 1982).

2.1.2. Perspektif Konstruksionis Sosial

Pada pertengahan tahun 1980-an, mulai muncul dan berkembang teori psikososial baru dalam menganalisis perilaku kolektif. Banyak studi mulai dilakukan untuk menggali dimensi psikososial yang baru ini. Snow dan Oliver (1995) (dalam Barkan and Snowden, 2001: 25)

menjelaskan bahwa bodi baru ini disebut dengan perspektif konstruksionis sosial (*social constructionist perspective*) atau *social constructionism*.

Perspektif ini menekankan pada persoalan bagaimana individu-individu memutuskan untuk berpartisipasi di dalam perilaku kolektif dan bagaimana mereka menafsirkan makna-makna yang mereka hubungkan dengan peristiwa perilaku kolektif tertentu. Perspektif ini juga menaruh perhatian pada aspek kultural dari perilaku kolektif, mencakup cara-cara melakukan gerakan yang didasarkan pada keyakinan agama dan kepercayaan lainnya. Cara yang dilakukan untuk menggerakkan para pendukungnya dan mengkonstruksi identitas kolektif tersebut mencakup kesamaan pemahaman tentang bagaimana mereka mendefinisikan diri sendiri dan tujuan-tujuan yang akan dicapai (Jonston and Klandermans, 1995).

Selain itu, perspektif ini juga memperhatikan identitas dan kultur yang sama pentingnya dengan perhatian terhadap organisasi dan perubahan struktural, dan bahkan mungkin lebih dari itu. Sebagai contoh, dengan mengadopsi temuan Jonston and Klandermans (1995) bahwa gerakan petani dapat sukses tidak hanya ketika dapat mempengaruhi kebijakan pertanahan dan perubahan struktural lainnya, tetapi juga ketika gerakan tersebut dapat merubah kultur agraria yang lebih besar dan memperkuat identitas kolektif petani. Upaya ini tidak hanya dapat dilakukan melalui gerakan sosiopolitik tetapi juga melalui gerakan sosiokultural.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Snow dan Oliver (Barkan and Snowden, 2001: 25-26), minimal terdapat dua tema penting di dalam menjelaskan perspektif konstruksionis sosial ini, yaitu framing kolektif (*collective framing*) dan identitas kolektif (*collective identity*). Masing-masing akan dijelaskan secara rinci dalam bahasan berikut ini.

2.1.1.1. Pembingkai Kolektif (*Collective Framing*)

Konsep "*collective framing*" dalam hubungannya dengan gerakan petani diartikan sebagai upaya mengkonstruksi makna-makna dan pemahaman para aktor gerakan, pihak lawan, dan masyarakat yang melekatkan keluhan-keluhannya pada gerakan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dan membenaran terhadap aksi-aksi kolektif yang dilakukan. Dalam hal ini, baik para aktor gerakan petani maupun pihak lawan sama-sama berjuang untuk mengontrol pandangan masyarakat yang terkait dengan aksi-aksi kolektif dalam gerakan petani. Pada satu sisi, gerakan petani berusaha meyakinkan masyarakat agar dapat menerima analisisnya mengenai berbagai alasan bahwa perubahan kebijakan pertanahan dan perubahan struktur sosial agraria itu

diperlukan, sedangkan para pihak lawan berupaya melakukan tindakan sebaliknya, yakni sering melukiskan bahwa gerakan petani itu sebagai tindakan berbahaya dan mengancam keberlangsungan tatanan masyarakat yang sudah mapan. Oleh karena itu, *collective framing* merupakan upaya untuk mempengaruhi “persepsi publik terhadap aksi-aksi kolektif yang dilakukan” (Ginneken, 2003).

Konsep *collective framing* lebih menunjuk pada dimensi psikososial, dan melengkapi kelemahan teori mobilisasi sumberdaya dan peluang politik. Teori struktur peluang politik banyak dikritik karena cenderung “*overextend*” dan “bias struktural” (Beasley, 1997). Beasley juga mengemukakan bahwa secara konseptual, pendekatan teoritis yang menfokuskan pada peluang politik kurang memuaskan karena beberapa alasan: (1) menyangkal posisi agensi dalam organisasi gerakan sosial dengan memotret keberhasilan gerakan yang sangat ditentukan oleh kekuatan dari luar, dan (2) kurang perhatian terhadap kemampuan organisasi gerakan sosial dalam memobilisasi sumberdaya individu. Dengan memperlakukan peluang politik sebagai variabel bebas menjadi kurang mampu menjelaskan mengapa organisasi gerakan sosial mengambil keuntungan terhadap peluang politik yang ada pada waktu tertentu.

Teori peluang politik juga mengabaikan kemungkinan organisasi gerakan mempengaruhi berubahnya peluang politik yang ada dan bahkan menciptakannya. Konsepsi struktur peluang politik lebih menekankan keterbukaan struktural yang menyebabkan terjadinya mobilisasi sumberdaya, daripada melihat proses-proses dengan mana para pelaku merasa gagal memanfaatkan peluang politik tersebut.²² Pendekatan peluang politik tidak secara sistematis merupakan refleksi atas konteks sosial yang lebih luas di mana organisasi gerakan terlekat di dalamnya dan tidak memiliki artikulasi yang cukup jelas bagaimana organisasi gerakan merespon perubahan peluang politik yang ada. Disini perhatian terhadap peranan pelaku dalam proses interpretasi simbol dan makna gerakan sosial menjadi penting. Proses interpretasi dilakukan dengan berbagai cara dan dengan menggunakan berbagai media. Semuanya merupakan aktivitas penting dalam *collective framing*.

Collective framing merupakan proses interpretasi kolektif, atribusi, dan konstruksi sosial yang memediasi antara peluang politik dan tindakan dalam gerakan sosial (McAdam dan Scott, 2002). Proses *collective framing* lebih menekankan pada bagaimana individu-individu

²² Kritik tersebut dikemukakan oleh Goodwin dan Jasper dalam makalahnya berjudul “*Caught in a winding, anarling vive*” dalam “*Sociological Forum*” tahun 1999 pada simposium kecil tentang gerakan sosial (Bevington and Dixon, 2005).

memutuskan berpartisipasi dan menginterpretasikan makna-makna yang terkait dengan perilaku kolektif. Snow et.al. (1986), Snow dan Benford (1988) dan Benford dan Snow (2000) menekankan bahwa *collective framing* sebagai strategi pemaknaan dan definisi bersama terhadap klaim-klaim identitas individual dan rasa tanggung jawab kultural terhadap suatu sebab. Disini *frame alignment* berguna untuk menggambarkan bagaimana keterkaitan timbal balik antara frame kognitif individu partisipan dengan frame ideologis (*frame ideological*). *Frame alignment* lebih fokus pada derajat kesamaan antara pilihan frame-frame para individu partisipan dan organisasi gerakan, tidak menyoroti strategi organisasi gerakan, tetapi lebih tepatnya pada beragam ideologis (Hjllmar, 1996).

Proses *framing* menurut McAdam dan Scott (2002) mengandung elemen-elemen simbolik yang menjadi penghubung antara parameter struktural dan aktivitas para pelaku. Mereka menafsirkan situasi yang dihadapi, memikirkan perbaikan, dan mengusulkan tindakan-tindakan perubahan yang akan dilakukan. Frame aksi kolektif tidak statis, tetapi terus dikonstruksi, dikonteskan, diproduksi, ditransformasikan, dan atau berubah sepanjang berlangsungnya aktivitas gerakan sosial, serta tidak terjadi dalam kondisi kevakuman struktural dan kultural. Oleh karena itu, proses *collective framing* dipengaruhi oleh sejumlah elemen sistem sosio-kultural di mana proses tersebut terlekat di dalamnya.²³

Keterkaitan antara *collective framing* dengan struktur mobilisasi sumberdaya dan struktur peluang politik terletak pada perubahan-perubahan dalam struktur peluang politik, khususnya perubahan dalam struktur kelembagaan dan atau hubungan informal suatu sistem politik, dan perubahan dalam struktur mobilisasi gerakan. Perangkat elemen kultural merupakan basis sumberdaya gerakan yang dapat dipakai sebagai dasar inovasi dan hasilnya dapat dipakai sebagai kerangka tindakan kolektif.

Keterkaitan interaktif antara *collective framing* dengan struktur peluang politik bukan berarti bahwa peluang-peluang politik secara murni merupakan entitas yang terkonstruksi secara sosial. *Collective framing* terhadap peluang politik merupakan komponen sentral dari frame tindakan kolektif, meskipun di dalamnya terdapat unsur "*given*", tetapi tidak mengabaikan kapabilitas aktif pelaku gerakan. Artinya, ketika para pelaku menafsirkan ruang politik dalam cara-cara yang

²³ Proses pembingkaihan (*framing process*) banyak digunakan dalam disiplin ilmu lain, seperti dalam psikologi, khususnya psikologi kognitif, ilmu bahasa dan analisis diskursus, studi komunikasi dan media, dan ilmu politik dan studi kebijakan. Di dalam disiplin sosiologi dipengaruhi oleh Goffman (1974) dalam bukunya berjudul "*Framing Analysis*". Saat ini perspektif teori framing semakin diakui, disamping perspektif teori mobilisasi sumberdaya dan perspektif teori peluang politik atau proses politik, dalam memahami karakter dan masalah gerakan sosial (Benford dan Snow, 2000: 611-612).

lebih menekankan pada peluang daripada tekanan-tekanan, mereka dapat menstimulir tindakan-tindakan yang dapat merubah peluang politik tersebut, dan frame peluang politik mereka menjadi suatu “*self-fulfilling prophecy*” (Benford dan Snow, 2000: 631).

Dibedakan antara ideologi dominan yang ditentang dengan ideologi gerakan. Ideologi dominan sebagai tantangan, sedangkan ideologi gerakan sebagai sumberdaya dalam kaitannya dengan proses pembingkaihan dan kerangka tindakan kolektif. Dalam *collective framing*, gerakan sosial tidak dipandang hanya menyangkut ide-ide dan makna-makna deterministik, merupakan kejadian yang tidak terantisipasi, dan sebagai ideologi yang sudah ada. Lebih dari itu, para pelaku dipandang sebagai penandaan para agen yang secara aktif terlibat memproduksi dan memelihara makna-makna yang dikonstruksi, dan terwujud dalam tindakan yang diorientasikan pada seperangkat kepercayaan, nilai-nilai, dan makna-makna kultural yang mengilhami dan meligitimasi aktivitas gerakan sosial (Benford dan Snow, 2000: 631). Oleh karena itu, *collective framing* bukan hanya berupa kumpulan (*aggregate*) sikap dan persepsi individu, tetapi juga merupakan hasil dari proses negosiasi makna-makna bersama (Benford dan Snow, 2000: 631). Hasilnya adalah komitmen terhadap hasil proses *framing* yang menjadi acuan bersama dalam melakukan tindakan kolektif, meskipun kondisi ini tidak berlaku ketat.

Menurut Benford dan Snow (2000: 615), kerangka tindakan kolektif terkait dengan proses pembingkaihan, terdiri dari dua karakteristik utama, yaitu: 1) menunjuk pada tindakan yang berorientasi fungsi sebagai tugas pembingkaihan inti dari organisasi gerakan sosial; dan 2) menunjuk pada interaktif, proses diskursif yang menyertainya dan yang melahirkan tindakan kolektif. Pembingkaihan inti terdiri dari tiga bagian, yaitu “pembingkaihan diagnostik” (masalah identifikasi dan atribusi), “pembingkaihan prognostik”, dan “pembingkaihan motivasional”. Dengan mengejar tugas pembingkaihan inti, para pelaku gerakan menyelesaikan masalah yang saling terkait dengan “mobilisasi konsensus” dan “mobilisasi tindakan”. Dalam pembingkaihan diagnostik memfokuskan pada perkembangan dan artikulasi sebab gerakan, yang oleh Gamson menunjuk pada “*injustice frame*”. Pembingkaihan prognostik menekankan pada artikulasi pemecahan masalah, paling tidak berupa rencana dan strategi gerakan. Sedangkan pembingkaihan motivasional menunjuk pada kesediaan untuk melakukan tindakan atau alasan logis terlibat dalam tindakan kolektif untuk melakukan perubahan (perbaikan), termasuk di dalamnya mengkonstruksi kosa kata terhadap alasan-alasan tersebut (Benford dan Snow, 2000: 615-617).

Dalam menganalisis kondisi masyarakat transisional, Tilly bersama McAdam dan Tarrow (2001:17) memasukkan konsep "*framing process*" dalam gerakan sosial dan berhubungan dengan konsep struktur mobilisasi sumberdaya dan peluang-peluang atau tantangan. Konsep "*framing process*" ternyata tidak dapat diabaikan dan merupakan konsep baru yang berkembang sebagai kritik terhadap perspektif teori struktural, terutama teori mobilisasi sumberdaya dan teori peluang politik yang mengabaikan dimensi psikososial.

2.1.1.2. Identitas Kolektif (*Collective Identity*)

Tema kedua dalam perspektif konstruksionis sosial ini adalah perhatiannya terhadap identitas kolektif. Gamson (Morris and Muller, 1992) mencatat bahwa: "Partisipasi di dalam gerakan sosial sering melibatkan pembesaran identitas diri bagi para partisipan gerakan dan menawarkan pemenuhan dan realisasi diri." Hal ini juga melibatkan identifikasi dengan penyebab yang lebih besar dan dengan orang-orang yang bekerja untuk mencapai tujuan itu. Aksi-aksi protes mungkin bertujuan untuk memperoleh kemenangan yang nyata seperti terjadinya perubahan kebijakan sosial. Tetapi aksi-aksi protes tersebut juga bertujuan untuk mengembangkan perasaan identitas kolektif di antara para aktor yang terlibat di dalamnya. Para aktor memperkuat ikatan-ikatan emosional satu sama lain dalam rangka mengembangkan identitas kolektif dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama, yang dapat dilakukan melalui tindakan bersama. Oleh karena itu, "komitmen bersama dan ikatan solidaritas" merupakan dua hal yang esensial untuk mengembangkan identitas kolektif dan seharusnya lebih kuat melekat dalam kelompok yang melakukan aksi-aksi kolektif.

2.3. Teori-Teori Struktural Gerakan Sosial

Teori-teori makro gerakan sosial berusaha melakukan penjelasan pada tataran struktural. Teori-teori ini terfokus pada penjelasan tentang perkembangan gerakan sosial di dalam struktur yang lebih besar di mana gerakan sosial tersebut berkembang. Beberapa teori gerakan sosial yang termasuk dalam teori makro struktural adalah teori perilaku kolektif, teori *value-added*, teori mobilisasi sumberdaya, dan teori struktur peluang politik.

2.3.1. Teori Perilaku Kolektif

Perilaku kolektif merupakan istilah teknis yang digunakan para sosiolog yang menunjuk pada situasi-situasi yang mana sejumlah besar orang bertindak di dalam relatif tidak hadirnya kontrol sosial yang

terintegrasi. Protes merupakan salah satu bentuk perilaku kolektif yang elementer. Para sosiolog beranggapan bahwa perilaku kolektif elementer tersebut berkembang di dalam konteks rusaknya tatanan tradisional (sering dihubungkan dengan perubahan sosial yang cepat) dan selalu menganggap sebagai sumber bersama yang mendasari terjadinya stress, kecemasan, ketegangan, atau frustrasi (Harper, 1989:134).

Blummer (1969:8) menulis bahwa pada awal munculnya gerakan sosial adalah memiliki ciri yang khas yaitu "*amorphous*" atau tidak berbentuk, sangat kurang terorganisir, menjadi ciri perilaku kolektif "pada level primitif", memiliki mekanisme interaksi yang "elementer" dan merupakan tindakan "spontan". Blumer menyatakan bahwa meskipun terdapat citra negatif terhadap perilaku protes, keberadaannya dapat menyumbang terciptanya bentuk sosial baru.

Blumer juga menyatakan adanya mekanisme gerakan sosial, meliputi agitasi, pengembangan *spirit de corps*, formasi ideologi, dan pengembangan nilai tertentu. *Spirit de corps* sebagai instrumen penting untuk mengembangkan solidaritas sosial, sehingga dapat memberikan soliditas pada gerakan sosial. *Spirit de corps* dapat dikembangkan melalui: a) pengembangan hubungan dalam kelompok dan luar kelompok; b) pengembangan formasi asosiasi persahabatan informal, dan (c) pengembangan partisipasi di dalam acara seremonial formal (Wahyudi, 2005:22).

Jadi, perspektif perilaku kolektif menekankan bahwa rusaknya pola-pola tatanan tradisional dan kontrol sosial menghasilkan bentuk elementer dari perilaku kolektif. Kondisi ini dapat mengkrystal ke dalam keberlangsungan gerakan sosial yang berusaha mendukung atau mencegah perubahan sosial lebih lanjut. Oleh sebab itu, gerakan sosial juga dapat dipandang sebagai respon adaptif terhadap kondisi-kondisi disorganisasi sosial (Harper, 1989:135).

2.3.2. Teori Nilai Tambah (*Value-Added*)

Smelser (1962) dalam teorinya tentang *structural-strain* atau *value-added* berada pada penjelasan tataran makro-struktural tentang tindakan kolektif. Smelser menjelaskan enam faktor utama penentu terjadinya tindakan kolektif, yaitu *structural condusiveness*, *structural strain*, *generalized belief*, *precipitating factors*, *mobilization for action*, dan *social control*.

1. *Structural condusiveness*. Berkaitan dengan konsep struktur, Smelser (1962: 15) menyatakan melalui pertanyaan sebagai berikut: "*Do certain structural characteristics, more than others, permit or encourage episodes of collective behavior ?*" Sedangkan

yang dimaksud *conduciveness is, at most, permissive of a given type of collective behavior*. Artinya, struktur yang sudah ada sebelumnya di dalam masyarakat lebih memungkinkan menghasilkan jenis gerakan tertentu daripada struktur yang lainnya. Sebagai contoh, struktur sosial agraria di pedesaan yang mengesampingkan isu kesetaraan dan keadilan penguasaan tanah pertanian bagi petani memungkinkan perilaku kolektif dan gerakan petani berkembang. Atau, suatu masyarakat memiliki karakteristik struktur sosial agraria tertentu yang antagonis terhadap petani memungkinkan terjadinya serangkaian aksi-aksi protes petani.

2. *Structural strains*. Smelser (1962: 47) menyatakan: “ *Most formulations of strain are unsystematic. We do not possess, for instance, an exact classification of types of strain. Nor do we know the relations among the major types of strain. Perhaps most important, we have no adequate theory of how strain combines with other determinants—conduciveness, growth of beliefs, operation of social controls, for instance—in the rise of an episode of collective behavior. In this volume we hope to lessen these deficiencies. In this chapter we shall define strain as an impairment of the relations among and consequently inadequate functioning of the components of action.*” Ini berarti ketegangan (ambigu yang dirasakan, deprivasi, inkonsistensi, tekanan) yang muncul dalam kaitannya dengancarabawa struktur yang kondusif itu dirasakan. Sebagai contoh, ketimpangan yang terjadi di dalam sistem sosial agraria merupakan suatu faktor kondusif yang dapat atau tidak dapat menghasilkan ketegangan. Pada kasus ini, ketegangan hanya akan berkembang jika ketimpangan tersebut dianggap sebagai fakta yang sangat merugikan kelangsungan hidup petani.
3. *Growth of a generalized belief system*. Smelser (1962: 80) menyatakan: “*We shall now investigate the peculiarities of those beliefs that activate people for participation in episodes of collective behavior. We refer to such beliefs as generalized beliefs.*” Kemudian Smelser menambahkan bahwa: “*Generalized beliefs constitute one stage in the total value-added process by which we account for the occurrence of episodes of collective behavior. Such beliefs become significant as determinants in the value-added process only when conditions of structural conduciveness and strain are present; these beliefs are necessary, however, to mobilize people for collective action.*” Jadi munculnya seperangkat ide diperlukan untuk membangkitkan dan meluasnya ketegangan ke dalam gerakan yang sedang berlangsung. Sistem ide atau ideologi menentukan

sumber ketegangan dan sampai pada solusi yang dapat mengurangnya.

4. *Precipitating factors*. Dalam hal ini Smelser (1962: 294) menyatakan: “*What are the roles of precipitating factors in the development of beliefs ? Most important, they mark the sudden establishment or symbolization of one of the conditions of conduciveness or strain.*” Jadi, faktor-faktor pemicu atau yang mempercepat memfokuskan kepercayaan khususnya pada orang, kejadian, atau situasi. Selain itu, faktor-faktor pemicu tersebut menciptakan rasa urgensi dan mempercepat mobilisasi untuk melakukan tindakan kolektif.
5. *Mobilization for action*. Pada tahap ini muncul para pemimpin dan juru bicara untuk melakukan gerakan, dan berkembangnya organisasi, dan juga proses-proses agitasi, rekrutmen, dan membuat klaim-klaim perjuangan mengenai yang dikeluhkan berkaitan dengan isu-isu yang menghidupkan gerakan (Harper, 1989:136).
6. *Social control*. Berupa aktivasi kekuatan masyarakat yang lebih besar untuk merespon gerakan. Respon-respon ini mungkin dilakukan oleh para pemegang otoritas pemerintahan atau oleh pihak lain yang melawan gerakan yang berkembang dalam hubungannya dengan suatu gerakan (Harper, 1989:136)

Smelser mengidentifikasi tiga bentuk respon yang dilakukan oleh para pemegang otoritas terhadap gerakan sosial. Pertama, mereka dapat membuka saluran komunikasi dan pengaruh, membawa gerakan, isu-isunya, sebagian para pemimpinnya ke dalam kerangka kerja sistem kelembagaan yang mapan, yang disebut dengan kooptasi. Kedua, mereka dapat, sementara tidak melakukan kooptasi gerakan, tetap berusaha untuk mengubah kondisi structural yang mendasari munculnya gerakan. Ketiga, mereka dapat berupaya menekan gerakan dengan segala sumberdaya yang dimiliki oleh nagara (Harper, 1989: 136).

Pentingnya organisasi gerakan (termasuk para pemimpin), diperlukan ketika melakukan mobilisasi tindakan. Kehadiran organisasi gerakan diperlukan untuk merekrut anggota ke dalam tindakan kolektif, mengorganisirnya dan dalam melakukan taktik-taktik gerakan yang lain.

2.3.3. Teori Mobilisasi Sumberdaya dan Struktur Peluang Politik

Dalam memahami genesis dan dinamika gerakan petani sebagai gerakan sosial, di dalam tradisi Amerika sering dibedakan antara dua konsep, yakni perilaku kolektif (*collective behavior*) dan tindakan

kolektif (*collective action*). Perilaku kolektif lazim digunakan dalam teori-teori gerakan sosial klasik, seperti teori-teori psikososial aliran Chicago, teori masyarakat massa, dan model struktural fungsional (Kornhauser, 1959; Arendt, 1951; Smelser, 1962). Paling tidak terdapat dua persamaan karakteristik umum dari pendekatan teori-teori *collective behavior*. Pertama, mereka lebih memfokuskan pada penjelasan partisipasi individu dalam gerakan sosial, melihat keluhan-keluhan dan nilai-nilai sebagai respon terhadap cepatnya perubahan sosial (*strain*). Kedua, perilaku kolektif dianggap bersifat eskpresif, "arational" jika tidak disebut "irrational", menyimpang dari tatanan sosial yang mapan, dan lebih elementer mencakup baik gerakan perubahan personal maupun institusional (Cohen, 1985: 672).

Sedangkan tindakan kolektif menurut Melucci (dalam Johnstone dan Klandermans, 1995: 43-44) merupakan hasil dari suatu proses yang direncanakan secara matang, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dalam melihat peluang dan hambatan. Tindakan kolektif tidak bersifat linier tetapi diproduksi melalui proses interaksi, negosiasi, dan dengan oposisi dari berbagai orientasi yang berbeda. "Konstruksi sosial" tentang "kolektif" melalui negosiasi dan renegotiasi ini secara terus menerus bekerja ketika suatu bentuk tindakan kolektif terjadi. Oleh karena itu, tindakan kolektif memiliki ciri-ciri sebaliknya dari perilaku kolektif.

Perspektif teori tindakan kolektif menolak pandangan teori-teori gerakan sosial klasik. Perspektif teori ini berusaha merumuskan kembali asumsi-asumsinya, dan masuk pada ranah kajian sosiologi politik dan sosiologi ekonomi. Perspektif teori ini secara umum sering disebut dengan teori mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization theory*),²⁴ dengan beberapa variannya seperti teori proses politik (*political process theory*) dan teori peluang politik (*political opportunity theory*). Beberapa ahli yang berhasil membangun dan mengembangkan perspektif teori ini adalah Oberschall (1973), Gamson (1975), McCarthy dan Zald (1973;1977), Tilly (1978), Jenkins (1981), dan Tarrow (1998) (dalam Barkan and Snowden, 2001: 23). Pada awal

²⁴ Secara umum perspektif teori mobilisasi sumberdaya mendasarkan asumsi-asumsinya sebagai berikut: (a) gerakan sosial harus difahami dalam konteks model konflik tindakan kolektif; (b) tidak ada perbedaan mendasar antara tindakan kolektif institusional dan non institusional; (c) mengandung konflik-konflik kepentingan yang dibangun ke dalam hubungan-hubungan kekuasaan terlembagakan; (d) tindakan kolektif melibatkan kelompok-kelompok yang bertindak rasional dalam mengejar kepentingannya; (e) tujuan dan keluhan-keluhan merupakan produk permanen dari hubungan kekuasaan dan tidak dapat menjelaskan formasi gerakan; (f) semua itu tergantung pada perubahan sumberdaya, organisasi, dan peluang tindakan kolektif; (g) kesuksesan gerakan dibuktikan oleh pengakuan kelompok sebagai pelaku politik atau oleh meningkatnya keuntungan material; (h) mobilisasi skala besar, bertujuan khusus, birokratik, dan dalam bentuk organisasi formal (Cohen, 1985: 675).

perkembangannya meskipun varian teori tersebut terdapat perbedaan, semuanya melihat pentingnya mobilisasi, organisasi, dan sumberdaya dalam gerakan sosial. Tetapi sebaliknya, dalam analisisnya kurang memperhatikan pentingnya faktor psikososial seperti keluhan-keluhan dan rasa ketidakpuasan. Titik utama teori mobilisasi sumberdaya adalah meletakkan pada pentingnya proses mobilisasi di dalam menganalisis gerakan sosial.

McCarthy dan Zald (1977: 1213) dengan tegas menyatakan bahwa pendekatan mobilisasi sumberdaya menekankan baik pada dukungan masyarakat maupun pada kendala dari fenomena gerakan sosial. Pendekatan ini menguji berbagai sumberdaya yang perlu dimobilisasi, keterkaitan gerakan sosial dengan kelompok-kelompok lain, ketergantungan dukungan eksternal untuk sukses, dan taktik yang digunakan oleh para pemegang otoritas untuk mengontrol atau menggabungkan gerakan. Disini, kekuatan struktur internal, jejaring eksternal, dan keoptimalan peran para elit aktor semua menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan mobilisasi sumberdaya secara keseluruhan dan dalam sakala yang lebih besar.

Terdapat lima titik tekanan utama dalam perkembangan teori mobilisasi sumberdaya. Pertama, studi tentang agregasi sumberdaya sangat penting untuk memahami aktivitas gerakan dalam mencapai tujuan kolektif. Kedua, agregasi sumberdaya perlu organisasi gerakan sosial. Ketiga, dalam memperhitungkan kesuksesan dan kegagalan gerakan perlu mengakui secara eksplisit pentingnya keterlibatan pihak luar (individu, kelompok, organisasi). Keempat, model penawaran dan permintaan kadang-kadang diterapkan terhadap arus sumberdaya kepada dan dari gerakan sosial khusus. Kelima, pentingnya konsepsi costs dan rewards dalam menjelaskan keterlibatan individu dan organisasi dalam gerakan sosial (Zald and McCarthy, 2003: 19).

Sebagai suatu gerakan sosial, gerakan petani yang terorganisir pada tingkat supra lokal (skala provinsi dan berjejaring pada tingkat nasional) seperti yang terjadi di Indonesia pada awal era reformasi selain bisa dikatakan sebagai gerakan populer juga lebih sesuai jika dianalisis dengan menggunakan teori mobilisasi sumberdaya. Menurut Jelin, bentuk-bentuk gerakan rakyat (*popular movements*)²⁵ yang banyak dilakukan di negara-negara selatan pada dekade tahun 1990-

²⁵ Menurut Stephen (1992) istilah "*popular*" secara umum menunjuk pada suatu peringkat masyarakat yang secara ekonomi termarginalkan, secara politik tidak mempunyai hak suara, dan secara kultural sebagai kelompok yang terancam, termasuk di dalamnya para penduduk lokal (*indigenous*), para pekerja sektor informal, para petani miskin dan tak bertanah, dan *underemployed* dan *unemployed*. Sedangkan dalam konteks Amerika Latin, Escobar (1989) menggunakan istilah "*popular*" terkait dengan mereka semua yang diciptakan tergantung pada proses pembangunan oleh para kapitalis (Brohman, 1996: 258).

an tidak hanya berorientasi *material* tetapi juga *postmaterial*, seperti sebagai upaya untuk melakukan penguatan identitas kolektif. Jelin (Brohman, 1996: 258) mengatakan sebagai berikut:

“... are forms of collective action with a high degree of popular participation, which use non-institutional channels, and which, at the same time that they formulate their demands, also find forms of action to advanced those demands and to establish themselves as collective subjects, that is, as a group or a social category.”

Kedua orientasi (*material* dan *postmaterial*) yang ada dalam gerakan sosial tersebut lebih sesuai jika dianalisis menggunakan teori mobilisasi sumberdaya daripada hanya menggunakan teori gerakan sosial klasik atau teori gerakan sosial baru (*new social movement theory*). Sejalan dengan pandangan Phongpaichit (1999), bahwa gerakan petani skala provinsi di Indonesia bertujuan sekaligus untuk mencapai dua kepentingan *material* (tanah) dan *postmaterial* (keadilan dan demokrasi agraria). Swain (2001) (dalam Triwibowo, 2006: 10) juga sependapat karena perspektif teori mobilisasi sumberdaya memiliki kelenturan lebih tinggi dalam mengakomodasi konteks spesifik gerakan sosial yang terjadi di negara-negara berkembang dan dalam menjelaskan keterkaitan antara proses-proses sosiopolitik pada tingkat mikro dan meso.

Teori mobilisasi sumberdaya didasarkan pada asumsi bahwa tindakan kolektif merupakan respon para aktor politik rasional terhadap kondisi konfliktual yang dihadapi. Kondisi tersebut (menghasilkan tekanan dan ketidakpuasan) relatif konstan dan tidak dapat menjadi faktor penentu (sebab) utama terjadinya tindakan kolektif. Tindakan kolektif dimulai ketika sumberdaya masyarakat dapat dimobilisir oleh para pemimpin gerakan dan ketika kondisi sosiopolitik telah terbuka terhadap mobilisasi. Gerakan berlangsung ketika dapat memobilisir sumberdaya yang cukup untuk mengimbangi kontrol negara (Barkan and Snowden, 2001: 28). Oleh karena itu, sebagai suatu tindakan kolektif yang rasional, normal, dan instrumental terorganisir maka dengan penguatan sumberdaya saja tidak cukup tanpa dapat memobilisirnya (Sztompka, 2004: 342).

Dalam perkembangannya perspektif teori ini dapat dikelompokkan menjadi dua model teoritis. Perbedaan keduanya terkait dengan dukungan dan penolakan terhadap teori pilihan rasional (*rational choice*) dan karya Olson berjudul “*The Logic of Collective Action* (1965)” (Muukkonen, 1999). Pertama, adalah “*political-interactive model*” atau “*political process approach*” yang dikembangkan oleh Tilly, Gamson, dan Oberschall. Model ini

menekankan pentingnya perubahan struktur peluang bagi aksi kolektif, keberadaan jaringan, serta ikatan horizontal yang telah terbangun dengan kelompok tertindas (*aggrieved group*) sebagai pelaku penentu keberhasilan gerakan sosial. Kedua, "*organizational-entrepreneurial model*" yang dikembangkan oleh McCarthy dan Zald. Model ini memandang dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya merupakan faktor-faktor yang lebih penting dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial (Canel, 2007). Dengan demikian, pendekatan mobilisasi sumberdaya menekankan baik pada dukungan masyarakat maupun tekanan terhadap fenomena gerakan sosial. Pendekatan ini menguji beragam sumberdaya yang harus dimobilisir, keterkaitan antara gerakan sosial dengan kelompok-kelompok lain, ketergantungannya terhadap dukungan eksternal untuk sukses, dan taktik yang digunakan oleh pemegang otoritas untuk mengontrol atau menyatukan gerakan (Zald and McCarthy, 2003: 16).

2.3.3.1. Struktur Mobilisasi Sumberdaya

Struktur mobilisasi sumberdaya menunjuk pada jaringan antar aktor atau antar kelompok aktor dari bentuk informal hingga dalam bentuk organisasi formal, merupakan rangkaian posisi dalam struktur mobilisasi mikro dan meso. Dibedakan antara struktur mobilisasi formal dan informal. Struktur mobilisasi formal dalam bentuk organisasi, sedangkan struktur mobilisasi informal dalam bentuk unit keluarga, jaringan pertemanan, asosiasi sukarela, unit-unit tempat bekerja, dan lain sebagainya (McAdam, McCarthy dan Zald, 1996: 141).

Mobilisasi sumberdaya merupakan proses di mana suatu organisasi menjamin kontrol kolektif terhadap sumberdaya. Sumberdaya gerakan memiliki banyak kegunaan dan terdapat pandangan yang beragam, seperti yang dikemukakan oleh Rogers (1974) dan Jenkins (1982) (dalam Jenkins, 1983: 533). Rogers membedakan antara "*instrumental resources*" yang digunakan dalam pengaruh aktual dan "*infra-resources*" sebagai kondisi yang berguna bagi sumberdaya instrumental, sedangkan Jenkins (1982) membedakan antara "*power resources*" yang menyediakan alat untuk melakukan kontrol tindakan terhadap target dan "*mobilizing resources*" sebagai fasilitas yang tersedia untuk memobilisasi *power resources*.

Sebagian ahli menolak gambaran instrinsik dari sumberdaya karena dianggap membatasi nilainya. Sumberdaya sebagai "*assets*" yang sering dimobilisasi dalam gerakan-gerakan sosial dan pandangan tentang *resources* juga beragam. McCarthy dan Zald (1977) menunjuk pada uang, fasilitas, tenaga, dan legitimasi. Etzioni membedakan antara sumberdaya *coercive* (mencakup senjata, kekuatan tentara, teknologi

manipulatif), sumberdaya *utilitarian* (barang, pelayanan informasi, uang) dan sumberdaya *normative* (loyalitas, kewajiban). Menurut Tilly (1978: 69), konsep *resources* tersebut menunjuk pada tanah, tenaga kerja, kapital, dan keahlian teknis. Kemudian Freeman (1979) (dalam Jenkins, 1983: 533) membedakan antara "*tangible assets*" seperti uang, fasilitas dan peralatan komunikasi, dengan "*intangible assets*" atau "*human assets*" sebagai basis utama gerakan sosial. Makna ini juga mencakup sumberdaya terspesialisasi seperti organisasi dan keahlian legal dan para pendukung yang tidak terspesialisasi.

2.3.3.2. Struktur Peluang Politik

Meskipun teori struktur peluang politik telah dikritik oleh perspektif teori psikososial baru (perspektif teori konstruksionis), tetapi dalam menjelaskan muncul dan berkembangnya gerakan petani sangat penting dan masih relevan. Berkembangnya konsepsi struktur peluang politik didasarkan pada alasan bahwa tidak semua teoritis tradisi mobilisasi sumberdaya menerima teori Olson tentang pilihan individual sebagai pelaku utama dalam tindakan kolektif. Faktor lain seperti kesiapan struktural dan struktur dukungan atau hambatan politik juga penting dipertimbangkan. Tarrow (1994) (dalam Beasley, 1997) menghubungkan antara analisis level medium atau meso (kelompok) dengan analisis level makro (struktural).²⁶ Variabel yang digunakan adalah derajat keterbukaan suatu *polity*, keragaman elit politik, toleransi terhadap aksi protes, dan kapabilitas implementasi kebijakan pemerintah. Kemudian Kitschelt (1986) (dalam Beasley, 1997) mengoperasionalkan sebagai "derajat keterbukaan suatu rezim terhadap tuntutan-tuntutan baru" atas berbagai kelompok yang mempengaruhi ukuran, strategi, dan taktik gerakan. Baik Tarrow maupun Kitschelt keduanya cenderung menganggap bahwa peluang politik bersifat obyektif. Pandangan ini melengkapi konseptualisasi Klandermans bahwa struktur peluang politik menunjuk pada derajat kondisi yang kondusif bagi munculnya gerakan sosial (Hjlmars, 1996: 169-186).

Keterkaitan antara struktur peluang politik dengan struktur mobilisasi sumberdaya telah dikaji secara intensif oleh Kreisi (et.al. 1992), Van der Heijden (et.al 1991), Koopmans dan Rucht (1995), dan

²⁶ Pada karya sebelumnya Tarrow menyatakan bahwa gerakan-gerakan sosial dibentuk secara struktural berbasis pada "*opportunities*" baik sebagai pendukung maupun sebagai penghambat. Kemudian definisinya tentang gerakan sosial berubah dari sebelumnya, menjadi: "perjuangan kolektif yang dilakukan oleh kelompok orang dengan tujuan bersama dan solidaritas dalam memelihara keberlanjutan interaksinya dengan para elit, para penentang dan para pemegang otoritas" (Beasley, 1997)

Tarrow (1995) (dalam Hjlmar, 1996). Mereka menyimpulkan bahwa ketika sistem politik bersifat tertutup terhadap klaim-klaim masyarakat, maka gerakan sosial yang terjadi agak kecil skalanya tetapi bersifat radikal, dan ketika terjadi sebaliknya maka aktivitas kelompok dalam gerakan sosial memungkinkan menjadi lebih besar tetapi kurang radikal.

Betapapun kuatnya struktur mobilisasi sumberdaya tidak pernah bebas dari tekanan-tekanan atau hambatan. Hal ini menunjuk pada keterkaitan antara “*institutionalized politics*” yang menentukan struktur peluang dan hambatan bagi berkembangnya gerakan-gerakan sosial.²⁷ Jadi, ruang dan proses politik menjadi tujuan utama dilakukan aksi-aksi kolektif yang dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam mempengaruhi keputusan legal atau politik yang lebih baik bagi pencapaian kepentingan gerakan (Dubet dan Thaler, 2004: 559). Tarrow menegaskan bahwa struktur peluang politik selalu berhubungan dengan sumberdaya eksternal. Sumberdaya ini dipergunakan sejalan dengan terbukanya akses kepada kelembagaan politik dan perpecahan di dalam tubuh para elit politik (Tarrow, 1998, 20).

Menurut Andrews, struktur peluang politik merupakan dimensi pelaku eksternal dari proses politik, meliputi peranan sekutu politik dan pendukungnya, ketersediaan akses di dalam sistem politik, kapabilitas dan kecenderungan negara untuk melakukan tekanan, pecahnya dan konflik antar para elit kekuasaan.²⁸ Struktur peluang politik merupakan determinan bentuk gerakan sosial dan juga dinamikanya yang dapat dibedakan menjadi “struktur tertutup” dan “struktur terbuka”, atau struktur keluaran (*output*) yang “kuat” dan “lemah”. Perbedaan tersebut dilihat dari konfigurasi spesifik tentang sumberdaya, susunan institusional, dan kejadian-kejadian dalam dinamika mobilisasi. Kemudian Tarrow (1994) menambahkan aspek semi formal dari struktur terbuka tersebut dalam akses kekuasaan, perubahan dalam jalur aturan, tersedianya para elit berpengaruh, dan perpecahan di dalam dan antar elit kekuasaan itu sendiri (Landman, 1999).

²⁷ Perkembangan ini muncul perspektif atau pendekatan baru dengan sebutan beragam, yaitu teori proses politik (*political process theory*), struktur peluang politik (*political opportunity structure*), teori peluang politik terstruktur (*structured political opportunity theory*). Semua teori tersebut mengandung bias struktural, menganggap bahwa para pelaku rasional berada dibawah tekanan-tekanan institusional dan lingkungan, yang membatasi kemampuan untuk mengejar tujuan-tujuannya (McAdam dan Scott, 2002).

²⁸ Tilly (1978) McAdam (1982), Morris dan Herring (1987), dan Tarrow (1994), semuanya menyatakan bahwa struktur peluang politik terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan dinamika politik yang membentuk peluang-peluang dan tekanan-tekanan terhadap mobilisasi (Andrews. 1997).

Dengan demikian, perubahan struktur peluang politik berkaitan dengan siklus gerakan sosial. Secara lebih rinci, McAdam (1996) (dalam Mandman, 1999) merumuskan struktur peluang politik dalam empat aspek berikut: (1) keterbukaan relatif dari sistem politik yang melembaga, (2) kestabilan relatif dari ikatan-ikatan para elit yang menyokong suatu kebijakan tertentu, (3) ketersediaan persekutuan-persekutuan baru yang berpengaruh, dan (4) kapabilitas negara dan kecenderungan untuk dapat menekan setiap upaya mobilisasi kekuatan masyarakat. Struktur peluang politik ini dapat dianggap bertanggung jawab dalam peningkatan atau penurunan resiko atau keuntungan dari berbagai upaya mobilisasi kekuatan masyarakat. Melalui persepsi para pemimpin gerakan dapat disimpulkan derajat ancaman dan keuntungan berhubungan dengan keputusan kebijakan publik, kesempatan berhasilnya mobilisasi, dan bagaimana otoritas negara memfasilitasi atau menekan mobilisasi tersebut.

Asumsi utama penjelasan tentang struktur peluang politik adalah bahwa mobilisasi gerakan dimungkinkan ketika terjadi perubahan iklim politik yang membuat tindakan kolektif lebih memungkinkan untuk sukses. Kitschelt (1986), Tarrow (1998), Jenkins (et.al., 2003), Mayer (2004) dan Mayer dan Minkoff (2004) (dalam Olzak dan Ryo, 2004) menyimpulkan bahwa peluang politik meningkat pada level penerimaan para elit terhadap aksi-aksi gerakan atau melakukan penstrukturan kembali hubungan-hubungan kekuasaan yang ada. Misalnya, situasi politik kompetitif dan perubahan politik dapat menciptakan peluang-peluang politik untuk melakukan mobilisasi dan aksi gerakan. Sebaliknya, tekanan politik berpengaruh terhadap menurunnya aktivitas gerakan khususnya yang tujuannya lebih radikal.

Kriesi mengkritik pandangan tentang struktur peluang politik dalam gerakan sosial, karena dianggap bersifat statik dan konstan. Menurutnya, struktur peluang politik bersifat dinamis dan selalu terbuka terhadap perubahan sebagai hasil kontrol para elit baru di dalam sistem atau tercapainya konsolidasi elit lama dengan berbagai modifikasi baru. Maka perlu dipertimbangkan struktur kelembagaan formal, informal dan berbagai strategi perubahan (Jenkins dan Klandermans, 1995: 168).

2.4. Pendekatan Sintesis

Berdasarkan perkembangan konsep-konsep dalam beberapa perspetif teori gerakan sosial, jelas bahwa pandangan McAdam, Tarrow dan Tilly tidak lagi hanya berada ruang-ruang makro-struktural, tetapi lebih luas dan mendalam dengan memperhatikan pentingnya ruang-ruang mikro-prosesual (perspektif teori psiko-

sosial). Kedua perspektif teori tersebut merupakan elemen yang saling terkait untuk menganalisis gerakan sosial (McAdam dan Scott, 2002).

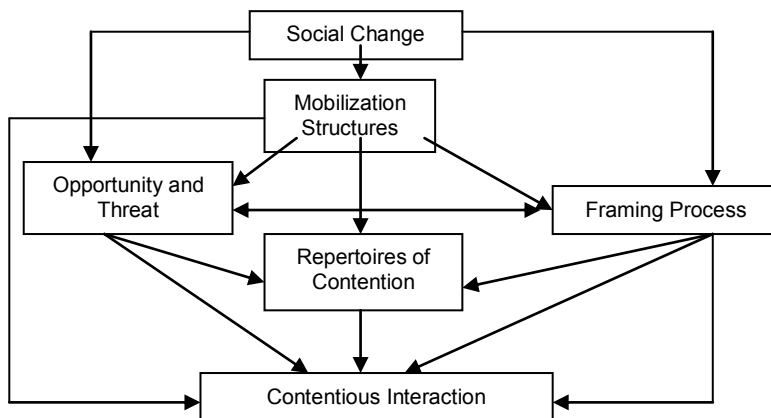
Keterkaitan timbal-balik antara struktur mobilisasi, peluang politik dan proses framing sebagai kesatuan dalam gerakan sosial sebagaimana dikemukakan oleh McAdam, Tarrow dan Tilly pada Gambar 1. Ini menunjukkan bahwa dimensi struktur dan tindakan aktor (proses) tidak dapat dipisahkan dalam praktek gerakan sosial. Jarak antara dimensi struktur dan tindakan aktor terdapat jaringan-jaringan sosial internal dan eksternal, baik dalam kerangka konsensus untuk memperkuat organisasi gerakan sosial, maupun dalam kerangka konfliktual yang menyebabkan terjadi fragmentasi antar kelompok dan antar individu aktor dalam siklus organisasi gerakan sosial.

Gerakan-gerakan sosial bersifat dinamis, membentuk struktur jaringan internal dan eksternal, mencari dan merespon peluang-peluang politik (*political opportunity*) yang dianggap mendukung atau menghambatnya, dan di dalamnya terjadi proses framing (*framing process*) antar aktor untuk dapat melakukan perubahan sosial. Eksistensi organisasi gerakan bukan hanya ditentukan oleh faktor struktural dan kultural, tetapi juga oleh berbagai kepentingan para aktor.²⁹ Disini terdapat dua kekuatan utama organisasi gerakan, yaitu eksistensi para aktor dan bangunan jaringan. Bangunan jaringan internal organisasi mencakup kepemimpinan, struktur, nilai, norma, visi, misi, strategi, garis ideologi, rekrutmen, kekuatan basis konstituen, kekuasaan, taktik, aksi, hingga pada tujuan gerakan. Sedangkan bangunan jaringan eksternal terkait dengan faktor mobilisasi dan memelihara atau mempertahankan keberlangsungan kekuatan hubungan eksternal dalam melakukan perubahan tatanan sosial yang lebih baik.

Kekuatan dan keberlangsungan mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) terkait dengan sejauh mana kolektivitas aktor mampu mencari, menciptakan, dan memanfaatkan secara inovatif struktur peluang-peluang politik yang ada dan mengatasi hambatan-hambatan gerakan dalam proses politik dan pemberdayaan para anggotanya. Struktur mobilisasi sumberdaya dan peluang politik terkait dengan proses dan hasil konstruksi ide, instrumen, dan tujuan yang dilakukan oleh kolektivitas aktor gerakan secara berulang, melalui proses-proses produksi dan reproduksi pengetahuan, ideologi, jaringan, strategi, taktik hingga dalam melakukan aksi-aksi gerakan untuk mencapai

²⁹ Dalam perspektif rasionalitas, konsep "aktor" menurut Mancur Olson menunjuk pada kelompok individu yang melakukan tindakan atas nama kepentingan bersama mereka, sama halnya dengan para individu yang dapat diharapkan melakukan tindakan atas nama kepentingan mereka (Morris and Mueller, Editor, 1992: 6).

tujuan. Disini dinamika organisasi gerakan juga tidak terlepas dari sistem sosio-kultural, karena eksistensinya berada dan melekat di dalam masyarakat di mana mereka berada.



Gambar 1. Keterkaitan Antara Struktur Mobilisasi, Peluang Politik dan Proses Framing dalam Gerakan Sosial

Sumber: McAdam, Tarrow dan Tilly, 2001:17

Pada perkembangan awal perspektif teori mobilisasi sumberdaya dan peluang politik selain lebih condong pada teori politik juga lebih menekankan pada prinsip rasionalitas dan kepentingan individu aktor (*self-interest*) daripada aspek psikososial seperti keluhan-keluhan, solidaritas, dan ideologi. Beberapa kritik telah diterima karena mendudukkan aktivitas aktor terlalu rasional, terlalu tidak emosional, dan terlalu berorientasi politik. Tidak semua tindakan kolektif direncanakan dengan matang, dan tidak semua episode tindakan kolektif secara eksplisit berorientasi politik seperti yang diasumsikan (Barkan and Snowden. 2001: 25). Kritik tersebut kemudian mendorong perspektif teori ini menerima konsepsi-konsepsi psikososial yang sebelumnya kurang diperhatikan. Ini didasarkan pada realitas bahwa perspektif teori ini selalu menghadapi tiga problem utama dalam analisis gerakan sosial, yakni problem identitas kolektif, problem kesadaran, dan problem solidaritas.³⁰ Ini berarti bahwa perspektif teori ini telah berkembang dari pendekatan strukturalis

³⁰ Problem identitas kolektif ketika tidak mampu menjawab mengapa dan kapan karakteristik yang sama menjadi relevan bagi pengakuan timbal balik para anggota kelompok. Problem kesadaran berkenaan dengan koneksi antara relasi produksi (atau dengan negara) dan artikulasi kepentingan jangka panjang dan jangka pendek yang tidak terjadi secara otomatis. Problem solidaritas terkait kategori kepentingan kolektif yang memerlukan analisis utama tentang keuntungan kolektif apa yang diperhitungkan dan bagaimana kepentingan kolektif diakui, ditarsirkan, dan dapat mengkomando loyalitas dan komitmen (Cohen, 1985: 685)

menjadi konstruksionis, disebut dengan perspektif konstruksionis sosial (*social constructionist perspective*) atau konstruksionisme sosial (*social constructionism*) (Barkan dan Snowden. 2000: 25).

Ada tiga elemen utama yang ditawarkan sebagai solusi, yakni: (1) merevisi konsep pelaku (*actor*) dari pandangan utilitarianisme menjadi pandangan bahwa aktor melekat secara sosial (*socially embedded actor*); (2) memperluas peranan penting mobilisasi mikro (jaringan informal) dalam interaksi bersemuka di dalam beragam konteks kelompok; dan (3) spesifikasi makna yang membangkitkan elemen-elemen oposisional dalam kultur sosiopolitik pada beragam waktu, sifat dan bentuknya (Morris dan Muller, 1992: 6).

Terkait dengan kategori aktor gerakan sosial, McCarthy dan Zald memperhatikan posisi masing-masing sebagai "*adherents*", "*constituents*", "*potential beneficiaries*", "*bystanders*", dan "*authorities*". *Adherents* adalah individu atau organisasi yang percaya terhadap tujuan gerakan; *constituents* adalah mereka yang memberikan dukungan sumberdaya kepada organisasi gerakan sosial; dan *baystanders* adalah mereka yang bersikap netral terhadap gerakan sosial (McCarthy and Zald. 1977: 1220-1221). Sedangkan Hunt, Gamson dan Snow (1994) membagi menjadi tiga kategori, yakni *protagonist*, *antagonist* dan *bystanders*. *Protagonist* mencakup semua kelompok dan kolektivitas yang mendukung gerakan atau yang merasa kepentingannya terwakili. Mereka termasuk *adherent*, konstituensi, dan *beneficiaries*. Inti dari *protagonist* gerakan adalah *adherent*, yang ikut serta dalam aktivitas gerakan dalam mengejar tujuannya. Sedangkan konstituensi adalah aktor yang menjadi basis *protagonist* gerakan. Sedangkan *antagonist* adalah mereka yang berdiri sebagai oposisi terhadap konstituen dan *adherent* gerakan (McAdam dan Snow. 1997: xxii-xxiv).

Mobilisasi mikro tidak hanya berkaitan dengan konteks di mana identitas kolektif dan *frame* tindakan dikonstruksi, tetapi juga menyangkut lokus di mana lokalitas diciptakan yang mendukung terbentuknya solidaritas organisasional. Proses mobilisasi mikro secara eksplisit berada di dalam sistem sosial yang memperkuat ketimpangan struktural. Perjuangan pada level mikro terkait dengan pelembagaan kepercayaan dan komitmen loyalitas. Perjuangan berperan dalam meningkatkan kesadaran, dalam proses konfrontasi dan polarisasi melalui mana kepercayaan dan identitas kolektif dimodifikasi dan ditransformasikan dalam gerakan.³¹

³¹ Taylor dan Whittier mengajukan konsepsi utama bagaimana komunitas oposisional mentransformasi para anggota sebagai pelaku politik. Komunitas oposisional atau komunitas identitas politik didefinisikan sebagai "jaringan individu dan kelompok secara longgar berbasis institusional,

Upaya untuk membedakan tindakan individu dalam bentuk “rasional” dan “emosional” atau “irasional” sebenarnya menolak kompleksitas perilaku manusia itu sendiri. Aspek psikososial (kognisi dan afeksi sosial) dan sosiokultural berada dalam kesatuan kapabilitas struktur schemata pelaku. Pertimbangan biaya dan keuntungan itu penting, tetapi menterjemahkan hubungan sosial obyektif ke dalam kelompok kepentingan yang mengalaminya secara subyektif juga penting. Aspek-aspek seperti pengalaman, nilai-nilai inti dan kepercayaan, filsafat kehidupan, dan ideologi selalu berada dalam proses interpretasi (dan afeksi) yang terkait dengan tindakan, pemahaman terhadap peluang dan tantangan di dalam lingkungan sistem sosio-politik (Carmin dan Balsler, 2002).

Cohen (1985) mengajukan pentingnya memperhatikan konsepsi identitas kolektif, solidaritas, dan kesadaran. Ketiganya menyangkut proses hubungan antara individu dengan sistem sosio-kultural yang menurut Gamson dapat dilihat pada level jaringan informal (mobilisasi mikro) (Morris dan Muller, 1992:54). Klandermans mengidentifikasi lima konsep utama gerakan sosial yang memperhatikan aspek-aspek simbolik dari mobilisasi, yakni liberasi kognitif, diskursus publik dan paket ideologi, formasi dan mobilisasi konsensus, pensejajaran frame (*frame alignment*), dan identitas kolektif.³² Ia juga membedakan antara tiga proses konstruksi makna pada level yang berbeda di dalam konteks gerakan, yakni diskursus publik, komunikasi persuasif, dan meningkatnya kesadaran selama episode tindakan kolektif. Masing-masing memiliki dinamikanya sendiri, saling mempengaruhi, sehingga berada dalam proses konstruksi dan rekonstruksi. Seperti proses membentuk dan mentransformasikan kepercayaan kolektif berada dalam cara berbeda. Pada level pertama melalui penyebaran jaringan

keragaman tujuan dan pelaku, dan identitas kolektif yang menawarkan kepentingan bersama berposisi dengan kelompok dominan” (Morris and Muller. Editors. 1992: 13).

³² Liberasi Kognitif (*cognitive liberation*) menurut McAdam (1982) menunjuk pada transformasi kesadaran antar partisipan potensial dalam tindakan kolektif. Ini merupakan suatu perubahan kesadaran dalam tiga hal: (1) sistem yang kehilangan legitimasi, (2) orang-orang yang tadinya fatalistik kemudian mereka mulai menuntut perubahan, dan (3) mereka mengembangkan perasaan baru terhadap kemajuan politik. Diskursus publik (*public discourse*) oleh Gamson (1989) dikaitkan dengan peranan media massa untuk memahami formasi dan aktivasi mobilisasi potensial. Peranan media massa juga penting dalam mendesiminasikan paket ideologi (*ideological packages*) gerakan. Pada awalnya Klandermans (1984) membedakan antara mobilisasi konsensus dan mobilisasi tindakan. Kemudian dia (1988) membedakan mobilisasi konsensus sebagai upaya sengaja yang dilakukan pelaku sosial untuk menciptakan konsensus antar bagian dari populasi, dan formasi konsensus menunjuk pada bertemuannya makna yang tidak direncanakan dalam jaringan sosial dan subkultur. Pensejajaran frame (*frame alignment*) menurut Snow (1986) menunjuk pada frame kognitif individu partisipan menjadi tersejajarkan dengan frame ideologi suatu organisasi gerakan sosial. Identitas kolektif (*collective identity*) menunjuk pada perasaan kelompok yang mendefinisikan diri sebagai siapa “kita” (*ingroup*) (Morris dan Muller, 1992: 79-80).

konstruksi makna; pada level kedua melalui upaya sengaja melakukan persuasi; dan pada level tiga melalui diskusi antar partisipan (Johnston dan Klandermans, 1995: 10).

Teori mobilisasi sumberdaya yang memperhatikan aspek sosial psikologis berhasil dikembangkan oleh McAdam, McCarthy dan Zald (1996) (McAdam, McCarthy dan Zald, 1996: 2), dan kemudian diperkuat oleh McAdam, Tarrow dan Tilly (2001) (dalam McAdam, Tarrow dan Tilly, 2001: 17). Mereka mencoba melakukan sintesis di antara ketiga konsepsi utama yang saling terkait secara dinamis dan yang menentukan muncul dan berkembangnya gerakan sosial, yakni: (1) struktur peluang politik dan tekanan-tekanan terhadap gerakan sosial; (2) bentuk-bentuk organisasi, baik formal maupun informal, yang dapat digunakan untuk melakukan gerakan; dan (3) proses-proses kolektif dari interpretasi, atribusi dan konstruksi sosial yang menjadi mediasi antara peluang dan tindakan kolektif. Ketiga faktor utama tersebut diringkas dalam tiga konsep, yakni: struktur mobilisasi sumberdaya, struktur peluang politik, dan pembingkai kolektif (McAdam, McCarthy dan Zald, 1996: 2).

Meskipun pendekatan sintesis tersebut masih tampak cenderung bias struktural, hingga saat ini masih mendominasi studi gerakan sosial karena mampu menjelaskan dan menawarkan prediksi kuat berbasis dukungan fakta empiris (King, 2008:26). Lagi pula, ketiga konsepsi utama tersebut telah terbukti berguna dalam menjelaskan hasil gerakan sosial. Akan tetapi, dengan banyak kritik yang ditujukan padanya karena ruang lingkungannya yang terlalu luas, maka setiap penelitian yang menggunakan pendekatan ini dihadapkan pada pentingnya mengkonsentrasikan sesuai dengan lingkup gerakan sosial yang diteliti.

2.5. Organisasi Gerakan Sosial dan Organisasi Gerakan Petani

2.5.1. Organisasi Gerakan Sosial

McCarthy dan Zald lebih khusus membedakan antara gerakan sosial dan organisasi gerakan sosial. Organisasi gerakan sosial menurut McCarthy dan Zald lebih kompleks, atau berbentuk organisasi formal yang mengidentifikasi tujuan-tujuannya dengan pilihan terhadap suatu gerakan sosial dan berusaha untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Pandangan McCarthy dan Zald lebih menunjuk pada derajat struktur organisasi gerakan mengarah pada bentuk-bentuk organisasi profesional atau organisasi karir (*carriers of social movement*) yang berkembang dalam gerakan-gerakan sosial masyarakat kontemporer, sehingga memungkinkan mengembangkan konsep "*organizational-*

entrepreneurial model". Model ini memandang bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya mobilisasi semuanya menjadi faktor determinan yang menentukan keberhasilan gerakan sosial (Kauffman and Alfonso, 1997). Sedangkan menurut Tilly, dengan kemungkinan dilakukannya tindakan kolektif secara langsung mempengaruhi organisasi dan peluang para aktor yang terlibat (Kriesi, 1988: 365). Tindakan kolektif muncul dari berlangsungnya reproduksi kondisi-kondisi struktural di dalam masyarakat, maka keberadaan organisasi gerakan menjadi penting sebagai basis proses mobilisasi untuk mengartikulasikan berbagai kepentingan masyarakat.

Dengan tidak mengabaikan definisi McCarthy dan Zald tentang organisasi gerakan sosial, Tilly lebih memaknai konsep "*organization*" tidak harus dalam bentuknya yang formal, tetapi lebih menunjuk pada perkembangan kualitas organisasional yang ditandai dengan semakin menguatnya identitas dan jaringan antar aktor. Dia menyatakan bahwa: "*the more extensive its common identity and internal networks of a group, the more organized the group*" (Tilly, 1978:63). Pandangan Tilly ini sejalan dengan konsep mobilisasi mikro yang banyak dijelaskan oleh McAdam. Munculnya berbagai bangunan jaringan informal dan kemudian berkembang menjadi jaringan organisasi formal merupakan bagian dari dinamika proses organisasional, dimana aktivitas para aktor gerakan dalam kehidupan sehari-hari secara terus menerus mereproduksi struktur kelompok untuk dapat dimobilisasi (Kriesi, 1988: 365).

Suatu gerakan sosial memang tidak dapat direpresentasikan oleh suatu organisasi sosial tertentu. Tetapi harus diakui bahwa wadah organisasional dapat menjadi katalisator penting dalam berbagai aksi kolektif. Pada konteks ini pula perlu menggunakan atau menciptakan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Bahkan tidak sedikit terjadinya akumulasi emosi masyarakat bawah, tampak jelas sebagai fenomena yang diciptakan. Kondisi kemiskinan misalnya, tidak dapat menjadi suatu realitas emosional kecuali jika diartikulasikan sebagai keluhan dan ketidakpuasan (Muukkonen, 1999). Melalui wadah organisasional, maka fenomena tersebut dapat dikondisikan untuk kemudian dapat dimobilisir. Terdapat beberapa variabel utama yang diakui mempengaruhi dinamika struktur organisasional gerakan sosial, yakni sifat gerakan dan tujuannya (ekspresif atau instrumental, isu tunggal atau jamak), bentuk proses rekrutmen (individu atau blok), peranan pemimpin dalam tahapan formatif, dan pengaruh pihak ketiga (Kauffman and Alfonso, 1997).

McCarthy dan Zald (1987) (dalam McAdam dan Scott. 2002:5) mengembangkan perspektif mobilisasi sumberdaya dengan memperhatikan keterkaitan antara struktur dan proses organisasional masyarakat kontemporer, yang di dalamnya terdapat unsur kepemimpinan, struktur administratif, insentif partisipasi, dan alat untuk memperoleh sumberdaya dan dukungan. Dalam konteks memahami maksud, tujuan dan identitasnya, menurut McCarthy dan Zald (1977), terkait dengan model sentralisasi dan desentralisasi organisasi gerakan. Jika tujuan utamanya adalah perubahan personal, maka lebih efektif menggunakan model struktur organisasi terdesentralisir dengan pembagian kerja minimal, karena dapat membangkitkan ikatan-ikatan sosial dan perasaan solidaritas. Sedangkan jika tujuan utamanya adalah perubahan institusional, maka model struktur tersentralisir dengan pembagian kerja yang jelas menjadi lebih efisien, karena berbagai keputusan dapat dibuat lebih cepat (Fuller, 1989).

Pandangan McCarthy dan Zald nampaknya mengarah pada perbedaan karakteristik antara organisasi gerakan kolektivistis (struktur desentralisasi) dan organisasi gerakan birokratis (struktur sentralisasi). Rothschild dan Whitt (1979) (dalam Fuller, 1989) merumuskan tipe ideal organisasi kolektivistis yang membedakannya dari organisasi birokrasi sebagai berikut: 1) otoritas tetap berada di dalam kolektivitas daripada berada di dalam individu atau posisi. Keputusan dibuat berdasarkan proses konsensus dari semua yang berpartisipasi; 2) aturan-aturan diminimalisir. Keputusan dibuat secara ad hoc dan lebih berbasis pada etika substantif daripada berbasis pada keadilan formal; 3) kontrol sosial dicapai melalui pendekatan personalistik dan moralistik atau melalui seleksi personal berorientasi homogenitas, daripada melalui supervisi langsung atau aturan-aturan yang dibakukan; 4) hubungan sosial bersifat "holistik, afektif, dan berdasarkan nilai di dalam diri mereka sendiri", daripada bersifat instrumental dan berbasis peranan; 5) kriteria rekrutmen dan kemajuan adalah berbasis pertemanan, nilai-nilai sosio-politik, dan ciri-ciri personalitas yang relevan terdiri atas latihan khusus atau standar kompetensi umum (universal); 6) struktur insentif didasarkan pada insentif purposive (pemuahan nilai) dan insentif solidaritas, sedangkan insentif material bersifat sekunder; 7) stratifikasi sosial diminimalisir melalui kemilikan dalam prestise, privelese, dan upah; dan 8) perbedaan diminimalisir dengan memelihara peranan-peranan kerja se-umum dan se-holistik mungkin.

Lichbach (1994) mengikuti pandangan Olson, menjelaskan tindakan kolektif dalam tataran analisis biaya dan keuntungan

individual. Lichbach menyatakan bahwa potensi individu berpartisipasi dalam tindakan kolektif dapat direduksi oleh sejumlah faktor, yakni: (1) resiko partisipasi individu dalam perilaku yang tidak dikehendaki (khususnya di dalam lingkungan yang represif secara politik) sering lebih tinggi dari keuntungan yang diperoleh; (2) hasil dari mobilisasi tidak dipengaruhi oleh partisipasi individu secara perseorangan; dan (3) keuntungan yang dicapai melalui mobilisasi tidak tergantung pada partisipasi individu secara perseorangan. Oleh karena itu, berbicara tentang resiko partisipasi individu menurut Lichbach terkait dengan tiga hal, yakni: (1) para individu sering memiliki opsi pilihan lebih dari satu kelompok yang dapat diajak kerjasama; (2) orang-orang memiliki tuntutan lain pada waktu itu yang sering lebih menekan daripada partisipasi kelompok (partisipasi di dalam gerakan dapat mengilangkan upah kerja sehari-hari); dan (3) terlepas dari “*opportunity cost*”, partisipasi individu secara potensial sangat berbahaya karena dapat dipenjarakan, disiksa, atau bahkan dibunuh. Dengan demikian, tujuan dari organisasi gerakan adalah: (1) meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan bagi para partisipan potensial; dan (2) memecahkan masalah “*free rider*” dengan melakukan distribusi keuntungan lebih besar bagi para individu yang nyata berpartisipasi dalam tindakan kolektif (Beasley, 1997).

Metapor ekonomi dalam organisasi gerakan telah diartikulasikan oleh McCarthy dan Zald (1977) ketika berbicara tentang perbedaan antara “*Social Movements*”, “*Social Movement Organizations*”, “*Social Movement Industry*”, dan “*Social Movement Sectors*”. Perbedaan ini didasarkan pada beberapa aspek, yakni: 1) bahwa dalam gerakan sosial tidak pernah sepenuhnya dapat melakukan mobilisasi sumberdaya; 2) secara eksplisit analisisnya terfokus pada aktivitas komponen organisasional; 3) secara eksplisit mengakui bahwa gerakan sosial secara khusus ditampilkan oleh lebih dari satu organisasi gerakan; dan 4) perbedaan itu mengikuti kemungkinan tanggungjawab terhadap muncul dan jatuhnya industri gerakan sosial yang tidak sepenuhnya tergantung pada jumlah gerakan sosial independen atau secara intensif pada berbagai preferensi yang ada di dalamnya (Muukkonen, 1999).

Analisis McCarthy dan Zald juga memperhatikan posisi aktor gerakan sebagai “*adherents*”, “*constituents*”, “*potential beneficiaries*”, “*bystanders*”, dan “*authorities*”.³³ Terdapat perbedaan antara gerakan

³³ *Adherents* adalah individu atau organisasi yang percaya terhadap tujuan gerakan; *constituents* adalah mereka yang memberikan dukungan sumberdaya kepada organisasi gerakan sosial; dan *bystanders* adalah mereka yang bersikap netral terhadap gerakan sosial. Lihat McCarthy dan Zald (dalam Triwibowo, Editor, 2006: 12-13).

sosial yang menfokuskan pada keuntungan *adherent* (organisasi gerakan sosial klasik) dan kesadaran *adherent* (organisasi gerakan profesional). *Konstituents* dari yang terakhir ini tidak mengandalkan pada keuntungan itu sendiri. Derajat organisasi gerakan tergantung pada satu atau lebih kelompok yang mempengaruhi bagaimana organisasi itu dapat memobilisir sumberdaya dan taktik-taktik gerakan yang dipilih (Muukkonen, 1999).

Organisasi gerakan juga dapat berfungsi sebagai “*issue/grievance entrepreneurs*” yang mampu memanfaatkan peluang struktural untuk ‘mengembangkan’ dan ‘memasarkan’ produk gerakan baru. Contohnya perkembangan gerakan-gerakan sosial di Chili dan Brazil menunjukkan semakin mengadopsi bentuk-bentuk aksi yang lebih terlembaga dan dengan tingkat resiko yang lebih rendah untuk menjamin ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan. Proses “*inevitable institutionalism*” ini sering menggiring transformasi organisasi gerakan ke dalam bentuk organisasi yang lebih formal dan terstruktur (Triwibowo, 2006:13).

Sifat dan tujuan gerakan juga mempengaruhi bentuk organisasional dan struktur kepemimpinan. Zald dan Ash (1966) (dalam Fuller, 1989) menyatakan bahwa perbedaan tugas-tugas menuntut perbedaan bentuk struktur organisasional. Struktur organisasi sentralisasi lebih efektif bagi perubahan kelembagaan, tetapi lebih sulit dalam mendorong partisipasi rakyat. Sebaliknya, struktur organisasi desentralisasi lebih mudah merekrut anggota, mencapai kepuasan lebih besar dan dalam memelihara kelompok, tetapi kurang mampu mencapai tujuan-tujuan strategis. Menurut Oberschall (1973) (dalam Fuller, 1989) bahwa struktur organisasional juga ditentukan oleh sifat proses rekrutmen dari tindakan kolektif. Kepemimpinan individual akan memainkan peranan sentral di dalam tahapan formatif, dan sebagai konsekuensinya struktur organisasional akan cenderung lebih hirarkhis dan terpusat.

Dalam proses organisasional, otoritas kolektif digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan konsensus, yang berusaha mengintegrasikan kehidupan “publik” dan “privat”. Hal ini dapat membantu menciptakan hubungan holistik antar aktor. Sedangkan dalam model birokratis dimana para aktor berhubungan satu sama lain terutama pada basis instrumental, sehingga hubungan antar aktor dalam organisasi gerakan lebih bersifat ekspresif. Kondisi ini memberi peluang para aktor untuk saling bertukar pikiran, berbagi perasaan karena partisipasi mereka di dalam berbagai hal, sekaligus dapat menampung berbagai “*hidden agendas*” masing-masing partisipan (Fuller, 1989).

Perdebatan utama tentang organisasi gerakan kontemporer terkait dengan mereka yang menganjurkan “*centralized bureaucratic model*” sebagaimana di kemukakan oleh Gamson (1975), McCarthy dan Zald (1973, 1977) dan “*decentralized informal model*” sebagaimana dikemukakan oleh Gerlach dan Hine (1970) (dalam Jenkins. 1983: 539). Sebagian besar teoritis gerakan sosial kontemporer menyatakan bahwa model struktur organisasi gerakan tersentralisir lebih efektif dalam mencapai tujuan instrumental.³⁴ Menurut Gamson, struktur formal dengan pembagian kerja yang jelas dapat memaksimalkan mobilisasi dengan transformasi persebaran komitmen kedalam peranan yang ditentukan dengan jelas dan bahwa suatu struktur pengambilan keputusan yang tersentralisir meningkatkan kesiapan untuk berjuang dengan mengurangi konflik-konflik internal. Sebaliknya, menurut Gerlach dan Hine bahwa organisasi gerakan desentralisasi dengan pembagian kerja yang minimal, terintegrasi melalui jaringan-jaringan informal dan ideologi adalah lebih efektif. Alasan suatu organisasi gerakan mengadopsi model struktur desentralisasi bukan karena para aktor tidak melihat pentingnya tujuan instrumental bahkan sebagai tujuan sekunder. Mereka mengakui bahwa organisasi gerakan bukan hanya menyediakan tujuan ideologis, tetapi juga tujuan instrumental. Selain itu, dengan segmentasi, struktur organisasi desentralisasi dapat memaksimalkan mobilisasi dengan menyediakan ikatan personal secara ekstensif yang dapat meningkatkan solidaritas dan memperkuat komitmen ideologis. Justru struktur organisasi yang demikian sangat adaptif, memberi harapan dalam pengalaman taktis, memberi ruang kompetisi antar sub-sub kelompok, dan responsif terhadap kooptasi oleh para penguasa (Jenkins. 1983:539).

Dengan demikian, suatu organisasi gerakan dapat memiliki dua tujuan sekaligus, yakni tujuan instrumental dan tujuan ideologis. Mempengaruhi institusi merupakan tujuan utamanya, disamping juga memiliki tujuan ideologis. Seperti perbedaan partisipasi dan membangun struktur kelembagaan yang kuat dalam organisasi gerakan lebih dipandang sebagai tujuan “*expressive*” daripada tujuan instrumental. Pada kenyataannya kedua tujuan tersebut tidak dapat dipandang secara terpisah karena tujuan perubahan personal dan perubahan institusional merupakan dua sisi yang berada pada satu mata uang yang sama (Fuller, 1989). Studi terakhir menghasilkan

³⁴ Perdebatan di dalam literatur tentang gerakan sosial secara umum tertuju pada derajat sentralisasi dalam mendiskusikan internal organisasi dari organisasi gerakan sosial. Konsep “sentralisasi” disini lebih menunjuk pada konsentrasi relatif kekuasaan pengambilan keputusan pada sebagian kecil orang (Fuller. 1989. Op. Cit).

bentuk tengah dari organisasi gerakan, yakni struktur organisasi tersentralisir dengan semi-otonomi tingkat lokal dan otonomi lokal yang dikoordinasikan melalui struktur federatif (Jenkins. 1983: 540).

Organisasi gerakan sosial berupaya untuk meningkatkan kapasitasnya dengan memperoleh akses sumberdaya lebih banyak yang dapat mereka berikan kepada para anggota. Beasley (1997) dalam studinya tentang organisasi gerakan sosial di Mexico menyimpulkan secara hipotetik bahwa berbagai cara yang digunakan organisasi gerakan dalam memobilisasi partisipan, bersamaan dengan ketersediaan sumberdaya dan kompetisinya dengan negara, akan berpengaruh besar terhadap kekuatan gerakan. Organisasi gerakan menggunakan berbagai cara untuk mengurangi resiko partisipan merupakan hal yang esensial. Organisasi gerakan sosial harus difahami dalam konteks bagaimana dapat mengelola: (1) untuk memperoleh akses terhadap barang langka; dan (2) bersaing dengan negara dan organisasi politik lain dalam memecahkan permasalahan tindakan kolektif.

2.5.2. Organisasi Gerakan Petani

Sebagaimana pandangan McCarthy dan Zald (1977), dibedakan antara gerakan sosial dan organisasi gerakan sosial. Organisasi gerakan sosial lebih kompleks berbentuk organisasi formal yang mengidentifikasi tujuan-tujuannya dengan pilihan terhadap suatu gerakan dan berusaha melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Ini menunjuk pada bentuk organisasi profesional yang memandang bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya mobilisasi menjadi faktor diterminan gerakan sosial (Kauffman dan Alfonso, 1997).

Pandangan Charles Tilly lebih lentur bahwa setiap aksi kolektif adalah terorganisir meskipun sangat sederhana. Gerakan sosial dapat dilihat dari perkembangan kualitas organisasionalnya ditandai dengan semakin menguatnya identitas dan jaringan antar pelaku. Menurut Tilly (1978:63), semakin ekstensif identitas bersama dan jaringan internal suatu kelompok, maka semakin terorganisir kelompok tersebut. Pandangan Tilly tersebut sejalan dengan konsep mobilisasi mikro dari McAdam. Munculnya bangunan jaringan informal berkembang menjadi organisasi formal merupakan bagian dari dinamika proses organisasional, di mana aktivitas para pelaku gerakan dalam kehidupan sehari-hari secara terus menerus mereproduksi struktur kelompok untuk dapat dimobilisir (Kriesi, 1988).

Menurut Scott (1993:305), gerakan petani sebagai gerakan sosial memiliki ciri-ciri antara lain: (a) lebih terorganisir, sistematis, dan

kooperatif; (b) berprinsip atau tanpa pamrih; (c) memiliki akibat-akibat revolusioner; dan (d) mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi (Mustain, 2007:24). Kemungkinan terjadinya gerakan petani menurut Dahrendorf dipengaruhi oleh tiga prasyarat kondisional, yaitu: (1) kondisi teknis berupa munculnya sejumlah orang tertentu yang mampu merumuskan dan mengorganisir kepentingan *latent* menjadi kepentingan *manifest*; (2) kondisi politis berupa ada tidaknya kebebasan politik yang diberikan oleh masyarakat; dan (3) kondisi sosial berupa adanya sistem komunikasi yang memungkinkan para anggota dari suatu kelompok selalu berkomunikasi dengan mudah (Nasikun, 1991: 21-22). Pandangan Dahrendorf tersebut dimodifikasi oleh Ngadisah, menjadi syarat kepemimpinan (kondisi teknis), syarat politik (kondisi politis), syarat teknis (kondisi sosial), dan syarat lingkungan strategis (Ngadisah, 2003: 309).

Menyimak pendapat di atas berarti bahwa wadah organisasi dapat menjadi katalisator penting dalam aksi kolektif petani. Melalui organisasi gerakan dapat memproduksi isu-isu strategis petani. Kemiskinan petani, misalnya tidak dapat menjadi suatu realitas emosional kecuali jika diartikulasikan sebagai keluhan dan ketidakpuasan. Oleh karena itu, akumulasi ketidakpuasan petani dimungkinkan sebagai fenomena yang diproduksi atau dikondisikan. Terdapat beberapa variabel utama yang mempengaruhi perkembangan struktur gerakan, yakni sifat gerakan dan tujuannya (ekspresif atau instrumental, isu tunggal atau jamak), bentuk proses rekrutmen (individu atau blok), peranan pemimpin dalam tahapan formatif, dan pengaruh pihak ketiga.

McCarthy dan Zald (1987) memperhatikan keterkaitan antara struktur dan proses yang di dalamnya terdapat unsur kepemimpinan, struktur administratif, insentif partisipasi, dan alat untuk memperoleh sumberdaya dan dukungan (McAdam dan Scott, 2002: 5). Dalam konteks memahami maksud, tujuan dan identitasnya, McCarthy dan Zald (1977) membedakan antara model sentralisasi dan desentralisasi. Jika tujuan utama gerakan adalah perubahan personal, maka lebih efektif menggunakan model struktur desentralisasi dengan pembagian kerja minimal, karena dapat membangkitkan ikatan-ikatan sosial dan perasaan solidaritas. Sedangkan jika tujuan utama gerakan adalah perubahan institusional, maka model struktur tersentralisir dengan pembagian kerja yang jelas menjadi lebih efisien, karena berbagai keputusan dapat dibuat lebih cepat (Fuller, 1989).

Pandangan McCarthy dan Zald nampaknya mengarah pada perbedaan karakteristik antara organisasi kolektifis (struktur

desentralisasi) dan organisasi birokratis (struktur sentralisasi). Rothschild dan Whitt (1979) (dalam Fuller, 1989) merumuskan tipe ideal organisasi gerakan yang membedakannya dari organisasi birokratis berdasarkan aspek otoritas, aturan, kontrol sosial, hubungan sosial, kriteria rekrutmen dan kemajuan, struktur insentif, stratifikasi sosial, dan meminimalisir perbedaan. Standar ukurannya adalah: 1) otoritas tetap berada di dalam kolektivitas daripada berada di dalam individu atau posisi. Keputusan dibuat berdasarkan proses konsensus dari semua partisipan; 2) aturan-aturan diminimalisir. Keputusan dibuat secara *ad hoc* dan lebih berbasis pada etika substantif daripada berbasis pada keadilan formal; 3) kontrol sosial dicapai melalui pendekatan personalistik dan moralistik atau melalui seleksi personal berorientasi homogenitas, daripada melalui supervisi langsung atau aturan-aturan yang dibakukan; 4) hubungan sosial bersifat “holistik, afektif, dan berdasarkan nilai di dalam diri mereka sendiri”, daripada bersifat instrumental dan berbasis peranan; 5) kriteria rekrutmen dan kemajuan adalah berbasis pertemanan, nilai-nilai sosio-politik, dan ciri-ciri personalitas yang relevan terdiri atas latihan khusus atau standar kompetensi umum (universal); 6) struktur insentif didasarkan pada *insentif purposive* (pemenuhan nilai) dan insentif solidaritas, sedangkan insentif material bersifat sekunder; 7) stratifikasi sosial diminimalisir melalui kemilikan dalam prestise, privelese, dan upah; dan 8) perbedaan diminimalisir dengan memelihara peranan-peranan kerja se-umum dan se-holistik mungkin.

Menurut Zald dan Ash (1966) (dalam Fuller, 1989), struktur organisasi sentralisasi lebih efektif bagi perubahan kelembagaan, tetapi lebih sulit dalam mendorong partisipasi rakyat. Sebaliknya, struktur organisasi desentralisasi lebih mudah merekrut anggota, mencapai kepuasan lebih besar dan dalam memelihara kelompok, tetapi kurang mampu mencapai tujuan strategis. Kepemimpinan individual memainkan peranan sentral di dalam tahapan formatif, dan sebagai konsekuensinya struktur organisasinya cenderung lebih hirarkhis dan terpusat.

Derajat organisasi gerakan tergantung pada satu atau lebih kelompok yang mempengaruhi bagaimana organisasi itu dapat memobilisasi sumberdaya dan taktik-taktik gerakan yang dipilih (Muukkonen, 1999). Organisasi gerakan juga dapat berfungsi sebagai ‘*issueataugrievance entrepreneurs*’ yang mampu memanfaatkan peluang struktural untuk ‘mengembangkan’ dan ‘memasarkan’ produk gerakan yang baru. Contohnya perkembangan gerakan-gerakan sosial di Chili dan Brazil semakin mengadopsi bentuk-bentuk aksi yang lebih terlembaga dan dengan tingkat resiko yang lebih rendah untuk

menjamin ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan. Tetapi proses ini sering menggiring transformasi organisasi gerakan ke dalam bentuknya yang lebih formal dan terstruktur (Triwibowo, 2006: 13).

Dalam proses organisasional, otoritas kolektif digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan konsensus, yang berusaha mengintegrasikan kehidupan “publik” dan “privat”. Hal ini dapat membantu menciptakan hubungan holistik antar pelaku. Sedangkan dalam model birokratis di mana para pelaku saling berhubungan terutama pada basis instrumental, sehingga hubungan antar pelaku dalam organisasi gerakan lebih bersifat ekspresif. Kondisi ini memberi peluang para pelaku untuk saling bertukar pikiran, berbagi perasaan karena partisipasi mereka di dalam berbagai hal, sekaligus dapat menampung berbagai “*hidden agenda*” masing-masing partisipan (Fuller, 1989).

Memang ada perbedaan antara yang menganjurkan “*centralized bureaucratic model*” seperti Gamson (1975), McCarthy dan Zald (1973, 1977) dan “*decentralized informal model*” seperti Gerlach dan Hine (1970) (dalam Jenkins, 1983: 539). Sebagian besar teoritis gerakan sosial lebih setuju model tersentralisir karena lebih efektif dalam mencapai tujuan instrumental.³⁵ Sebaliknya, model desentralisasi dengan pembagian kerja yang minimal, terintegrasi melalui jaringan informal dan ideologi menjadi lebih efektif. Alasan model desentralisasi bukan karena para pelaku tidak melihat pentingnya tujuan instrumental, tetapi dianggap sebagai tujuan sekunder.

Sebagai organisasi gerakan sekaligus memiliki dua tujuan ideologis dan instrumental. Seperti membangun struktur kelembagaan organisasi gerakan yang kuat lebih dipandang sebagai tujuan “*expressive*” daripada tujuan instrumental. Pada kenyataannya kedua tujuan tersebut tidak dapat dipandang secara terpisah karena tujuan perubahan personal dan perubahan institusional merupakan dua sisi yang berada pada satu mata uang yang sama (Fuller, 1989). Studi terakhir menghasilkan bentuk tengah, yakni struktur organisasi tersentralisasi dengan semi-otonomi tingkat lokal dan otonomi lokal yang secara erat dikoordinasikan melalui struktur federatif (Jenkins, 1983: 540). Disini yang penting adalah organisasi gerakan sosial perlu difahami dalam konteks bagaimana dapat mengelola: (1) untuk memperoleh akses terhadap barang langka; dan (2) bersaing dengan

³⁵ Perdebatan di dalam literatur tentang gerakan sosial secara umum tertuju pada derajat sentralisasi dalam mendiskusikan internal organisasi dari organisasi gerakan sosial. Konsep “sentralisasi” disini lebih menunjuk pada konsentrasi relatif kekuasaan pengambilan keputusan pada sebagian kecil orang (Abigail A. Fuller, 1989).

negara dan organisasi politik lain dalam memecahkan permasalahan yang menjadi dasar tindakan kolektif (Beasley, 1997).

2.6. Perkembangan Organisasi Gerakan Petani

Secara umum gerakan sosial, lebih khusus gerakan petani, mengalami pasang surut, berjalan pada siklusnya bahkan hingga pada titik kematian. Mauss menyimpulkan ada lima tahapan pola gerakan sosial yang merupakan bentuk ideal, yakni *incipiency*, *coalescence*, *institutionalization*, *fragmentation*, dan *demise* (Mauss, 1975: 61-66; Harper, 1989: 147). Dalam teori perkembangan linier dari Weber, Troeltseh, dan Michels dan teori "*life cycle*" atau "*natural history*" dari Hoper (1950), semua menyimpulkan bahwa ketika gerakan sosial semakin melekat pada sistem sosial yang mapan maka akan berubah menjadi konservatif.³⁶ Dia akan menjadi gerakan konsensus dan tidak dapat dipakai sebagai katalis perubahan sosial (Morris dan Muller, 1992: 205). Kondisi ini berbeda ketika program-program gerakan belum terlembagakan tetapi organisasi gerakan sudah melekat pada sistem sosial yang mapan. Gerakan sosial yang demikian berjalan di tempat (stagnan) karena seakan gerakannya berhasil tetapi sebenarnya secara substantif mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan.

Organisasi gerakan petani sebagai katalis gerakan petani dapat dipandang sebagai sumberdaya yang mencerminkan perannya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat petani, terutama komunitas petani basis. Dinamika organisasional gerakan petani dapat dilihat dari tiga peran utamanya, yakni sebagai pengimbang kekuatan negara dan swasta dalam struktur hubungan sosial agraria, sebagai kekuatan gerakan pemberdayaan masyarakat petani, dan sebagai lembaga perantara antara masyarakat petani dengan negara dan swasta maupun dengan segenap lembaga pendukung baik dalam konteks jejaring (*networks*) maupun koalisi.³⁷ Dinamika organisasional tersebut tidak terlepas dari dimensi internal dan eksternal. Culla (2006) dan Miller dan Covey (2005) mengukurnya dari tingkat kemandirian (*autonomy*), swadaya (*self-supporting*), swasembada (*self-generating*), legitimasi, dan kredibilitas. Culla (2006: 31) menekankan pada kapabilitas masyarakat sipil dan dalam studinya ditujukan pada kapabilitas Ornop, sama dengan Miller dan Covey (Miller dan Covey,

³⁶ Hoper menjatakan bahwa gerakan sosial berkembang dalam empat tahapan, yakni, "*preliminary stage*", "*popular stage*", "*formal stage*", "*institutional stage*" (Harper. 1989: 146-147).

³⁷ Ketiga peran organisasi gerakan petani tersebut diadaptasi dari kerangka konseptual Rahmat (Lihat Rahmat, 2003: 34-37). Konsepsi tersebut juga diadaptasi oleh Culla dalam studinya tentang peran masyarakat sipil di Indonesia (Lihat Culla, 2006: 31).

2005: 15-17). Kemandirian menunjuk pada kemampuannya dalam mengembangkan diri tanpa tergantung pada pihak lain, yakni: 1) kemampuan dalam mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan pihak lain; dan 2) kondisi, reaksi atau perkembangan organisasi yang mampu mengelola dan mengatur diri sendiri secara bebas. Swadaya menunjuk pada tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan tertentu berdasarkan prakarsa sendiri disertai kemampuan memobilisasi sumberdaya materi sendiri tanpa harus tergantung pada pihak lain atau sumberdaya dari luar. Swasembada menunjuk pada tingkat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sendiri berdasarkan sumberdaya yang dimiliki. Legitimasi menunjuk pada siapa saja yang secara nyata menjadi anggota organisasi tani dan sejauh mana mereka mengakui keberadaan organisasi gerakan tersebut. Kredibilitas menunjuk pada hubungan antara organisasi gerakan dengan konstituennya, ukuran konstituen, dan seberapa jauh bertanggung jawab kepada konstituennya.

Pada sisi lain, Konsorsium Pembaharuan Agraria mengukurnya dari enam prinsip utama, yakni demokrasi, kepemimpinan, kemandirian, garis massa, kritik-otokritik, kesatuan dan persatuan. Prinsip “demokrasi” mengandung arti bahwa “kepemimpinan pusat yang berlandaskan demokrasi”, dan sebaliknya, “demokrasi yang dipimpin suatu program perjuangan yang terpusat”. Konsep demokrasi merupakan suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Prinsip “kepemimpinan” berarti kemampuan mengihindarkan diri terpisah dari petani, dan mampu sungguh-sungguh memimpin keseluruhan massa petani untuk melangkah maju. Prinsip “kemandirian” berarti kemampuan diri organisasi dalam menjawab persoalan-persoalan tanpa harus meminta ijin dari organisasi yang lebih tinggi. Prinsip “garis massa” berarti para kader harus selalu berada di tengah-tengah massa petani. Prinsip “kritik-otokritik” berarti kemampuan menunjukkan kesalahan orang lain dengan cara membandingkan antara prinsip perjuangan dengan praktek yang akan dilakukan, dan kemampuan menunjukkan kesalahan diri sendiri dengan cara membandingkan antara prinsip perjuangan dengan praktek yang dilakukan. Sedangkan prinsip “kesatuan dan persatuan” berarti dalam kerja dan kegiatan praktek politiknya di tengah massa, segala pandangan dan pikiran yang muncul akan berada dalam satu garis politik yang memperjuangkan kepentingan massa petani (Hardiyanto dan Wiradi, 2001: 11-17).

Lebih rinci Kriesi (McAdam, McCarthy and Zald, 1996: 154-156), mengajukan empat parameter analisis perkembangan organisasional gerakan sosial dilihat dari faktor internal dan eksternal. Keempat

parameter tersebut adalah pertumbuhan dan penurunan organisasional, strukturasi organisasional internal, strukturasi organisasional eksternal, dan orientasi tujuan dan repertoire tindakan.

Suatu organisasi gerakan petani sangat tergantung pada konstituennya, selama aktivitas utamanya terkait dengan mobilisasi konstituen, khususnya petani basis. Dengan menyediakan insentif selektif maka menjadi kurang tergantung pada fluktuasi komitmen individual dan lebih mampu memperluas basis sumberdaya mobilisasi. Dalam hubungannya dengan konstituen, seperti dengan jaringan pendukung, dengan aliansi dan dengan para pemegang otoritas semua memiliki sisi ambivalensi (sisi kekuatan dan kelemahan) dalam dinamika gerakan petani. Salah satu kecenderungannya dapat mengarah pada bentuk "*autopoietic systems*", di mana masing-masing aktor gerakan berorientasi pada kepentingannya daripada kepentingan gerakan petani (Paradakis, 1988: 440). Pada kondisi ini karakter anggota tidak terlembagakan dan lemah komitmen mereka terhadap kemajuan gerakan petani. Kepentingan rasional dapat mempengaruhi kualitas hubungan antar elemen aktor dalam struktur gerakan. Atau bahkan mengarah pada konflik dan fragmentasi karena masing-masing memiliki logika rasionalitas berbasis pada kepentingannya sendiri.

Perkembangan organisasi gerakan petani dengan memperhatikan faktor internal dapat dibedakan antara dinamika organisasional internal dan tipe gerakan sosial, sedangkan dengan memperhatikan faktor eksternal dapat dilihat keterkaitannya dengan lingkungan lebih luas (ekonomi, politik dan kultural) (McAdam, McCarthy and Zald, 1996: 157). Menurut Zald dan Asch (1966) (dalam Harper, 1989: 150), perkembangan struktur mobilisasi dan peluang politik dapat mengarahkan gerakan lebih memperhatikan eksistensi organisasi daripada mencapai tujuannya semula. Sedangkan pada konteks adaptasi sistem sosiokultural, maka perkembangan organisasi gerakan petani cenderung berjalan pada jalur "*accommodationist*". Pada kondisi demikian organisasi gerakan petani dihadapkan pada dilema antara tetap memperhatikan kepentingan konstituen, visi, misi dan kerjanya, dan memenuhi kepentingan para pendukung (termasuk kepentingan lawan) (Kilby, 2004: 4). Bahkan dalam jangka panjang stabilisasi organisasi gerakan akan rentan jika pola kepemimpinan lebih tertutup mengandalkan pada figur tokoh personal karena minimnya kaderisasi (Fahrudin, 2003).

Mengacu pandangan Schlager (1995:243-270), dalam gerakan petani selain bangunan jaringan juga penting membangun koalisi. Koalisi dalam hal tertentu sama dengan jaringan tetapi lebih bersifat

sementara. Faktor lain adalah ikatan solidaritas dengan memasukkan dimensi rasional.³⁸ Dalam kaitannya dengan jaringan gerakan maka solidaritas rasional lebih bermakna dinamis (Kadushin, 2004). Dinamika jaringan dan solidaritas rasional betapapun kecilnya terkait dengan kepentingan aktor dalam relasi kekuasaan yang dapat mengganggu aktivitas dan stabilitas organisasi gerakan petani.

Fenomena tersebut ini terjadi pada banyak kasus organisasi gerakan sosial di Indonesia, sebagaimana hasil analisis Törn-quist (2008) terhadap arah kedencerungan perilaku gerakan-gerakan demokrasi pada umumnya. Kondisi tersebut dapat difahami, karena menurut Milucci perilaku organisasi gerakan tidak bersifat "*given*" dan deterministik yang berada di luar kontrol kesadaran pelaku aktif, tetapi sebagai tampilan hasil proses konstruksi yang terkait dengan persepsi, orientasi, dan pilihan para pelaku yang disesuaikan dengan lingkungan sosiokulturalnya (Kriesi, 1996: 350).

³⁸ Dalam perkembangannya secara analitik dibedakan antara konsep "*social solidarity*", "*social exchange*", "*instrumental exchange*", dan "*instrumental co-ordination*" (Lihal Widegren, 1997: 755-771). Dalam konteks organisasi gerakan petani yang di dalamnya syarat kepentingan beragam pelaku, maka tidak memungkinkan memakai konsep solidaritas sosial dalam maknanya yang murni, melainkan perlu didaptasikan dengan ketiga konsep lain tersebut.

Kontradiksi dan Negasi Struktural: *Mainstream* Sistem Sosial Agraria Dominan

3.1. Pendahuluan

Masyarakat atau komunitas petani dan selanjutnya disebut dengan istilah “petani” saja, sebagai suatu organisasi sistem yang secara institusional menjadi elemen inti dari sistem sosial agraria. Dia memiliki prinsip-prinsip struktural yang khas dalam memandang tanah pertanian, baik pada ruang makro kosmos maupun mikro kosmos. Tanah pertanian merupakan *substratum* kehidupan petani. Hubungan antara petani dengan tanah pertanian sama tuanya dengan keberadaan petani itu sendiri. Ketika manusia hidup menetap dan mengenal bercocok tanam maka manusia dengan sendirinya menyatu dengan wilayah tempat tinggal dan lahan pertaniannya. Tempat tinggal yang dikelilingi lahan pertanian ini kemudian terbangun totalitas organisasi sistem sosiokultural yang berada dalam wilayah non fisik dan tanah pertanian pada lingkup teritorial. Dari proses itu kemudian berkembang menjadi masyarakat adat, dengan penguasaan tanah pertanian sistem komunal dan bersifat sosialis (Hartoyo, 2006: 13).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa petani memiliki tata kehidupan dan kepentingannya sendiri yang menyatu dengan lingkungannya. Tanah pertanian bagi petani tidak semata-mata dipandang sebagai sumberdaya produktif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi sekaligus berfungsi sebagai sumber kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri.³⁹ Begitu menyatunya

³⁹ Menurut Shanin, bahwa petani memiliki ciri-ciri khusus: (1) mempunyai hubungan khusus dengan tanah dengan ciri spesifik produksi pertanian berakar pada keadaan khusus petani, (2) usaha petani keluarga merupakan satuan dasar pemilihan produksi dan konsumsi serta kehidupan sosial tertentu, (3) kepentingan pokok pekerjaan dalam menentukan kedudukan sosial, peranan dan kepribadian petani dikenal secara baik oleh masyarakat yang bersangkutan, (4) struktur sosial desa merupakan keadaan khusus bagi daerah tertentu dan waktu tertentu, dan (5) masyarakat petani merupakan sebuah kesatuan sosial pra-industri yang memindahkan unsur-unsur spesifik struktur sosial ekonomi dan kebudayaan lama ke dalam masyarakat kontemporer (Nasikun, dkk., 1992. *Struktur Kelas*

tanah pertanian dengan kehidupan petani, sehingga membentuk suatu totalitas kehidupan yang sangat sarat makna mendasar. Banyak ahli yang berkesimpulan bahwa tanah pertanian bagi petani adalah sebagai urat nadi, nafas kehidupan, ideologi, identitas, martabat, kekuasaan, dan sumber mata pencaharian.

Dalam ungkapan Jawa dikatakan: “*sedumuk bathuk senyari bumi, ditohing pecahing dodo dan wutahing ludiro*”. Artinya, hubungan antara kepala petani dan bumi (tanah) amat sangat dekat, dan mereka akan berjuang mati-matian jika tanah pertaniannya diganggu pihak lain sampai pada tetesan darah terakhir. Ungkapan ini menunjukkan bahwa makna tanah pertanian bagi petani berhubungan dengan kebutuhan dasar yang bersifat ontologis. Makna ontologis petani terhadap tanah pertanian berarti kebebasan yang dapat menciptakan harmoni kehidupan. Makna kebebasan ini mengandung unsur rasa aman, tenteram dan damai, baik di dalam sistem sosialnya sendiri maupun dalam hubungannya dengan sistem sosial yang lebih luas.

Oleh karena itu, eksistensi petani sebenarnya lebih dekat dengan sifat-sifat yang cenderung mengarah pada romantisme kehidupan daripada sifat-sifat yang membangkang atau melawan. Sejauh kebutuhan ontologis petani sebagai produsen pertanian dengan penguasaan efektif atas tanah tidak terganggu, maka hubungannya dengan pihak-pihak lain sangat sedikit kemungkinan terjadi konflik. Hal ini terjadi karena tidak ada kontak antara masing-masing pihak yang memberi konteks bisa terjadi konflik.

Dalam struktur sosial agraria tradisional, sistem *patronage* ternyata mampu bertahan lama, karena dalam banyak hal keberadaan *patron* (petani kaya) oleh *klien* (petani miskin, tuna kisma dan buruh tani) dirasakan lebih bersifat membantu daripada bersifat eksploitatif. Mereka berinteraksi dalam suatu lingkungan sosiokultural yang membentuk sistem sosial agraria yang dikonstruksi bersama, sehingga hubungan di antara mereka dirasakan saling menguntungkan.⁴⁰ Konflik-konflik agraria terjadi jika antara kontak dengan konteks terjadinya konflik saling berhubungan. Seperti terjadinya krisis

dan *Perubahan Sosial di Jawa*. Yogyakarta: Seri Monografi FISIPOL UGM, No. 3/1992, dalam Nurhasim, 1997)

⁴⁰Pernyataan tersebut mengarah pada dua makna yang kontradiktif, karena kondisi yang dianggap saling menguntungkan dalam hubungan patron - klien berada pada situasi yang dikonstruksi dominan sepihak dan tentunya lebih berpihak (fungsional) pada kepentingan patron. Kelanggengan hubungan patron - klien harus diikuti oleh kesadaran klien yang sejalan dengan mindset mereka yang selalu menerima apa adanya dalam pola hubungan tersebut. Dalam perspektif Marxian, pola hubungan patron-klien bersifat eksploitatif, karena di dalam prakteknya terjadi ketimpangan akses, partisipasi dan kontrol atas sumber-sumber agraria. Patron terus menerus menekan perkembangan kesadaran klien agar selalu membenarkan tindakan-tindakan patron dan selalu berada pada pola hubungan yang dibangun dan sudah mapan (Popkin. 1979: 11-23).

subsistensi petani dalam jangka pendek, atau terjadi perubahan mendadak yang mengancam kehidupannya, maka situasi ini dapat menggerakkan petani melakukan perlawanan atau terlibat di dalam aksi-aksi kolektif (Popkin, 1979:72-78). Situasi tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat mendorong meningkatnya derajat kontradiksi dan negasi struktural, yang berarti juga mengabaikan unsur mediasi. Fenomena ini masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia hingga saat ini, khususnya di Lampung, dan terutama di wilayah pedesaan. Petani sering dihadapkan pada konflik-konflik pertanian berkepanjangan karena tidak diselesaikan secara tuntas di lapangan, bahkan sering terjadi konflik akumulatif dan dalam lingkaran kekerasan.⁴¹

3.2. Pola Dasar Sistem Sosial Agraria

Sebagaimana sudah disajikan pada penjelasan sebelumnya bahwa terdapat dua jenis hubungan agraria, yaitu hubungan teknis dan hubungan sosial agraria. Di dalam hubungan sosial agraria difokuskan pada tiga pelaku atau subyek utama, yaitu negara (pemerintah), swasta (perusahaan), dan petani.⁴² Ketiganya dilihat sebagai suatu organisasi sistem atau institusi sosial yang masing-masing memiliki prinsip-prinsip struktural tersendiri yang berbeda secara khas, bahkan dapat berbeda secara diametral. Oleh karena itu, totalitas hubungan di antara ketiga institusi sosial tersebut sebagai sistem sosial agraria, di dalamnya melekat unsur-unsur kontradiksi, negasi dan mediasi struktural.

Negara merupakan suatu institusi politik yang memiliki legitimasi atas “penguasaan” sumberdaya tanah sebagai obyek agraria.

⁴¹ Dalam tulisan Ichsan Malik, dkk., (2003. Op.cit.: 148) dibedakan antara bersengketa dan berkonflik. Bersengketa merupakan suatu situasi persaingan antara dua atau lebih orang atau kelompok yang ingin meletakkan haknya atas suatu benda atau kedudukan. Sedangkan berkonflik merupakan suatu situasi yang menunjukkan adanya praktek-praktek penghilangan hak seseorang atau lebih dan atau kelompok atas suatu benda atau kedudukan. Secara sosiologis, sesuai dengan pandangan Simon Fisher, dkk. (2000:4-5), bahwa bersengketa sudah masuk kategori “konflik di permukaan” karena mengandung unsur ketegangan, pertentangan dan upaya saling mencari menang. Sedangkan konflik kekerasan termasuk konflik terbuka yang mengandung unsur menindas, yakni meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.

⁴² Ketiga kategori institusi sosial ini didasarkan pada pembagian masyarakat menurut Linz dan Stepan (1996) dan Miller dan Covey (2005). Menurut Linz dan Stepan, masyarakat dibagi menjadi tiga kelompok, yakni (1) masyarakat ekonomi yang oleh Antonio Gramsci disebut dengan masyarakat privat; (2) masyarakat politik selaku institusi yang memiliki instrumen untuk mendominasi; dan (3) masyarakat sipil yang merupakan perwujudan rakyat kebanyakan (proletar) sebagai sistem kelas sosial yang dihegemoni. Sedangkan Miller dan Covey membagi masyarakat secara jelas lebih menunjuk pada hubungan timbal balik antara tiga sektor, yakni masyarakat sipil, negara dan pasar (Linz and Stepan, 1996: 14, dalam Widjajanto, dkk., 2007: 46-47; Miller dan Covey, 2005: 29-31).

Menurut konstitusi, yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945, bahwa negara dengan kapasitas politiknya bersumber pada komitmen terhadap makna “menguasai” atas obyek agraria yang ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip kerjanya adalah negara sebagai suatu institusi yang secara politik menguasai obyek agraria. Atas dasar penguasaan obyek agraria tersebut, kemudian negara wajib mengatur sebaik-baiknya sesuai dengan amanah konstitusi dengan melakukan reproduksi struktur signifikansi (*schemata, mindset*), struktur dominasi sumberdaya otoritatif (politik) dan alokatif (ekonomi), dan struktur legitimasi agraria.⁴³ Semuanya diarahkan pada pencapaian orientasi tujuan ideologis, yakni untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip kerja tersebut secara ringkas dapat dijelaskan melalui mekanisme *politics – structure – politics*.

Tabel 2 Perbedaan Prinsip Struktural Antar Elemen Sistem Sosial Agraria

Elemen Sistem	Prinsip-Prinsip Struktural Dalam Sistem Sosial Agraria
Negara	Sebagai institusi politik yang “menguasai” obyek agraria ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (politik agraria).
Perusahaan	Sebagai institusi ekonomi yang mampu mengelola obyek agraria dalam skala besar dan luas berbasis pada prinsip-prinsip manajemen ekonomi moderen (ekonomi agraria moderen).
Petani	Sebagai institusi sosial yang menempatkan obyek agraria yang secara tradisional melekat di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari (sosio-kultural agraria tradisional).

Sumber: Hartoyo, 2011a

Perusahaan merupakan institusi ekonomi memiliki kapasitas mengelola obyek agraria berbasis pada prinsip-prinsip manajemen ekonomi dan teknologi moderen. Prinsip ekonomi bagi perusahaan adalah dengan biaya sekecil-kecilnya untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip kerjanya adalah melalui uang atau modal atau kapital digunakan untuk mengorganisasikan kegiatan bisnis yang akan menghasilkan barang (komoditi), kemudian dijual ke pasar untuk

⁴³ Uraian lebih mendalam tentang makna konsep signifikansi, struktur dominasi sumberdaya politik dan ekonomi dan struktur legitimasi dijelaskan oleh Anthony Giddens dalam bukunya berjudul *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press, 1984. Konsepsi teoretik strukturasi Giddens ini digunakan sebagai alat analisis utama beberapa bab dalam buku ini.

menghasilkan sejumlah uang (*money - commodity - money*). Sedangkan petani merupakan institusi sosial memiliki kapasitas mengelola tanah sebagai obyek agraria berbasis pada prinsip-prinsip sosiokulturalnya. Prinsip kerjanya adalah melalui tanah pertanian yang secara aktif dikuasai dan dikelolanya maka petani menghasilkan komoditi yang dapat dipertukarkan dengan uang yang sebanding, kemudian uang itu digunakan untuk membeli beberapa komoditi lain yang sebanding (*commodity - money - commodity*).⁴⁴

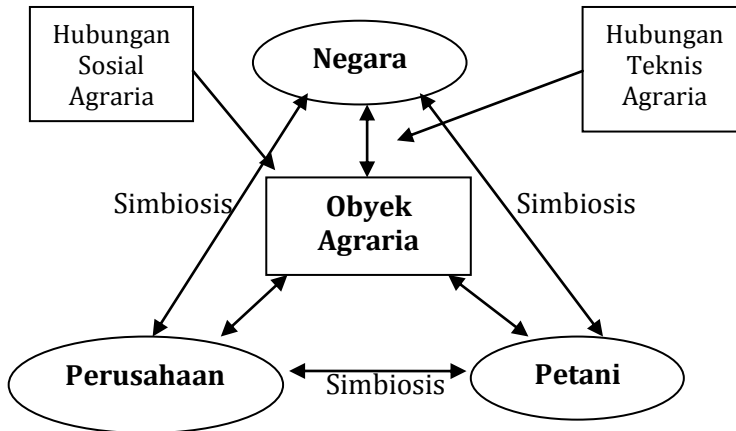
Guna memenuhi kepentingan bersama dalam aspek kehidupan berbasis obyek agraria, maka ketiga elemen institusional tersebut perlu suatu bangunan sistem sosial yang disebut dengan “Sistem Sosial Agraria”. Konsep ini diartikan sebagai suatu pola hubungan sosial yang dikonstruksi oleh para pelaku atau kolektivitas pelaku dari ketiga elemen institusi sosial tersebut berdasarkan prinsip-prinsip strukturalnya masing-masing yang diorganisasikan sebagai praktek-praktek sosial agraria sehari-hari.

Sistem sosial agraria di Indonesia menurut konstitusi menunjukkan bahwa negara, perusahaan dan petani secara historis diciptakan berada dalam posisi hubungan yang tidak seimbang. Institusi negara secara politik diposisikan berada di atas institusi perusahaan dan petani. Negara mempunyai kekuasaan yang sah atas obyek agraria untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, negara dijamin hak monopolinya untuk menggunakan kekerasan, baik secara fisik maupun administratif dalam konteks mencapai tujuan kemakmuran bersama secara setara dan adil. Sedangkan hubungan antara perusahaan dan petani pada dasarnya masing-masing memiliki hubungan yang sejajar, karena keduanya berada dalam wilayah politik negara yang sama (Indonesia). Melalui negara, maka kedua elemen perusahaan dan petani dijamin dapat berhubungan dengan setara dan adil dalam penguasaan obyek agraria.

Logika rasional institusional tersebut didasarkan pada suatu asumsi bahwa negara menguasai obyek agraria yang secara politik mampu mengembangkan unsur mediasi untuk mencapai kepentingan bersama dan dapat menjembatani antara kepentingan perusahaan dan petani. Konsekuensinya adalah semakin kuat posisi perusahaan dalam hubungannya dengan petani, maka keduanya semakin memperkuat posisi negara. Pada situasi seperti itu ketiga institusi tersebut sama-sama dapat memperoleh manfaat secara adil terhadap sumber-sumber agraria. Oleh karena itu, hubungan antara ketiga elemen institusional

⁴⁴ Uraian cara kerja masing-masing organisasi sistem atau institusi sosial di atas didasarkan pada pemikiran Marx. Cara produksi perusahaan oleh Marx disebut produksi kapitalis, sedangkan cara produksi petani sesuai dengan cara produksi komoditi sederhana (Sanderson, 2000: 221).

tersebut dalam hubungannya dengan obyek agraria cenderung mengarah pada pola dasar sistem sosial agraria simbiosis mutualisme (Gambar 2).

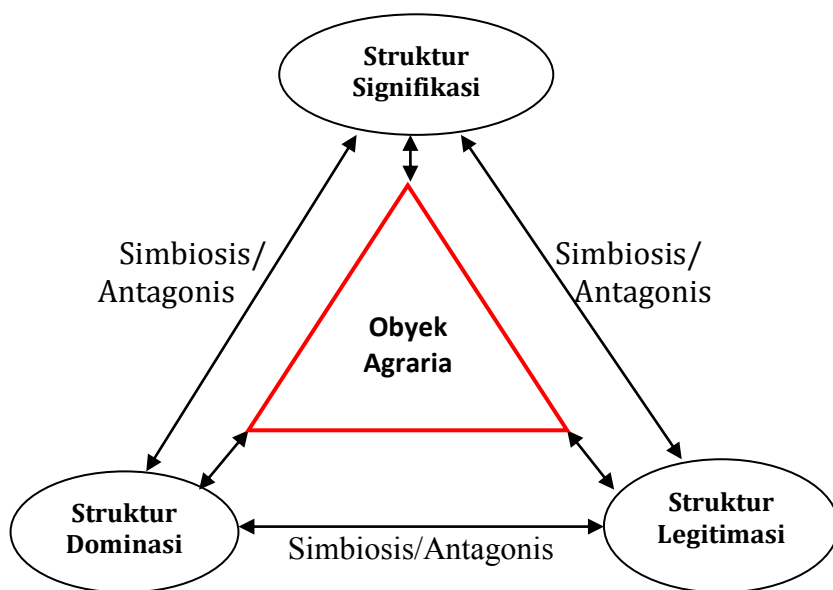


Gambar 2. Pola Dasar Sistem Sosial Agraria

Potensi berkontradiksi dan bernegasi antar ketiga elemen sistem sosial agraria tetap eksis karena sifat-sifat struktural dari ketiga institusi tersebut memang berbeda secara mendasar. Mengacu pada pola dasar sistem sosial agraria di atas, maka kedua unsur dasar kontradiksi dan negasi struktural selalu dapat dikelola sejalan dengan upaya mengembangkan unsur mediasi. Hasilnya bahwa kepentingan antara masing-masing elemen sistem sosial agraria yang selalu terwujud dalam praktek sosial agraria cenderung mengarah pada pola hubungan simbiosismutualisme daripada pola hubungan antagonis. Artinya, meskipun di antara ketiga elemen sistem sosial agraria dikonstruksi dalam kerangka struktur hubungan dominasi negara (karena posisinya secara politik konstitusional adalah menguasai sumberdaya agraria), tetapi pola dasarnya adalah baik hubungan vertikal maupun horizontal selalu mengarah pada terbukanya peluang dapat dikembangkan pola hubungan yang simbiosis mutualisme.

Sistem sosial agraria di dalamnya melekat tiga unsur prinsip struktural yang sejajar dan saling terkait satu sama lain, yakni aturan (struktur signifikasi dan struktur legitimasi) dan sumberdaya (struktur dominasi). Sedangkan konstruksi dan keberlakuan sistem sosial agraria tersebut ditentukan oleh kapasitas agensi aktor pada masing-masing elemen institusionalnya, yakni derajat perubahan struktural dalam *schemata* agensi yang ditransformasikan dalam tindakan sehari-hari (dalam hubungan sosial agraria). Konstruksi dari ketiga unsur

prinsip struktural tersebut akan mempengaruhi konstruksi sistem sosial agraria yang mengarah pada pola hubungan simbiosismutualisme atau antagonis (Gambar 3).



Gambar 3. Prinsip-Prinsip Struktural Sistem Sosial Agraria
 Sumber: Diadaptasi dari Konsepsi Giddens (Priyono, 2003:24)

Bentuk hubungan simbiosismutualisme cenderung berjalan berdampingan dan sinergis antar elemen sistem (konsensus dan integratif), sedangkan bentuk hubungan antagonis cenderung mengarah pada pola hubungan konfliktual. Artinya, pola hubungan agraria konsensual atau konfliktual merupakan wujud dari hasil konstruksi sistem sosial agraria yang simbiosis mutualisme atau antagonis yang termanifestasikan di dalam praktek sosial agraria sehari-hari. Realitas pola hubungan sosial agraria tersebut bersifat inheren di dalam kesadaran para aktor, sehingga selalu ada gambaran nyata tentang fenomena konsensual atau konfliktual yang dialami. Pengalaman tersebut selalu disimpan sebagai bagian (elemen) dari saling mempengaruhi antara struktur pengetahuan (*stock of knowledge*) para aktor dan realitas sosial yang mereka alami sehari-hari.

3.3. Formasi Sosial Agraria Sebagai Proses Konstruksi Sistem Sosial Agraria

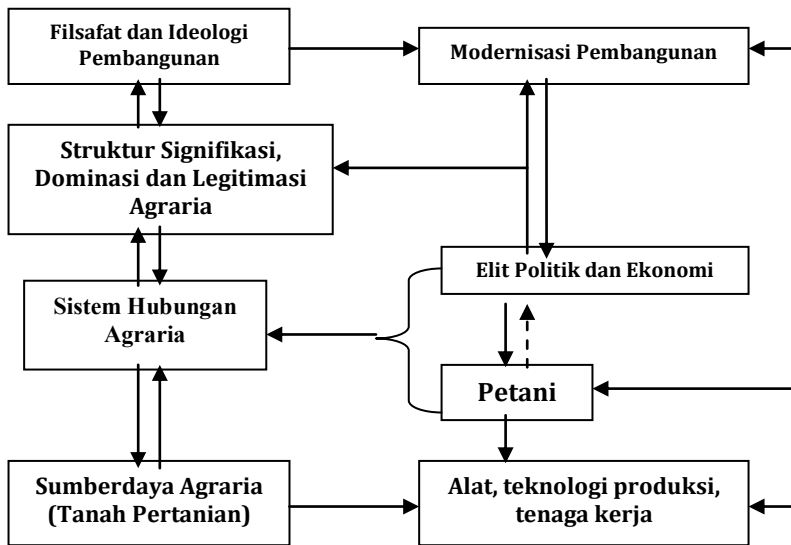
Logika rasional institusional dalam proses konstruksi sistem sosial agraria dapat dijelaskan berdasarkan konstruksi formasi sosial

agraria. Sesuai dengan derajat kesadaran agraria yang dikonstruksi dalam realitas politik suatu rezim masa lalu, maka alur formasi sosial agraria dapat dicermati bergerak dari atas ke bawah. Artinya, derajat kesadaran para aktor kekuasaan dan para pendukungnya itulah yang menentukan konstruksi formasi sosial agraria. Pada sisi lain, sesuai dengan kondisi konfliktual yang berkembang, maka alur formasi sosial dapat dicermati bergerak dari bawah ke atas. Artinya, keberlakuan sistem sosial agraria dalam formasi sosial agraria itulah yang menentukan derajat kesadaran petani dan para pendukungnya. Kedua alur formasi sosial agraria tersebut berproses secara dialektikal, sehingga tidak dapat difahami secara terpisah. Dialektikanya dapat dilihat dari praktek-praktek sosial agraria yang berlangsung selama masa Orde Baru (Lihat Gambar 3).

Menurut Pieterse (dalam Schrijvers, 2000: 25), bahwa istilah *developmentalism* berakar pada suatu filsafat yang terkandung dalam teori kemajuan linier, perkembangan evolusioner, teori modernisasi dan pemikiran pembangunan. Produksi pengetahuan merupakan bagian integral dari paradigma tersebut, dan setiap konsep yang digunakan oleh para pengampu kebijakan dan kaum intelektual selalu mengacu pada ideologi pembangunan dan dimanfaatkan untuk mendukungnya. Para pelaku menyakini pentingnya pembangunan berbasis teknologi moderen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemajuan. Gugus pengetahuan paradigma pembangunan tersebut terkonsentrasi pada upaya perubahan mendasar sendi-sendi kehidupan tradisional yang diarahkan pada saling keterkaitan antara aspek sosial, politik, ekonomi, dan kultural moderen. Semua kemudian dikemas dalam suatu paket pendekatan modernisasi pembangunan. Pendekatan ini yang menjadi referensi utama membangun di Indonesia pada masa Orde Baru.

Konstruksi paradigma pembangunanisme terlekat dalam struktur schemata pelaku yang diyakini sebagai solusi tepat untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan politik. Dua persoalan ini terjadi cukup serius yang ditinggalkan oleh rezim Orde Lama. Konsisten dengan upaya perubahan aspek-aspek kehidupan yang “mendasar” tersebut, diproduksi gugus pengetahuan tentang pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama yang didukung pengetahuan tentang sistem politik negara, sistem birokrasi dan sistem modernisasi sosio-kultural. Untuk memperkuat dan mendukungnya antara lain dilakukan serangkaian transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar melalui jalur pendidikan formal (Fakih, 2004).

Salah satu obyek yang menjadi sumberdaya pembangunan dan terkait dengan persoalan sekaligus solusi pertumbuhan ekonomi adalah sumberdaya agraria. Berpusat pada obyek potensial ini maka seperangkat pengetahuan agraria dikembangkan searah dengan sistem pengetahuan modern yang dapat mengeksploitasi dan mengelola sumberdaya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Terkait dengan sistem pengetahuan agraria modern tersebut adalah sistem pengetahuan ekonomi perbangkan, sistem pengetahuan politik dan sistem hukum agraria. Semuanya menjadi faktor inti dimana para pelaku pembangunan terlibat secara aktif dalam proses produksi dan reproduksi. Kemudian lahirilah gugus pengetahuan agraria teknokratis yang melekat kuat di dalam struktur signifikansi (*schemata, mindset*) para aktor pembangunan yang terpusat pada kompetensi para teknokrat.⁴⁵



Keterangan:

1. —————> Hubungan kuat.
2. - - - - -> Hubungan lemah

Gambar 4. Formasi Sosial Agraria

Sumber: Hartoyo, 2011a

⁴⁵ Menurut Ignas Kleden, teknokrasi lahir karena kompetensi (kemampuan dan keahlian dalam bekerja) tanpa konstituensi (jumlah orang-orang memilih seseorang untuk mewakili mereka). *Pertama*, para teknokrat mendapat suatu jabatan politik karena keahlian dan kemampuannya dalam suatu bidang teknis dan karena itu mereka tidak memerlukan konstituensi yang mendukungnya. *Kedua*, teknokrasi cenderung percaya pada suatu elitisme intelektual yang mengandaikan bahwa soal-soal ekonomi politik dan sosial politik dalam suatu negara moderen harus dipegang oleh seorang yang kompeten (Ignas Kleden, 2004: 4-5).

Sejalan dengan reproduksi struktur signifikansi agraria tersebut dibuat seperangkat aturan hukum yang melegitimasi penguasaan tanah pertanian yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Menjadi sangat logis jika kebijakan pertanahan (obyek agraria) yang dikeluarkan cenderung berpihak pada kepentingan para pemodal besar, karena kapasitasnya yang lebih menjanjikan. Struktur dominasi sumberdaya politik dan ekonomi terkait dengan obyek agraria cenderung dikonstruksi berhubungan dengan model pembangunan dan sistem hukum yang dibangun. Melalui interpretasi konsep “penguasaan” sumberdaya agraria dalam maknanya yang “absolut”, maka negara secara politik dapat mengontrol pelaksanaan program-program pembangunan yang dapat berjalan berdampingan dengan operasi perusahaan.

Konstruksi prinsip-prinsip struktural agraria dalam lingkup pembangunan tersebut berpengaruh terhadap sistem sosial agraria. Berbasis pada seperangkat pengetahuan modernisasi pembangunan, para aktor politik dan ekonomi harus berhubungan dengan petani. Secara logis dengan mudah dapat diketahui bahwa dalam sistem sosial agraria tersebut memposisikan petani sebagai obyek atau subyek pasif dalam proses pembangunan. Struktur dominasi sumberdaya otoritatif dan alokasi sumberdaya ekonomi yang berbasis kompetensi dengan jelas tidak bersifat partisipatif. Artinya, dalam proses konstruksi struktur tersebut tidak memberi peluang kepada petani untuk berpartisipasi aktif dalam reproduksi prinsip-prinsip struktural sistem sosial agraria dalam arus utama pembangunan. Pada arus kepentingan perusahaan yang terbingkai dalam modernisasi pembangunan, maka akses petani terhadap tanah pertanian dibatasi, dan kemudian diarahkan menjadi bagian dari faktor produksi potensial. Demikian juga dalam konteks hubungan antar elemen sistem sosial agraria, di mana petani berada pada posisi subordinat.

Menyimak keberlakuan sistem sosial agraria selama masa Orde Baru, secara konsisten menunjukkan bahwa petani selain dalam posisi subordinat juga termarginalkan secara sistematis. Formasi sosial agraria secara substantif berada pada dominasi politik dan ekonomi. Akibatnya, petani tidak memiliki kekuatan kontrol atas sumberdaya agraria. Roh kolonialisme tidak bisa hilang begitu saja, tetapi masih menjadi stok pengetahuan dan aktif dalam diri sebagian aktor strategis pembangunan.⁴⁶ Regulasi kebijakan politik agraria yang demikian itu secara sistematis menutup ruang akses, partisipasi dan kontrol atas penguasaan tanah oleh petani. Telah terjadi delegitimasi eksistensi

⁴⁶ Seperti tafsir yang berlaku umum atas UU Kehutanan (UU No. 41/1999) dan UU Pelertarian (UU No. 5/1990) masih merujuk pada *Domain Verklaaring* warisan pemerintah kolonial (Sitorus. 2006: 24).

partisipasi petani dalam proses pembangunan. Kondisi ini menyebabkan petani semakin lama semakin teralienasi (terasing) dengan lingkungannya baik secara politik, ekonomi, maupun kultural.

Dalam banyak kasus konflik pertanahan di Indonesia menunjukkan bahwa para elit politik dan ekonomi lebih mendapat dukungan hukum daripada petani. Batas-batas antara legitimasi hukum formal dan kekuasaan menjadi kabur, bahkan hukum-hukumpertanahan cenderung menjadi alat kekuasaan. Jika kita simak dengan seksama pengalaman historis tentang praktek hubungan dalam sistem sosial agraria, makadengan jelas menunjukkan bahwa formasi sosial agraria oleh para aktor strategisnya selalu tidak terlepas (sengaja dilekatkan) dari sifat-sifat feodalisme dan kolonialisme, meskipun keduanya tidak nampak menonjol. Para pejabat negara sering mengumandangkan akan melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen, tetapi dalam praktek agraria sehari-hari cenderung mengarah pada sifat-sifat kapitalisme semu (Wiradi, 2000:173).

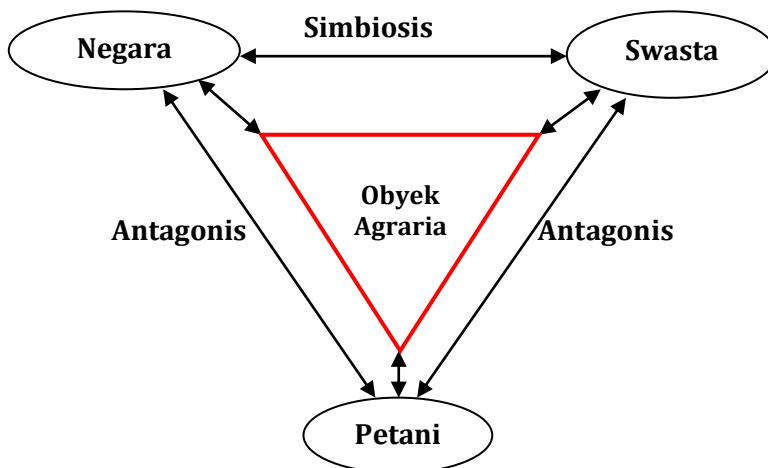
Formasi sosial agraria seperti itu secara nyata menyebabkan terabaikannya hak-hak hidup petani secara asasi. Dalam praktek terdapat kecenderungan kuat keberlakuan sistem sosial agraria yang antagonis. Para aparatus negara dan pengusaha selalu bersikukuh berlindung pada keberlakuan hukum formal dalam menyelesaikan setiap kasus sengketa pertanahan berhadapan dengan petani. Dapat difahami bahwa penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur hukum formal ini kurang diminati oleh petani, karena lebih terfokus pada kepastian hukum dan sering mengabaikan asas kesetaraan, keadilan, hak-hak adat, dan hak-hak historis.

Bagi petani, sampai pada suatu kesimpulan bahwa substansi pembuatan dan keberlakuan hukum formal tentang pertanahan adalah dari, oleh dan untuk kepentingan penguasa dan pengusaha, bukan untuk kepentingan petani. Realitasnya, penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur hukum formal bagi petani berarti berhadapan dengan tembok penghalang struktural berlapis. Dapat difahami jika kemudian petani melakukan aksi-aksi kolektif terorganisir di luar jalur kelembagaan yang mapan. Dengan memahami posisi *underdog* petani yang demikian tertekan dan terkungkung secara struktural dan diduga dilakukan secara sistematis, merupakan suatu hal yang beralasan jika kemudian aksi-aksi kolektif dilakukan karena sudah tidak ada jalan lain bagi petani untuk dapat memperjuangkan hak-haknya atas tanah pertanian.

Di dalam dinamika formasi sosial agraria mengandung sifat-sifat statika. Hal ini terbukti bahwa petani tidak diberi ruang akses,

partisipasi dan kontrol yang setara dan adil atas tanah pertanian. Selama episode kekuasaan rezim Orde Baru, petani selalu berada di bawah kontrol para elit politik dan ekonomi, sesuai dengan aturan main (politik) dan aturan hukum yang berlaku. Struktur pengetahuan agraria dimonopoli, di buat oleh dan untuk para elit politik dan elit ekonomi sesuai dengan perangkat ideologi yang dianut (modernisasi pembangunan) sebagai basis reproduksi hubungan sosial antar subyek (negara, swasta, petani) atas penguasaan sumberdaya agraria (tanah pertanian).

Pasca jatuhnya rezim Orde Baru hingga saat ini, esensi formasi sosial agraria tidak mengalami perubahan secara berarti. Secara struktural dapat dilihat dari perubahan sifat-sifat struktural dari struktur signifikasi, struktur dominasi politik dan ekonomi, dan struktur legitimasi agraria. Menurut Giddens, dimaksud struktur signifikasi adalah mencakup skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan dan wacana; struktur dominasi (politik dan ekonomi) mencakup skemata penguasaan atas orang dan barang/benda.; dan struktur legitimasi mencakup skemata peraturan normatif yang tercermin dalam tata hukum (Priyono, 2003:24).



Gambar 5. Praktek Struktural dalam Sistem Sosial Agraria
 Sumber: Hartoyo, 2011a, 2011b.

Pola hubungan agraria antara negara dengan swasta tetap simbiosis mutualisme, sedangkan antara negara dan swasta dengan petani cenderung tetap antagonis. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, terutama di wilayah pedesaan, konflik-konflik pertanahan yang melibatkan hubungan di antara ketiga elemen sistem sosial agraria tersebut masih seringnya terjadi.

Jika kondisi struktural agraria dominan tersebut dikaitkan dengan dinamika gerakan petani, secara metapor dapat dinyatakan sebagai berikut:

Struktur Sosial Agraria Dominan dan Gerakan Petani

Gerakan-gerakan sosial melawan *developmentalism* atau melawan modernisasi pembangunan pasca Orde Baru telah berhasil membentuk gelombang besar gerakan petani, yang mengusung agenda reforma agraria. Gelombang gerakan itu ternyata mampu mengikis dan mematahkan sebagian ujung karang yang besar dan terjal, yaitu otoritarianisme dan birokrasi sentralistik. Tetapi, gelombang besar itu hanya berlangsung sesaat dan sekarang berubah menjadi riak-riak kecil. Kapal-kapal gerakan yang berjalan selama ini hanya mampu menggoyang ujung karang yang ada di permukaan laut dalam, sedangkan di dalam laut masih terdapat karang yang besar dan terjal dengan fondasinya yang masih kokoh. Gerakan petani hingga saat ini belum mampu menggeser struktur sosial agraria yang ada secara berarti, apalagi merubahnya menjadi yang relatif baru.

3.4. Akar Konflik Agraria Bersifat Struktural dan Sistemik

Berdasarkan sebab-sebab konflik agraria sebagaimana sudah dijelaskan di atas, terdapat arah kecenderungan pada dimensi sebab yang kompleks, beragam dan saling melengkapi. Secara umum sebab-sebab konflik agraria tersebut terjadi dalam dimensi sosial, kultural, ekonomi politik, dan psikologis. Keempat dimensi sebab tersebut secara lebih sederhana dapat dikelompokkan menjadi dua dimensi realitas sosial, yakni dimensi struktural dan kultural dan tindakan sosial aktor (ekonomi politik dan psikologis).

Sebagaimana dijelaskan dalam formasi sosial agraria di atas, dapat disimpulkan bahwa krisis hubungan agraria selalu terjadi ditopang oleh konstruksi sistem sosial agraria yang antagonis. Oleh karena itu, sumber krisis agraria sebenarnya bukan terletak pada obyek agraria (tanah pertanian), melainkan berakar pada “konstruksi sistem sosial agraria” tersebut. Keberlakuan sistem sosial agraria dominan konsisten dengan arah produksi prinsip-prinsip strukturalnya yang ditransformasikan dalam praktek hubungan antar pelaku dari ketiga elemen institusionalnya. Ketiga prinsip struktural tersebut terkonsentrasi pada praktek kekuasaan. Pada satu sisi, kekuasaan semakin kuat dalam menampakkan unsur kontradiksi dan negasi dalam struktur dominasi, sedangkan pada sisi lain struktur signifikasi dan struktur legitimasi semakin diposisikan sebagai alat kekuasaan elit politik dan ekonomi. Keberadaannya dikembangkan dan dipertahankan secara terus menerus dalam esensinya yang linier, yakni selalu memosisikan petani sebagai pihak yang lemah dalam struktur penguasaan tanah pertanian.

Secara historis di wilayah Lampung sudah sejak lama menjadi ajang produksi pertanian skala besar. Para pengusaha silih berganti berinvestasi dalam usaha perkebunan untuk memasuki pasar dalam dan luar negeri. Melalui dukungan kebijakan pertanahan, maka komersialisasi pertanian dapat berkembang cepat. Usaha pertanian skala besar semakin bertambah dan memerlukan tanah yang luas. Usaha tersebut selanjutnya mengganggu kebebasan hidup, hak-hak hidup, dan status penguasaan tanah bagi petani di pedesaan (Landsberger dan Alexandrov, 1984: 8)

Berdasarkan arah kecenderungan praktek hubungan antar ketiga elemen institusional agraria tersebut, terdapat tiga domain kesalahan konsekuensi prinsip struktural sistem sosial agraria yang saling terkait satu sama lain. Pertama, *schemata* interpretasi simbol dalam struktur signifikasi sistem sosial agraria dikonsentrasikan pada “hasil” yang didukung oleh “alat”, yakni pertumbuhan ekonomi (material) yang cukup tinggi, dan didukung dengan stabilitas politik yang mantab, yaitu melalui sistem politik otoriter dan birokrasi yang sentralistik. Konstruksi struktur signifikasi demikian mengabaikan komunikasi partisipatif yang dialogis dimana petani menjadi salah satu elemen utama di dalam sistem sosial agraria.

Kedua, struktur dominasi agraria diwujudkan dalam hubungan kekuasaan yang timpang dan eksploitatif terhadap petani. Kekuasaan oleh Weber dimaknai sebagai kontrol berbeda (*differential control*), yang berarti kontrol sosio-politik negara yang kuat terhadap petani. Pandangan Weber ini konsisten dengan makna kekuasaan menurut Marx sebagai keuntungan berbeda (*differential benefit*) yang sangat timpang dinikmati oleh para penguasa (elit politik) dan pengusaha (elit ekonomi). Dalam model relasi kekuasaan tersebut para petani yang berperilaku rasional dianggap tidak mungkin dapat bekerjasama dengan negara dan perusahaan dan mereka harus ditekan karena hanya akan menghambat jalannya pembangunan.

Ketiga, struktur legitimasi terus diproduksi sejalan dengan struktur signifikasi dan mendukung struktur dominasi. UUPA tahun 1960 berhasil dikooptasi, meskipun oleh Mendagri tahun 1978 masih dinyatakan berlaku, melalui seperangkat kebijakan agraria yang mendukung kepentingan negara paralel dengan kepentingan swasta. Kontrol sosiopolitik negara cenderung melegalkan pendekatan keamanan yang menciptakan berbagai tindak kekerasan secara masif dan berkepanjangan. Praktek-praktek pembangunan ternyata berjalan seiring dengan lingkaran konflik-konflik kekerasan sebagaimana banyak terjadi di negara-negara berkembang (Joke Schrijvers. 2000).

Bukan suatu yang kebetulan jika tindakan kekerasan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru memiliki hubungan kontinyu dengan tindakan kekerasan yang terjadi pada rezim sebelumnya. Fenomena ini merupakan ciri khas negara-negara berkembang yang membangun sistem politik dan ekonomi warisan kolonial (Miall, dkk., 2000: 112-116). Gelombang kekerasan yang terjadi di Indonesia merupakan indikasi adanya suatu *geneology of violence*, yang ditandai dengan sebuah rezim teror yang secara terus menerus melegitimasi penggunaan kekerasan oleh negara (*state-sponsored violence*). Kondisi ini sengaja dimanfaatkan oleh pemimpin politik dan militer (sepanjang periode revolusi) untuk menyelesaikan masalah politik terlembagakan dan dampak negatif yang muncul dikemudian hari, dan memberikan legitimasi menggunakan pola-pola represif untuk memperluas pengaruhnya pada sistem politik dan ekonomi (Widjajanto, dkk., 2007: 189-190).

Organisasi sistem sosial agraria dalam formasi sosial tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan perusahaan cenderung meminimalisir unsur kontradiksi dan negasi dengan mengembangkan unsur mediasi. Pada sisi lain, hubungan antara negara dan perusahaan dengan petani cenderung menonjolkan unsur kontradiksi dan negasi sehingga meminimalisir unsur mediasi. Indikasinya adalah kekuasaan negara terhadap sumberdaya agraria cenderung dioptimalkan memihak kepada kepentingan perusahaan. Tanah dikuasai secara “absolut” oleh negara dijadikan sebagai komoditas yang memiliki nilai komersial. Ketika formasi sosial agraria mengarah pada sistem komersialisasi, maka petani dilihat sebagai bagian dari ketersediaan tenaga kerja di pedesaan, sebagai faktor produksi potensial dan fungsional yang harus tetap dipelihara dan dikondisikan guna mendukung keberhasilan operasi perusahaan. Akibatnya, kehidupan keseharian sebagian petani tidak lagi tergantung pada tanah pertanian yang sebelumnya dikuasai dan dikelola secara aktif, tetapi tergantung pada dinamika perusahaan yang terpisah dengan kehidupan keseharian petani.

Kondisi tersebut merupakan titik kritis marginalisasi, eliminasi dan alienasi petani yang di dalamnya melekat unsur eksploitasi. Pertama, model korporasi secara langsung memposisikan tenaga kerja (banyak di antara mereka yang dulunya sebagai petani) sebagai pihak yang memiliki posisi tawar sangat lemah. Penduduk dikerahkan menjadi buruh upahan atas tanah-tanah pertanian atau perkebunan yang telah dikuasai perusahaan. Kerena terbatasnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja, maka dalam banyak kasus

perusahaan menerima buruh lepas (paling banyak) yang dapat dipekerjakan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Tabel 3. Konstruksi Sistem Sosial Agraria Antagonis Terhadap Petani

Subyek Agraria	Struktur Dasar Konseptual	Dominasi Politik dan Ekonomi	Struktur Legitimasi: Kebijakan Agraria
Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Developmentalism • Pertumbuhan ekonomi • Modernisasi Pembangunan • Agro industri. • Trickle down effects. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hak “menguasai” tanah secara absolut. • Politik otoriter • Birokrasi sentralistik. • Kolaborasi dengan perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan agraria sektoral. • UUPMA dan PMDN • Kehutanan, pertambangan, pertanian, dll.
Swasta	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pure economic oriented.</i> • Investasi modal. • Teknologi moderen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimalisasi penguasaan sumber agraria. • Akumulasi modal. • Subyek pembangunan aktif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kebijakan agraria kuat
Petani	<ul style="list-style-type: none"> • Penyedia tenaga kerja tak terampil. • Teknologi pertanian sederhana. • Basis sosiokultural tradisional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Deideologisasi • Depolitisasi • Obyek dan subyek pembangunan pasif. • Minimalisasi penguasaan tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kebijakan agraria lemah

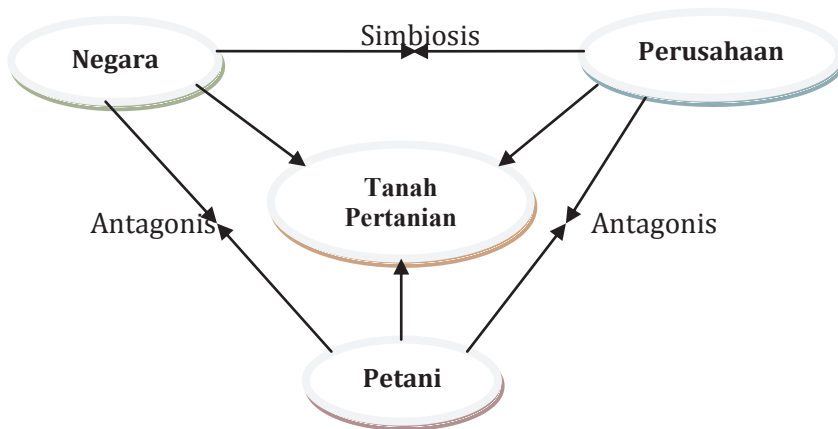
Sumber: Hartoyo, 2011a

Kedua, perusahaan berpeluang menciptakan nilai lebih dengan memanipulasi produktivitas tenaga kerja, seperti meningkatkan volume kerja dengan menekan tingkat upah kerja atau paling tidak menciptakan upah tenaga kerja secara konstan rendah pada tingkat kondisi kehidupan petani yang subsisten (Suhartono, 1991). Kondisi ini tetap konsisten dengan kondisi yang dialami petani pada masa kolonial. Dengan tidak mengabaikan keragaman artikulasinya yang terjadi di berbagai wilayah, masih cenderung berada pada kondisi yang sama. Secara umum keberlakuan sistem sosial agraria masih cenderung mengarah pada karakteristik kapitalisme semu.

Ketiga, sebagian wilayah kehutanan diperuntukkan sebagai basis konservasi keaneka ragaman hayati dan sumberdaya air, maka konsep “menguasai” oleh negara cenderung dimaknai sedikit mungkin berinteraksi dengan petani. Akibatnya, petani kehilangan sumber mata

pencaharian dan ruang hidupnya. Program Transmigrasi Lokal dalam praktek juga bermakna pengusiran petani dari kawasan hutan, mencetak lahan belukar menjadi lahan produktif yang mengandung unsur kerja paksa. Kondisi yang sama terjadi dalam pelaksanaan reboisasi hutan, pembangunan waduk, HTI, bahkan untuk usaha perkebunan (agribisnis).

Pemerintah dan perusahaan terus mengembangkan konsepsi-konsepsi bermakna strategis yang dapat memperkuat hubungan simbiosis mutualisme. Berbagai konsepsi tentang pengelolaan tanah pertanian mampu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga selalu mengarah pada praktek kerjasama yang saling menguntungkan. Sedangkan hubungan antara negara dan perusahaan dengan petani, dimana perbedaan prinsip-prinsip struktural keduanya cenderung diperlebar jaraknya secara diametral dengan prinsip-prinsip struktural petani. Konsekuensi transformasi ke dalam praktek hubungan sosial agraria cenderung mengarah pada bentuk hubungan antagonis dengan petani.



Gambar 6. Hubungan Antar Elemen Sistem Sosial Agraria

Sumber: Hartoyo, 2011a; 2011b

Data pada Tabel 3 dengan jelas menunjukkan arah kecenderungan konstruksi prinsip-prinsip struktural sistem sosial agraria. Kecenderungan tersebut mengarah pada pola hubungan simbiosis antara negara dan swasta dibanding hubungannya dengan petani yang antagonis. Kapasitas politik negara berhubungan kuat dengan kapasitas ekonomi swasta. Contohnya, konstruksi sistem sosial agraria pada setiap episode kekuasaan rezim masa lalu dalam bentuk

simbiosis mutualisme dan antagonis terhadap petani sebagaimana disajikan pada Gambar 6.

Sistem sosial agraria yang antagonis dalam arus utama (*mainstream*) model pembangunanismemasa lalu tersebut yang sesungguhnya menjadi akar munculnya konflik-konflik agraria struktural. Sistem sosial agraria dominan syarat dengan praktek marginalisasi, eksploitasi, alienasi, kekerasan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap eksistensi kehidupan petani. Akibatnya, petani yang menjadi penduduk terbesar di wilayah pedesaan justru merekalah yang paling sedikit dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.

3.5. Perkembangan Kesadaran Petani

Perkembangan kedsasaran petani berkaitan dengan perubahan struktur signifikasi tentang dasar-dasar kondisi sosiokulturalnya dalam praktek sosial agraria sehari-hari. Terdapat dua arah kecenderungan perkembangan kesadaran petani ini, yaitu yang mendukung dan menentang keberlakuan sistem sosial agraria antagonis. Pertama, kesadaran petani yang berkembang mendukung pembangunan di bidang agraria. Pada kesadaran ini petani cenderung berpandangan, bersikap dan bertindak proaktif, sehingga mengalahkan daya kritisnya. Artinya, daya kognisi dan afeksi petani menjadi lemah sehingga kurang peka dalam melihat berbagai kesalahan konsekuensi praktek-praktek pembangunan agraria. Kedua, kesadaran petani yang berkembang dalam kerangka kritis sesuai dengan kapasitas monitoring refleksifnya dalam melihat praktek-praktek sosial agraria sehari-hari. Pada tingkat kesadaran ini petani secara aktif mengembangkan pandangan, sikap dan perilaku yang cenderung melawan atau berada pada ruang oposisi dalam melihat berbagai kesalahan konsekuensi dari praktek pembangunan agraria.

Kapasitas kedsasaran kritis petani pada awalnya terwujud dalam kesadaran konfliktual dan kemudian berkembang menjadi kesadaran oposisional. Kesadaran konfliktual menunjuk pada reproduksi struktur pikiran dan perasaan petani sesuai dengan kapasitas monitoring reflektifnya dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pada tataran praksis dapat diwujudkan dalam bentuk reaksi-reaksi kolektif petani terhadap kebijakan pertanahan yang merugikan mereka. Pada tingkat kesadaran ini biasanya aksi-aksi kolektif petani cenderung didominasi oleh daya afektifnya yang berlebih. Karakteristik aksi-aksi kolektif ini bersifat spontan, irasional, emosional, dan tidak terorganisir dengan baik.

Kesadaran politik oposisional petani lebih menunjuk pada kapasitas monitoring refleksif petani terhadap posisi dirinya terkait dengan realitas yang dihadapi sehari-hari di dalam lingkungannya terkait dengan persoalan pertanahan. Kesadaran politik ini kemudian ditransformasikan ke dalam tindakan-tindakan kolektif yang ditujukan untuk merubahkebijakan pertanahan. Mengacu pada pandangan Giddens (2004: 6-8), maka kesadaran politik petani ini sudah sampai pada kesadaran diskursif, yakni kemampuan dalam merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci dan eksplisit atas tindakan yang dilakukan. Definisi Giddens tentang kesadaran diskursif lebih menunjuk pada kapasitas kognitif petani sebagai prosesor aktif daripada kapasitas afektifnya. Sedangkan tindakan kolektif petani di dalamnya juga mengandung derajat kapasitas afektifnya, meskipun tidak secara jelas disebutkan oleh Giddens. Betapapun tinggi tingkat rasionalitas gerakan petani tetap diekspresikan kandungan tingkat emosi para pelakunya.

Perkembangan kesadaran sosial konfliktual menjadi kesadaran politik oposisional tidak terlepas dari dimensi struktur kognitif dan afektif yang secara langsung dan bersifat kolektif membentuk subkultur petani, yang disebut dengan 'sosiokultural oposisional'. Sistem kepercayaan tentang dunia, sistem sosiokultural dan ideologi yang sudah mapan tidak diterima begitu saja oleh petani tetapi juga direkonstruksi. Petani selalu memantau, mencatat, memperhitungkan, menilai, merasakan, dan merespon perkembangan situasi dan konsekuensi dari tindakannya dan tindakan pihak lain yang terkait dengan keberlanjutan hidupnya. Oleh karena itu, praktek-praktek sosial agraria di pedesaan oleh petani tidak selalu dipandang dalam konteks konsensus, tetapi juga dalam konteks konfliktual obyektif dan subyektif. Pada kondisi ini petani memiliki kapasitas kritisnya dan mampu menerapkannya dalam mereproduksi makna-makna yang berlaku untuk memelihara keamanan ontologis dari gangguan pihak lain. Dalam proses sosiokultural yang lebih luas petani juga menawarkan dan menerima makna hubungan sosial agraria alternatif yang sering ditampilkan untuk ditafsirkan secara kritis oleh petani sesuai dengan perkembangan konteks lingkungan lokal yang terjadi.

Di dalam ruang dan waktu tertentu disamping petani memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan menggunakan aturan dan sumberdaya dominan, mereka juga memiliki kemampuan untuk memproduksi sistem sosiokultural dan strategi alternatif perubahan hubungan sosial agrarian sesuai dengan yang dibutuhkan. Sesuai dengan pandangan Giddens (dalam Turner,1998:500), bahwa perkembangan kesadaran politik petani didukung oleh dua kapasitas

utamanya. Pertama, petani memiliki kemampuan untuk mendapatkan seperangkat pengetahuan dan pengalaman kontekstual tentang apa yang terjadi, hadir dan berhubungan dengan pihak kawan dan lawan, seperti dengan sesama petani, dengan pemerintah, dengan perusahaan, dan dengan pihak-pihak lain yang terlibat. Kedua, petani memiliki kemampuan menggunakan seperangkat pengetahuan praktisnya untuk menafsirkan konteks lingkungan lokal yang mereka hadapi. Disini terdapat proses dialektika antara kondisi kehidupan petani dan perkembangan kesadaran politiknya. Pada satu sisi, kondisi kehidupan nyata yang dihadapi petani dalam arus utama sistem sosial agraria memungkinkan untuk mengembangkan kesadarannya. Pada sisi lain, perkembangan kesadaran sosiopolitik petani juga menentukan derajat perjuangannya dalam merubah kebijakan pertanian.

Menyimak dinamika kehidupan petani, terutama pada beberapa komunitas petani di wilayah konflik pertanian, secara sederhana dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan perkembangan kesadaran petani yang dikonstruksi semakin kondusif terhadap kemungkinan dapat dilakukan gerakan sosiopolitik. Dengan meramu kategori kesadaran menurut Freire, Giddens dan Corrigan, maka perkembangan kesadaran petani secara sederhana dibagi menjadi tiga kategori, yakni kesadaran proaktif, kesadaran sosial konfliktual dan kesadaran politik.

Paulo Friere (dalam Smith, 2001) membagi kesadaran manusia menjadi tiga tingkatan yang cenderung berkembang akibat tekanan-tekanan struktural (penindasan), yakni kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Giddens (2004: 6-8) membagi kesadaran manusia menjadi tiga tingkatan yang cenderung menunjuk pada kapasitas kognitifnya sebagai prosesor aktif, yakni motif tak sadar, kesadaran praktis, dan kesadaran diskursif. Kemudian Corrigan (dalam Suhartono, 1995:130) membagi kesadaran politik menjadi tiga berdasarkan indikasi perilaku resistensi yang ditampilkan petani, yakni belum sadar (resistensi prapolitik), setengah sadar (resistensi quasi-politik), dan sadar sepenuhnya (resistensi sadar politik).

3.5.1. Kesadaran Proaktif

Kesadaran proaktif menunjuk pada derajat penerimaan petani terhadap keberlakuan sistem sosial agraria. Pada tahapan ini kesadaran petani tidak dikonstruksi mengarah pada suatu kondisi bahwa dirinya menerus termarginalkan dan mengalami tekanan-tekanan struktural. Petani yang masuk pada kesadaran ini masih kuat memiliki pandangan proaktif terhadap keberlakuan sistem sosial agraria. Atau, justru secara ekstrim petani memelihara dan mempertahankan pandangan fatalistis, sehingga mengalahkan daya

kritisnya dalam memahami situasi tekanan struktural yang dihadapi. Contohnya, tindakan yang dilakukan oleh penguasa dan pengusaha terhadap diri petani merupakan sesuatu yang harus diterima begitu saja dan apa adanya. Jadi, apa yang dilakukan petani konsisten dengan yang diketahuinya, tetapi tidak konsisten dengan pengetahuan untuk mengubahnya. Petani tidak memiliki gambaran strategis yang mengarah pada upaya untuk merubah situasi yang dihadapi yang melawan arus keberlakuan sistem sosial agraria.

Karena pengetahuan petani tentang situasi yang dihadapi lebih tertuju pada keterkaitannya dengan sesuatu yang berada di luar kemampuannya, maka tindakanya cenderung sekedar menerimanya secara pasif dan menyesuaikan diri dengan realitas yang ada. Petani menurut saja mengikuti apa yang telah dianggap sebagai “kebijakan pemerintah”. Sikap ini diambil guna menunjukkan atau sebagai tanda ketataan dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan tujuan mempertahankan ketenangan dan ketenteraman hidup. Petani mengakui dan dapat menerima perlakuan kasar, berbagai simbol represif dan stigma politik hasil konstruksi penguasa yang ditujukan terhadap dirinya. Dalam beberapa kasus, stigma politik seperti anggota BTKI atau PKI sering ditujukan kepada petani-petani yang dianggap menentang kebijakan pemerintah dan dalam melaksanakan program-program pembangunan, termasuk pembangunan pertanian. Petani juga tidak tahu dan tidak mau tahu bahwa di balik keberlakuan sistem sosial agraria itu telah terjadi tindakan penyimpangan yang luar biasa (termasuk pembohongan, pembodohan, ingkar janji, dan sebagainya) baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para pengusaha.

Struktur pengetahuan (*schemata*) petani tentang kehidupan pada tahapan ini banyak digambarkan berada dalam suatu romantisme kehidupan. Romantisme kehidupan petani diwujudkan dalam ciri-cirinya yang sangat khas seperti lemah, tidak terbiasa mengkoordinir diri, tidak memiliki perencanaan yang jelas dan sistematis, meminimalisir kerugian yang dialami, tidak mau bertindak konfrontatif, cenderung kooperatif, berupaya tetap hidup dengan sistem sosial yang mapan, bergerak karena terancam secara fisik dan benar-benar terhimpit, lekat dengan ekonomi moral (mendahulukan selamat), menganut gaya hidup kolektif dan pemerataan, bersifat homogen (terstratifikasi secara horizontal), dan menganut pola hubungan yang tunduk pada pemimpin, hubungan patron-klien, lebih mengedepankan kompromi daripada perlawanan.

Sifat-sifat struktural dasar tersebut terlekat dalam *schemata* petani dan di antara mereka tetap melakukan tindakan yang sama ketika berhubungan dengan penguasa dan pengusaha. Sebagai

implimentasi dari rasa percaya terhadap pihak lain, maka para petani tidak mau mengembangkan pikiran dan prasangka negatif tentang apa yang akan terjadi terhadap dirinya ke depan sebagai konsekuensi yang tidak diharapkan.

Beberapa contoh kasus, pertama, petani mudah percaya tanahnya dipinjam (diganti rugi tanam tumbuh) oleh pejabat daerah untuk dikelola perusahaan dan dijanjikan akan dikembalikan setelah ijin operasi perusahaan tersebut habis. Kedua, mereka sangat senang mendapat kepercayaan dari kepala Dinas Kehutanan untuk membuka areal kawasan hutan dijadikan lahan garapan, dan percaya surat ijinnya diminta pejabat dengan janji akan dibuat sertifikat hak milik. Ketiga, mereka percaya SKT yang dimiliki diminta seorang tokoh adat (kaki tangan perusahaan) dan petani diberi uang sewa. Keempat, mereka juga percaya atas janji perusahaan untuk mensejahterakan warga, melalui cara persuasif dengan merangkul pemimpinnya. Rasa percaya terhadap pihak lain tersebut masuk pada ranah kesadaran proaktif petani yang di dalamnya mengandung makna harapan, yakni sikapnya itu diharapkan berkonsekuensi pada kehidupan yang aman (dari gangguan pihak lain), tenteram (tidak terjadi keributan) dan nyaman (kehidupan yang layak).

Pada situasi ini para petani menyadari bahwa mereka tetap tidak bisa lepas dari lahan garapan sebagai penyangga kehidupan, tetapi keinginan itu mereka kalahkan dengan kerangka referensi tujuan bersama yang mereka buat. Misalnya, demi mencapai kesejahteraan bersama, maka mereka harus taat mengikuti apa yang menjadi kemauan pemerintah. Kerangka referensi petani tersebut pada titik rendah dibuktikan dengan tingkat kepasrahannya. Misalnya, terkait dengan persoalan pertanahan dengan pemerintah daerah, maka petani menyadari bahwa dirinya dikatakan sebagai “perambah hutan”, “perusak hutan”, “penduduk liar”, “takut kuwalat hidupnya tidak berkah menentang program pemerintah”, dan sebagainya. Mereka kemudian banyak yang rela diusir dan dipindahkan ke tempat lain yang baru, meskipun dengan kondisi yang jauh dari memadai, seperti lahan masih belukar, kering, gersang dan tidak subur. Mereka banyak yang rela dan dengan mudah menyerahkan lahan garapannya untuk kepentingan pemerintah dan juga untuk dikelola perusahaan dengan di sewa, diberi ganti rugi tanam tumbuh. Mereka kemudian beralih pekerjaan menjadi buruh perusahaan atau mencari pekerjaan di luar sektor pertanian. Mereka juga rela membayar “uang retribusi (pungli)” atau uang sewa atau bagi hasil dengan oknum aparat pemerintah dan pihak lain yang mau menjamin keamanan atas lahan garapannya meskipun hanya sekedar menumpang. Semuanya itu mereka lakukan

dalam mendukung keberhasilan pembangunan (sebagaimana yang sering dikatakan oleh para penguasa), dan dalam memelihara keamanan ontologisnya.

Pada tahapan ini para petani masih belum menyadari kalau ruang geraknya semakin lama semakin dibatasi. Mereka semakin tidak leluasa berusaha dan dikondisikan tidak aman dalam menguasai lahannya. Bahkan sebelum lahan mereka diambil alih oleh penguasa maupun pengusaha sudah hadir serangkaian praktek intimidasi dan ancaman. Petani yang mencoba melawan atau tidak mengetahui (beda pandangan) bahwa dirinya melakukan pelanggaran sudah dilancarkan aksi penangkapan, didenda, dihukum dan dianiaya. Kebanyakan petani pada tahap kesadaran ini tidak memiliki niat untuk melakukan perlawanan dan mereka juga tidak tahu harus berbuat apa untuk merubah nasibnya. Bahkan banyak petani yang kemudian mampu mereproduksi kesadaran proaktifnya, mereka dengan cepat merubah strategi bertahan hidup dari sebagai petani menjadi pekerja di luar sektor pertanian. Perubahan dimensi kesadaran dalam bidang kehidupan yang berbeda ini masih tetap berada pada garis sifat-sifat sistem keamanan dasar petani tersebut.

Akan tetapi, pengetahuan dan pengalaman bertani yang bermasalah dengan pemerintah dan juga dengan pihak perusahaan, serta kesadaran mereka terhadap pentingnya tanah pertanian bagi kelangsungan hidupnya tidak bisa hilang begitu saja. Keterlekatan perilaku bertani tetap menjadi bagian penting dari kelangsungan hidupnya, meskipun mereka ada yang sudah lama beralih pada pekerjaan lain. Bagi petani, tanah pertanian merupakan sumberdaya yang menjadi andalan utama dalam kehidupan keluarga dan dalam mempertahankan sosiokultural masyarakatnya. Semua tidak dihilang di dalam memori, dan tetap aktif di dalam proses-proses interaksi, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan kerabat maupun di lingkungan masyarakat yang lebih luas.

3.5.2. Kesadaran Sosial Konfliktual

Pada tahap kesadaran sosial konfliktual, petani mulai mampu membaca kondisi tekanan struktural yang dihadapi. Mereka sudah memiliki konsepsi-konsepsi pandangan kritis terhadap praktek dominasi agraria. Tetapi, pada tahap ini petani merasa tidak memiliki cukup kekuatan (sumberdaya) untuk melakukan perlawanan, dan takut pada tindakan represif yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus oleh aparat keamanan. Mereka takut ditangkap, dituduh sebagai anggota PKI atau BTI, takut berurusan dengan aparat keamanan, takut dianiaya, ditahan, didenda, dan sebagainya. Dapat

dikatakan bahwa pada ranah kognitif sebenarnya petani sudah memiliki stok pengetahuan kontekstual dan sudah mampu menafsirkan secara kritis praktek-praktek sosial agraria yang dimaknai sebagai tekanan. Tetapi pada ranah afeksi masih belum mampu membangkitkan kesadaran emosinya. Mereka lebih memilih untuk diam karena takut ancaman dan kapasitas kritisnya tidak ditujukan pada bagaimana bisa mengatasi ancaman tersebut. Petani sering melihat dan mendengar bahwa banyak petani di daerah lain yang mendapat perlakuan kekerasan, seperti intimidasi, penangkapan, pemerasan, dan semacamnya yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap mereka yang menentangnya. Perilaku seperti ini semakin menambah stok pengetahuan dan afeksi petani. Akan tetapi, petani masih cenderung percaya bahwa jika melakukan hal yang sama akan mendapatkan perlakuan yang sama pula.

Sama dengan kesadaran proaktif, pada kesadaran konflikktual tampak di luar bahwa petani mengikuti apa yang menjadi kemauan pemerintah. Akan tetapi, berbeda dengan kesadaran proaktif dilihat dari stok pengetahuan kritis yang dimiliki. Dibalik sikap dan tindakan yang dilakukan tampak proaktif, sebenarnya petani sudah mampu mengembangkan kesadaran yang tampak diartikulasikan dalam sikap tidak setujunya secara kontekstual terhadap 'program pembangunan' sebagaimana yang mereka ketahui dan alami. Mereka sudah mampu mendiskusikan dengan pihak-pihak lain terhadap tekanan-tekanan yang dialaminya meskipun dengan cara diam-diam, informal dan dalam kegiatan rutinitas sehari-hari. Partisipasinya terhadap "program pembangunan" lebih merupakan keterpaksaan (sebagai strategi mencari selamat) dari ancaman-ancaman yang mereka rasakan dan yang mereka alami, dan bersifat semu atau penuh kepura-puraan. Keinginan untuk melakukan perlawanan atau memprotes kebijakan agraria sudah ada, tetapi tidak mereka wujudkan dalam tindakan nyata melainkan dengan cara mempengaruhi pihak lain. Tujuannya adalah agar diperoleh pandangan, keinginan, dan sikap yang sama. Bahkan mereka juga mendorong jika ada pihak-pihak lain yang mampu melakukan perlawanan secara nyata.

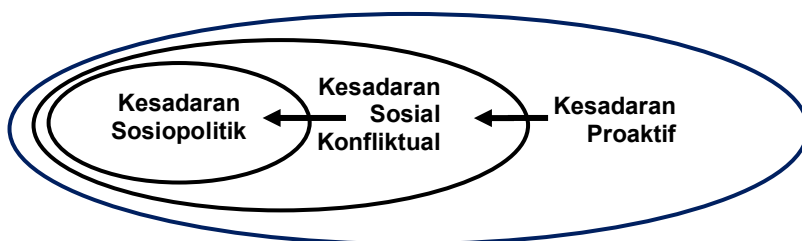
Pada tingkat kesadaran sosial konflikktual yang pasif ini tidak berlangsung lama ketika tekanan hidup dan tekanan dari pihak luar semakin sama kuatnya. Seiring dengan proses tekanan-tekanan internal dan eksternal tersebut, maka petani semakin mampu mengembangkan kesadaran sosial konflikktual yang aktif. Pandangan, motivasi dan sikap kritisnya mampu memonitor praktek dominasi agraria, sehingga petani merasa diperlakukan tidak adil. Mereka sudah mampu mengkonstruksi secara nalar apa yang dialaminya dan yang

dialami petani di tempat lain, apa yang perlu dilakukan dan apa yang dilakukan pihak lain untuk mengurangi tekanan-tekanan dan untuk mempertahankan hidup.

Pandangan kritis petani terhadap tekanan struktural yang melahirkan praktek hubungan agraria yang antagonistersebut bukan hanya terbatas pada tataran ide, tetapi berhubungan dengan motivasi dan sikap aktifnya (*predisposition*) yang mengarah pada tindakan perlawanan untuk mempertahankan haknya. Pandangan kritis yang kuat diperoleh karena petani selalu memantau, mencatat, memperhitungkan, menilai, dan merespon perkembangan situasi dan konsekuensi dari tindakannya dan tindakan pihak lain (yang dianggap lawan) yang membuat dirinya tak berdaya. Petani sudah memahami siapa dirinya sebagai petani, dan siapa mereka yang menyebabkannya tidak berdaya, dan bagaimana cara untuk melakukan tindakan agar hak-haknya atas tanah pertanian dapat dipertahankan. Berdasarkan stok pengetahuan kritisnya, petani aktif mencari pendukung, mendiskusikan persoalan pertanahan yang dihadapi, dan memperluas jaringan dan membangun sumberdaya mobilisasi.

3.5.3. Kesadaran Sosiopolitik

Pada tahapan kesadaran sosiopolitik, petani aktif membangun dan mengembangkan solidaritas ke dalam (antar petani) dan ke luar (dengan para pendukungnya), dan mereka memiliki komitmen tinggi untuk melakukan perubahan kebijakan pertanahan dan mengantisipasi tindakan balik dari pihak lawan. Mereka aktif memperkuat posisi tawarnya dengan membangun jaringan informal dan formal, dan terlibat aktif membentuk kelompok-kelompok petani basis dan organisasi tani.



Gambar 7. Perkembangan Kesadaran Sosial Petani

Karakteristik lainnya dari kesadaran sosiopolitik adalah, pertama, mereka aktif dalam memimpin aksi massa, melakukan lobi dan negosiasi dan memiliki peran yang menentukan dalam proses aksi-aksi kolektif. Kedua, mereka aktif dalam menyumbang ide-ide untuk mengembangkan dan memelihara gerakan. Ketiga, mereka aktif

melakukan berbagai pertemuan baik formal maupun informal dengan sesama aktor gerakan, baik pada tingkat lokal, daerah, nasional, bahkan tingkat internasional. Keempat, aktif dalam memperkuat kapasitas organisasi petani dan menjalin dukungan jaringan dengan pihak lain.

Pada Gambar 7 tampak bahwa terdapat hubungan antara wilayah kesadaran dengan jumlah petani yang termasuk di dalamnya. Semakin tinggi tingkat kesadaran petani, semakin sedikit jumlahnya. Akan tetapi, ruang kesadaran ini bersifat terbuka, terutama ketika memasuki episode aksi-aksi protes seiring berkembangnya peluang politik nasional dan lokal. Pada mulanya petani masih banyak yang berada pada wilayah kesadaran proaktif, kemudian secara progresif banyak yang masuk pada wilayah kesadaran konfliktual, dan pada wilayah kesadaran sosiopolitik. Individu atau kelompok tani dapat meningkat kesadarannya dalam situasi politik yang dianggap memungkinkan dan ingin memainkan peran lebih besar sebagai pihak yang peduli dalam merubah nasib petani. Demikian sebaliknya, banyak petani yang secara kognitif sudah memiliki kesadaran politik dengan baik, kemudian perilakunya dapat berubah masuk ke wilayah kesadaran sosial konfliktual dan bahkan pada wilayah kesadaran proaktif dengan berbagai faktor penyebabnya.

Dalam beberapa kasus memperlihatkan bahwa banyak petani yang tadinya aktif melakukan perlawanan, karena mendapat perlakuan kekerasan dari aparat keamanan yang menyebabkan terjadinya korban fisik, kemudian menghilang dan sama sekali tidak pernah muncul dalam berbagai aksi protes. Pada kasus lain, banyak petani yang tadinya sangat kuat melawan, setelah dapat dipengaruhi (imbalan sejumlah materi, pekerjaan dan fasilitas lain) kemudian berubah. Mereka mengkonstruksi pandangan, merubah sikap dan tindakan yang mendukung pihak lain yang tadinya dianggap lawan.

Kesadaran sosial konfliktual petani muncul dan berkembang sejalan dengan berkembangnya praktek sosial agraria yang antagonis, meskipun belum nampak jelas sampai pada menguatnya kesadaran sosiopolitik. Hal ini ditandai dengan terjadinya letupan-letupan kecil berupa protes-protes di beberapa tempat yang dilakukan secara kasuistik di beberapa wilayah konflik pertanahan. Terbukanya peluang politik pusat berimplikasi pada terbukanya peluang gerakan di daerah. Situasi tersebut dengan cepat membuka arus komunikasi, informasi dan gerakan-gerakan pro demokrasi. Situasi ini berpengaruh terhadap berkembangnya kesadaran sosiopolitik petani, sehingga mereka secara psikososial telah siap dan dengan mudah dapat diorganisir, sehingga dengan cepat dapat dimobilisir untuk melakukan aksi-aksi kolektif.

Menurut McAdam (dalam Morris dan Mueller, 1992: 79), kondisi politik menjadi daya dorong penting terhadap proses liberasi kognitif (*cognitive liberation*). Konsep ini menunjuk pada transformasi kesadaran antar partisipan potensial ke dalam aksi kolektif petani. Liberasi kognitif memiliki kekuatan perubahan makna simbolik dalam hubungan sosial konfliktual antara petani dengan pemerintah dan perusahaan. Kesadaran petani yang berkembang begitu cepat pada awal reformasi karena tiga hal, yaitu: (1) sistem sosial agraria yang kehilangan legitimasi; (2) petani yang biasanya fatalistik mulai menuntut perubahan kebijakan agraria; dan (3) petani mengembangkan kesadaran baru terhadap terbukanya peluang politik pusat dan daerah.

Dalam beberapa episode kekuasaan rezim di Indonesia pada umumnya dan di Lampung pada khususnya, melalui kebijakan agraria (pertanahan), berbagai gangguan terhadap kehidupan petani datang dari luar desa atau pada ruang supra desa. Gangguan itu terjadi secara akumulatif, bersifat masif dan merata wilayah Lampung. Alas hak atas tanah pertanian di luar hukum positif tidak diakui, dan dalam rangka penegakan hukum diikuti dengan tindakan kekerasan yang dilakukan secara sistematis, baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan. Secara struktural, petani menjadi semakin tersingkir dalam proses pembangunan pertanian atau perkebunan.

Makna penyingkiran petani dalam proses pembangunan juga tersirat ketika banyak penduduk pedesaan terpaksa bekerja sebagai buruh perkebunan karena tidak memiliki tanah garapan yang memadai, menjadi pekerja serabutan, mencari pekerjaan ke kota hingga ke luar negeri. Makna kehidupan petani menjadi hilang karena banyak di antara mereka yang tadinya sudah hidup tenteram dan sejahtera dengan tanah pertanian yang dikuasai dan dikelolanya secara aktif dan produktif, kemudian dalam waktu singkat menjadi jatuh miskin dan tidak memiliki lahan garapan.

Tindakan pengusiran yang disertai dengan kekerasan dan stigma politik banyak dijumpai pada lahan-lahan yang diklaim secara yuridis formal menjadi wilayah kekuasaan negara (pemerintah) dan perusahaan. Upaya pemerintah untuk “mengusir” petani dari wilayah kehutanan juga dilakukan dengan program transmigrasi lokal. Tetapi, di dalamnya terdapat banyak masalah yang merugikan kelangsungan hidup petani yang dipindahkan. Tanahnya tidak subur, petani harus mulai menggarap lahan dari titik awal, dan terjadi saling klaim antar transmigran terhadap lahan transmigrasi yang di berikan. Situasi yang tidak menguntungkan tersebut mendorong sebagian petani kembali ke

tempat asal dan kembali menguasai tanah pertanian yang sudah nyata-nyata menghasilkan dan mampu membuat hidupnya lebih sejahtera.

Setelah ditelisik ternyata semua itu bermuara pada sebab struktural dari sistem sosial agraria yang antagonis terhadap petani. Dilihat dari formasi sosial agraria, posisi marginal petani dikonstruksi berada di bawah kontrol sepenuhnya oleh negara (pemerintah) dan perusahaan. Posisi petani dieliminir dari elemen utama konstruksi sistem sosial agraria, unsur kontradiksi dan negasi struktural dipertajam dan struktur dominasi cenderung mengarah pada relasi kekuasaan distributif. Sistem sosial agraria yang demikian itu menunjukkan arah kecenderungan konstruksi prinsip-prinsip strukturalnya. Struktur sosial agraria yang dikonstruksi cenderung mengarah pada pola hubungan antagonis daripada simbiosis mutualisme terhadap petani. Sistem sosial agraria seperti ini menjadi sebab mendasar lahirnya konflik-konflik pertanahan, karena tingkat gangguan yang dihadapi petani sudah memasuki ruang ontologisnya. Pada titik ini, jika tidak ada pilihan lain untuk mempertahankannya maka petani akan menggunakan berbagai cara lain dan dalam keadaan dan situasi apapun.

Kesadaran sosiopolitik petani sebagai faktor utama yang memungkinkan dilakukan mobilisasi petani. Pada tahap ini formasi dan aktivasi gerakan dapat dikondisikan sebagai pendukung kuat mobilisasi sumberdaya. Kesadaran sosiopolitik ini dikembangkan dan dikondisikan segera setelah terbukanya peluang politik.

Ketegangan Struktural Agraria dan Penguatan Sub Kultur Oposisi Petani

4.1. Pendahuluan

Muncul dan berkembangnya gerakan petani di Lampung dapat dijelaskan sekaligus dari faktor internal dan eksternalnya. Dari faktor internal dapat dilihat dari dinamika, karakteristik, tujuan, organisasi, dan konstituennya. Pada sisi lain, dari faktor eksternal dapat dilihat dari kondisi-kondisi luar yang relevan mempengaruhi muncul dan berkembangnya gerakan petani. Penjelasan pada bagian ini difokuskan pada salah satu aspek dari faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan eksternal yang dapat memfasilitasi munculnya gerakan petani.

Memfokuskan pada penjelasan tentang kondisi eksternal untuk memahami sebab munculnya gerakan petani di Lampung bukan karena faktor tersebut lebih penting dari faktor eksternal lainnya atau lebih penting dari penjelasan tentang faktor internal. Realitasnya, aksi-aksi kolektif petani muncul dan berkembang melekat di dalam konteks sosiohistoris yang khusus. Fenomena ini membutuhkan penjelasan yang memadai jika sebab-sebab munculnya gerakan petani ingin difahami secara penuh.

Terdapat kondisi-kondisi lingkungan kontekstual umum yang relevan menjadi sebab munculnya gerakan petani, yaitu kondisi-kondisi ketegangan struktural agraria. Berkembangnya ketegangan-ketegangan tersebut sejalan dengan menurunnya kehidupan petani. Selain itu, petani juga merasakan sulitnya memperjuangkan hak-haknya atas tanah pertanian yang diambil secara baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan. Kondisi-kondisi tersebut memfasilitasi berkembangnya sub kultur oposisi petani.

4.2. Ketegangan Struktural

Menurut Smelser (1962:47), konsep ketegangan (*strain*) diartikan sebagai: “*impairment of the relations among and consequently inadequate functioning of the components of action*” (rusaknya hubungan antar dan sebagai konsekuensi rendahnya fungsi dari komponen-komponen tindakan). Dalam kacamata sosiologi,

pandangan Smelser ini berada pada perspektif struktural fungsional dari suatu sistem sosial. Ketegangan dilihat sebagai rusaknya kondisi internal struktur hubungan sosial sebagai akibat dari melemahnya derajat berfungsinya komponen-komponen sistem sosial.

Senada dengan pandangan Smelser, McAdam dan Snow(1997: 2) memaknai ketegangan sosial sebagai semua bentuk gangguan atau kondisi-kondisi sosial yang penuh ketidakpastian yang dapat menjadi stimulan bagi tumbuhnya gerakan sosial. Kemudian Smelser memaknai ketegangan struktural (*structural strains*) sebagai ketegangan (ambiguitas yang dirasakan, deprivasi, inkonsistensi, tensi-tensi, dan konflik-konflik di dalam masyarakat) yang muncul dalam hubungannya dengan cara-cara di mana struktur yang kondusif (suatu struktur yang lebih dulu muncul yang lebih mungkin menjadi pendorong munculnya suatu gerakan tertentu daripada struktur yang lain) itu dirasakan (Harper, 1989: 135; Eckstein, 1989: 5).

Berdasarkan pendapat Smelser dan McAdam dan Snow tersebut di atas dapat diacu untuk memaknai konsep “ketegangan struktural agraria”. Konsep “agraria” dalam studi ini diikutsertakan karena ketegangan struktural tersebut terjadi akibat adanya upaya petani dalam mempertahankan kuasa atas sumberdaya agraria (tanah pertanian) berhadapan dengan kekuatan negara dan swasta. Konsep “ketegangan struktural agraria” dimaknai sebagai labilnya kondisi-kondisi atau adanya ketidakpastian struktur hubungan agraria yang dirasakan oleh petani (dengan segenap elemen pendukungnya) sebagai peluang dan sebagai pendorong bagi munculnya tindakan-tindakan kolektif petani. Pada kondisi ini telah terjadi ketidaksesuaian hubungan antar elemen struktur agraria dalam beberapa aspek seperti nilai-nilai, norma-norma, dan kepentingan. Menurut Smelser, ketegangan struktural terkait dengan berbagai aspek tertentu dalam elemen utama tindakan sosial, yakni: (a) ambiguitas dalam fasilitas situasional, (b) deprivasi dalam tahap mobilisasi motivasi, dan (c) konflik atas berbagai norma sosial yang ada (Smelser, 1962: 278).

Dalam argumen teori tradisional (*breakdown theory*) menyatakan bahwa gerakan sosial adalah “*by-products*” sebagai akibat dari arus perubahan sosial yang cepat dan terjadi disintegrasi sosial yang dipicu oleh kondisi struktural dan tindakan-tindakan yang dapat memunculkan ketegangan dan frustrasi secara ekstrim. Beban psikologis yang demikian berat dapat dilepaskan melalui gerakan sosial (McAdam dan Snow, 1997:2). Akan tetapi, meskipun ketegangan struktural penting sebagai pemicu tetapi tidak berarti bahwa setiap terjadi ketegangan struktural secara otomatis akan direspon dalam aksi-aksi kolektif. Masih diperlukan faktor-faktor lain yang berfungsi

sebagai prasyarat atau prakondisi utama bagi munculnya gerakan, selain sudah adanya ketegangan struktural yang terjadi secara meluas dan akumulatif. Gerakan petani yang dimaksud dalam studi ini adalah “*by-design*”, sehingga ketegangan struktural agraria yang “*by-product*” diposisikan sebagai prakondisi akumulasi sumberdaya mobilisasi potensial yang selalu siap diaktualkan dalam tindakan-tindakan kolektif ketika bersinergi dengan faktor-faktor lain.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa sangat sulit dalam mengukur atau menentukan derajat ketegangan struktural agraria yang secara tepat menjadi prakondisi bagi munculnya gerakan petani. Ketegangan struktural agraria sendiri tidak dapat menjadi satu-satunya faktor penentu pasang-surutnya atau respon gerakan petani. Meskipun demikian, ketegangan struktural agraria tidak dapat diabaikan sebagai prakondisi utama terjadinya akumulasi sumberdaya mobilisasi, jika didasarkan pada suatu asumsi bahwa “*tidak akan ada asap jika tidak ada api*”.

Selain itu, juga sangat sulit menjelaskan meningkatnya ketegangan struktural sesuai dengan kompleksitas persoalan agraria yang dihadapi petani. Akan tetapi, juga tidak dapat diabaikan adanya keterkaitan timbal-balik antara sebab-sebab terjadinya ketegangan struktural yang terkonsentrasi pada perubahan kesadaran, sumberdaya politik, sumberdaya ekonomi dan kebijakan agraria. Mengadopsi pandangan Huiser (1967) dan Wolf (1969) (dalam Ghimire, 2001: 164) bahwa ketegangan struktural terjadi karena terganggunya petani terhadap perkembangan agresif moda produksi skala besar, yakni kepentingan komersialisasi tanah didukung oleh kekuatan negara. Landsberger dan Alexandrov (1984: 38-42) bahkan menyimpulkan secara simultan, yakni: 1) karena terintegrasinya petani ke dalam pasar nasional dan internasional; maka 2) kondisi tersebut mendorong berkembangnya komersialisasi pertanian, dan (3) akhirnya berkembang berbagai gangguan terhadap petani tentang hak dan status atas tanah pertanian. Petani khawatir terjadi penggusuran yang berarti penurunan statusnya, dan ancaman itu bukan berasal dari tuan tanah tetapi dari kekuatan institusi supra desa.

Jadi, perubahan pola hubungan struktural agraria cenderung mengarah pada berkembangnya ketegangan struktural ketika tanah-tanah pertanian di pedesaan berubah menjadi suatu komoditas komersial. Praktek seperti ini sangat mengganggu kelangsungan hidup petani, karena tanah pertanian secara mendasar dirubah hanya berfungsi ekonomi. Perubahan mendasar ini terjadi melalui proses kapitalisme dan perluasan pasar, sehingga berjalan seiring dengan kecenderungan kuat transformasi petani ke dalam posisi proletariat

(sebagai tenaga kerja kasar) pedesaan (Archetti, Fossum and Reiton, 1970: 189). Hall, Hirsch and Li (2011: 5) berhasil mengidentifikasi enam bentuk penyingkiran masyarakat dari akses terhadap tanah atas tindakan para aktor yang berkuasa. Keenam bentuk penyingkiran itu adalah: (1) regularisasi akses terhadap tanah melalui program sertifikasi tanah, formalisasi, dan pemindahan masyarakat, (2) ekspansi ruang dan upaya intensifikasi untuk mengkonservasi hutan melalui pembatasan pertanian, (3) datangnya tanaman-tanaman baru (*new boom crops*) secara massif, cepat, dan terjadinya konversi tanah-tanah untuk produksi tanaman sejenis (*monocropped*), (4) konversi lahan untuk penggunaan di luar sektor agraris, (5) proses perubahan formasi kelas agraria pada skala desa tertentu, dan (6) mobilisasi kolektifitas untuk mempertahankan atau menuntut akses tanah dengan mengorbankan pengguna tanah lain atau penggunaan tanah lainnya.

Argumen-argumen tersebut di atas masih berada pada tataran umum dan terkait dengan saling hubungan antara faktor politik, ekonomi dan ideologi. Bagi petani penggarap faktor penguasaan tanah jauh lebih penting dibandingkan dengan faktor kesadaran ideologis, sedangkan bagi petani kecukupan insentif ideologi itu justru yang lebih menarik. Jika diasumsikan bahwa perlawanan petani membutuhkan basis ideologi perjuangan yang memadai, maka Wolf (1969: 292) berpendapat bahwa petani kelas menengahlah yang menjadi pendukung utamanya. Petani lapisan menengah ini lebih peka terhadap dampak gejolak pasar dan kebijakan agraria, lebih mudah menerima ideologi gerakan, memiliki basis ekonomi independen dan sumberdaya politik taktis. Terjadinya ketegangan-ketegangan relasi kuasa dalam struktur agraria semakin berpotensi mendorong munculnya gerakan petani ketika gangguan eksternal muncul mengenai keduanya. Para petani kecukupan ini berpotensi menjadi aktor strategis gerakan dan menjadi simpul perjuangan petani terutama di lingkungan komunitasnya.

Dalam perspektif moral ekonomi, titik kritis ketegangan struktural terjadi ketika petani merasa terancam kebutuhan dasarnya dan hancurnya tatanan tradisional akibat penetrasi kapitalisme (Scott, 1976, 1989, 2000; Wolf, 1969, 1983; Migdal, 1979). Dalam perspektif Marxian, ketegangan struktural terjadi akibat petani berada pada posisi subordinate dalam moda produksi pertanian dan faktor politik. Menurut Marx upah pekerja tidak bertumbuh secara “nyata” menjadikan mereka sebagai proletarian bukan sebagai petani. Argumen Marx ini menunjukkan bahwa tidak ada petani tanpa penguasaan tanah dan bebas dari posisi subordinasi (Kurtz, 2000:101). Paige (1978)

menganggap argumen Marx tersebut lebih cocok untuk menjelaskan kondisi masyarakat agraris daripada masyarakat industrial. Paige menambahkan faktor politik seperti terancamnya posisi petani miskin dalam relasi kerja dengan petani berkecukupan terkait dengan tanah dan upah. Ketegangan tersebut akan berkembang menjadi aksi-aksi yang radikal jika diikuti dengan kemampuan menggalang solidaritas berbasis ideologi karena terjadi krisis ekonomi dan peluang politik yang mendukung.

Masih dalam perspektif struktural, dalam kasus yang terjadi di Amerika Latin, Susan Eckstein menyimpulkan bahwa ketegangan struktural terjadi akibat petani diperlakukan tidak adil (penindasan) dan terjadi lonjakan beban hidup akibat krisis ekonomi yang tidak dapat diatasi oleh petani. Pada sisi lain respon negara dan kondisi kultural tetap kurang kondusif (Eckstein, 1989:15). Situasi ini diawali adanya bentuk-bentuk kontradiksi tertentu dalam struktur hubungan agraria, kemudian terjadi ketidakpuasan yang terkait dengan kepentingan tertentu pula. Jadi, ketegangan struktural agraria berkembang memuncak karena tersumbatnya saluran (peluang politik), berkembangnya sistem nilai baru, dan ambiguitas peran negara dalam membuat pilihan harus reformis atau menindas petani (Siahaan, 1999: 60-70).

Namun demikian, juga tidak dapat diabaikan perspektif ekonomi politik yang basis premisnya bersifat utilitarian dan *rational choice*. Betapapun kecilnya ketegangan struktural agraria sebagai prakondisi munculnya gerakan petani tidak terlepas dari kalkulasi rasio antara *costs* dan *rewards*, meskipun tidak bebas dari peluang munculnya "*free riders*". Perilaku kolektif petani dimungkinkan sejauh mereka menerima penghargaan selektif atas partisipasinya itu, dan non partisipan akan memperoleh sanksi negatif ketika mereka tidak terlibat di dalamnya (Eckstein, 1989: 4). Jadi, ketegangan struktural agraria terjadi karena kepentingan pihak lain yang tidak pernah dapat disatukan dalam suatu titik kompromi dengan kepentingan substantif petani. Teori ekonomi politik ini lebih didasarkan pada faktor rasionalitas dan intensionalitas tindakan individu atau kolektivitas aktor dan berorientasi pada perubahan tatanan masa depan yang lebih baik (Popkin, 1979; Bates, 1984).

Menurut Huizer, kasus-kasus yang terjadi di banyak negara menunjukkan bahwa ketegangan struktural agraria memuncak akibat frustrasi ekstrim yang dialami petani. Ini terjadi tidak hanya karena kemiskinan dan marginalisasi petani, tetapi juga karena modernisasi atau pembangunan yang menciptakan ketidakcocokan, berada dalam wilayah yang sudah terbuka (tidak terisolasi dan mudah mengakses

atau berkomunikasi dengan pusat kota), dan terjadi dalam wilayah yang berpenduduk relatif padat. Karena petani mengalami erosi status quo yang pada umumnya akibat pembangunan ekonomi, maka ketegangan struktural menjadi pendorong utama petani ikut berorganisasi untuk terlibat dalam gerakan-gerakan sosial (Ghimire, 2001: 187).

Lebih lanjut, Landsberger dan Alexandrov menyimpulkan lima sebab yang memungkinkan unsur-unsur psikologis (kegelisahan atau ketidakpuasan) dalam ketegangan struktural menjadi faktor pendorong utama munculnya gerakan petani, yakni: 1) terjadinya kemerosotan obyektif yang nyata di dalam beberapa atau semua dimensi status; 2) inkonsistensi status atau perbaikan yang tidak seimbang (perbaikan pada beberapa aspek tertentu tetapi terjadi perubahan atau kemerosotan pada aspek lain); 3) perubahan kedudukan petani dibandingkan dengan yang lain; 4) meningkatnya aspirasi kehidupan petani lebih cepat dari perbaikan status obyektif mereka, yakni penyebaran ide egalitarian dan konsepsi tentang hak setiap orang atas kebahagiaan; dan 5) kombinasi dari semuanya (Landsberger dan Alexandrov, 1984: 43).

Dalam kasus di Cina, Zagoria mencatat beberapa kondisi sosial, psikologis, politik dan teknis yang dapat mempercepat munculnya gerakan revolusioner. Pertama, kondisi-kondisi sosial, yaitu: (a) besarnya kelas petani tak bertanah dan miskin tanah dalam sistem tenansi; (b) beratnya tekanan terhadap tanah, dan (c) eksisnya intelegensia pedesaan. Kedua, kondisi-kondisi psikologis, yaitu: (a) ketidakpuasan petani dengan status quo dan tuntutan untuk melakukan perubahan, dan (b) kesadaran petani terhadap praktik penghisapan tuan tanah dan bangkrutnya struktur kekuasaan pedesaan. Ketiga, kondisi-kondisi politik, yaitu: (a) peran organisasi-organisasi revolusioner yang membidaninya (seperti partai komunis), dan (b) kondisi melemahnya para elit pedesaan. Keempat, kondisi-kondisi teknis, yaitu: (a) kemampuan organisasional petani, dan (b) kemampuan organisasional gerakan revolusioner. Semua itu sebagai prasyarat bagi terbentuknya formasi organisasi gerakan untuk mewujudkan tujuan mentransformasi petani dari suatu *'class in itself'* menjadi *'class for itself'* (Chung, 1980: 35).

4.3. Sumber Utama Ketegangan Struktural

Pembahasan tentang sumber utama ketegangan struktural agraria pada bagian ini dikembangkan dari tulisan Hartoyo, dkk. (2008). Ketegangan struktural agraria terjadi ketika petani merasakan adanya sikap dan perilaku yang ambigu, berkembangnya deprivasi

absolut dan relatif, terjadi inkonsistensi, dan juga tekanan-tekanan dari pihak luar. Semua itu muncul berkaitan dengancara-caradirasakannya struktursosial agraria yang kondusif tersebut.

Ketimpangan struktural yang dialami petani sebagai salah satu elemen sistem sosial agraria, merupakan suatu faktor kondusif yang dapat menghasilkan ketegangan struktural. Pada kasus ini, ketegangan hanya akan berkembang jika ketimpangan tersebut dianggap sebagai faktasosial yang menindas petani.

Sumber utama ketegangan struktural antara lain dapat ditemukan dari pola penguasaan tanah pertanian, menurunnya kondisi kehidupan petani baik secara obyektif maupun subyektif, dan sulitnya perjuangan petani untuk memperoleh kembali kekuasaan atas tanah pertanian.

4.3.1. Pola Penguasaan Tanah Pertanian dan Konflik Pertanahan

Berbagai kasus penguasaan tanah oleh masyarakat di pedesaan yang melandasi munculnya gerakan petani secara umum dapat dibagi dua, yakni tanah adat dan non adat. Penguasaan tanah secara adat banyak terjadi baik tanah hak kolektif (ulayat) maupun yang sudah menjadi hak perseorangan. Sedangkan tanah-tanah non adat sebagian besar diperoleh melalui berbagai cara, antara lain melalui pembelian, program kolonisasi dan transmigrasi, hasil pembukaan kawasan hutan (termasuk rawa-rawa), dan mengelola tanah-tanah negara bekas hak *erfpacht* yang ditinggalkan Belanda. Tanah-tanah non adat yang diperoleh dengan berbagai cara tersebut banyak yang diusahakan oleh penduduk pendatang.

Rangkaian kebijakan agraria berhubungan kuat dengan proses perubahan hak penguasaan petani atas tanah. Terdapat empat pola perubahan penguasaan tanah yang bersinggungan dengan hak petani atas tanah, yakni: (1) tanah-tanah masyarakat yang diperuntukkan areal perkebunan; (2) tanah-tanah masyarakat yang diperuntukkan bagi kepentingan program pemerintah; (3) tanah-tanah negara yang diperuntukkan bagi masyarakat; dan (4) tanah-tanah perkebunan bekas *onderneming* yang berpindah tangan menjadi hak penguasaan secara perseorangan. Sedangkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penguasaan tanah dan berujung konflik dengan masyarakat setempat, dapat dibedakan dalam tiga kategori utama, yakni: (1) antara masyarakat dengan pemerintah; (2) antara masyarakat dengan perusahaan (negara dan swasta); (3) antar kelompok-kelompok masyarakat akibat kebijakan pemerintah dan tindakan perusahaan.

Ketiga kategori tersebut secara umum tidak berhubungan dengan derajat kontrol negara, karena relatif tidak berbeda atau sulit

dibedakan. Perbedaannya tampak dari kasus yang terjadi (seperti yang terjadi di wilayah kehutanan atau bukan wilayah kehutanan), derajat tindak kekerasan yang dilakukan terhadap petani (sesuai dengan kualitas persoalan pertanahan yang dihadapi), dan derajat respon (perlakuan) pihak pemerintah dan perusahaan terhadap petani.

Konflik-konflik kepentingan terhadap penguasaan tanah antara negara dan perusahaan dengan petani, sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Banyak instansi pemerintah dan perusahaan yang berkonflik dengan komunitas masyarakat lokal. Contohnya, Departemen Transmigrasi menguasai ribuan hektar lahan yang seharusnya dibagikan kepada transmigran justru diselewengkan peruntukannya, dikelola sendiri bermitra dengan perusahaan.⁴⁷ Bahkan suatu kejadian yang sulit difahami oleh petani bahwa ada lembaga yang secara khusus berfungsi sebagai lembaga penelitian dan pengembangan teknologi harus menguasai tanah pertanian yang luasnya ratusan hektar. Padahal, dilihat dari kebutuhannya, petani dapat menyediakan bahan-bahan berapapun jumlahnya yang diperlukan oleh lembaga tersebut untuk diteliti. Kerjasama dengan petani setempat dalam pengelolaan lahan pertanian tidak pernah dilakukan, dan yang terjadi justru kerjasama dengan perusahaan.

Penjelasan tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa petani di pedesaan sudah mampu berfikir kritis atas tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan. Perkembangan kapasitas berfikir kritis petani dihasilkan bukan hanya akibat dari proses interaksi sejalan dengan bekerjanya sistem sosial agraria yang berlaku, tetapi juga diperoleh melalui kemudahan akses interaksi dan komunikasi dengan dunia luar yang semakin terbuka. Berkembangnya gerakan demokrasi yang menyuarakan kesetaraan dan keadilan agraria dan pentingnya pengelolaan tanah pertanian secara aktif oleh petani menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan tersebut.

Secara institusional nampak bahwa kesalahan konstruksi sistem sosial agraria dalam praktek hubungan agraria sehari-hari bermuara pada tanggung jawab negara dalam melaksanakan kapasitas politiknya mengeluarkan kebijakan pertanahan untuk memenuhi sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Dilihat dari perilaku para aktornya, kesalahan konstruksi sistem sosial agraria itu sebagai akibat dari tindakan kolaboratif yang secara sadar dilakukan oleh penguasa dan pengusaha. Oleh sebab berkembangnya konstruksi kesadaran palsu penguasa dan

⁴⁷ Diuraikan dalam Memorandum Hukum: *Dasar-Dasar Pertimbangan Pentingnya Penyerahan Eks Lahan PT. PAGO/PT TDA Kepada Warga Pemohon 11 Kampung di Padang Ratu, Lampung Tengah*. Bandar Lampung, 2006.

pengusaha dalam praktek hubungan sosial agraria yang diyakini kebenarannya itu, maka para petani banyak yang menderita. Untuk menangkai berkembangnya protes petani, maka dikonstruksi suatu argumen bahwa:

“Semua itu sebagai konsekuensi dari biaya pembangunan yang harus ditanggung, sebagai bagian dari proses mencapai kesejahteraan masyarakat seutuhnya dan seluruhnya yang akan dinikmati dalam jangka panjang”.

Artinya, demi suksesnya program “pembangunan” maka petani yang tergesur, terpingirkan, tersingkir, teraniaya saat itu terkait dengan persolan pertanahan adalah sebagai bagian dari biaya pembangunan yang harus ditanggung, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dari semakin banyaknya tanah-tanah pertanian yang dikuasai perusahaan dan berujung konflik dengan masyarakat setempat, menunjukkan bahwa komunitas petani di pedesaan telah mengalami akselerasi dan akumulasi berbagai persoalan kebutuhan hidup. Sebagai petani, maka sarana untuk mengatasi kebutuhan hidupnya adalah sangat tergantung pada ketersediaan lahan pertanian. Kebijakan dan konflik pertanahan tidak terlepas dari praktek-praktek yang dilakukan pada masa lalu dan konflik-konflik tersebut terus berlanjut. Semakin luas, mendalam dan terakumulasinya persoalan pertanahan yang dihadapi petani, maka semakin memerlukan penyelesaian yang lebih komprehensif dan tuntas di lapangan. Berkembangnya situasi ini semakin berimplikasi pada akselerasi perubahan sosial, politik, ekonomi dan kultural yang kurang mendukung bagi perbaikan kehidupan petani.

1. Kebijakan Pembangunan Mengabaikan Kepentingan Petani

Wilayah Lampung memang dari dulu strategis menjadi tempat persinggahan awal para migran ke pulau Sumatera. Sejak ketentuan Belanda tentang adat *gemeenschappen* dihapus, maka tidak ada rintangan lagi bagi penduduk pendatang yang bukan warga “*marga*” (kesatuan masyarakat adat Lampung) untuk mendapatkan hak pakai atas tanah dalam wilayah bekas “*marga*” tersebut. Daya tarik hak pakai atas tanah tersebut, antara lain, yang mendorong penduduk luar bermigrasi ke Lampung (Swasono dan Singarimbun, 1985). Bahkan pada tahun 1960-an Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah mengeluarkan kebijakan pembukaan kawasan hutan kepada penduduk sekitar dan jika dikelola dengan baik selama dua tahun dapat ditingkatkan menjadi hak milik.

Pada tahun 1950 penduduk Lampung sebanyak 718.000 jiwa (Sayogyo, 1982). Pada tahun 2000 meningkat pesat menjadi 6.998.535 jiwa (BPS Provinsi Lampung, 2000), dan pada tahun 2010 sudah mencapai 7 608 405 jiwa (BPS Provinsi Lampung, 2010). Faktor penyebabnya antara lain karena tingginya pertumbuhan penduduk alami, keberhasilan para transmigran yang dahulu mampu menarik arus migrasi swakarsa dari daerah asal, dan keberhasilan pembangunan di daerah Lampung menjadi daya tarik para migran spontan dari daerah lain, terutama dari Pulau Jawa. Begitu pesatnya arus penduduk masuk ke Lampung maka dibuat tiga kebijakan transmigrasi: yaitu (1) selama Pelita III transmigrasi ditempatkan di Pulau Sumatera di luar Lampung, (2) pada Pelita IV Provinsi Lampung sudah tertutup sebagai daerah penerima program transmigrasi, dan (3) dikembangkan sistem transmigrasi lokal (translok).

Kebijakan tersebut ternyata tidak mempengaruhi migrasi penduduk dari daerah lain ke Lampung. Bahkan jumlahnya mengalami peningkatan dan sebagian di antaranya menempati kawasan hutan. Kondisi tersebut berada di luar kemampuan kontrol pemerintah daerah dan juga akibat lemahnya pemerintah dalam melakukan sistem koordinasi. Pada kebijakan berikutnya mereka itu dikenal sebagai “perambah hutan”. Kemudian untuk mengatasi para perambah hutan dan masalah kependudukan lainnya seperti kepadatan penduduk dan lahan kritis, maka Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan Nomor: 074/DPD/HK/1980, tanggal 26 April 1980 tentang Program Transmigrasi Lokal atau dikenal dengan istilah “Translok”, yaitu:

... pemindahan penduduk Lampung yang tinggal di kawasan hutan, daerah kritis, daerah terkena proyek strategis, dan daerah padat penduduk ke daerah lainnya di wilayah provinsi Lampung yang masih luas dan telah ditetapkan pemerintah daerah.

Meskipun tercatat sudah sebanyak 70.225 KK “perambah hutan” yang berhasil dipindahkan oleh Kanwil Deptrans dan PPH Provinsi Lampung, tetapi program translok tersebut justru yang paling kurang diminati oleh penduduk Lampung dibanding program transmigrasi lainnya, karena sebagian besar transmigran adalah petani yang sudah hidup mapan di daerah asal (Rusmialdi, 1995:7). Menyimak definisi tersebut, jelas bahwa program translok memiliki orientasi kepentingan yang berbeda, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang dipindahkan tetapi lebih pada penataan kembali persebaran penduduk di wilayah Lampung. Sasaran utamanya adalah penduduk yang telah menggarap dan bermukim di suatu areal kawasan hutan, yaitu mereka yang sudah tinggal dan berusaha di wilayah tertentu

yang masih dianggap wilayah yang dikuasai negara. Banyak petani yang tinggal menetap di wilayah tertentu yang sudah lama mereka buka sebagai lahan pertanian dan pemukiman, kemudian diusir begitu saja dan dipaksa pindah.

Pada praktiknya, penduduk yang hidupnya sudah mapan di daerah asal dipindahkan ke daerah yang sama sekali baru dan mereka harus memulai hidup baru sebagaimana para transmigran lain sebelumnya. Tekanan politik, fisik, sosial dan psikologis terus menerus dialami selama mereka menolak dipindahkan dengan berbagai alasan yang tidak pernah didengar oleh pemerintah. Banyak petani yang kemudian frustasi hidupnya tidak tetap. Mereka yang dipindahkan pemerintah dan berada di daerah tujuan banyak yang menderita karena lahan yang diberikan kondisinya tidak memadai, berupa lahan baru, kering dan kurang subur.⁴⁸

Jelas bahwa program translok kurang diminati dan banyak mendapat perlawanan penduduk setempat. Seperti penduduk di Pulau Pangung diusir dan dipindahkan. Lahan yang sudah mereka kelola sejak tahun 1920-1930 kemudian oleh pemerintah dimasukkan dalam wilayah hutan lindung. Kasus yang sama terjadi di Register 19 Gunung Betung. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutan No. 472/Kpts-II/1992 kawasan ini telah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman yang berfungsi sebagai wilayah konservasi, tangkapan air, pendidikan dan pariwisata. Perlakuan yang sama terjadi pada masyarakat desa Dwikora, Lampung Utara dan di desa Sidorejo, Lampung Tengah.

Dilihat dari kebijakan agraria secara umum ketegangan struktural agraria di pedesaan bersumber dari tiga hal, yaitu: (1) terintegrasinya sumberdaya agraria (tanah) dalam struktur kepentingan ekonomi dan politik supra lokal; (2) penetrasi

⁴⁸Salah satu contoh seperti yang terjadi di wilayah Gunung Betung. Tahun 1991 penduduk dusun Muara Tiga wilayah Gunung Betung kembali diusir dengan adanya proyek reboisasi. Mereka harus mengungsi atau ikut transmigrasi lokal ke Rawa Jitu Lampung Utara. Mereka dianggap sebagai perambah dan perusak hutan, maka harus pindah secara swadaya. Penduduk yang berangkat adalah dari Talang Pelita kurang lebih 20 KK, sebanyak 30 KK dari Talang Muara Tiga II dan Talang Sejali. Akan tetapi pada tahun 2000 mereka kembali lagi ke Muara Tiga. Alasannya bahwa lahan di Rawa Jitu sama sekali tidak subur, harus memulai dari nol lagi, dan mereka harus meninggalkan harta kekayaan yang berharga yaitu kebun yang sudah menghasilkan. Tingkat kesuburan tanahnya di Rawa Jitu jauh lebih jelek dibandingkan dengan yang di wilayah asal. Jangankan ditanami kopi atau padi, ditanami singkong saja tidak menghasilkan. Beberapa warga ada yang berangkat tapi banyak juga yang tidak, karena menurut Kepala Desa waktu itu jatah lahan untuk mereka diberikan kepada daerah lain. Beberapa warga yang ikut transmigrasi karena mereka tidak betah hidup disana kemudian pulang lagi ke Muara Tiga. Sebagian warga yang bersedia ikut transmigrasi ternyata tidak semua bisa diberangkatkan karena lokasi penempatan mereka telah dikuasai oleh oknum tertentu (warga dari daerah lain). Rupanya telah terjadi jual beli lahan transmigrasi oleh oknum pemerintah (Sumber: WALHI Lampung dan Kawan Tani Lampung, 2008)

kapitalisme, yakni komersialisasi dan politisasi tanah yang mendorong masuknya para pemodal (investor); (3) tanah sebagai faktor produksi dikuasai secara besar-besaran (prakteknya dilakukan dengan cara yang tidak fair); dan (4) banyak kebijakan pertanahan yang akhirnya bermasalah dengan komunitas masyarakat setempat.

Sudah lama terjadi bahwa kebijakan pertanahan secara sistematis dikeluarkan terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi. Ini dapat dicapai melalui kerjasama dengan para pemodal. Pada tahun 1970-an sudah muncul protes petani kepada pemerintah daerah terkait dengan persoalan pertanahan. Ini sejalan dengan praktik pembebasan tanah masyarakat adat untuk kepentingan industri perkebunan. Beberapa implikasi dan dampaknya adalah: (1) lahan dan penduduk pedesaan diarahkan semakin teintegrasi ke dalam pasar yang lebih luas; (2) berkembangnya komersialisasi pertanian yang dikuasai oleh para pemodal besar dan didukung kuat oleh negara; dan (2) mendorong munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup petani.

Banyak lahan pertanian yang sudah dikuasai secara produktif oleh petani, tiba-tiba diambil-alih atau dibebaskan secara paksa atau dengan cara halus baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Lahan-lahan tersebut sebagian besar adalah untuk usaha agro industri, kemudian pada kawasan hutan tanaman industri, hutan konservasi, pembangunan tambak moderen, perkantoran pemerintah, dan kawasan pariwisata. Kapitalisasi sumberdaya tanah tersebut jelas ikut andil menjadi sebab berkembangnya persoalan pertanahan di pedesaan. Faktor lain adalah penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara dengan cara mengambil paksa lahan-lahan yang dikuasai dan dikelola secara produktif oleh penduduk sekitar, dengan mengusir atau memindahkan penduduk yang ada di dalamnya. Mereka dituduh sebagai perambah dan perusak hutan. Program ini untuk kepentingan menjaga wilayah hutan konservasi, pengembangan hutan produksi, dan pembangunan waduk untuk PLTA.⁴⁹

2. Praktik Penguasaan Tanah Komunitas Setempat Oleh Negara dan Perusahaan Dengan Cara Tidak Fair

Secara khusus ketegangan struktural agraria yang terjadi bersumber pada beragam faktor. Semuanya merupakan implementasi kebijakan pertanahan yang tidak responsif terhadap kepentingan petani. Berdasarkan kasus-kasus yang diteliti paling sedikit terdapat

⁴⁹ Kasus tersebut terjadi di wilayah kawasan Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, di Register 1, 8, 17, 19, 22, 28, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44,45, 46, 47, dan 48.

enam faktor utama, yakni: (1) delegitimasi bukti-bukti alas hak petani atas tanah; (2) buruknya sistem ganti rugi; (3) praktik pembebasan tanah yang cacat hukum; dan (4) buruknya administrasi pertanahan; dan (5) janji dan kesepakatan dengan petani yang diingkari oleh pemerintah dan perusahaan.

3. Deligitimasi Bukti-Bukti Alas Hak Atas Tanah

Berdasarkan kebijakan pertanahan yang dikeluarkan kemudian, maka lahan-lahan yang dikuasai petani dengan alas hak secara tradisional tidak diakui keberadaannya. Banyak petani yang memiliki bukti ijin hak penguasaan dan pemilikan tanah (hasil pembukaan hutan), tetapi alas hak tersebut menjadi lemah ketika bersentuhan dengan kepentingan pembangunan.

Kebijakan pertanahan dan implementasinya yang merugikan petani, dimana beberapa indikasinya dalam praktik dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Proses lahirnya kebijakan agraria yang tidak partisipatif. Penetapan peralihan hak atas tanah masyarakat menjadi areal perkebunan atau untuk kepentingan lain bersifat sepihak tidak melibatkan masyarakat secara penuh. Dari rangkaian kebijakan yang dibuat sikap pemerintah sangat jelas berpihak kepada pengusaha paralel dengan sikapnya yang meminggirkan petani.
- b. Sikap diskriminatif dan ambivalensi pemerintah tampak nyata dan terstruktur. Posisi pemerintah pusat lebih dominan dan kondisi ini juga memberi peluang semakin bersemainya konflik kepentingan dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak mengizinkan kawasan hutan dikelola dan dihuni masyarakat, tetapi Dinas Kehutanan Provinsi masih memberikan ijin kepada perusahaan untuk menebang hutan di kawasan Hutan Lindung. Konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mencuat setelah diberlakukan UU No. 22/1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Akibatnya masyarakat khususnya yang mengelola lahan di kawasan hutan menjadi korban seiring dikeluarkan Peraturan Daerah No.7/2000 tentang "Iuran Hasil Hutan Bukan Kayu (IHBBK)" dengan ijin pemanfaatan hutan yang masa berlakunya satu tahun dan dapat diperpanjang.
- c. Dalam pelaksanaan program pembangunan kawasan hutan, para petani diposisikan sebagai obyek mobilisasi dan partisipasi pasif pada lahan-lahan yang dulunya sudah mereka kuasai secara produktif. Kemudian, petani mengalami intimidasi dan suaranya tidak pernah didengar (setiap dikumpulkan yang didapat hanya

amarah para petugas), seperti kasus program rehabilitasi DAS dengan sistem jalur yang dilaksanakan oleh PT. Inhutani V tahun 1995 (Tim PSDHBM Watala. 2004: 25).

4. Buruknya Sistem Ganti Rugi

Penetapan ganti rugi (sewa tanah) dilakukan secara sepihak, tidak ditepati, tidak sesuai (dengan janji dan dengan harga pasaran), banyak yang tidak menerima, dan dilakukan dengan tidak transparan. Masyarakat pada akhirnya merasa mendapatkan perlakuan yang tidak fair, tidak adil. Ganti rugi tersebut ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.

Formasi hubungan yang demikian jelas menempatkan petani berada pada posisi lemah dan dalam kondisi tekanan yang kuat. Terjadi persetujuan semu karena masyarakat menerima begitu saja ganti rugi yang ditetapkan secara sepihak, tetapi dibalik sikapnya itu menyimpan rasa ketidakpuasan. Ada juga masyarakat yang berani melakukan protes karena nilai ganti rugi tidak sesuai dengan harga pasaran, dimanipulasi, tidak merata dan tidak transparan.

5. Praktik Pembebasan Tanah Cacat Hukum

Banyak kasus tanah yang sudah dikuasai secara aktif dan produktif oleh petani kemudian diambil-alih dan dibebaskan secara paksa dengan berbagai macam cara. Masyarakat merasa tidak pernah diajak musyawarah dan prosedur pembebasan tanah dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum baik hukum positif maupun hukum adat. Memang tidak dapat dihindari telah terjadi kerjasama yang erat di antara para aktor pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan dengan pihak perusahaan dalam pengambil-alihan dan pembebasan tanah yang dikuasai dan dikelola secara produktif oleh masyarakat setempat.

6. Buruknya Sistem Administrasi Pertanahan

Mencermati banyaknya praktik penguasaan tanah dalam proses kapitalisasi oleh kekuatan institusi supra desa, maka terdapat indikasi bahwa telah terjadi kesenjangan antara meningkatnya persoalan tanah dengan sikap pemerintah untuk menyelesaikan. Semua itu akibat sikap pemerintah yang kurang jelas dan tegas dalam menyelesaikan pertanahan. Terjadinya tumpang tindih pemilikan dan penguasaan tanah, batas lahan tidak jelas, proses administrasi simpang siur, yang semuanya tidak direspon secara cepat dan tegas untuk diselesaikan. Pembentukan kepanitiaan pengadaan tanah untuk 'pembangunan'

hanya melibatkan aparatus negara sampai ke tingkat desa. Kondisi ini tampak tidak ada peluang partisipasi masyarakat melalui perwakilan, dan hak-hak mereka atas tanah selalu berada dalam posisi yang rentan untuk dikalahkan.

7. Janji dan Kesepakatan Diingkari

Manipulasi persetujuan petani dan pengingkaran terhadap janji-janji dan kesepakatan yang telah dibuat bersama ternyata juga ikut memicu maraknya persoalan pertanahan. Petani tidak dapat berbuat banyak ketika terjadi pengingkaran oleh pemerintah maupun oleh perusahaan, karena situasi sosiopolitik yang tidak mendukung.

Persoalan “janji” dan “ingkar” yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan dalam penguasaan tanah-tanah petani tidak lagi tepat jika dipandang sebagai suatu tindakan kasuistik. Cara-cara tersebut merupakan fakta sosial yang menjadi bagian dari strategi penaklukan struktural terhadap petani. Fakta ini diperkuat dengan sikap pemerintah yang cenderung diam dan terkesan tidak mau tahu bahkan ‘membiarkan’ ketika aparat keamanan digunakan perusahaan untuk meredam reaksi perlawanan masyarakat setempat. Bahkan pada kasus lain, pemerintah (meskipun dalam pandangan lain dikatakan hanya dilakukan oleh sebagian oknum) oleh masyarakat setempat dianggap telah turut membantu perusahaan dalam melakukan tindak penipuan dan pembodohan dengan menebar janji-janji palsu demi suksesnya proyek besar yang disebut dengan pembangunan.

4.3.2. Menurunnya Kondisi Kehidupan Petani

Struktur hubungan agraria yang asimetristernyata mengandung sifat statika, sehingga dalam jangka panjang petani tetap lemah dalam akses, partisipasi dan kontrol atas penguasaansumberdayatanah. Bahkan sampai saat ini struktur hubungan agraria tersebut tidak pernah berubah secara berarti.⁵⁰ Petani tetap berada dalam jangkauan kontrol negara secara ketat sesuai dengan aturan main yang berlaku yang kurang memihak kepada kepentingan petani. Tekanan struktural agraria yang didukung dengan kemudahan akses petani terhadap

⁵⁰ Banyak contoh kasus di Lampung yang masih terjadi hingga saat ini, antara lain: (1) Pada hari Sabtu, 16 Januari 2009 warga Kampung Gunung Keramat, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara melakukan unjuk rasa berhadapan dengan PT. Great Giant Pineapple dan terjadi keriuhan sehingga 14 orang warga ditangkap; (2) Sebanyak 2.122 warga Moro-Moro yang menempati wilayah Register 45 mereka mempunyai hak pilih tetapi tidak bisa memilih karena tidak memiliki KTP dan usulan penerbitan KTP di wilayah tersebut di tolak pemerintah setempat. Wilayah yang diduduki petani tersebut merupakan wilayah HTI yang dikuasai PT. Silva Inhutani melalui keputusan Menteri Kehutanan No.93/KPTS-11/1997, tanggal 17 Februari 1997.

dunia luar, menjadi faktor pendorong berkembangnya deprivasi (obyektif dan relatif),⁵¹ menguatnya pembingkaihan isu ketidakadilan (*injustice frame*), dan berkembangnya ideologi egalitarian. Saling terkait di antara kondisi-kondisi tersebut menjadi landasan bagi munculnya protes-protes petani lokal berkembang menjadi gerakan sosial.

1. Deprivasi absolut/obyektif. Deprivasi absolut mencakup deprivasi material seperti rasa lapar, rasa sakit, dan kurang aman yang menjadikan orang dekat dengan kondisi-kondisi minimal untuk bertahan. Banyak yang menyatakan bahwa perubahan-perubahan dalam kondisi sosial obyektif, seperti kemiskinan ekstrim dan meningkatnya harga pangan, menjadi sebab terjadinya perilaku kolektif dan gerakan sosial. Di beberapa wilayah konflik pertanahan banyak petani yang hidup miskin dan tidak memiliki lahan garapan. Kebijakan konservasi hutan dan program translok sebagai solusi justru menyengsarakan banyak petani. Mereka banyak yang tidak lagi menjadi petani otonom, menguasai dan menggarap lahan sendiri. Dampak terhadap penurunan kondisi obyektif lainnya seperti rumah yang hilang atau hancur, pendidikan anak terlantar, pekerjaan yang hilang, beban psikologis yang berat dan sebagainya.
2. Deprivasi relatif/subyektif. Paling tidak terdapat lima kelompok kasus yang dapat diidentifikasi terkait dengan berkembangnya deprivasi relatif. Pertama, melalui program translok, banyak petani yang kemudian dipindah paksa oleh pemerintah di wilayah lain. Ternyata kondisi lahan di tempat tujuan jauh lebih buruk dari kondisi di tempat asal. Banyak di antara mereka yang kemudian kembali lagi, karena di tempat yang baru mereka harus bekerja susah payah lagi kalau mau bertahan hidup. Kedua, karena akan dibuat perkebunan oleh perusahaan maka petani yang sudah bermukim dipindah paksa di tempat lain yang tidak jelas statusnya dan kondisinya jauh lebih buruk dari kondisi semula. Ketiga, mereka membanding petani lain yang hidupnya berkecukupan secara ekonomi karena memiliki lahan yang dikelola sendiri.

⁵¹Gurr (1970:24) mendefinisikan deprivasi relatif "...as actors perception of discrepancy between their value expectations and their value capabilities (sebagai persepsi para aktor tentang terjadinya pertentangan antara nilai yang diharapkan dengan nilai yang dicapai)." Deprivasi relatif eksis ketika terjadi kesenjangan yang berarti antara nilai yang diharapkan dengan nilai yang dihasilkan, atau dalam bahasa yang sederhana antara apa yang diharapkan orang dengan apa yang dialami. Kondisi ini sangat sedikit dialami oleh orang yang mengalami deprivasi absolut (obyektif), tetapi banyak dialami oleh orang-orang yang relatif masih merasa kekurangan dari keadaan yang diharapkan. Teori deprivasi relatif juga mensiratkan pentingnya kelompok-kelompok referensi, yang menjadi sumber munculnya harapan-harapan itu. Jadi, orang merasa terpuasi atau kekecewaan dengan membandingkan kondisi-kondisi yang dialaminya dengan kategori-kategori yang berkaitan dengan yang dialami oleh orang lain.

Keempat, petani yang kecewa karena tanahnya sudah diambil-alih oleh perusahaan tetapi mereka tidak diberi kesempatan yang baik untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kelima, dalam aksi-aksi petani yang mengambil kembali haknya atas tanah relatif sama banyaknya dengan yang menjarah. Mereka yang ikut dan yang menguasai lahan hasil aksi pendudukan lahan banyak yang tidak miskin secara obyektif.

3. Meningkatnya rasa diperlakukan tidak adil. Program-program pembangunan di pedesaan berdampak pada penurunan drastis kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis petani. Mereka menjadi obyek atau subyek pasif sehingga lemah dalam akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat pembangunan. Petani ditaklukkan melalui stigma politik, pendekatan keamanan dan tuduhan melakukan serangkaian tindakan melawan hukum dan diberi sanksi. Komunikasi dan hukum di sumbat rapat-rapat, sehingga banyak petani yang menjadi korban pembangunan. Sifat dan kondisi pedesaan yang sudah terbuka terhadap dunia luar atau dengan lingkungan pergaulan yang lebih luas memungkinkan aspirasi kehidupan petani menjadi meningkat. Tuntutan terhadap peningkatan kualitas hidup bukan lagi menjadi monopoli masyarakat perkotaan tetapi sudah merasuk jauh di dalam relung kehidupan masyarakat desa. Meningkatnya aspirasi kehidupan yang tidak diimbangi capaian yang sesuai mendorong munculnya berbagai ketidapuasan.
4. Pengaruh ideologi egalitarian atau neo-populis. Kondisi dan posisi petani yang lemah dan merasa diperlakukan tidak adil dalam proses pembangunan, mengharuskan mereka berjuang dan memungkinkan masuknya ideologi perjuangan yang sesuai. Petani difahami menjadi otonom harus memiliki lahan dan mengolahnya sendiri. Tuntutan petani menjadi berubah seiring dengan semakin kuat diterimanya ideologi perjuangan yang sesuai. Ideologi egalitarian atau neo-populis tumbuh subur, berkembang pesat dan dapat diakses dari berbagai sumber. Paket ideologi yang diusung dari luar lebih berorientasi non material dan bersifat strategis yang mendukung kepentingan material (lahan pertanian) petani yang bersifat praktis. Contohnya, pada awalnya petani hanya menuntut diijinkan melakukan pertanian tumpang sari pada tanah negara yang dikuasai perusahaan. Tuntutan ini diajukan karena desakan kebutuhan ekonomi dan saat itu masih masa Orde Baru. Pasca jatuhnya Orde Baru, ketika aktif menjadi anggota organisasi gerakan maka tuntutan mereka berubah, yaitu “tanah kembali kepada petani dan sertifikasi tanah”. Tetapi dalam banyak kasus

pembebasan tanah petani pada awalnya direspon dengan tuntutan ganti rugi yang memadai atau memperoleh hak garap kembali. Tuntutan-tuntutan seperti kerdaulatan petani, hutan kerakyatan, reforma agraria itu bukan berasal dari petani tetapi dari kalangan aktivis pendukung gerakan petani.

4.3.3. Sulitnya Perjuangan Petani Pada Era Orde Baru

Ketegangan struktural agraria telah berproses cukup lama, terjadi secara akumulatif, dan menyebar. Bahkan praktik penguasaan tanah oleh negara dan swasta yang berujung bentrok dengan petanimulai menguat pada dasawarsa tahun 1980-an dan semakin meluas hingga dasawarsa tahun 1990-an. Kondisi tekanan struktural ini sangat mengganggu kelangsungan hidup petani dan eksistensi komunitasnya, sehingga mendorong munculnyaperjuangan kolektif petani.

Sistem sosial agraria yang memarginalkan petani telah memacu berkembangnya kemampuan kritis petani dalam mencerna, memahami dan menafsirkan konteks ruang (fisik dan sosiokultural) yang mereka alami. Dengan semakin kuat tekanan struktural yang mengancamnya maka petani semakin berusaha keras untuk mengembangkan stok pengetahuan praktisnya, mengembangkan cara dan tindakan alternatif meskipun bertentangan dengan sistem sosial agraria yang mapan. Semua itu dilakukan petani dalam batas-batas kritis untuk mengatasi kebutuhan hidup yang bersifat dasar. Ini berarti bahwa pengetahuan, sikap dan perilaku petani tidak selalu harus sejalan dengan sistem sosial agraria yang mapan (yang ternyata merugikan petani) meskipun mendapat tekanan kuat. Suatu kondisi yang dirasa mengganggu melampaui batas toleransi kebutuhan dasarnya, maka petani akan mencari berbagai cara untuk mengatasinya. Pada masa struktur politik otoritarian, reaksi-reaksi kolektif petani tetap rmuncul mulai dari protes klasik, kemudian gerakan konsensus sampai dengan berkembang menjadi gerakan lokal-tradisional.

Dalam banyak kasuskonflik pertanahan terdapat variasi penyebab langsung munculnya aksi-aksi kolektif petani terkait dengan perlakuan tidak adil oleh penguasa dan pengusaha yang menjadi sumber ketegangan struktural. Saling terkait antara deprivasi (absolut dan relatif), ketidakadilan, dan pengaruh ideologi egalitarian dengan jelas secara bersama-sama menjadi landasan bagi munculnya gerakan petani.

Deprivasi absolut dalam beberapa kasus sudah dapat menjadi sebab munculnya perilaku kolektif petani, seperti aksi protes petani

karena terusir dari wilayahnya sehingga tidak memiliki lahan dan tempat tinggal. Tetapi, dalam beberapa kasus lain bahwa penurunan kondisi obyektif saja tidak cukup, masih perlu didukung deprivasi relatif (subyektif). Secara akumulatif, meningkatnya deprivasi relatif didukung oleh meningkatnya rasa ketidakpuasan (perlakuan tidak adil). Semuanya mendorong petani untuk meminta bantuan hukum atau bantuan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah pertanian yang dihadapi. Tindakan kolektif petani secara institusional ini disebut dengan “gerakan konsensus” karena dilakukan menurut tata aturan hukum yang mapan. Sejalan dengan semakin kuatnya arus masuknya ideologi egalitarian (neo-populis) maka faktor-faktor di atas menjadi saling terkait dalam mendorong munculnya gerakan lokal-tradisional. Gerakan terakhir ini perlu dukungan lebih kuat dari kalangan non petani (kelas menengah kota) dibanding aksi-aksi protes dan gerakan konsensus untuk menghadapi tindakan represif negara dan perusahaan.

1. Aksi Protes Klasik

Protes merupakan perilaku kolektif petani yang paling dasar dalam gerakan sosial dan biasanya tidak berbentuk (*amorph*). Aksi ini dilakukan oleh semua komunitas di wilayah konflik pertanahan dengan bentuk dan intensitasnya yang beragam. Ini lebih merupakan reaksi-reaksi emosional yang biasanya disertai dengan kekerasan dan amuk massa. Karena tindakannya bersifat emosional, spontan dan sporadis maka tidak terorganisir dengan baik. Berbagai upaya mereka lakukan seperti menyandera atau merusak peralatan, gedung, rumah, tanaman, jalan, dan sebagainya. Tindakan demikian biasanya dilakukan ada yang bermakna mempertahankan diri sebagai respon balik atas tindakan kekerasan yang dilakukan pihak lawan, dan ada yang bermakna perusakan atau penghancuran atau pemusnahan.

Protes merupakan tindakan primer yang lebih bersifat ekspresif daripada instrumental. Perilaku ini cenderung dilakukan untuk menumpahkan kemarahan, frustrasi, atau emosi-emosi lainnya (Barkan dan Snowden, 2001: 6). Perilaku tersebut mereka lakukan karena mendapat tekanan yang kuat dari aparat keamanan dan sumber kehidupannya (kebutuhan dasar) terancam secara mendadak.

Perilaku protes tersebut terjadi di banyak tempat ketika terjadi tindakan pembebasan dan mengambil-alihan tanah komunitas petani setempat. Karena perilaku tersebut sangat lemah, tidak terorganisir, dan belum mendapat dukungan kuat dari kalangan non petani, maka dengan mudah dapat dilemahkan, dipatahkan dan dilokalisir agar tidak meluas.

2. Gerakan Konsensus

Persoalan pertanahan bersifat mendasar bagi petani sehingga akan terus diaktifkan sebelum terselesaikan secara tuntas di lapangan. Ketika memakai strategi protes tidak berhasil secara memuaskan, kemudian petani membangun strategi baru, yakni “gerakan konsensus” (*consensus movement*).⁵² Dalam studi ini gerakan konsensus, meskipun termasuk gerakan sosial, tetapi eksistensinya cenderung lebih dekat dengan ciri-ciri sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) daripada gerakan sosial. Melalui gerakan konsensus, para petani secara kolektif berupaya penyelesaian persoalan pertanahan sesuai dengan prosedur yang berlaku (*institutional concensus*) dan berhubungan dengan para pemegang otoritas setempat.⁵³ Paling sedikit terdapat enam unsur yang memungkinkan para petani berpartisipasi di dalam proses perjuangan bersama, terutama melalui pendekatan konsensus (disajikan dalam Tabel 4).

- a. Kepercayaan petani terhadap hak penguasaan tanah tidak bersifat magis tetapi lebih didasarkan pada bukti-bukti tradisional tertentu (fisik dan non fisik). Bukti-bukti tersebut di kalangan petani adalah sah dan menjadi alas hak yang cukup kuat untuk menguasai dan memilikinya.
- b. Tuntutan petani menguat seiring dengan semakin berkembangnya kekuatan perjuangan. Ketika menjadi anggota organisasi gerakan tani, maka tuntutan tersebut menguat bahwa lahan dapat dikuasai kembali oleh petani.
- c. Meskipun berada pada wilayah konflik yang sama tetapi mereka cenderung membuat kelompok sendiri-sendiri (terpisah) dan berjuang sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi dan kekuatan masing-masing.

⁵² Istilah “gerakan konsensus” (*consensus movement*) menurut McCarthy dan Wolfson (1988: 26) menunjuk pada mobilisasi sosial yang didukung oleh masyarakat luas (80-90 % penduduk) dan “sedikit atau bukan oposisi terorganisir”. Sedangkan menurut Lofland (1989:163) dibedakan antara “*consensus movements*” dan “*conflict movements*” dilihat dari derajat kepentingan obyektif yang berlawanan dan upayanya untuk merubah kebijakan sosial (Lihat Morris dan Mueller, 1992: 205, 275).

⁵³ Menurut Michael Schwartz dan Shuva Paul, terdapat dua faktor kunci yang membedakan antara kelompok kepentingan dan gerakan sosial. *Pertama*, kelompok kepentingan selalu berhubungan dengan para pemegang otoritas yang diberi mandat secara institusional dan mengikuti prosedur institusional yang ada untuk mencapai tujuannya. Sedangkan gerakan sosial dapat melakukan itu, tetapi juga melakukan tindakan-tindakan kolektif yang merusak aturan dan mengacaukan proses normal dalam upaya untuk mencapai tujuannya. *Kedua*, kelompok kepentingan dapat menyerukan konstituennya untuk aktif mendukung, tetapi modus operandi utamanya (dan barangkali eksklusif) adalah interaksi antara pemimpinnya dengan para pemegang otoritas institusional. Sedangkan gerakan sosial lebih mengandalkan mobilisasi massa konstituen untuk mencapai tujuannya (Morris dan Mueller, 1992: 221).

- d. Peranan pemimpin sangat menentukan dan posisinya sebagai simpul perjuangan komunitasnya. Pada komunitas adat yang menjadi pemimpin adalah para pemuka adat, sedangkan pada komunitas non adat para pemimpinnya bisa muncul dari warga setempat yang ditokohkan. Secara umum ciri para pemimpin kelompok adalah memiliki wawasan luas, memiliki kemampuan supranatural (kesaktian), mampu membangun jaringan ke luar desa, konsisten dan komitmen tinggi dalam perjuangan, kondisi ekonominya relatif sudah mapan, mampu berargumentasi, mampu melakukan koordinasi dan negosiasi, dan berani dalam berjuang. Meskipun terdapat ciri moderen dan tradisional, para pemimpin umumnya mengacu pada struktur otoritas tradisional baik dalam komunitas adat maupun non adat.

Tabel 4. Unsur-Unsur Gerakan Konsensus

Unsur-Unsur	Keterangan
Kepercayaan	Merasa berhak atas tanah sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki.
Kepentingan (Tuntutan)	Pengembalian tanah, ganti rugi yang memadai, pembagian tanah, pengusahaan lahan, sertifikasi tanah.
Kelompok	Informal dengan struktur sangat sederhana dan anggotanya masih terbatas dalam suatu komunitas di masing-masing wilayah konflik.
Kepemimpinan	Tradisional dan kharismatik
Kesadaran	Konflikual berhadapan dengan penguasa dan pengusaha.
Strategi Perjuangan	Institusional-konsensus

Sumber: Hartoyo, 2010.

- e. Perasaan senasib (*in group*) sudah tumbuh dan mereka sadar berhadapan dengan para pemegang otoritas (*out-group*) setempat. Paling tidak mereka berada pada tingkat kesadaran perjuangan karena adanya pertentangan nilai dan kepentingan dengan negara dan perusahaan. Ini merupakan bentuk awal terjadinya konsensus mobilisasi skala mikro. Mereka dapat lebih intensif berinteraksi mengembangkan kesadaran diskursif.
- f. Pertimbangan biaya (*costs*) dan keuntungan (*benefits*) dalam berjuang tidak bisa diabaikan. Strategi perjuangan yang ditempuh selain ditentukan oleh faktor kekuatan internal kelompok juga berkembang seiring dengan kekuatan kontrol negara. Tetapi, secara umum mereka cenderung menggunakan jalur institusional

baik melalui jalur hukum formal maupun melalui mediasi dan negosiasi.

Melalui strategi institusional (gerakan konsensus) ternyata juga tidak efektif, yakni banyak yang kasusnya masih terkatung-katung. Krisis kepercayaan petani terhadap lembaga hukum formal semakin kuat menjelang jatuhnya rezim Orde Baru dan tetap tinggi pada awal-awal reformasi. Indikasinya adalah sangat sedikit persoalan pertanahan yang diajukan petani untuk diselesaikan dengan cara penal (litigasi) dibanding dengan cara non penal (non litigasi), meskipun dengan cara non penal juga banyak yang kandas. Salah satu kasus konflik tanah pertanian antara petani dengan perusahaan perkebunan di wilayah Lampung Selatan, sebagaimana diungkapkan oleh seorang tokoh gerakan petani yang ikut bermusyawarah waktu itu:

Pada tahun 1997 pernah dilakukan musyawarah antara petani dengan perusahaan perkebunan yang dimediasi oleh organisasi Gema Trikora dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Hasilnya, disepakati masyarakat boleh melakukan tumpang sari seluas 300 Ha di lahan yang dikuasai perusahaan. Sudah ada suratnya dari pemerintah kabupaten Lampung Selatan waktu itu. Tetapi, alhamdulillah pihak perusahaan tidak mau melaksanakan kesepakatan itu.

Kata "Alhamdulillah" yang diucapkan tersebut paling tidak memiliki dua makna terkait dengan aksi-aksi petani di kemudian hari. Pertama, jika ternyata pihak perusahaan waktu itu mau melaksanakan kesepakatan bersama tanaman tumpang sari, maka ini dapat dipakai sebagai alasan perbuatan baik pihak perusahaan dan sebagai bukti peduli terhadap nasib petani di sekitarnya. Paling tidak sikap perusahaan itu di kemudian hari akan menjadi beban psikologis tersendiri bagi petani untuk melakukan aksi-aksinya. Kedua, sikap perusahaan yang mengingkari kesepakatan tersebut merupakan peluang bagi petani dikemudian hari (pada tahun 1998) untuk berani melakukan aksi reklamasi pada lahan yang dikuasai perusahaan.

Di Trimodadi, Lampung Utara di mana masyarakat setempat bahkan sudah berjuang sejak 1960-an ketika tanah yang sudah dikuasainya diambil paksa oleh perusahaan. Pada masa Orde Baru sudah meminta penyelesaian ke pemerintah pusat tetapi tidak ada tanggapan. Akhirnya mereka melakukan aksi reklamasi meskipun tetap gagal. Seorang pengurus inti IPL menceritakan:

"... perjuangan kami untuk memperoleh kembali tanah yang dicaplok perusahaan sudah sejak orde lama. Ketika itu dipimpin oleh kepala kampung dan dibantu oleh BTI. Kemudian pada masa

pak Harto kami juga sudah berupaya secara baik-baik dan sudah mengadu ke pusat Jakarta, tetap tidak ada tanggapan. Bahkan ketika perusahaan melakukan perluasan lahan maka tanah-tanah penduduk di seitar sini juga diambil lagi. Kita semua tahu bagaimana kerasnya Orde Baru dan waktu itu kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa sakit hati dan terus mengadu pada pemerintah. Kami juga sering diancam-ancam dan dicap anggota PKI, BTI. Ketika jaman reformasi kami sudah berusaha merebut kembali tanah-tanah itu, bahkan barisan ibu-ibu dikerahkan, dan dibantu oleh SPL, tetapi tetap tidak berhasil “.

Penyelesaian pertanahan oleh berbagai komunitas petani selama lima tahun (1998-2002), seperti di lima wilayah kabupaten/kotadi provinsi Lampung (Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tulang Bawang dan Way Kanan) dari 220 kasus yang ada hanya 71 (32%) kasus yang dapat diselesaikan. Dari 43 kasus yang diajukan dengan cara penal terdapat sebanyak 24 (56%) kasus yang terselesaikan, sedangkan dari 177 kasus yang diajukan dengan cara non penal terdapat 47 (27%) kasus yang diselesaikan (Sunarto, 2007: 219).

3. Gerakan Lokal-Tradisional

Gagalnya perjuangan petani melalui pendekatan hukum dan negosiasi mendorong mereka membangun strategi gerakan lokal-tradisional, yakni aksi-aksi kolektif non-institusional, berlokus lokal dan berbasis pada otoritas tradisi setempat. Mereka melakukan tindakan-tindakan kolektif yang cenderung keluar dari tata aturan yang berlaku (*non institusional*) atau lebih mengandalkan pada aksi massa melakukan tekanan ke atas untuk mencapai tujuannya. Misalnya, komunitas petani di Dwikora, Lampung Utara dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat berunjuk rasa ke Gubernur dan berusaha mempertahankan diri tidak mau dipindahkan mengikuti program Translok. Mereka tetap menguasai lahan meskipun menghadapi tekanan-tekanan sangat kuat.

Gerakan lokal-tradisional dilakukan juga karena upaya melalui jalur-jalur institusional tetap kandas. Upaya penyelesaian melalui jalur hukum (dengan bantuan hukum dari LSM) memakan waktu lama dan tidak ada kejelasan dan kepastian. Upaya negosiasi untuk mengolah lahan tidur dan tumpang sari juga tidak berhasil. Para pemegang otoritas cenderung mempertahankan status quo dengan tetap memperkuat hegemoni dan pendekatan keamanan.

Kondisi tersebut menyebabkan kesadaran konsensus berkembang menjadi kesadaran konfliktual-oposisional. Pada tingkat

kesadaran konsensus, petani memposisikan upaya penyelesaian persoalan tanah pertanian yang dianggap menjadi haknyacenderung melalui jalur hukum formal (institusional). Sebaliknya pada tingkat kesadaran konfliktual, petani memposisikan persoalan tanah pertanian cenderung perlu dimunculkan dalam aksi-aksi kolektif non institusional melalui wadah tatanan tradisi setempat. Meskipun demikian, upaya negosiasi dan mediasi masih tetap terbuka untuk dilakukan.

Kegagalan petani menggunakan pendekatan institusional mendorong untuk beralih pada pendekatan non institusional yang diwujudkan dalam gerakan lokal-tradisional. Cirinya, gerakan ini masih mengandalkan tara cara, struktur organisasi, data-data atau informasi dan manajemen aksi yang sederhana dan terikat pada struktur otoritas tradisi masyarakat setempat. Gerakannya masih bersifat lokal, terbatas di lingkungan komunitasnya, lebih didasarkan pada kesadaran konfliktual (belum sampai pada kesadaran politik) dan lebih ditujukan untuk mencapai kepentingan material (lahan pertanian).

Pada sisi lain semakin menguatnya solidaritas, kepercayaan, loyalitas dan komitmen moral menjadi pertanda telah disituasikanya semangat kolektif petani. Dalam gerakan lokal-tradisional, petani semakin kuat dalam pendefinisian bersama tentang siapa “kita (*in-groups*)” dan siapa pihak “lawan (*out-groups*)”. Mereka melakukan proses interaktif terus menerus, dan dalam pendefinisian bersama tersebut (konstruksi, negosiasi, aktivasi dan formasi) berhubungan dengan orientasi gerakan dan menafsirkan peluang dan tekanan-tekanan di mana gerakan tersebut dilakukan. Mereka yang di dalam komunitasnya menjadi tokoh masyarakatadalah juga menjadi simpul gerak perjuangan petani.

Para anggota gerakan lokal-tradisional cenderung terbatas dalam wilayah komunitas yang sama. Tetapi, keadaannya berbeda ketika aksi-aksi kolektif petani sudah meluas sampai keluar desa (kecamatan, kabupaten dan provinsi). Aksi kolektif ini sudah mulai bertambah mendukungnya, atau partisipanyang semakin beragam. Hal ini dilakukan karena kuatnya tekanan oleh negara dan perusahaan. Mereka beranggapan bahwa semakin banyak partisipan maka semakin kuat posisi tawarnya. Meskipun alas hak dalam perjuangan petani tetap penting, tetapi dengan pendekatan terbuka seperti itu berkosekuensi pada terbukanya peluang pihak luar untuk ikut mencapai kepentinganya, bahkan termasuk di dalamnya para penunggang bebas (*free-riders*). Selain itu, aksi-aksi kolektif yang dilakukan sering kurang dapat dikendalikan atau dikontrol, antara lain

karena cara pengorganisasian yang masih sederhana. Karena beragamnya latar belakang partisipan dalam aksi-aksi kolektif petani membuat strategi gerakan berbasis otoritas tradisional menjadi kurang efektif.

4.4. Berkembangnya Sub Kultur Oposisi Petani

Upaya petani dalam mengelola beragam struktur mobilisasi sumberdaya telah menghasilkan strategi aksi kolektif institusional dan non institusional. Tetapi semua upaya yang dilakukan tersebut tetap tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang mereka hadapi. Kontrol politik negara sangat kuat dan menutup rapat upaya petani untuk memperjuangkan haknya atas tanah yang diambil-alih oleh pemerintah dan perusahaan.

Dari banyak kasus kegagalan aksi-aksi kolektif petani dapat disimpulkan bahwa sejauh berbagai upaya yang telah dilakukan masih bersifat lokalistik, terpisah-pisah dan tidak mendapat dukungan kuat dari pihak lain, maka upaya tersebut tidak dapat diandalkan sebagai instrumen bagi keberhasilan perjuangan petani. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta bahwa sistem sosial agraria dominan adalah teritegrasi secara nasional dan sikap politik negara tetap konsisten diarahkan pada arus utama modernisasi pembangunan yang berpihak kepada para pemodal besar. Otoriterianisme tetap berlaku untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, sedangkan petani harus membatasi hak-hak demokrasinya agar memberi ketenangan politik bagi pertumbuhan ekonomi (Kleden, 2004: 32). Pada sisi lain, petani tetap pada pendiriannya terus berjuang memperoleh hak kuasanya atas tanah pertanian. Keteguhan pendirian petani tersebut kemudian melahirkan suatu konsepsi yang disebut dengan istilah “sub kultur oposisi petani” (Hartoyo, 2010; 2013).

Konsep “sub kultur” dapat dimaknai sebagai seperangkat perilaku dan kepercayaan sekelompok orang yang berbeda dan yang membedakan mereka dari kultur dominan di mana mereka menjadi bagiannya. Sedangkan konsep “oposisi” menunjuk pada pandangan, sikap dan perilaku yang bertentangan dengan pihak lain yang dianggap sebagai lawan. Jadi “sub kultur oposisi petani” diartikan sebagai realitas sosiokultural melawan dominasi yang direproduksi secara aktif dalam struktur skemata petani, di dalam ruang-ruang interaksi dan berkembang selama persoalan pertanahan struktural berlangsung. Sub kultur oposisi petani lebih dinamis dibanding kultur dominan, tetapi sifatnya kurang cair (*fluid*) dibanding pembingkai kolektif (*collective framing*). Di dalam sub kultur oposisi petani selain terdapat akumulasi ketidakpuasan juga terdapat penguatan kesadaran

konflikual sejalan dengan kegagalan atas berbagai strategi perjuangan petani yang pernah ditempuh.

Terbentuknya sub kultur oposisi petani mambuka ruang bagi meningkatnya situasi hubungan agraria konflikual yang berkembang di kalangan petani. Di dalam situasi hubungan tersebut sudah ada kesadaran oposisional tetapi masih berada pada derajat kesadaran konflikual belum sampai pada kesadaran politik. Dimaksud kesadaran oposisional (*oppositional consciousness*) menurut Morris dan Muller (1992:363) adalah menunjuk pada seperangkat ide-ide dan kepercayaan “memberontak” yang dikonstruksi dan dikembangkan oleh kelompok tertekan dengan tujuan mengarahkan perjuangannya untuk merusak atau meruntuhkan, atau menggulingkan suatu sistem dominasi. Sub kultur oposisi petani berkembang sejalan dengan berkembangnya situasi hubungan konflikual dan tekanan struktural. Situasi ini mendorong rasa “frustasi aktif” (ketidakpuasan) petani dan meningkatkan ketegangan struktural. Rasa ketidakpuasan tersebut sempat dimunculkan dalam beberapa kasus tindakan kolektif secara spontan, gerakan konsensus hingga gerakan lokal-tradisional.

Kontinuitas dalam tahapan tindakan kolektif petani tidak nampak dominan didasarkan pada faktor deprivasi absolut (obyektif), tetapi lebih nampak secara bersama-sama didasarkan oleh faktor deprivasi relatif (subyektif) dan faktor lainnya. Tidak semua partisipan dalam aksi kolektif adalah miskin dan tidak memiliki lahan pertanian. Akan tetapi, fenomena tersebut merupakan pertanda bahwa sistem sosial agraria dominan tidak lagi kebal terhadap ketidakpuasan dan bahkan dapat mendorong berkembangnya perilaku oposisi petani. Kesadaran konflikual petani tumbuh sejalan dengan berkembangnya sub-kultur alternatif dengan segenap unsur-unsurnya yang terwujud dalam sub kultur oposisi petani. Ini dapat menjadi suatu “*tool kit*” yang sangat berguna untuk mengkonstruksi tindakan-tindakan strategis dalam perjuangan petani selanjutnya.

4.5. Sumber Utama Ketegangan Struktural dan Tahapan Perjuangan Petani

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa sumber utama ketegangan struktural agraria tidak semata-mata terletak pada interest masing-masing pihak terhadap tanah pertanian maupun pada praktik ketidakadilan, tetapi lebih pada konstruksi struktur sosial agraria berbasis pada kepentingan pembangunan yang terwujud dalam praktek-praktek ketidakadilan dalam hubungan sosial agraria sehari-hari, antara petani dengan negara dan swasta. Pelaksanaan kebijakan

pertanahan berjalan seiring dengan jumlah petani yang kehilangan tanah pertaniannya.

Fenomena tersebut menunjukkan keberadaan sistem sosial agraria yang meminggirkan petani dan terciptanya struktur hubungan agraria yang timpang. Dampaknya adalah berkembangnya deprivasi (absolut dan relatif) dan petani merasa diperlakukan tidak setara dan tidak adil. Maraknya konflik-konflik pertanahan menunjukkan adanya ketidaksesuaian hubungan antar elemen sistem sosial agraria, bahkan semakin melegitimasi praktik peminggiran petani. Kondisi ini melahirkan dua bentuk sikap petani, yakni pasif dan reaktif. Sikap reaktif petani termanifestasikan dalam bentuk aksi-aksi kolektif sesuai dengan kekuatan struktur sumberdaya mobilisasi dan derajat tekanan struktural atau peluang politik, baik di pusat maupun di daerah.

Tumbuhnya ideologi egalitarian atau neo-populispada aras lokal memperkuat daya dorong munculnya protes klasik petani berkembang menjadi gerakan lokal-tradisional. Pada satu sisi, proses dan tahapan gerakan-gerakan lokal tersebut menunjukkan adanya inovasi strategi perjuangan petani. Akan tetapi, upaya-upaya mereka banyak yang gagal. Gerakannya bersifat lokalistik atau dapat dilokalisir, sehingga mudah dihambat dan dilemahkan oleh pihak lawan.

Kegagalan akumulatif perjuangan petani pada tingkat lokal memicu muncul dan berkembangnya sub kultur oposisi petani. Sub kultur inimengandung sumberdaya mobilisasi potensial dalam aksi-aksi kolektif petani selanjutnya. Ketika peluang politik pusat dan daerah terbuka, maka sumberdaya potensial tersebut dengan mudah dapat diorganisir dan dimobilisir dalam bangunan kekuatan gerakan sosiopolitik petani.

Tabel 5. Sumber Utama Ketegangan Struktural Agraria dan Perjuangan Petani

Kebijakan Pertanian (Sumber Umum)	Praktik Penguasaan Tanah (Sumber Khusus)	Efeknya Terhadap Kondisi Petani
1. Terintegrasinya tanah dalam struktur kepentingan ekonomi dan politik supra lokal.	1. Delegitimasi alas hak atas tanah petani tradisional.	1. Deprivasi obyektif/absolut (Miskin, pekerja kasar/rendahan, buruh tani dan buruh perusahaan, pekerja tak tetap, meng-anggur).

2. Penetrasi kapitalisme: komersialisasi dan politisasi tanah mendorong masuknya para pemodal besar.	2. Mengabaikan sistem ganti rugi yang adil.	2. Deprivasi absolute dan subyektif subyektif/relatif (ingin hidup lebih sejahtera).
3. Tanah sebagai faktor produksi utama yang harus dikuasai secara besar-besaran.	3. Pembebasan tanah melanggar hukum.	3. Berkembangnya rasa ketidakadilan dan ketidakmerataan (akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat pembangunan).
	4. Memperburuk administrasi pertanahan.	
	5. Mengingkari janji dan kesepakatan.	4. Pengaruh ideologi luar (demokrasi, egalitarian, neo populis).

Tahapan Perjuangan Petani

Tahapan Gerakan	Uraian
Protes Klasik	Gerakan tak berbentuk, berupa reaksi-reaksi spontan, emosional, sporadis baik sembunyi maupun terbuka (biasanya dalam bentuk kekerasan fisik atau amuk massa). Hasilnya selalu gagal dan dengan mudah ditekan dan dilemahkan.
Gerakan Konsensus	Komunitas petani lokal berjuang bersama bertujuan menyelesaikan persoalan pertanahan baik melalui jalur hukum maupun dengan cara mediasi dan negosiasi. Hasilnya banyak yang tidak terselesaikan.
Gerakan Lokal-Tradisional	Aksi-aksi kolektif non institusional dengan ciri-ciri sederhana dalam organisasi, data dan strategi aksi; terikat oleh struktur otoritas tradisi setempat; berlokus lokal (wilayah komunitas petani tertentu); tujuannya berorientasi material (tanah kembali atau mendapat ganti rugi).
Sub Kultur Oposisi Petani	Realitas sosiokultural melawan dominasi yang direproduksi secara aktif dalam struktur schemata petani, di dalam ruang-ruang interaksi dan berkembang selama persoalan pertanahan struktural berlangsung.

Sumber: Hartoyo, 2010.

Gerakan Petani Dalam Kerangka Gerakan Sosiopolitik

5.1. Pendahuluan

Gerakan petani di Indonesia pada umumnya dan di Lampung pada khususnya yang muncul bersamaan dengan tumbangannya rezim Orde Baru merupakan suatu gerakan sosiopolitik. Aksi-aksi kolektif yang dilancarkan petani merupakan perang manuver yang ditujukan untuk melakukan perubahan kebijakan agraria.

Gerakan petani di Lampung muncul berawal dari perubahan situasi politik pusat yang berimbas pada perubahan situasi politik daerah. Pada masa ini petani dan para penggiat pro demokrasi dari kelas menengah kota bersatu memanfaatkan perubahan situasi politik tersebut sebagai peluang untuk melakukan aksi-aksi kolektifnya.

Langkah pertama adalah memanfaatkan sub kultur oposisi dan kesadaran politik petani untuk diintergrasikan ke dalam wadah organisasi tani. Keduanya mempermudah dalam merekrut dan mengorganisir petani dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat. Melalui kekuatan organisasi tani basis itulah aksi-aksi kolektif petani dapat dilakukan, baik dalam melakukan tekanan ke atas kepada para pemegang otoritas, maupun dengan cara reklaiming. Hasil dari aksi-aksi kolektif tersebut memiliki efek positif dan negatif, langsung dan tidak langsung terhadap petani.

Pada bagian ini secara rinci menjelaskan tentang konstruksi sumberdaya mobilisasi, anatomi gerakan sosiopolitik petani, respon petani terhadap peluang politik, aksi-aksi kolektif petani, dan efek dari aksi-aksi kolektif tersebut. Penjelasan ini didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh dari para aktivis gerakan petani dan para pengurus organisasi tani tingkat basis dan tingkat wilayah Lampung, dan para petani yang aktif berpartisipasi dalam aksi-aksi kolektif. Data-data tersebut sebagian besar sudah dituangkan dalam karya Hartoyo (2010) dan Hartoyo, dkk. (2010).

5.2. Konstruksi Sumberdaya Mobilisasi

Aksi-aksi kolektif petani tidak terlepas dari bagaimana latar internal organisasinya, terutama terkait dengan prakondisi munculnya gerakan, peran jaringan pendukung, dan aktivitas aktor strategisnya. Pertama, gerakan petani dipicu oleh kondisi khusus, yakni berkembangnya ketegangan struktural. Kedua, persoalan pertanian tidak terselesaikan secara tuntas di lapangan, bahkan terjadi secara akumulatif, massive, dan merata. Ketiga, gerakan tersebut didukung kuat oleh elemen masyarakat sipil. Keempat, peran elemen non petani sama kuatnya dengan elemen petani dalam mencapai keberhasilan gerakan dan dalam menentukan pasang surutnya gerakan petani.

Perkembangan gerakan petani ditandai dengan semakin diformalkan organisasi gerakan petani baik sebelum maupun sesudah melakukan aksi-aksi kolektif. Gerakan petani dapat dikatakan sebagai gerakan sosial karena direncanakan dengan matang dan terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, dilihat dari proses penguatan struktur organisasi gerakannya dibedakan antara gerakan petani konstruksi dari atas dan dari bawah (Hartoyo, dkk., 2010). Dimaksud dengan gerakan petani konstruksi dari atas adalah suatu gerakan yang organisasi taninyasecara formal sudah dibentuk terlebih dahulu sebelum mengembangkan anggota basis dan melakukan aksi-aksinya. Sedangkan gerakan petani konstruksi dari bawah terjadi melalui penguatan struktur organisasi tani dibentuk bersamaan dengan proses aksi-aksi kolektif petani. Prosesnya dimulai dari pengorganisasi anggota tingkat basis menjadi organisasi secara formal dan terstruktur hingga pada tingkat supra lokal. Kesamaannya adalah bahwa kedua organisasi gerakan petani tersebut sama-sama disahkan atau dideklarasikan melalui suatu konggres. Berikut ini akan dijelaskan gerakan petani konstruksi dari atas dan dari bawah, dengan mengambil kasus di Provinsi Lampung.

5.2.1. Konstruksi Gerakan dari Atas

Sebelum organisasi gerakan petani ini berdiri, pada mulanya tanggal 21 September 1998 para aktivis non petani dari beberapa organisasi masyarakat sipil dan beberapa tokoh petani dari berbagai wilayah kabupaten dalam satu wilayah provinsi diajak untuk mengikuti seminar Pembaruan Agraria. Seminar itu diselenggarakan oleh ormas nasional bekerjasama dengan ormas di daerah. Selesai seminar mereka kemudian diajak berdiskusi di salah satu sekretariat ormas dengan agenda membentuk organisasi tani sebagai organisasi gerakan agraria di tingkat wilayah provinsi. Pada hari berikutnya, kemudian sebanyak 60 orang utusan perwakilan pergi ke Jakarta yang

difasilitasi oleh salah satu ormas nasional bekerjasama dengan ormas di daerah..

Pada tanggal 22 September 1998 mereka mengikuti aksi unjuk rasa di DPRD di provinsi. Karena belum mempunyai wadah organisasi tani, maka dalam aksi tersebut mengatasnamakan “Masyarakat Tani Daerah”. Pada tanggal 24 September 1998 mereka pergi ke Jakarta untuk memperingati Hari Tani dan melakukan aksi di DPR-RI. Setelah aksi mereka kembali ke UI Depok untuk mendengarkan mimbar bebas.

Pada bulan Oktober 1998 (sebulan setelah dari Jakarta) mereka bertemu menindaklanjuti perlunya dibentuk organisasi tani sebagai organisasi gerakan agraria skala provinsi. Pertemuan dihadiri oleh beberapa organisasi masyarakat sipil dan diikat dalam wadah “konsorsium”. Dari hasil pertemuan itu mereka mempersiapkan diri untuk melakukan kongres yang rencananya dilaksanakan pada bulan Desember 1998. Kemudian pada hari Rabu 9 Desember 1998 berhasil dilakukan kongres pertama. Hari dan tanggal tersebut sekaligus disepakati sebagai hari lahirnya organisasi gerakan petani yang baru dibentuk.

Organisasi tani ini menganut model federatif dan sebagai wadah perjuangan massa dan kader petani yang mandiri dan berdaulat. Tujuannya adalah merombak dan memperbaharui, memulihkan dan menata (1) model pembangunan ekonomi secara umum dan kebijakan agraria secara khusus, dan (2) demokrasi di bidang politik secara umum dan kedaulatan politik petani secara khusus, keduanya agar sesuai dengan Pancasila dan UUD’45. Strategi perjuangannya adalah: (1) selalu mempertimbangkan kebutuhan permasalahan, kehendak, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh massa dan kader petani; (2) memadukan gerakan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan petani secara tepat, menyeluruh, sistematis dan penuh perhitungan; (3) perombakan, pembaharuan, pemulihan dan penataan sistem agraria nasional yang sejati untuk keadilan dan kemakmuran bersama bagi petani dan seluruh rakyat Indonesia; (4) memperjuangkan terjadinya pemulihan kedaulatan politik petani dan seluruh rakyat Indonesia untuk keadilan dan kemakmuran bersama bagi petani dan seluruh rakyat Indonesia; (5) memperjuangkan terjadinya perombakan sistem agraria agar menjadi adil dan beradab serta pemulihan kedaulatan politik petani untuk keadilan dan kemakmuran bersama bagi kaum tani dan rakyat seluruh dunia sebagai pelaksana tanggung jawab bersama petani dan masyarakat Indonesia sebagai warga dunia.

Kepengurusan organisasi sesuai dengan hasil kongres pertama adalah selama tiga tahun. Dalam kepengurusan tersebut terdiri dari

dua badan, yakni Dewan Pimpinan Petani (DPP) dan Badan Pimpinan Pelaksana (BPP). Organisasi petani basis anggota disebut Organisasi Tingkat Lokal (OTL). Jumlah DPP ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan cakupan wilayah kerjanya setingkat kabupaten. DPP inilah yang mengangkat BPP, dan masing-masing anggota DPP memiliki sekretariat di daerah yang berasal dari daerah asalnya. Dalam Anggaran Dasar organisasi juga dinyatakan bahwa kalangan non petani dapat menjadi pengurus BPP.

Segera setelah organisasi tani tingkat wilayah provinsi ini terbentuk kemudian keanggotaan petani basis diperluas. Persoalan pertanahan dan pertanian diangkat dalam suatu isu ketidakadilan dan diwujudkan dalam aksi-aksi kolektif petani. Jadi, sejak awal dibentuknya organisasi tani tingkat wilayah provinsi ini sudah menjadi anggota atau berjejaring kuat dengan organisasi gerakan agraria tingkat nasional.

5.2.2. Konstruksi Gerakan dari Bawah

Gerakan petani konstruksi dari bawah atau konstruksi struktur sumberdaya mobilisasi (*human resources/assets*) gerakan petani dari bawah, diawali dengan pembukaan Posko Pengaduan. Setelah ada pengaduan dari komunitas petani lokal tentang masalah pertanahan, kemudian segera dilanjutkan dengan pengorganisasian berbagai komunitaspetani yang disebut Posko Reformasi Rakyat dan Mahasiswa Bersatu (PRRMB). Organisasi tani yang dibentuk pada tingkat basis disebut Posko Basis, dan yang mengkoordinir beberapa Posko Basis disebut Posko Induk. Pada tingkat wilayah Kabupaten disebut Koordinator (Korwil), dan kemudian dibentuk organisasi tani tingkat provinsi sebagai organisasi gerakan agraria. Selain itu bahwa posisi para aktor strategis non petani berada sejajar dengan posisi para elit petani. Meskipun mereka berada di luar struktur organisasi gerakan, tetapi peran mereka sangat menentukan pasang-surutnya aktivitas organisasi gerakan petani dan aksi-aksi kolektif petani.

Terbentuknya PRRMB berarti petani sudah memiliki wadah identitas kolektif sendiri. Tetapi sebagai suatu gerakan sosiopolitik bersama petani, para aktor non petani masih belum terwadahi. Label “mahasiswa” dalam PRRMB pada dasarnya merepresentasikan kelompok non petani, tetapi dalam organisasi itu lebih menunjukkan penguatan identitas kolektif petani. Sedang gerakan reformasi yang menjadi agenda gerakan masyarakat sipil tidak hanya dilakukan petani tetapi mencakup semua elemen organisasi pendukung (non petani). Semua elemen pendukung kemudian diikat dalam suatu wadah organisasi tersendiri, yakni sebagai organisasi berbentuk konsorsium

terdiri dari 36 elemen organisasi masyarakat sipil, termasuk di dalamnya PRRMB. Jadi sejak awal terbentuknya PRRMB menjadi elemen dan memperkuat struktur organisasi konsorsium tersebut, sehingga posisinya sudah tidak otonom.

Pasca dilakukan aksi kolektif perdana pada tanggal 25-26 Agustus 1998, kemudian tanggal 1 September 1999 dijadikan hari lahir dan tanggal 9 September 1999 sebagai hari berdirinya organisasi tani tingkat provinsi ini. Sejak ini sudah memiliki sekretariat sendiri, dan berhasil dirumuskan beberapa tuntutan menurut bidangnya masing-masing sebagai berikut:

1. Bidang ekonomi: (a) menuntut dikembalikannya tanah petani yang dirampas secara paksa oleh rezim Orde Baru; (b) menuntut diutamakannya ekonomi rakyat secara konkrit (ekonomi kerakyatan); (c) menuntut diberhentikannya penindasan dan perampasan tanah petani.
2. Bidang politik: (a) tolak Habibie dan adili Soeharto; (b) menuntut dikembalikannya harta Soeharto dan kroninya untuk mengatasi krisis ekonomi; (c) menuntut dicabutnya Dwi Fungsi ABRI; (d) turunkan harga; (e) bentuk pemerintahan transisi yang dipimpin oleh pemerintahan sipil demokratik; (f) pemutusan sistem sentralisasi; (g) referendum untuk rakyat Timor Leste.⁵⁴
3. Bidang sosial: (a) rakyat menolak disebut perambah hutan; (b) desa-desa yang dihilangkan secara paksa status hukumnya harus dikembalikan lagi menjadi desa definitif; (c) desa-desa yang berada di areal register harus di *enclave*.

Pada tanggal 14-17 Mei 1999 berlangsung kongres pertama. Dari sini mulai mencuat konflik-konflik kepentingan antar kelompok pendukung.

5.3. Anatomi Gerakan Petani

Gerakan petani sebagai suatu gerakan sosial karena memiliki struktur sumberdaya mobilisasi yang jelas dalam bentuk organisasi gerakan sosial (*social movement organization*). Menurut karakteristik yang dikemukakan oleh Scott (Mustain, 2007:24-25), bahwa karakteristik dari gerakan sosial adalah: (1) lebih terorganisir, sistematis, dan kooperatif; (2) berprinsip atau tanpa pamrih; (3) memiliki akibat revolusioner; dan (4) mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi. Kemudian, dengan

⁵⁴ Pada waktu itu para mahasiswa dari Timor Leste yang sedang tugas belajar (biaya negara) di Lampung sudah bergerak memanfaatkan momentum dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Gerakan mereka berbaur dan berada di tengah-tengah gerakan reformasi mahasiswa di Provinsi Lampung.

mengacu pada pandangan Landsberger (1984) dan Lofland (1996), terdapat tujuh unsur atau karakteristik utama gerakan sosial, yakni sebab, tujuan dan sasaran, strategi, ideologi atau kepercayaan, keanggotaan, kepemimpinan, struktur organisasi dan efek gerakan. Sesuai dengan tujuh unsur tersebut maka organisasi tani skala provinsi yang terjadi di Lampung, baik konstruksi dari bawah maupun dari atas, memenuhi semua unsur sebagai organisasi gerakan sosial.

Struktur gerakan petani merupakan instrumen perjuangan petani yang dikembangkan bukan lagi hanya untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek atau tujuan material, seperti penguasaan tanah pertanian, tetapi juga untuk mencapai tujuan jangka panjang yaitu reforma agraria. Gerakan reforma agraria dalam jangka pendek selain terkonsentrasi pada gerakan sosiopolitik untuk merubah kebijakan agraria yang memihak kepada petani, tetapi dalam jangka panjang juga sebagai gerakan sosiokultural. Dalam gerakan sosiopolitik dilakukan berbagai cara termasuk melakukan aksi-aksi kolektif, sedangkan dalam gerakan sosiokultural membutuhkan waktu lama atau sebagai program jangka panjang. Targetnya bukan hanya terjadi transformasi sistem sosial agraria yang lama kepada yang baru (terjadi perubahan karakteristik dan sifat-sifat strukturalnya yang mendasar dan lebih baik) tetapi juga dalam proses pelembagaannya sehingga menjadi sistem sosial agraria yang mapan.⁵⁵

Dibandingkan dengan struktur gerakan yang terjadi sebelumnya, seperti dalam gerakan-gerakan lokal-tradisional, maka gerakan petani terorganisir ini dilihat dari karakteristik normatif dan aksi-aksi kolektif yang dilakukan sebagai gerakan sosiopolitik. Gerakan petani skala provinsi ini menunjukkan lebih sempurna dalam semua unsurnya sebagai suatu gerakan sosial dibandingkan dengan aktivitas perjuangan kolektif petani yang terjadi sebelumnya. Bahkan dalam perkembangannya mampu berjejaring kuat dengan organisasi gerakan agraria tingkat nasional.

Selain itu, pada tataran normatif sebagaimana dirumuskan di dalam AD/ART organisasi menunjukkan bahwa gerakan petani skala provinsi ini secara organisasional dengan jelas mengarah pada kesempurnaan sebagai organisasi gerakan sosial moderen. Pada Tabel 6 disajikan gambaran yang rinci tentang anatomi gerakan petani sebagai gerakan sosiopolitik.

⁵⁵ Jika mengacu teori sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Luckmann (1966), maka proses perubahan sistem sosial agraria yang mendasar dan lebih baik itu harus melalui proses yang panjang. Sistem nilai dan norma yang berkaitan dengan struktur hubungan agraria yang baru sedikit-demi sedikit dan terus menerus diinternalisasikan, sehingga lama kelamaan mengalami obyektifikasi. Sebagai konsekuensi dari obyektifikasi tersebut adalah dapat dieksternalisasikan oleh ketiga elemen sistemnya, yaitu negara, swasta dan petani.

Tabel 6. Anatomi Gerakan Petani Sebagai Gerakan Sosiopolitik

Aspek	Uraian
Sebab atau sumber gerakan	Kebijakan agraria dan implementasinya, pengaruhnya terhadap petani (berkembang deprivasi absolut dan relatif, perasaan tidak setara dan tidak adil, peningkatan aspirasi kehidupan) dan masuknya ideologi luar
Aktor gerakan	Terdiri dari elemen petani dan non petani. Dalam perkembangannya semakin mengerucut pada dominan elemen petani.
Lawan gerakan	Abstrak: Imperialisme dan neo-kolonialisme Kongkrit: negara (pemerintah) dan swasta (perusahaan).
Tujuan dan Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Jangka pendek: penguasaan tanah pertanian bagi petani penggarap dan perubahan kebijakan pertanahan yang memihak petani. • Jangka panjang: perubahan tatanan agraria lebih baik dan kondusif terhadap peningkatan kesejahteraan petani. • Sasaran: pemerintah pusat dan daerah.
Strategi Gerakan	Makro: sosiopolitik dan sosiokultural. Mikro: aksi unjuk rasa dan reklamasi (jangka pendek).
Ideologi Gerakan	Egalitarian, neo-populis.
Keanggotaan	Bersifat suka-rela dan kolektif dalam wadah organisasi tani tingkat basis ⁵⁶
Organisasi dan Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi: terstruktur secara hirarkhis dan jelas. • Kepemimpinan: (1) pada tingkat basis lebih ditentukan oleh tradisi setempat baik dalam komunitas adat maupun non adat; (2) pada level provinsi lebih ditentukan kapabilitas individu aktor. • Sumber dana: swadaya dan sumber dana lain dari LSM mitra dan jaringan pendukung (dalam dan luar negeri), dari jaringan organisasi nasional, perusahaan dan pemerintah daerah.
Efek Gerakan	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi perubahan sikap proaktif pemerintah pusat dan daerah. • Berhasil dikeluarkannya kebijakan pertanahan yang menguntungkan masyarakat lokal (petani). • Berhasil dikuasai (kembali) tanah pertanian.

Sumber: Hartoyo, dkk.,2010.

⁵⁶ Pada perkembangannya tahun 2007, organisasi SPL merubah model struktur organisasinya dari federatif menjadi unitarian, yaitu SPI. Sejalan dengan perubahan ini, mulai dibuka dan dipraktikkan keanggotaan bersifat personal. Akan tetapi, cara ini hingga sekarang masih belum diterapkan secara penuh, atau masih mengandalkan keanggotaan kolektif.

5.4. Respon Petani Terhadap Terbukanya Struktur Peluang Politik

Segera setelah terjadi dekonstruksi struktur politik pusat, yaitu runtuhnya rezim Orde Baru, maka situasi tersebut sekaligus berarti telah terbuka peluang politik terhadap gerakan petani. Lengsernya presiden Soeharto menjadi momentum dekonstruksi struktur politik pusat. Kekuatan rezim Orde Baru telah runtuh dan para elit politik sudah tidak lagi solid di dalam mengawalinya, bahkan terjadi konflik dan fragmentasi. Kekuatan politik negara melemah dan kelompok elit yang kontra Orde Baru mendukung gerakan masyarakat sipil dalam melakukan perubahan-perubahan.

Terbukanya peluang politik diposisikan sebagai faktor pendorong utama berkembangnya kesadaran kolektif petani dan penguatan struktur mobilisasi sumberdaya gerakan. Indikasinya dapat dilihat dari derajat keterbukaan rezim pasca Orde Baru terhadap tuntutan-tuntutan baru dari elemen petani. Bukti keterbukaan lain adalah aksi-aksi unjuk rasa tidak dapat dibendung, semakin ditolerir ke luar kampus, dan pemerintah daerah sudah mau membuka dialog untuk menyelesaikan kasus pertanahan.

Asumsi dasar urgensi terbukanya struktur peluang politik adalah dimungkinkan dilakukan mobilisasi sumberdaya gerakan ketika terjadi perubahan iklim politik yang mendorong aksi-aksi kolektif yang lebih memungkinkan untuk sukses. Pada situasi ini derajat peluang politik meningkat pada level penerimaan para elit terhadap aksi-aksi kolektif atau perlu dilakukan penstrukturan kembali hubungan-hubungan kekuasaan yang ada. Meningkatnya peluang politik ini juga dapat mempengaruhi keragaman tujuan gerakan yang ingin dicapai dan juga taktik gerakan yang diartikulasikan oleh organisasi gerakan petani.

Terbukanya peluang politik pusat dengan cepat direspon dengan penguatan sumberdaya gerakan di daerah. Terutama bagi kalangan komunitas petani korban pembangunan, dengan terbukanya peluang politik tersebut memperkuat semangat mereka untuk meneruskan perjuangan sosio-politik. Sinyal responsif di kalangan petani disambut baik oleh kalangan non petani yang aktif dalam gerakan reformasi atau gerakan pro demokratisasi dan didukung oleh segenap elemen masyarakat sipil lainnya.

Namun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa betapapun kuatnya struktur mobilisasi sumberdaya masih tidak bebas dari tekanan-tekanan politik, karena meskipun rezim Orde Baru sudah runtuh tetapi “ruh” otoritarianismenyanamasi belum mati. Suatu realitas bahwa petani baru bergerak segera setelah ancaman politik melemah atau peluang politik benar-benar terbuka. Terbukanya

struktur peluang politik ternyata direspon secara dinamis dan beragam oleh berbagai komunitas petani di tingkat basis. Beragamnya respon kolektif petani terhadap keterbukaan peluang politik sesuai dengan karakteristik persoalan yang dihadapi. Bahkan dalam wilayah yang sama respon masing-masing komunitas petani terhadap peluang politik bisa berbeda-beda. Hal ini terkait dengan persepsi tentang situasi yang dihadapi, kalkulasi resiko (*costs*) yang akan ditanggung dan hasil (*benefits*) yang akan dicapaibila memutuskan untuk melakukan aksi-aksi kolektif. Kalkulasi partisipasi petani dalam aksi-aksi kolektif bukan hanya mempertimbangkan faktor obyektif dari luar (faktor eksternal), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor subyektif dari pengalaman praktis petani sendiri.⁵⁷

Perbedaan respon petani juga didukung oleh fakta bahwa perubahan peluang politik di dalamnya masih tidak bebas dari unsur tekanan politik yang dapat menghambat berkembangnya aktivitas gerakan. Lemahnya kontrol negara tidak sepenuhnya menghilangkan upaya pihak lawan (pemerintah daerah dan perusahaan) untuk mempertahankan kepentingannya dengan berbagai cara. Masih belum terbuka sepenuhnya peluang politik di daerah, dilihat dari beberapa kasus, oleh petani masih dianggap dapat berkonsekuensi negatif terhadap pengambilan keputusan partisipasi mereka di dalam gerakan. Pada kasus lain, tekanan politik dan upaya persuasif pemerintah juga mempengaruhi menurunnya aktivitas gerakan petani selanjutnya.

Derajat responsif petani terhadap perubahan struktur peluang politik dilihat dari fungsinya dalam gerakan juga tidak cukup dengan telah berkembangnya sub kultur oposisi petani. Dalam beberapa kasus, sub kultur oposisi petani dapat mempercepat respon terhadap terbukanya peluang politik. Akan tetapi, pada tataran praksisdalam diri petani masih melekat tekanan psikologis yang dirasakan akibat pengalaman traumatik (trauma politik) masa lalu. Pandangan petani terhadap para pemegang otoritas bahwa mereka masih melekat watak otoritarianisme negara yang pada tataran praksis juga masih sering dialaminya.

⁵⁷ Contohnya, di suatu wilayah komunitas desa yang satu para petani dengan cepat merespon secara positif perubahan politik nasional dan lokal, sedangkan para petani di desa lainnya lebih lambat. Seperti ada 9 orang petani di beberapa desa terdekat yang bergerak cepat dalam merespon peluang politik. Mereka kemudian diakui sangat berjasa dalam mengawali perjuangan petani, dan dianggap sebagai tokoh perintis perjuangan petani yang kemudian disebut "*Tim Wali Songo (Tim Wali Sembilan)*". Pada pihak lain, para petani di desa-desalainnya dalam wilayah konflik pertanahan yang sama belum ada respon yang nyata. Mereka masih menunggu upaya penyelesaian persoalan pertanahan yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Selain itu, para tokohnya juga sedang mengalami masalah internal organisasi yang menjadi andalan perjuangan petani, yakni Gema Trikora. Kedua persoalan tersebut yang menjadi kendala petani di lokasi tersebut, sehingga mereka lebih lambat dalam merespon keterbukaan peluang politik..

Berkembangnya sub kultur oposisi petani didukung dengan terbukanya peluang politik menjadi daya dorong perkembangan kesadaran konfliktual petani menjadi kesadaran politik dan proses transformasi kesadaran politik tersebut ke dalam tindakan kolektif. Situasinya memungkinkan karena telah terjadi masa transisi di mana sistem otoriter telah kehilangan legitimasinya. Petani yang biasanya fatalistik mulai berubah banyak yang berani menuntut perubahan dan mengembangkan sensitifitas baru terhadap kemajuan sistem politik yang adil dan demokratis sejalan dengan bergulirnya era reformasi.

Meskipun demikian, kerja-kerja pendampingan untuk segera membentuk organisasi tani tingkat basis sangat diperlukan. Fungsi lainnya adalah bagaimana membantu petani dalam merefleksikan kondisi dan pengalaman subyektif, dan dalam menginterpretasikan peluang-peluang dan merumuskan kepentingan bersama mereka. Kesadaran politik petani tidak hanya cukup dilihat dari derajat pemahaman terhadap posisi marginalnya dalam sistem sosial agraria yang mapan, tetapi juga bagaimana mereka dapat menawarkan harapan baru sebagai solusi alternatif terhadap kedudukannya yang pantas dalam sistem sosial agraria. Alienasi, marginalisasi, dan subordinasi petani merupakan wujud dari praktik ketidakadilan yang harus dihilangkan karena menyebabkan penderitaan petani.

Fakta tersebut di atas merupakan indikasi bahwa penguatan struktur sumberdaya dalam gerakan petani sangat tergantung pada kekuatan elemen pendukung dari luar (non petani) terutama yang berposisi sebagai aktor strategis gerakan. Peluang elemen non petani berperan dalam posisi strategis gerakan telah mendorong: (a) penguatan sumberdaya non petani terkait dengan respon positif terhadap berubahnya struktur peluang politik guna memberi dukungan terhadap gerakan petani; (b) para elit politik dari partai politik tertentu mendukung gerakan demokrasi dan bergabung dengan berbagai elemen organisasi masyarakat sipil; dan (c) mengalirnya dukungan berbagai elemen masyarakat sipil dan partai politik dengan cepat dapat dikonsolidasikan di dalam suatu wadah konsorsium.

Fakta di atas mengarah pada pembuktian bahwa respon kolektif aktor non petani terhadap perubahan peluang politik (nasional dan daerah) memposisikan petani berada lebih dekat sebagai basis akumulasi sumberdaya mobilisasi utama dalam gerakan petani. Akan tetapi, dalam perkembangannya posisi petani mengandung ambivalensi. Pada satu sisi para aktor strategis non petani dapat bekerja secara sinergis dengan petani basis terutama ketika mereka masih terarah pada satu sasaran bersama yang belum tercapai. Pada sisi lain posisi petani basis rentan terhadap kemungkinan penyimpangan perilaku

para aktor non petani yang menggeser tujuan strategis gerakan untuk mencapai kepentingan praktis dan pragmatismenya melalui mobilisasi sumberdaya petani basis tersebut.

5.5. Mobilisasi Sumberdaya Dalam Aksi-Aksi Kolektif Petani

Pada dimensi sosiopolitik, gerakan petani ini merupakan jawaban atas lemahnya ancaman politik karena negara sedang dihadapkan pada kondisi labil atau sedang mengalami anomali. Untuk memanfaatkan momentum tersebut maka menciptakan konfigurasi gerakan menjadi penting. Langkah ini menjadi target utama yang perlu segera dilakukan. Tetapi, dilihat dari tahapan perjuangan petani sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka sebenarnya gerakan sosiopolitik petani merupakan kelanjutan dari perjuangan yang telah dilakukan sebelumnya, yakni pada masa kekuasaan rezim Orde Baru.

Potensi sumberdaya mobilisasi petani di tingkat basis atau lokal sangat ditentukan oleh derajat kekuatan hubungan antar organisasi basis yang dibentuk. Ini disebut dengan "*block recruitment*" dan memang lebih memudahkan kontrol jaringan (rentang kendali) dalam gerakan petani terorganisir. Misalnya pada konstruksi gerakan dari bawah disebut "Posko Induk" yang membawahi beberapa organisasi basis (Posko), sedangkan pada konstruksi gerakan dari atas disebut Dewan Pimpinan Petani (DPP) yang membawahi beberapa organisasi tani lokal (OTL). Struktur mobilisasi sumberdaya petani tingkat basis tersebut juga sangat ditentukan oleh struktur mobilisasi sumberdaya pada tingkat wilayah provinsi. Solidaritas dan komitmen awal antar organisasi tani basis menyediakan dasar bagi berlakunya insentif kolektif yang diharapkan bersama. Konsep "*bloc recruitment*" dengan tersedianya solidaritas antar kelompok dalam struktur mobilisasi petani tingkat basis merupakan cara yang sangat baik dan menjadi tipikal dari gerakan petani.

Sumberdaya potensial sebenarnya sudah tersedia jauh sebelum berbagai organisasi tani lokal dibentuk. Berkembangnya sub kultur oposisi petani menunjukkan bahwa sumberdaya petani selalu diaktifkan, dan potensi sumberdaya tersebut semakin menguat sejak awal proses rekrutmen. Sejak proses awal mobilisasi sudah terjadi akumulasi sumberdaya dan secara bersamaan telah dilakukan "aktivasi" mobilisasi potensial. Upaya ini disebut dengan "mobilisasi konsensus", yakni upaya sengaja yang dilakukan untuk menciptakan konsensus antara petani dan non petani untuk sewaktu-waktu siap melakukan gerakan petani. Proses awal dalam gerakan petani dimaksudkan untuk memperkuat dukungan ideologis dan untuk

meningkatkan semangat perjuangan petani dalam mengejar tujuan praktis dan strategisnya.

Gerakan petani yang terdiri dari perpaduan antara sumberdaya petani dan non petani ternyata tidak bisa sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan untung-rugi berbasis asumsi rasionalitas material, meskipun faktor tersebut tidak dapat diabaikan. Pertimbangan untung-rugi dapat mereduksi persoalan gerakan ke dalam motivasi partisipasi untuk memperoleh insentif selektif. Dasar pertimbangan tersebut sulit digunakan untuk menjelaskan motivasi partisipasi para aktor strategis pada masa pra sampai dengan aksi-aksipendudukan lahan atau *reclaiming*. Dasar pertimbangan untung-rugi secara material ternyata relevan untuk menjelaskan dinamika gerakan pasca *reclaiming*. Pada masa ini kepentingan partisipan dengan jelas muncul ke permukaan, yakni kepentingan sesungguhnya yang menjadi dasar partisipasinya di dalam gerakan petani. Indikasinya dapat dilihat dari pergeseran dasar orientasi tindakan yang semula terkonsentrasi pada pencapaian kepentingan “substansif” petani menjadi berubah berbasis pada “potensi”, yakni kekuatan sumberdaya petani basis yang dapat dimobilisir untuk mencapai kepentingan praktis mereka meskipun menyimpang dari tujuan strategis gerakan.

Menyimak fenomena di atas, maka dapat dinyatakan bahwa tantangan utama gerakan terpusat pada keunggulan insentif moral atau purposif yang dapat ditawarkan dalam gerakan petani. Dilihat dari keberhasilan pendudukan lahan tampak bahwa ternyata insentif selektif tidak hanya dinikmati oleh para kontributor tetapi juga oleh banyak non-kontributor. Besarnya akses non kontributor di dalam ikut memanfaatkan peluang memperoleh keuntungan menjadi tidak terkontrol. Gejala ini menunjukkan bahwa kekuatan jaringan internal (solidaritas sosial dan komitmen moral) sudah mulai memudar. Solidaritas sosial dan insentif purposif adalah berdimensi kolektif karena mengandung peleburan antara kepentingan personal partisipan dan kolektif gerakan. Ternyata anggapan tersebut menjadi semakin tidak berarti ketika tindakan para aktor strategis gerakan dalam mencapai tujuan praktisnya justru semakin memperlebar jaraknya dengan tujuan strategis gerakan petani itu sendiri.

5.5.1. Determinan Gerakan Petani

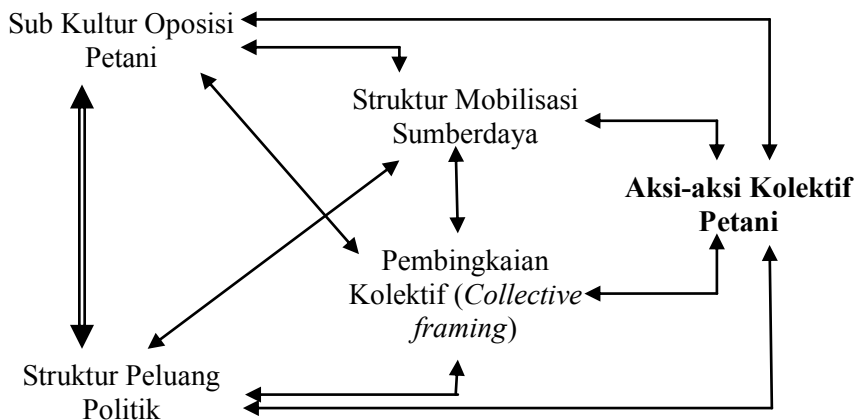
Terbukanya peluang politik mendorong sub kultur oposisi petani berfungsi sangat baik sebagai faktor mendukung percepatan respon positif dalam memperkuat kesiapan struktur sumberdaya mobilisasi. Isu-isu agraria berbasis ideologi egalitarian dengan mudah diberikan dan didesiminasikan karena sesuai dengan kepentingan dan

pengalaman praktis petani. Selain isu-isu utama yang dikemas dalam paket ideologi gerakan, faktor terbukanya peluang politik, dan faktor sub kultur oposisi petani, juga masih diperlukan penguatan struktur mobilisasi sumberdaya. Faktor-faktor tersebut berjalan melalui proses pembingkai kolektif untuk segera dapat ditransformasikan dalam aksi-aksi kolektif petani. Oleh sebab itu konfigurasi gerakan sosio-politik petani paling tidak ditentukan oleh empat faktor utama yang saling terkait sebagaimana tampak disajikan pada Gambar 8.

Untuk sampai pada penguatan struktur mobilisasi sumberdaya petani diperlukan proses penyadaran politik. Upaya ini dilakukan melalui pendampingan terutama dalam mensosialisasikan ideologi gerakan berbasis pada isu-isu yang secara politis sangat strategis. Strategi “sapu lidi” dipilih, yakni target utamanya dikonsentrasikan pada upaya cepat penyadaran terhadap para tokoh petani yang menjadi simpul perjuangan di komunitasnya (di wilayah konflik pertanahan).

Meskipun masih secara selektif dikonsentrasikan pada para tokoh petani, selain menjadi simpul perjuangan petani mereka juga yang banyak memiliki kemampuan lebih sebagai prosesor aktif dan derajat emosi tertentu dalam mengkonstruksi makna-makna sosio-kultural oposisional di dalam sub kultur oposisi petani.⁵⁸ Seiring dengan perkembangan struktur peluang politik, maka makna-makna sosiokultural oposisional petani paling tidak sudah diorganisasikan melalui bingkai-bingkai interpretasi kolektif (*collective framing*). Mereka memahami apa yang menjadi persoalan bersama, menyadari pentingnya membangun kekuatan bersama atau solidaritas, dan sebagainya. Konsensus melakukan mobilisasi dan upaya mobilisasi petani yang dipengaruhi oleh sistem sosiokultural oposisional tersebut dapat berkembang dalam kerangka ideologi alternatif. Ideologi ini disosialisasikan oleh para pendamping non petani dan juga melalui diskursus baik sebelum maupun selama aksi-aksi kolektif dalam proses gerakan petani.

⁵⁸ Dipilihnya para tokoh petani sebagai target utama penyadaran politik didasarkan pada alasan tertentu. Kesadaran politik berbasis ideologi egalitarian yang diinjeksikan oleh non petani memang masih belum cukup menggerakkan petani miskin berpartisipasi aktif dalam gerakan petani. Insentif material (tanah) jauh lebih memikat bagi partisipasi petani kebanyakan. Insentif ideologis hanya menarik bagi petani kecukupan karena mereka memiliki kapabilitas untuk itu. Menurut Wolf, petani kelas menengah sebagai penggerak utama gerakan petani karena mereka selain memiliki basis ekonomi independen dan sumberdaya politik taktis juga yang paling rentan terhadap perubahan pasar dan kebijakan agraria, sehingga lebih mudah menerima ideologi gerakan yang menjanjikan tata politik dan stabilitas ekonomi (Oetami Dewi, 2006: 6)



Gambar 8. Determinan Aksi-Aksi Kolektif dalam Gerakan Petani
 Sumber: Hartoyo, 2010:119; Hartoyo, dkk., 2010:94.

5.5.2. Rekrutmen dan Pengorganisasian Petani Basis

Untuk dapat memanfaatkan momentum terbukanya peluang politik, upaya segera meningkatkan kesadaran politik dan penguatan struktur mobilisasi sumberdaya petani sangat diperlukan. Meskipun sudah berkembang sosiokultural oposisional petani, tetapi mereka masih terbatas pada kesadaran konfliktual, dan belum sepenuhnya terbangun kesadaran politik. Kebanyakan petani basis hanya tahu tanahnya telah diambil oleh pemerintah dan atau perusahaan, dan kemudian mereka diajak secara beramai-ramai untuk mengembalikannya kembali. Setelah ada pengaduan dari petani, para aktivitas pendamping segera terjun di lokasi untuk melakukan penyadaran dan sekaligus mengorganisasikan komunitas petani basis.

Rekrutmen partisipan petani dapat dibagi dua, yakni individual dan kolektif. Rekrutmen individual terjadi kepada para tokoh petani atau para petani aktivis organisasi tani yang nafasnya adalah pro pembangunan. Sedangkan rekrutmen di kalangan komunitas petani basis dilakukan secara kolektif. Secara umum rekrutmen terhadap komunitas petani basis memiliki ciri: (1) terkonsentrasi pada komunitas petani korban pembangunan (konflik pertanahan dengan pemerintah dan perusahaan); (2) keanggotaan bersifat kolektif terdiri atas komunitas petani di wilayah tertentu; (3) datang sendiri ke Posko Pengaduan, kemudian didatangi untuk diaktifkan.

Untuk merekrut komunitas petani basis menjadi anggota organisasi tani minimal melalui empat cara, yakni: (a) membuka pos pengaduan; (b) memperkuat jaringan yang sudah ada (sebagai klien

dalam advokasi hukum); (c) mengangkat kasus secara langsung di lapangan; (d) memakai instrumen kekuatan keanggotaan dalam suatu tim yang dibentuk antara para aktivis gerakan bersama dengan pemerintah daerah.⁵⁹ Hasil dari rekrutmen anggota adalah terbentuk organisasi-organisasi gerakan tingkat basis dan kemudian disatukan atau dikonsolidasikan dalam kesatuan organisasi tani tingkat wilayah kabupaten dan provinsi. Pada kasus lain terdapat pengorganisasian petani bersifat *top-down*, yakni konstruksi gerakan dimulai dari atas (Hartoyo, dkk, 2010: 94-95).

Kajian Hartoyo (2010:121-122) dan Hartoyo, dkk. (2010:95) menemukan bahwa selama proses pengorganisasian petani pada tingkat basis dan tingkat wilayah provinsi dalam melakukan aksi-aksi reklamasi terdapat beberapa kesepakatan penting, yakni:

1. Pengembangan dan artikulasi sebab perlunya dilakukan aksi-aksi kolektif. Ini menunjuk pada penguatan konstruksi "*injustice frame*" petani. Di dalam sistem hubungan sosial agraria di mana petani selalu berada pada posisi *underdog*, termarginalkan, mengalami deskriminasi, dan tersubordinasi.
2. Identifikasi dan artikulasi persoalan petani sehingga minimal dapat dihasilkan rencana dan strategi aksi kolektif. Disini ternyata terjadi penguatan dan bahkan perubahan tuntutan dan strategi gerakan yang dianggap paling tepat untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutanpetani.⁶⁰
3. Terjadi persamaan pandangan, motivasi, sikap dan persetujuan terhadap prinsip-prinsip gerakan, seperti prinsip komando dan diskusi (musyawarah) tertuang dalam slogan "Satu Aksi Satu Komando, Komando Hasil Diskusi".⁶¹

⁵⁹Di Provinsi Lampung berhasil dibentuk Tim 13, yaitu sebagai tim mediasi penyelesaian kasus pertanahan yang dibentuk antara pihak aktivis gerakan dan pemerintah daerah. Tim 13 ini dibentuk pertama kali ketika terjadi aksi besar-besaran tanggal 25-26 Agustus 1998. Karena aktivitasnya semakin melemah, maka pada tahun 2001 oleh para aktivis gerakan petani dituntut untuk diaktifkan kembali bersamaan dengan dideklarasikan sebuah organisasi gerakan petani yang baru pecahan dari salah satu organisasi gerakan petani yang lama.

⁶⁰ Penguatan tuntutan juga berarti meningkatkan akurasi data kasus dan status penguasaan lahan. Sedangkan perubahan tuntutan petani pada awalnya berupa permintaan ganti rugi yang sesuai, kemudian berubah menguat. Tujuan utama gerakan adalah penguasaan lahan, dan setelah dapat dikuasai kemudian tuntutan berubah menjadi pemilikan (sertifikat). Faktor yang mendasari berubahnya tuntutan tersebut adalah kuatnya posisi tawar petani dan kuatnya definisi "petani" sebagai prinsip gerakan, yakni "mereka yang memiliki lahan dan mengelolanya secara aktif dan produktif untuk kelangsungan hidupnya". Oleh karena itu, dalam gerakan petani tidak ada istilah meminta ganti-rugi dalam melancarkan tuntutan-tuntutannya, tetapi yang ada adalah lahan pertanian harus dikuasai dan dimiliki petani.

⁶¹ Terdapat perbedaan pendapat antara para tokoh gerakan terhadap slogan kedua, yaitu: "*Komando Hasil Diskusi*". Mereka yang terlibat pada awal gerakan petani mengatakan tidak ada slogan kedua itu, sedangkan mereka yang terlibat aktif pada gerakan petani berikutnya mengatakan ada dan digunakan slogan kedua itu.

Dilihat dari perspektif partisipan, sampai pada titik puncak gerakan, sikap partisipatif petani dan para pendukungnya merupakan hasil dari motivasi bersama mereka untuk benar-benar mengentaskan nasib petani. Artinya, partisipasi mereka dalam aksi-aksi kolektif petani merupakan konsekuensi dari motivasinya untuk menyelesaikan persoalan substantif petani daripada menjadi sebab yang mendasari motivasinya itu.

Mengkonsolidasikan sumberdaya gerakan pada lokus supra desa, yaitu pada tataran wilayah provinsi juga berarti memperluas pemahaman tentang struktur dan kultur gerakan. Pertama, skala oposisional petani diperluas dan struktur kognisinya dirubah sampai pada pemahaman tentang persoalan pertanahan dalam skala makro nasional bahkan global. Kedua, telah terjadi perkembangan institusionalisasi dan diferensiasi organisasi gerakan petani pada ranah gerakan sosiopolitik. Ketiga, posisi dan peran antar aktor strategis dan organisasi gerakan petani semakin terdiferensiasi, sehingga manajemen gerakan tidak lagi berbasis pada struktur otoritas tradisional, tetapi sudah mengarah pada karakteristik manajemen moderen yang didominasi oleh aktor non petani. Keempat, dominasi aktor strategis non petani berkonsekuensi pada aktivitas organisasi gerakan petani yang cenderung diarahkan sesuai dengan kepentingan dan kultur elitis mereka daripada kepentingan dan kultur petani basis.

5.5.3. Penguatan Struktur Mobilisasi Sumberdaya Pendukung

Meskipun secara keseluruhan terjadi percepatan rekrutmen anggota petani basis, rekrutmen para pendukung gerakan petani lebih mudah dan lebih cepat dibanding rekrutmen di kalangan petani. Dimungkinkan percepatan akumulasi sumberdaya mobilisasi di kalangan pendukung karena keberadaan mereka terkonsentrasi di wilayah perkotaan, lebih mudah diakses, dan di antara mereka sudah terjadi hubungan baik.

Oleh karena itu, meskipun nampak bahwa gerakan petani itu didukung oleh berbagai elemen masyarakat sipil dan partai politik, tetapi para aktornya tidak banyak yang baru, karena diantara mereka sudah saling kenal dengan baik. Ciri ini juga berlaku dalam rekrutmen individu petani yang mampu berperan penting dalam ikut membidani lahirnya gerakan dan organisasi gerakan petani.⁶²

⁶² Termasuk "individu petani aktivis" adalah mereka yang terlibat secara individual karena pengalaman peran mereka yang penting di dalam pemberdayaan masyarakat (petani). Seperti dalam tubuh SPL mereka banyak yang sudah berpengalaman menjadi kader Bina Desa sebagai PO (*Peasant Organizer*) tetapi tidak mewakili komunitas petani di wilayah tertentu atau tidak berposisi sebagai tokoh atau pemimpin komunitas petani di wilayah tertentu.

Solidaritas sosial dan komitmen moral untuk mendukung perjuangan petani nampak menonjol dalam tahap awal gerakan sehingga mempermudah proses konsolidasi para partisipan kelompok pendukung. Gerak langkah mereka sangat solid di dalam mengawal aksi-aksi kolektif meskipun belum diikat secara formal dalam suatu wadah organisasi. Pada konstruksi gerakan dari bawah, organisasi konsorsium(DRL) baru dibentuk (12 Agustus 1998) menjelang dilakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Kantor Gubernur (25-26 Agustus 1998).

Terbentuknya struktur mobilisasi sumberdayapendukungdalam wadah konsorsiumjuga memiliki ambivalensi. Kehadirannya selain memiliki kekuatan tersendiri juga mengurangi otonomi organisasi tani. Organisasi konsorsiumselain terdiri dari beragam karakteristik anggota juga jelas sarat dengan beragam kepentingan. Eksistensinya tidak bisa menjadi pusat artikulasi kepentingan dan partisipasi petani. Oleh karena itu, ketika organisasi tani masuk menjadi bagian dari jangkauan kontrolDRL, maka secara otomatis dia rentan menjadi ajang perebutan kepentingan dari berbagai kelompok.

Terbentuknya Tim 13 tahap I (26 Agustus 1998) dan tahap II (27 Maret 2001) selain menunjukkan kekuatan organisasi konsorsium dan organisasi tanidalam melakukan tekanan-tekanan politik, pada dasarnya juga merupakan suatu bentuk terjadinya kompromi politik antara organisasi gerakan dengan pemegang otoritas (pemerintah provinsi). Kesepakatan ini pada satu sisi dapat meredakan aksi-aksi kolektif petani dalam gerakan, tetapi pada sisi lain menjadi bias kepentingan negara dan pengusaha. Banyak rekomendasi yang berhasil dibuat dan diajukan ke Gubernur tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Dalam perkembangannya mulai tahun 2002 keanggotaan Tim 13 sudah murni bentukan Pemerintah Daerah dengan persetujuan Manteri dan keanggotaan dari organisasi tani ditiadakan karena dianggap “duri dalam daging”. Dengan demikian, jelas bahwa keberadaan Tim 13 di bawah kontrol pusat (Menteri) semakin menjadi instrumen efektif untuk melemahkan gerakan-gerakan petani di Lampung.

5.6. Aksi-Aksi Kolektif Petani dan Efeknya

Terdapat dua bentuk aksi-aksi utama dalam gerakan petani, yakni unjuk rasa dan pendudukan lahan (*reclaiming*). Kasus aksi unjuk rasa yang representatif adalah yang dilakukan pada tanggal 25-26 Agustus 1998 di kantor Gubernur. Sedangkan aksi pendudukan lahan yang representatif dilakukan di register 40 Gedung Wani pada tanggal 13 - 17 September 1998. Terdapat keterkaitan erat antara

kedua bentuk aksi kolektif tersebut, karena sering terjadi ketika aksi unjuk rasa tidak ditanggapi mereka langsung ke lokasi melakukan pendudukan lahan.

Kedua bentuk aksi kolektif tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan posisi tawar petani. Dukungan non petani sudah tergalang dengan kuat. Untuk menarik perhatian masyarakat yang lebih luas mereka juga menyampaikan pengaduan ke DPR, Komnas HAM, departemen atau lembaga non departemen yang menjadi atasan pihak lawan. Mereka juga menjalin dukungan dengan lembaga-lembaga di wilayah provinsi lain dan di tingkat nasional.

Pertama, unjuk rasa merupakan salah satu bentuk aksi kolektif yang dilakukan di pusat-pusat kekuasaan untuk melakukan tekanan kepada para pemegang otoritas. Contoh kasus terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran tanggal 25-26 Agustus 1998 di lapangan Gubernur. Dalam aksi tersebut secara intensif dilakukan negosiasi antara wakil pengunjuk rasa dengan para pejabat pemerintah daerah. Hasilnya adalah berhasil dibentuk Tim 13 yang terdiri dari 13 anggota, dan 8 (delapan) anggota di antaranya diambil dari pihak petani dan pendukungnya. Tugas utamanya adalah melakukan mediasi dalam penyelesaian berbagai kasus konflik pertanahan di daerah.

Kedua, pada umumnya aksi-aksi pendudukan lahan dilakukan karena aksi unjuk rasa tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Contohnya dalam aksi pendudukan lahan di Register 40 Gedung Wani pada tanggal 13 – 17 September 1998, karena dipicu oleh beberapa situasi berikut:

1. Para elit aktor kurang percaya bahwa strategi aksi unjuk rasa akan segera direspon secara positif oleh para pemegang otoritas.
2. Tim 13 masih belum menunjukkan hasil kerjanya.
3. Terdapat pemahaman kolektif (hasil musyawarah) bahwa pendudukan lahan merupakan langkah perjuangan yang paling efektif dan langkah yang paling strategis untuk segera dilakukan agar tidak ketinggalan momentum.

Aksi pendudukan lahan merupakan strategi terakhir dalam gerakan petani dan sedikitnya terdapat tiga ciri utama, yakni:

1. Dilakukan secara massal dengan melibatkan seluruh anggota petani basis. Aksi-aksi pendudukan lahan di wilayah tertentu selalu dibantu oleh para petani dari beberapa wilayah lain yang datang secara bergantian dan terkoordinir dengan baik. Bantuan ini selain sebagai bentuk dari rasa solidaritas dan soliditas antar petani, juga sebagai sebuah strategi untuk memperkuat posisi tawar petani.
2. Terbentuk pengendalian terstruktur dari tingkat organisasi basis (Posko basis atau OTL) hingga tingkat wilayah provinsi.

3. Terdapat pembagian tugas yang jelas, yaitu ke bawah terus melakukan koordinasi di lapangan dan ke atas terus melakukan negosiasi.

Ketiga, dilihat dari efek gerakan petani terdapat dua keberhasilan dari aksi-aksi kolektif petani yang penting dijelaskan, yakni perubahan kebijakan dan luasnya lahan pertanian yang dapat dikuasai kembali oleh petani. Perubahan kebijakan pertanahan terjadi dalam dua kategori, yakni kebijakan tingkat provinsi dan tingkat lokal.

Perubahan kebijakan tingkat provinsi antara lain: (1) Surat Keputusan Gubernur Lampung No:G/302/B.IX/HK/2000 tanggal 23 September 2000 tentang Penunjukan Lokasi Eks. Areal Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas 145.125 hektar, menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan tanah negara; (2) Surat BPN Provinsi Lampung No: 600-283 Tahun 2001 tanggal 4 April 2001 yang di tujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan se Propinsi Lampung tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Ajudikasi Swadaya di lokasi eks. Areal Kawasan Hutan di Provinsi Lampung.

Perubahan kebijakan secara khusus dapat diketahui antara lain di wilayah kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan dan di kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah. Di wilayah kecamatan Tanjung Bintang antara lain adalah: (1) secara simbolik diserahkan tanah Register 40 Gedung Wani seluas 1.500 Hektar kepada petani; (2) Surat Keputusan Gubernur Lampung No: 06 Tahun 2000 tanggal 19 Februari tahun 2000 yang menetapkan desa Karang Rejo (eks rekaliaming) sebagai desa persiapan dan tahun 2004 menjadi desa definitif (bersamaan dengan dengan beberapa desa lainnya).

Sedangkan perubahan kebijakan di kecamatan Padang Ratu antara lain adalah: (1) Menteri Negara Transmigrasi dan PPH mengeluarkan surat No. 05/MEN/XI/1999, tanggal 10 Nopember 1999 agar membentuk tim terpadu dalam rangka penyelesaian kasus Padang Ratu; (2) tanggal 19 April 2000, Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan mengeluarkan surat No. 805.PA.01.13.2000 tentang penyelesaian tanah HPL di Padang Ratu; (3) tanggal 3 Agustus 2000, DPRD dan Pemda Lampung Tengah membuat surat pernyataan mengenai penghentian kegiatan di areal oleh PT.TDA; dan (3) tanggal 13 Oktober 2000, Bupati Lampung Tengah memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah untuk mengukur lahan yang dimohon masyarakat 11 Desa di kecamatan Padang Ratu.

Rangkaian perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap persoalan pertanahan terkait dengan kuatnya aksi-aksi kolektif dan tuntutan petani. Tetapi pada tingkat lokal terdapat

keragaman perubahan kebijakan sesuai dengan jenis dan derajat persoalan masing-masing. Pada sisi lain, banyak hasil rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Tim 13 tentang penyelesaian konflik pertanahan, tetapi masih di "peti es-kan" oleh pemerintah daerah dan tidak ada tindak lanjutnya atau memang sengaja diabaikan. Situasi ini menimbulkan kecurigaan dan dugaan negatif di kalangan petani.

Tidak adanya tindak-lanjut dari hasil rekomendasi Tim 13 oleh instansi terkait yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan konflik pertanahan, maka kecurigaan itu paling tidak menyangkut lima hal:

1. Konflik pertanahan terutama di wilayah kehutanan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, sehingga prosesnya sangat panjang.
2. Diduga ada konspirasi antara pemerintah daerah dengan para pengusaha yang ijin oprasinya belum selesai.
3. Adanya kepentingan pemerintah terhadap lahan yang telah dikuasai kembali oleh petani untuk perusahaan.
4. Adanya kesan keberadaan Tim 13 hanya sebagai peredam konflik pertanahan, sehingga hasil rekomendasi itu sengaja diisukan untuk segera diselesaikan, tetapi sebenarnya masuk ke "tong" sampah atau masuk ke "peti es".
5. Adanya upaya mengkondisikan status tanah di wilayah konflik terus diabaikan, sehingga pada saatnya nanti akan dapat diambil kembali oleh pemerintah dan atau dapat diberikan kembali kepada perusahaan (Hartoyo, 2010:126-127).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kebijakan pertanahan yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah pada kenyataannya di lapangan (di tingkat lokal) belum sepenuhnya berhasil direalisasikan. Realitasnya di lapangan masih ada upaya tarik menarik kepentingan antara pemerintah (pusat dan daerah), para pengusaha, dan petani.

Keberhasilan penguasaanlahan secara sistematis oleh petani termasuk di dalamnya adalah yang gagal bertahan untuk dikuasai kembali. Keberhasilan tersebut bukan berarti persoalanpertanahanbagi petani sudah selesai, tetapi masih rentan terhadap tindakan balik oleh pihak lawan. Ini adalah persoalan klasik, tetapi tindakan balik tersebut mampu melemahkan kekuatan petani. Akibatnya, apa yang tadinya sudah disepakati menguntungkan bagi petani kemudian menjadi mentah kembali. Tindakan balik ini merupakan ancaman eksternal yang setiap saat bisa muncul dan menghantui ketenangan petani dalam menguasai kembali tanah pertaniannya.

Kendala internal juga semakin menguat dan mengaburkan tujuan gerakan. Dalam banyak kasus setelah tanah berhasil dikuasai justru

terbuka peluang muncul dan berkembangnya berbagai persoalan baru di tingkat komunitas lokal.

1. Terdapat ungkapan: "*Asu gede menang kerahe*" (Anjing besar menang berkelahnya). Ketika melakukan aksi semua ikut berjuang sama-sama. Tetapi setelah lahan berhasil dikuasai kembali maka mereka yang "berkuasa" merasa lebih berjasa dan minta bagian paling banyak. Sedangkan yang lemah hanya mendapatkan bagian sisanya, bahkan ada yang tidak mendapatkan bagian.
2. Banyak pihak luar (non petani) yang tidak ikut berjuang tetapi mendapat bagian lahan pertanian. Atau beralihnya lahan pertanian kepada orang-orang yang tidak ikut berjuang (non partisipan). Bahkan tidak sedikit dari mereka yang justru menguasai lahan pertanian yang luas.
3. Terjadinya kekacauan dalam pembagian lahan pertanian dari hasil pendudukan (reklaiming), yakni rata-rata mencapai sekitar 70 % (Hartoyo, 2010:128).

Begitu sulitnya mengurus pembagian lahan pertanian hasil aksi reklaiming. Organisasi tani terasa tidak berdaya dalam mengatasi setiap permasalahan yang berhubungan dengan lahan-lahan pertanian yang telah diperoleh hasil reklaiming dan telah dibagikan kepada petani yang berhak menerimanya. Banyak aktivis gerakan petani yang menyadari bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tanah pertanian pasca aksi reklaiming tidak mudah dan diperlukan suatu organisasi tani yang kuat. Antar petani anggota organisasi sendiri terdapat konflik terpendam, bahkan sering terjadi ketegangan, terkait dengan pembagian lahan pertanian. Organisasi tani sebagai organisasi gerakan tingkat wilayah (provinsi) yang semula diharapkan sebagai wadah perjuangan petani yang kuat, justru kondisinya semakin melemah dan tidak berdaya menghadapinya.

Mestinya terdapat satu rangkaian tahapan gerakan petani, antara pra, proses dan pasca aksi-aksi kolektif. Realitasnya, terdapat dua ruang yang terpisah dan masing-masing seolah-olah berdiri sendiri antara masa pra dan proses dengan masa pasca aksi-aksi kolektif, terutamadalam mengelola tanah pertanian yang diperoleh dari aksi reklaiming.

Pertama, terdapat derajat kekompakanyang tinggi antar anggota dalam suatu organisasi tani, antar organisasi tani, dan segenap elemen aktor pendukungnya untuk secara bersama-sama melakukan perubahan kebijakan pertanahan dan memperjuangkan tanah pertanian yang dikuasai oleh pihak lawan (pemerintah dan perusahaan). Hal ini tampak dari tingginya derajat solidaritas sosial yang dibuktikan melalui partisipasi aktif semua pihak dalam melakukan aksi-aksi

kolektif. Partisipasi aktif secara kolektif dilakukan, baik dalam melakukan tekanan-tekanan ke atas terhadap para pemegang otoritas maupun dalam melakukan aksi-aksi di lapangan terhadap pihak lawan yang menguasai tanah pertanian secara paksa.

Kedua, terdapat penurunan derajat kekompakan antar anggota dalam suatu organisasi tani dan antar organisasi tani basis, serta segenap pendukungnya pasca reklamasi dan dalam mengelola tanah pertanian hasil reklamasi. Fungsi sistem koordinasi vertikal dan derajat solidaritas sosial horizontal menurun. Sebaliknya, yang tampak menonjol adalah perebutan kepentingan politik dan ekonomi terkait dengan kekuatan sumberdaya gerakan (organisasi tani) dan kepentingan penguasaan tanah pertanian hasil reklamasi. Kedua orientasi yang menyimpang tersebut berpengaruh terhadap keberlangsungan gerakan agraria itu sendiri.

Fragmentasi Gerakan Petani

6.1. Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan tentang dinamika gerakan, khususnya tentang terjadinya fragmentasi dalam gerakan petani. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa dilihat dari proses konstruksinya, struktur gerakan petani dapat dibagi menjadi dua, yakni konstruksi gerakan dari atas dan dari bawah. Sedangkan dilihat dari anatominya maka gerakan petani memenuhi unsur-unsur sebagai gerakan sosial. Karena aksi-aksi kolektif petani lebih ditujukan untuk mencapai kepentingan jangka pendek, yakni perubahan kebijakan agraria, maka gerakan petani tersebut termasuk dalam gerakan sosiopolitik.

Mobilisasi sumberdaya dalam gerakan petani didorong oleh terjadinya dekonstruksi struktur politik nasional dan daerah. Kondisi ini membuka peluang dilakukan gerakan petani dan dengan cepat direspon oleh petani di berbagai wilayah konflik pertanahan bersama dengan segenap pendukungnya. Rekrutmen petani dilakukan melalui pembentukan organisasi tani basis. Perpaduan antara petani dan segenap pendukungnya kemudian dibentuk struktur gerakan petani tingkat kabupaten dan provinsi. Kekuatan sumberdaya mobilisasi ini, menjadi determinan berhasilnya dilakukan aksi-aksi kolektif petani. Cirinya adalah ada sedikit perubahan kebijakan agraria dan tanah pertanian di beberapa lokasi berhasil dikuasai kembali.

Keberhasilan aksi-aksi kolektif dalam gerakan petani tersebut ditentukan oleh empat unsur utama, yakni terbentuknya sub kultur oposisi petani yang didalamnya mengandung akumulasi sumberdaya mobilisasi potensial (petani), terbukanya struktur peluang politik, berhasil dibangun struktur mobilisasi sumberdaya tingkat provinsi, dan terjadinya proses pemingkiaan kolektif yang menghasilkan prinsip-prinsip perjuangan bersama.

Pasca aksi-aksi reklamasi terjadi penguatan organisasi gerakan petani. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya justru terjadi penurunan peran organisasi tani sebagai organisasi gerakan agraria. Antar kelompok aktor gerakan dengan latar belakang ideologi dan garis perjuangan yang berbeda saling klaim kuasa atas organisasi gerakan petani dan organisasi tani basis. Perebutan kuasa antar

kelompok aktor tersebut semakin mempertajam konflik internal dan berakhir dengan fragmentasi organisasi tani.

Disorientasi tindakan berbagai kelompok aktor gerakan petani tersebut sampai pada proses komodifikasi petani basis dalam merespon peluang politik institusional untuk mencapai kepentingan praktisnya. Akibatnya, terjadi *distrust*, delegitimasi dan penurunan kredibilitas organisasi gerakan petani. Elemen organisasi gerakan petani semakin mengerucut terdiri atas unsur petani, gerak langkah elemen aktor non petani semakin terpisah dari organisasi gerakan petani, antar organisasi basis anggota menjadi tercerai-berai tidak mampu dikelola dengan baik, dan kemampuan kontrol organisasi gerakan petani semakin menyempit terkonsentrasi pada lingkungan wilayah di mana pengurus inti berada.

Fenomena elitis gerakan petani skala provinsi tersebut sebagai indikasi telah terjadi perubahan drastis sikap partisipatif mereka sebagai hasil dari motivasinya, menjadi sebagai pelembagaan yang mendasari motivasi partisipasinya. Artinya, sikap partisipasi para elit aktor gerakan bukan sebagai konsekuensi dari motivasi mereka untuk mencapai tujuan strategis gerakan, melainkan menjadi sebab yang mendasari motivasinya (ekonomi dan politik) yang sesaat. Disinilah letaknya mengapa tujuan strategis gerakan petani menjadi semakin jauh jaraknya dengan tujuan instrumental (praktis). Akar gerakan petani (komunitas petani basis) semakin tercerabut dari batang tubuhnya (organisasi tani). Suatu hal yang logis ketika tujuan instrumental gerakan petani yang semakin dibuat berjarak dengan tujuan strategisnya akan berdampak pada luruhnya soliditas perjuangan petani.

6.2. Dekonstruksi Struktur Gerakan Petani

Dalam perkembangannya, terutama pasca aksi reklamings, struktur gerakan petani mengalami deformasi, yakni terjadi perubahan struktur gerakan baru yang tidak mengarah pada penguatan formasi gerakan petani yang kuat, tetapi justru terjadi konflik internal, terjadi pembelahan elemen struktur gerakan dan akhirnya mengarah para perpecahan organisasi gerakan petani dan bercerai-berainya organisasi petani basis. Artinya, dalam perkembangan selanjutnya terjadi konflik dan fragmentasi dalam tubuh organisasi gerakan petani. Antar kelompok aktor pendukung (non petani) saling berebut sumberdaya mobilisasi, sehingga posisi organisasi gerakan petani berada dalam kondisi kritis sebagai ajang pertarungan kepentingan politik dan ekonomi yang mengarah pada terjadinya komodifikasi.

Organisasi gerakan petani dan organisasi petani basis menjadi suatu komoditas untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan ekonomi.

6.2.1. Konflik dan Fragmentasi Gerakan Petani

Konflik dan fragmentasi dalam organisasi gerakan petani, baik dalam tubuh DTL maupun SPL lebih diwarnai oleh tindakan-tindakan para aktor non petani. Seperti konflik di dalam tubuh DTL sebenarnya sudah mulai muncul sebelum dilakukan konggres dan berkembang mencuat ke permukaan ketika berlangsung konggres pada tanggal 14-17 Mei 1999 di dusun Cipadang, desa Way Lima, kecamatan Gedung Tataan, kabupaten Lampung Selatan. Konflik tersebut muncul bermula ketika dilakukan pembahasan tentang rancangan AD/ART. Ada dua rancangan AD/ART berbeda yang masing-masing dibawa oleh Ketua dan Sekjen. Perbedaan mendasarnya terkakit dengan garis perjuangan. Bermula dari situ kedua kelompok tersebut bersitegang mengemukakan rancangan yang diajukan masing-masing. Konflik berkembang hingga pasca konggres, sehingga terjadi perpecahan menjadi dua kubu, yakni kubu Ketua dan Sekjen.

Di belakang Ketua adalah kelompok garis partai, yakni PRD. Tokoh inti PRD juga berada pada posisi inti DRL, sedangkan DTL berada di dalam struktur (menjadi elemen) DRL. Mereka ingin segera menguasai massa petani dengan cepat dan dengan cara-cara yang kurang fleksibel dengan memaksakan hekendak agar berada dalam barisan PRD menyongsong Pemilu 1999. Sedangkan di belakang Sekjen adalah kelompok LSM yang berada pada garis netral dan independen, tidak berpihak kemana-mana termasuk kepada organisasi politik manapun dan organisasi lain apapun.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa sebenarnya yang bekerja secara aktif dalam mempengaruhi organisasi gerakan petani adalah kelompok aktor non petani. Mereka ada di belakang Ketua dan Sekjen dan masing-masing berhasil mengarahkannya. Ketua sendiri meskipun di belakangnya adalah PRD, tetapi dia tidak sejalan dengan garis perjuangannya. Akhirnya, posisinya menjadi terjepit dijauhi baik oleh kelompok PRD maupun LSM.

Sikap netral ketua DTL dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Edaran DTL tanggal 20 Mei 1999 tentang independensi DTL. Di dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa: "Mensikapi perkembangan politik dewasa ini dan posisi anggota adalah petani, maka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Tani Lampung perlu terus menjaga sifatnya yang independen terhadap seluruh organisasi politik yang ada. Untuk itu, Dewan Tani Lampung perlu menegaskan kembali bahwa untuk menjaga independensi

organisasi – seluruh pengurus di lingkungan Dewan Tani Lampung tidak diperkenankan merangkap sebagai fungsionaris partai politik apapun.”

Sebenarnya di dalam tubuh PRD juga terjadi perpecahan. Mereka juga berusaha menguasai DRL dan DTL untuk tujuan politik praktis. Mereka adalah kelompok Poros Indonesia atau embrio Partai Nasional Banteng Keadilan (PNBK). Mereka termasuk pemrakarsa dilakukannya Sidang Tinggi DRL, dan hasilnya DRL dapat dikuasai, dilakukan restrukturisasi organisasi, dan mengeluarkan DTL dari DRL. Berdasarkan keputusan tersebut maka semua organisasi tani basis di tingkat lokal (Posko) kembali lagi menjadi di bawah koordinasi DRL, dan tidak dibentuk wadah baru lagi seperti DTL.

Pasca likuidasi maka DTL menjadi stagnan dan mati suri. Ketuanya diisolir (ditekan) agar tidak dapat leluasa berada di ruang publik. Tekanan dan penyingkiran tersebut antara lain dia (dan beberapa organisasi tani basis pendukungnya) tidak dilibatkan dalam pertemuan DRL pada tanggal 11 Agustus 1999, sehingga hampir terjadi bentrok fisik antara DRL dan LBH dengan para tokoh petani.

Indikasi penyingkiran tersebut sudah diketahui sebelum dilakukan rapat DRL. Pada tanggal 7 Agustus 1999, ketua DTL mengeluarkan surat tentang Instruksi Rapat Koordinasi DTL (bersifat rahasia dan tidak melibatkan Sekjen DTL) yang ditujukan kepada Koordinator dan Sekretaris Posko yang masih mendukungnya. Rapat dilakukan pada hari Selasa, 10 Agustus 1999 untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dilakukan dalam rapat DRL tersebut.

Dalam rapat DTL tersebut para peserta diharapkan membawa stempel posko dan bekal selama tiga hari di Bandar Lampung. Dalam surat instruksi tersebut juga dinyatakan: “Mengingat rapat koordinasi DTL kali ini sangat penting dan tertutup bagi posko yang tidak mengakui kepemimpinan Sekjen DRL lama, maka rapat ini kami nyatakan rahasia dari posko yang pro DRL rekayasa.”

Pada pihak lain, para pengurus inti berketetapan bahwa DTL masih ada dan dapat berjalan sendiri meskipun sudah dikeluarkan dari DRL dan tidak berhubungan lagi dengan LBH Bandar Lampung. DTL itu secara *de facto* memang sudah bubar, tetapi secara *de jure* tidak, dan ketua DTL hingga saat ini masih mengklaim dirinya sebagai ketua yang sah.

Dalam perkembangannya dalam tubuh DRL juga terjadi perpecahan dan dalam perjalannya terjadi perbedaan sikap antara mereka yang pro dan yang kontra dengan kelompok Sekjen DTL. Dengan tidak aktifnya DTL maka perebutan inti basis petani hanya terjadi antara DRL dan kelompok Sekjen DTL. Kelompok Sekjen DTL

termasuk yang menganggap DTL masih tetap ada. Ini berkaitan dengan persoalan bagaimana agar DTL bisa tetap mempertahankan organisasi petani basis (Posko) dan dikemudian hari merupakan aset yang dapat di gunakan untuk mendukung berdirinya organisasi baru yang tetap berfungsi sebagai organisasi gerakan petani.

Semakin lemahnya DTL pada sisi lain merupakan peluang tersendiri bagi kelompok Sekjen DTL sebagai alasan untuk mendirikan organisasi sendiri. Pada tanggal 2-4 Juli 2001 berhasil diselenggarakan kongres IPL (Ikatan Petani Lampung) yang lepas dari elemen DRL. Dalam IPL tersebut Sekjen DTL (dibantu LBH Bandar Lampung)⁶³ berhasil menduduki jabatan sebagai Ketua. Kepentingan politis kelompok Sekjen DTL mendirikan organisasi baru dengan tetap mempertahankan organisasi petani basis yang tadinya menjadi anggota DTL. Alasan yang mendasarinya adalah bahwa terbentuknya IPL itu bukan merupakan organisasi baru, tetapi tetap DTL yang hanya diubah namanya menjadi IPL.

Belakangan, massa inti basis petani ini menjadi ajang rebutan lebih lanjut antara IPL dengan DRL, serta dengan para aktivis lainnya yang membentuk LSM baru seperti Redec, Ragom dan Pramukti.⁶⁴

6.2.2. Berebut Sumberdaya Mobilisasi

Pasca aksi-aksi kolektif petani kemudian sepak terjang para aktor non petani menampakkan tujuannya masing-masing, baik dalam tubuh DTL maupun SPL. Tindakan merekaitu berdampak pada berkurangnya pencapaian tujuan substantif petani yang seharusnya diperankan oleh organisasi gerakan petani. Masing-masing kelompok pendukung

⁶³ Dalam perjalanannya di tubuh LBH Bandar Lampung sendiri juga terjadi kemelut perebutan posisi kepemimpinan. Mereka ada yang pro IPL dan ada yang pro DRL dan ada yang pro Tim 13. Bahkan ada yang keluar dari LBH kemudian mendirikan LSM dan bergabung dengan IPL.

⁶⁴Kecewaaan ketua Pramukti mulai muncul setelah dipecat dari jabatan sebagai Koordinator Posko Induk II oleh Sekjen DTL, dan tindakan itu tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART. Pada tanggal 9 Oktober 1999, para petani Posko Induk II wilayah Gedung Wani dipimpin koordinatornya hadir di sekretariat DTL untuk menyampaikan perkembangan terakhir perjuangan petani di wilayahnya. Diceritakan bahwa massa petani yang semula menyatu dengan kelompok mereka, sekarang telah terjadi pembelahan yang mengkristal nyaris terjadi konflik horizontal. Pembelahan massa petani ini tidak terlepas atau bermuara dari dua halaman *Pertama*, adanya kudeta internal di tingkat Posko Induk II yang dimotori oleh Sekjen DTL, yakni diberhentikanya Koordinator Posko Induk tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku baik di tingkat Posko maupun DTL. Tindakan ini menyimpang dari statuta organisasi, sebab bila mengacu pada AD/ART DTL yang layak melakukan pemecatan adalah melalui rapat atau keputusan presidium DTL. *Kedua*, terjadi tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Pri Suhardi dan kawan-kawan yang ada di lapangan terhadap perlakuan ketidakadilan dan perampasan hak secara sewenang-wenang. Kecewaaan berikutnya adalah ketika pendirian IPL, dia tidak masuk dalam kepengurusan inti. Kemudian tahun 2002 dia dan pendukungnya mendirikan "Pramukti" (Paguyuban Reformasi Aktif Masyarakat Tani Indonesia) yang mengklaim anggota basisnya sama dengan anggota basis IPL, terutama di wilayah Register 40 Gedung Wani dan sekitarnya.

bersaing membangun jaringan informal untuk memanipulasi hubungan kekuasaan dan afeksi agar dapat mengontrol organisasi gerakan petani dalam mencapai kepentingannya. Pada kondisi ini, tindakan-tindakan para elit gerakan petani menjadi tidak terarah pada berbagai konsekuensi positif, tetapi justru mengarah pada berbagai konsekuensi negatif terhadap struktur inti gerakan petani dan pemberdayaan petani basis. Pada satu sisi di antara petani basis masih solid, tetapi pada sisi lain, para elit pendukungnya terjadi perpecahan karena berebut penguasaan sumberdaya petani basis.

Perubahan negatif akibat tindakan-tindakan para elit gerakan tersebut membuat bingung para petani basis yang menjadi anggota inti organisasi tani. Pada tingkat basis juga tidak ada kontrol organisasi dan koordinasi yang jelas dan tegas, sehingga banyak terjadi penyimpangan pembagian tanah hasil reklamasi yang tidak sesuai dengan tujuan dilakukan gerakan. Titik awal terjadi penyimpangan setelah disepakati bahwa urusan pembagian tanah hasil reklamasi diserahkan sepenuhnya kepada posko masing-masing. Keputusan ini didasarkan pada asumsi bahwa masalah tanah adalah yang menjadi kepentingan utama petani. Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan di antara petani terjadi cekcok berebut tanah dan sulit diatur. Realitas yang demikian itu diduga karena organisasi taninya yang tidak kompak, tidak kuat, dan sibuk dengan urusannya masing-masing.

Contohnya kasus pembagian tanah hasil reklamasi di Desa Karang Rejo. Disini telah terjadinya kekacauan dalam pembagian lahan pertanian dan sudah cukup mengkhawatirkan. Jika di buat rata-rata dari ketiga Posko Induk yang ditugasi sudah terjadi penyimpangan mencapai 70 %. Paling besar terjadi penyimpangan di wilayah Posko Induk II, kemudian di wilayah Posko Induk III dan di wilayah Posko Induk I. Itu belum termasuk yang dialih-tanggalkan (dijual) ke pihak lain yang tidak ikut berjuang.

Dalam komitmen awalnya bahwa tujuan dibentuknya organisasi gerakan petani tingkat wilayah provinsi adalah sebagai wadah penguatan sumberdaya mobilisasi dan sebagai katalis gerakan yang menyediakan struktur sumberdaya yang memadai. Manipulasi hubungan kekuasaan dan hubungan afeksi tersebut tampak ketika tindakan-tindakan mereka dengan jelas ditujukan untuk mencapai kepentingan praktis masing-masing. Sasarannya adalah menguasai organisasi gerakan petani yang berarti juga berpeluang untuk memanfaatkan sumberdaya petani basis. Akibatnya, otonomi organisasi gerakan petani menjadi semu, tidak lagi berorientasi populis melainkan bias bersifat elitis, kurang responsif terhadap

kepentingan substantif petani basis, dan rentan terhadap komodifikasi sumberdaya gerakan.

Fenomena tersebut mengarah pada proses pembelahan. Organisasi gerakan petani merupakan kolektivitas sumberdaya yang merefleksikan sistem gerakan yang nampak besar berada dalam skala provinsi, tetapi dalam batas-batas tertentu perkembangannya semakin menjauh dari lingkungan sosio-kultural gerakan yang hidup dan dihidupkan oleh komunitas petani basis. Artinya, ruang gerak organisasi gerakan petani tingkat wilayah provinsi semakin berjarak dengan organisasi basis, dan sistem komunikasi di antara mereka menjadi lemah. Misalnya, konflik kepentingan antar kelompok elit aktor gerakan membuat DTL mati suri, tetapi organisasi basis banyak yang tidak tahu sebabnya. Seperti pengakuan dari para komunitas petani di Cipadang, Way Lima mereka merasa “bagaikan anak ayam kehilangan induknya”, sehingga organisasi petani basis ikut melemah.

Pada sisi lain, organisasi gerakan petani yang masih tetap eksis bahwa ketika struktur dominasi berada di bawah kendali para elit aktornya, maka ia menjadi rentan terhadap proses komodifikasi. Struktur sumberdaya mobilisasi dapat diarahkan menjadi suatu komoditas yang dapat dijual sejalan dengan peluang-peluang politik yang muncul di dalam dinamika politik lokal. Organisasi gerakan petani yang posisinya strategis karena memiliki klaim sebagai organisasi massa petani, maka ia dapat diarahkan menjadi komoditas dalam politik praktis. Mereka diarahkan sebagai sumberdaya mobilisasi dalam dinamika politik lokal di daerah Lampung. Sebagai imbal baliknya adalah tanah pertanian yang sudah dikuasai secara aktif oleh petani basis dapat dipertahankan dan tidak diganggu oleh pihak lain yang berkepentingan.

Pada sisi lain, bahwa posisi strategis organisasi gerakan petani karena memiliki basis massa petani justru mengandung makna yang semu dalam dinamika politik lokal. Kehadirannya pasca reklamings dapat dimanipulasi oleh para pemimpin dan juga menjadi incaran kelompok pendukung. Dalam pemilu 1999 di mana DTL sudah menjadi ajang perebutan kepentingan, diarahkan menjadi pendukung utama partai politik tertentu, dan dimobilisir untuk mendukung pencalonan anggota legislatif.

Secara historis kekuatan struktur gerakan petani tidak terlepas dari segenap elemen pendukungnya dan kehadirannya secara formal bersifat otonom. Tetapi dalam perkembangannya justru semakin larut dengan berbagai kepentingan kelompok pendukung tersebut dan semakin berjarak dengan organisasi tani basis. Antar kelompok pendukung bersaing ketat untuk dapat memperkuat jangkauan kontrol

terhadap eksistensi organisasi gerakan petani dan petani basis, tetapi yang terjadi bukan penguatan melainkan pelemahan.

Gejala lain bahwa kehadiran organisasi gerakan petani nampak lebih disebabkan adanya momentum. Secara internal tersedia sumberdaya mobilisasi, semangat perjuangan yang membara, dan dekonstruksi struktur politik nasional. Pembentukannya terkesan dipaksakan, kurang perencanaan yang matang, dan ketersediaan sumberdaya non material yang serba kurang memadai. Segera setelah terbentuk organisasi tani, maka agenda utamanya adalah menjadikan segenap kegiatan untuk mempertahankan hidup (*survival*) organisasi tersebut. Seakan-akan *survival* organisasi dianggap sebagai satu-satunya tujuan yang hendak dicapai, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani.

Sejak awal berdirinya organisasi tani sudah dihadapkan pada konflik kepentingan dalam kepemimpinan dan perebutan sumberdaya mobilisasi. Seperti SPL sejak awal sudah terjadi aksi “mosi tidak percaya” dan perombakan kepengurusan inti yang dimotori oleh para aktivis non petani. Kemudian dimanfaatkan untuk memobilisasi petani basis dalam pencalonan anggota DPD. Tetapi setelah calonnya tidak jadi mereka kembali pergi meninggalkannya. Bahkan ketika mereka diberi tanggung jawab untuk membangkitkan kembali SPL ketika akan melakukan kongres ke II tanggal 3-5 Nopember 2007 juga tidak dilaksanakan.

Sebelum kongres SPL berlangsung jauh-jauh hari, yaitu pada bulan Februari 2007, sudah dibentuk tim kerja yang terdiri dari 5 orang anggota. Mereka yang ditunjuk adalah para aktivis gerakan, berpendidikan, sudah berpengalaman dalam membina organisasi, dan hidupnya juga tidak begitu tergantung pada aktivitas pertanian karena bukan murni sebagai petani. Dipilihnya anggota tim tersebut dengan harapan dapat melakukan konsolidasi anggota petani basis dan dapat mempersiapkan kongres. Realitasnya, setelah beberapa bulan berjalan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada laporan perkembangan hasil kerjanya. Karena waktunya sudah mendesak, kemudian anggota tim tersebut diganti 5 orang yang murni dari petani. Ternyata tim yang baru ini dapat melaksanakan tugas dengan baik termasuk dalam mempersiapkan kongres.

6.2.3. Pertarungan Garis Perjuangan Kelompok Pendukung

Menyimak perjalanan organisasi tani, selain dihadapkan pada persoalan pemantapan strukturnya juga dihadapkan pada benturan garis ideologi perjuangan yang berbeda. Masa kritis organisasi tani

mulai terjadi ketika menjadi ajang tarik menarik di antara kelompok pendukung yang masing-masing memiliki garis ideologi perjuangan yang berbeda secara diametral, yakni antara garis ideologi perjuangan partai politik dan LSM. Masing-masing saling menawarkan garis ideologi perjuangannya, sehingga secara substantif mengarah pada dua kemungkinan, yakni persetujuan (*agreement*) atau pertentangan (*confrontation*). Persetujuan dicapai ketika terjadi adopsi aturan-aturan dengan masing-masing pihak saling menyalurkan energi positif terhadap penguatan organisasi sebagai organisasi gerakan petani. Sebaliknya pertentangan terjadi ketika persetujuan tidak dapat dicapai dan masing-masing menyalurkan sangsi negatif terhadap pihak lain.

Sebagaimana sudah di jelaskan sebelumnya bahwa konflik internal muncul karena terjadi tarik menarik kepentingan praktis dan fragmatis. Situasi ini berkembang dengan cepat, karena di antara kelompok-kelompok tersebut mengabaikan atau meminimalkan unsur mediasi. Masing-masing pihak saling memaksakan kehendak dan saling menghambat atau bahkan saling meniadakan (negasi) pihak lain dengan berusaha mengubah struktur dan formasi gerakan yang dapat dikontrolnya. Artinya, masing-masing pihak memiliki prinsip-prinsip garis ideologi yang berbeda yang sama-sama dipaksakan untuk diterapkan sejalan dengan perkembangan organisasi gerakan petani, dalam mencapai kepentingan praktis dan pragmatismenya.

Contohnya, dalam tubuh DTL dihadapkan pada dilema hubungan afeksi (kedekatan) dengan kelompok pendukung tertentu yang dapat dimaknai oleh kelompok pesaing dapat berakibat pada manipulasi hubungan kekuasaan atas sumberdaya organisasi gerakan petani. Kelompok PRD dan Serikat Petani Nasional (STN) yang secara nyata lebih aktif mendekatinya.

Keragaman garis ideologi dan persaingan yang berkembang tersebut menunjukkan adanya keragaman interpretasi yang terfokus pada arti penting organisasi tani sebagai sumberdaya mobilisasi potensial untuk mencapai kepentingan masing-masing pihak. Jika mereka benar-benar memiliki niat untuk memperkuat organisasi sebagai organisasi gerakan petani seharusnya dapat mencapai titik temu dan memenuhi empat hal. Pertama, saling mempengaruhi yang tidak terhindarkan karena adanya usaha untuk melakukan perubahan *schemata* garis ideologi kelompok lain, seharusnya mereka tetap pada koridor tujuan substantif gerakan petani. Kedua, kualitas interpretasi kelompok yang satu menunjukkan adanya potensi kritik interpretasi terhadap garis ideologi kelompok lain, tetapi tindakan itu diwujudkan dalam perjuangan untuk memperkuat organisasi gerakan petani. Ketiga, di dalamnya terbuka peluang untuk melakukan refleksi kritis

terhadap relasi kekuasaan dalam struktur dominasi, terutama terkait dengan latar belakang dan model perjuangan yang dipertahankan dalam gerakan petani. Keempat, kualitas interpretasi garis ideologi inilah yang memungkinkan lahirnya kritik terhadap upaya dominasi kelompok yang satu terhadap kelompok lainnya.

Ketika semuanya tidak dapat sampai pada titik temu dalam bangunan komitmen bersama, maka yang terjadi adalah kehancuran formasi struktur gerakan petani itu sendiri. Mengedepankan unsur bernegasi berarti mempertajam kontradiksi. Interpretasi garis ideologi oleh kelompok yang satu dapat mendatangkan reaksi keras dari kelompok lain yang berbeda garis ideologinya. Ini terjadi karena garis ideologi yang ditawarkan oleh masing-masing pihak mampu menyentuh syaraf kekuasaan dalam struktur dan formasi gerakan petani dan menyoroti posisi kelompok lain yang memiliki kepentingan dalam relasi kekuasaan terhadap organisasi tani dan petani basis.

Tidak semua garis ideologi perjuangan tersebut bersifat positif, progresif dan harus diterima dalam memperkuat formasi dan struktur gerakan petani. Kelompok LSM cenderung berada pada garis ideologi kompromistis, sedangkan kelompok PRD cenderung berada pada garis ideologi “radikal”. Tetapi, pada dasarnya perkembangan kematangan ideologi gerakan petani yang terwujud dalam organisasi gerakan petani membutuhkan unsur mediasi di antara garis ideologi-ideologi kelompok pendukung. Menjadi sebuah organisasi gerakan yang secara organisatoris terpisah dari komunitas petani basis, tetapi berjejaring kuat dan mampu mengartikulasikan kepentingan substantif petani.

Lemahnya posisi petani dalam struktur hubungan kekuasaan dalam gerakan petani juga karena karakter sosiokulturalnya. Selain kondisi kerja petani yang terbiasa tidak terorganisir juga bangunan hubungan-hubungan produksi pertanian yang membuat kekuatan politik petani cenderung bersifat konservatif. Kondisi ini hanya menyediakan visi bersama antar petani tetapi belum mampu mengorganisasikan kerangka tindakan mereka. Selain itu, benar bahwa petani lebih mengandalkan semangat untuk berjuang terhadap penguasaan tanah yang diyakini benar, dan karena itu mereka memiliki ketergantungan besar terhadap dukungan non petani.

Bagi para aktor strategis gerakan, tujuan kekuasaan tidak hanya bermakna kontrol terhadap sumberdaya mobilisasi tetapi juga bermakna memperoleh keuntungan terhadap mobilisasi sumberdaya petani basis. Konflik kepentingan terjadi ketika di antara mereka saling berebut untuk memperoleh kedua tujuan kekuasaan (kontrol dan keuntungan) sekaligus. Kelompok aktor yang berada di belakang Partai Politik berusaha mencapai kepentingan politiknya untuk dapat masuk

ke dalam ruang-ruang politik institusional. Kelompok aktor yang berada di belakang LSM berusaha mencapai kepentingan berhubungan dengan donor dan juga kepentingan politik praktis. Sedangkan kelompok aktor strategis petani berusaha mencapai kepentingannya sejalan dengan kepentingan (ekonomi dan politik) dengan kelompok mana mereka berjejaring atau berkoalisi. Kepentingan yang beragam tersebut cenderung dipertajam sejalan dengan struktur kontrol dan keuntungan yang tidak seimbang. Kondisi ini membuat petani basis terombang-ambing dengan arah perkembangan gerakan yang semakin tidak menentu.

Gerakan petani di Lampung dilihat dari tipe aktor dalam elemen status, orientasi utama gerakan, dan capaian langsung bisa dikatakan sama dengan kasus gerakan petani di Kalibakar Malang Selatan di mana orientasi utama aktor idealis adalah penerapan program *landreform by leverage*.⁶⁵ Tetapi hasil penelitian gerakan petani di Lampung membuktikan bahwa telah terjadi pergeseran orientasi utama dan capaian langsung yang dikejar oleh para aktor idealis, yakni mereka cenderung menjauh dari tujuan strategis gerakan dan banyak yang menjadi oportunistis. Kepentingan substantif petani basis menjadi tergerus oleh kepentingan praktis mereka. Kondisi ini memperkuat keberadaan petani basis sebagai “komoditas” ekonomi dan politik dalam sirkuit perilaku elitis.

Pertarungan pelembagaan garis ideologi gerakan, konflik internal dan fragmentasi organisasi yang terjadi semuanya bermuara pada sirkuit kepentingan para elit aktor gerakan. Jaringan antar kelompok aktor gerakan menjadi semakin renggang bukan hanya terjadi antar kelompok aktor non petani tetapi juga terjadi antar organisasi gerakan petani hingga antar organisasi petani basis. Fenomena elitis ini merupakan indikasi telah terjadi perubahan drastis sikap partisipatif dari motivasi membela kepentingan substantif petani menjadi sebagai pelembagaan yang mendasari motivasi untuk berpartisipasi. Sikap partisipasi para elit aktor gerakan bukan sebagai konsekuensi dari motivasi mereka untuk mencapai tujuan strategis, melainkan menjadi sebab yang mendasari motivasinya untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik sesaat. Disinilah titik utamanya mengapa tujuan strategis gerakan petani menjadi semakin jauh jaraknya dengan tujuan instrumental (praktis). Akar gerakan petani (komunitas petani basis) semakin tercerabut dari batang tubuhnya (organisasi tani). Suatu hal

⁶⁵ Dalam penelitiannya tentang formasi dan struktur gerakan sosial petani di Kalibakar Malang Selatan, Wahyudi menghubungkan antara tipe aktor dan orientasinya. Aktor idealis adalah para pemimpin gerakan petani, LSM, dan mahasiswa aktivis. Orientasi utamanya adalah penerapan program *land reform (norm oriented)* dengan capaian langsungnya adalah tersosialisasikannya ide *land reform* sebagai sesuatu yang bisa dilaksanakan (Uraian lebih rinci lihat Wahyudi, 2005: 198).

yang logis ketika tujuan instrumental gerakan petani yang semakin dibuat berjarak dengan tujuan strategisnya akan berdampak pada luruhnya soliditas perjuangan petani.

6.3. Decoupling Antara Persoalan Substantif Petani Dengan Kepentingan Para Elit Aktor Gerakan

Beberapa studi menggunakan konsep *decoupling* yang diartikan sebagai sesuatu yang tadinya sebagai satu kesatuan kemudian terpisah atau terputus dan masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Goodman dan Jinks (2004) sesuai dengan konteks kajiannya mengartikan sebagai “keterputusan antara tujuan resmi dan struktur formal dengan tuntutan fungsional”.⁶⁶ Chen (1995) mengartikannya menunjuk pada “keterpisahan fungsi”. Demikian juga Weick (1976, dalam *Administrative Science Quarterly*, 21:1-19) mengartikan konsep *decoupling* menunjuk pada “keterputusan hubungan antara kebijakan dan hasil substantifnya, antara kebijakan dan prakteknya di lapangan”.

Mengacu pada beberapa pengertian di atas, dimaksud dengan “*decoupling*” dalam penjelasan pada bagian ini adalah: “terjadinya suatu pemisahan (keterputusan) antara persoalan substantif petani dengan kepentingan para elit aktor gerakan petani. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa secara faktual terjadinya gerakan petani pada tataran sosiopolitik merupakan hasil kerja bersama antara petani dengan segenap elemen pendukungnya. Akumulasi sumberdaya mobilisasi di antara kedua elemen tersebut memang berada pada latar historis yang berbeda. Seperti akumulasi sumberdaya elemen pendukung (terdiri atas kaum intelektual dan kelas menengah kota) berangkat dari gerakan sosiopolitik secara umum untuk meruntuhkan kekuatan rezim Orde Baru. Sedangkan akumulasi sumberdaya petani secara khusus berbasis pada intensitas dan akumulasi persoalan agraria, khususnya masalah pertanahan. Kedua elemen tersebut bersatu membangun kekuatan gerakan dan bersinergi melakukan aksi-aksi kolektif dalam gerakan petani.

Dalam perkembangannya pasca aksi-aksi reklamasi antar elemen gerakan tersebut terjadi pemisahan, yakni masing-masing elemen aktor gerakan yang tadinya bersinergi, kemudian antar kelompok non petani bersaing mengedalikan organisasi gerakan petani, dan akhirnya masing-masing terpisah, saling bergerak menjauh dan bekerja sendiri-sendiri. Kondisi tersebut melemahkan pencapaian tujuan substantif

⁶⁶Goodman dan Jinks (2004: 649) menyatakan bahwa: “...“*decoupling*” (*within states*): *official purposes and formal structure are disconnected from functional demands.*”

petani sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan semula, baik dalam mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam pertemuan antar para pimpinan petani di Cipadang, Way Lima juga terungkap bahwa telah terjadi transaksi politik antara petani dengan para aktor non petani. Dua pimpinan dari wilayah komunitas petani basis yang berbeda menyatakan bahwa mereka akan dijamin tetap aman lahannya tidak diganggu jika mau mendukung salah satu calon Gubernur dalam pemilihan tahun 2008.

Kemudian, dilihat dari perkembangan gerak langkah beberapa organisasi gerakan agraria di Lampung pada umumnya dan organisasi gerakan petani pada khususnya, terdapat kesamaan pandangan bahwa strategi aksi unjuk rasa dan aksi reklamings sudah mulai kurang diperhatikan. Meskipun masih berada pada derajat yang beragam, mereka mulai berupaya untuk merespon perkembangan peluang politik untuk masuk dalam gelanggang politik institusional. Pertama, ada yang masih berada pada taraf wacana politik organisasi, meskipun secara individual atau kelompok aktor sudah mulai melakukannya, seperti IPL dan Mirak Nadai. Kedua, ada yang sudah menjadi program organisasi dan mekanismenya sudah diatur dalam AD/ART, seperti SPI-Lampung. Ketiga, ada yang sudah menjadi program organisasi dan sudah mulai melakukannya, seperti DRL, Walhi dan Kawan Tani Lampung. Gerakan petani yang terwadahi dalam GPL dalam melawan pembangunan Kota Baru Lampung juga sudah tidak ada aktivitasnya.

Antar kelompok elit aktor gerakan agraria masih belum mampu membangun satu visi, misi dan *common platform*. Masing-masing sudah terpisah, saling memisahkan diri, dan bergerak sendiri-sendiri. Perbedaan strategi dan orientasi dukungan politik institusional dalam dinamika politik lokal tersebut tidak berbasis pada komitmen bersama. Misalnya, kelompok aktor yang satu secara politik mengarahkan dukungannya pada calon tertentu bersaing dengan kelompok aktor lain yang mengarahkan dukungannya pada calon yang berbeda. Persaingan terhadap dukungan politik tersebut berjalan seiring dengan adanya penurunan derajat komunikasi dan rentan mengganggu ikatan solidaritas antar komunitas petani basis. Peluang politik tingkat desa juga sudah dimanfaatkan oleh para elit organisasi tani, di mana mereka menampilkan calonnya masing-masing merebut jabatan Kepala Desa. Pada satu sisi, cara itu oleh mereka dianggap sebagai strategi gerakan agar dapat mengontrol kebijakan pemerintah desa dalam mendukung tujuan perjuangan. Tetapi, pada sisi lain terjadi perenggangan ikatan antar komunitas petani basis karena tidak didasari oleh sistem koordinasi yang terpusat pada organisasi tani.

Strategi dan orientasi politik lokal yang terpisah tersebut menunjukkan bahwa masing-masing masih tersekat “ego organisasi” (termasuk ego ketokohan dan ego kelompok), sehingga di balik itu semua justru kepentingan para elitnya yang nampak lebih menonjol dibanding perjuangan untuk mencapai kepentingan substantif petani. Ada kecenderungan bahwa perubahan strategi dan orientasi gerakan yang ingin masuk dalam ruang politik institusional nampaknya lebih didasarkan pada arti penting sumberdaya mobilisasi potensial untuk mencapai kepentingan praktis dan pragmatisnya daripada didasarkan pada komitmennya untuk mengatasi berbagai persoalan substantif yang dihadapi petani.

Akibatnya tingkat kepercayaan (*trust*) konstituen (petani basis) terhadap keberadaan organisasi tani semakin menurun (derajat legitimasi rendah). Sikap petani basis terhadap peluang komunikasi dialogis dengan para elit organisasi guna mengembangkan organisasi gerakan menjadi semakin tertutup meskipun tujuannya jelas untuk kemajuan petani. Kondisi tersebut terjadi berdasarkan pengalaman sebelumnya atas berbagai kesalahan konsekuensi yang dilakukan oleh para elit gerakan, terutama akibat pengaruh dari perilaku aktor non petani sebagai pendukungnya. Pencapaian makna substantif agraria sesuai dengan kepentingan petani justru semakin dimanipulasi sejalan dengan perkembangan peluang-peluang politik dan ekonomi dalam dinamika politik lokal. Oleh karena itu, cacat perilaku elit di dalam perkembangan organisasi tani bukan hanya menurunkan derajat kepercayaan petani basis tetapi juga menjauhkan derajat solidaritas perjuangan di antara mereka dalam kelanjutan gerakan petani. Cacat masing-masing elit aktor bukan menjadi pelajaran tetapi justru rentan menjadi “kartu kunci” untuk saling menjatuhkan.

6.4. Stagnasi Gerakan Petani

Terjadinya deformasi (kerusakan) dan *decoupling* dalam struktur gerakan petani sebenarnya sebagai indikasi bahwa telah terjadi proses pelemahan struktur internal gerakan petani. Dengan hadirnya bukti-bukti lain dengan jelas lebih memperkuat arah kecenderungan tersebut. Proses pelemahan struktur gerakan petani akibat kedua faktor internal dan eksternal, dan ini merupakan indikasi telah terjadi proses degenerasi. Aktivitas organisasi tani dengan segenap cirinya berada pada kondisi stagnan, seperti yang terjadi pada perjuangan sebelumnya ketika berada pada sistem politik otoritarian.

6.4.1. Pengeroposan Dari Dalam

Pasca aksi pendudukan lahan istilah “mabuk kemenangan” menjadi akrab. Konsepsi ini justru mengarah pada perilaku dan pengaruh negatif yang berimplikasi pada makna perjuangan yang semakin memudar, soliditas sosial semakin lemah, tingkat kepercayaan antar sesama semakin turun, jaringan hubungan semakin mengendur, dan komitmen perjuangan semakin melemah. Singkatnya, modal sosial gerakan petani mengalami peluruhan drastis. Sekalipun banyak yang mengklaim bahwa gerakan petani adalah sukses, tetapi sebenarnya tidak mengubah kehidupan petani secara berarti. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa anggapan seperti itu justru mendorong munculnya tindakan-tindakan yang berindikasi terjadinya pengeroposan dari dalam. Hasil penelitian Hartoyo (2010: 143-146) menemukan beberapa kelemahan organisasi tani sebagai berikut:

1. Sikap menjadi fungsi kepentingan. Selama aksi unjuk rasa dan pendudukan lahan, orientasi tindakan para partisipan terkonsentrasi pada tercapainya tuntutan-tuntutan praktis yang mendukung tujuan strategis gerakan. Pasca reklamasi orientasi tindakan mereka berubah semakin berjarak dengan tujuan strategisnya. Komunitas petani basis diposisikan sebagai sumberdaya mobilisasi potensial dan menjadi ajang perebutan pendukung tercapainya kepentingan instrumental oleh para elit gerakan itu sendiri.
2. Praktik saling menegasikan. Jatuh bangundalam kepemimpinan organisasi tani, upaya membunuh karakter, menyebar fitnah dan mempersempit gerak pihak lain dalam akses di ruang publik adalah bagian dari indikasi upaya meningkatkan derajat kekuasaan diri dan kelompoknya dengan cara menurunkan atau mengeliminir derajat kekuasaan kelompok lain yang dianggap pesaing atau lawan.
3. Pola kepemimpinan dalam gerakan yang lebih bersifat transaksional daripada transformasional. Upaya untuk menguasai petani basis baik secara langsung maupun melalui penguasaan kontrol terhadap organisasi tani bukan dalam rangka penyelesaian persoalan substantif petani tetapi lebih dilihatnya memiliki nilai jual yang bisa mendatangkan keuntungan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, gerakan petani dalam perkembangan organisasionalnya lebih bersifat sebagai gerakan untuk mencapai tujuan praktis dan pragmatis daripada untuk mencapau tujuan strategis gerakan. Kualitas kepemimpinan semakin nampak keropos dan mandul, mereka saling mengklaim petani basis sebagai anggotanya, saling

menegasikan pihak lain dan perpecahan sebagai jalan keluar dengan membentuk organisasi tani sendiri.Indikasinya antara lain adalah: (1) kepemimpinan yang jatuh bangun; (2) tidak ada kaderisasi; (3) tidak mampu tampil sebagai kelompok penekan dengan inovasi isu-isu petani secara produktif; (4) kepemimpinan yang tidak demokratis; (5) keanggotaan bersifat kolektif dan berbasis klaim; (6) tidak dapat mengatasi persoalan pembagian lahan hasil pendudukan sesuai dengan tujuan gerakan, yakni mendahulukan yang berhak dan para petani miskin; (7) tidak mandiri dan tidak memiliki garis massa yang jelas; dan (8) organisasi tani oleh para petani basis semakin kurang dipercaya sebagai wadah perjuangan petani karena para elit organisasi membawanya masuk terlibat proses transaksi dalam dinamika politik lokal.

4. Kesadaran petani basis dalam mendukung keberlanjutan organisasi tani semakin lemah. Kuat anggapan bahwa perjuangan petani telah selesai ketika mereka sudah mendapatkan tanah pertanian. Tujuan gerakan petani adalah spesifik, kongkrit dan bersifat meterial bukan pada tujuan strategis. Fakta ini merupakan kelemahan para elitnya karena tidak mampu mentransformasikan tujuan strategis gerakan dalam struktur schemata petani.
5. Struktur komunikasi dalam organisasi tani semakin kurang efektif karena kurang pendekatan secara periodik. Pada tataran perilaku para elit juga sudah cacat di mata petani basis karena berbagai kesalahan tindakan yang telah mereka lakukan. Petani basis sering menjadi alat mobilisasi untuk mencapai kepentingan para elit gerakan sehingga sangat sulit mempertahankan kepercayaan mereka yang sudah terlanjur luntur. Berbagai kasus yang terjadi di mana petani basis semakin jelas menjadi obyek mobilisasi untuk kepentingan politik dan ekonomi yang berujung sebagai korban kesalahan tindakan. Dalam ranah sosiopolitik petani basis menjadi sadar sebagai obyek mobilisasi dukung-mendukung pencapaian kekuasaan politik sehingga rasa simpati, loyalitas dan kepercayaan petani menjadi semakin turun. Dalam ranah ekonomi, antara lain kasus koperasi tani yang didukung secara materi oleh petani basis (iuran modal/simpanan wajib), tetapi oleh para elit aktornya diselewengkan dengan tidak ada pertanggung jawaban yang jelas. Koperasi menjadi gulung tikar dan modalnya juga ikut habis tidak diketahui kemana larinya. Kedua kasus tersebut melunturkan kepercayaan petani dan sikap mereka menjadi apatis, pasif dan bahkan cenderung tidak mau tahu terhadap kondisi organisasi tani yang juga semakin rapuh.

6. Terjadi pembelahan arus sumberdaya gerakan sampai terjadi polarisasi antara yang terkonsentrasi pada organisasi tani dan yang terkonsentrasi pada massa petani basis. Para aktor strategis gerakan semakin larut bermain pada ruangnya sendiri berada di dalam organisasi tani. Mereka sengaja memanfaatkan kapabilitas organisasi tani untuk dapat bermain pada ruang relasi kekuasaan dalam struktur jaringan eksternal.⁶⁷ Kemudian terjadi dua stratifikasi ruang yang terpisah antara kelompok elitis organisasi tani dan komunitas petani basis. Jarak stratifikasi ruang tersebut selain menunjukkan lemahnya soliditas jaringan internal juga menunjukkan bahwa kedua kelompok aktor dalam ruangnya masing-masing sehingga sama-sama terjebak pada upaya pemuasan kepentingannya sendiri dalam jangka pendek.
7. Rendahnya sumberdaya manusia dalam kepengurusan organisasi. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan organisasi dan kualitas penyelesaian setiap persoalan petani. Tujuan pragmatis petani memperoleh tanah tidak mampu dikontrol secara baik dan distribusinya diserahkan sepenuhnya kepada organisasi tani tingkat basis (paling tinggi tingkat posko induk). Akibatnya, di wilayah yang berhasil diduduki terjadi pembagian yang kacau dan tidak dapat dibendung, munculnya para borjuis kecil, aksi premanisme, maraknya para spekulan tanah dan para penunggang bebas (*free-rides*) dari berbagai kalangan.⁶⁸ Sesuai dengan tujuan gerakan, para petani miskin yang seharusnya menjadi sasaran utama justru banyak yang tidak mendapatkan bagian lahan garapan. Terdapat ungkapan bahasa Jawa: "*asu gede menang kerahe*" (anjing besar mesti menang dalam berkelahi). Artinya, ketika melakukan aksi unjuk rasa dan mengklaim semua partisipan (dengan beragam latar belakang) bekerjasama secara sinergis (bahu membahu). Bahkan banyak organisasi tani basis dari berbagai wilayah ikut serta membantu. Tetapi setelah tanah dapat dikuasai, kemudian muncul saling mengaku (klaim) yang paling berjasa dengan mengeluarkan berbagai atribut kekuasaan untuk

⁶⁷ Masing-masing aktor strategis memiliki kapabilitas membangun jaringan kepentingan dengan pihak luar secara politik maupun ekonomi yang berkaitan atau tidak dengan kepentingan substantif petani. Jaringan hubungan tersebut menjadi lintas batas termasuk berhubungan dengan para pemegang otoritas institusional atau dengan pihak lain meskipun harus menjual diri dan menjual massa petani basis anggota organisasi.

⁶⁸ Capaian langsung para oportunist bukan hanya untuk mendapat citra sebagai pejuang, sebagai pahlawan petani, serta untuk memperoleh kekuasaan sosial politik sebagaimana yang terjadi pada kasus gerakan petani di Kalibakar Malang Selatan (Wahyudi, 2005: 198). Lebih dari itu, mereka juga berkeinginan mendapatkan keuntungan materi dan bagian tanah pertanian. Bahkan sebagian besar motivasi aktor strategis (petani dan non petani) pada akhirnya terlihat bahwa partisipasi mereka dalam gerakan hanya sebagai alat untuk mencapai kepentingannya yang bersifat oportunist.

mendapatkan bagian yang paling banyak. Mereka adu kekuatan untuk saling menyingkirkan yang lain, dan yang paling kuat adalah mereka yang mampu memperoleh bagian yang paling banyak sesuai keinginan. Sedangkan mereka yang lemah hanya mendapatkan sisanya, bahkan ada yang tidak mendapatkan bagian atau hanya sebagai klien (petani penggarap) dari pihak-pihak non petani (patron) yang dapat menguasai lahan disitu.

8. Komunitas petani basis secara terus menerus berpotensi menjadi ajang perebutan pengaruh oleh berbagai organisasi lain yang para elit aktornya secara historis pernah berjasa terhadap keberhasilan perjuangan petani di masa lalu. Para elit gerakan (petani dan non petani) tidak lagi bisa bersatu karena kuatnya kepentingan masing-masing dan saling menganggap bahwa komunitas petani basis yang ada itu juga menjadi anggota organisasinya. Beberapa contoh kasus di antaranya adalah: (1) berdirinya Posko (baru) di dalam Posko (lama); (2) munculnya isu akan dilakukan gerakan 40.000 petani dengan mudah dibatalkan secara sepihak oleh para aktor strategis non petani karena mereka sudah berhasil mengurus ijin operasi perusahaan dan mendapatkan sejumlah uang dari perusahaan; (4) perebutan pengaruh dalam acara peringatan sewindu pasca reklamining; dan (5) berdirinya LSM dan organisasi tani (baru) yang mengklaim sebagian besar anggotanya adalah juga yang menjadi anggota organisasi tani lain (lama).

Semua itu membawa suatu kondisi bahwa konflik horizontal masih rentan terjadi. Suatu persoalan yang krusial adalah belum adanya tanda-tanda upaya penyatuan kembali gerak langkah perjuangan berbagai organisasi gerakan petani. Menurunnya kapasitas organisasional gerakan petani berdampak pada munculnya persoalan horizontal, semakin menurunnya soliditas perjuangan, komitmen moral dan jaringan (*networks*) antara para aktor strategis petani dan segenap elemen pendukungnya.

6.4.2. Penyumbatan dari Luar

Kemampuan gerakan petani juga dipengaruhi oleh penyumbatan dari luar, baik langsung maupun tidak langsung. Proses penyumbatan terjadi dalam berbagai cara dan upaya terkait dengan kondisi spesifik pada masing-masing kasus. Hasil penelitian Hartoyo (2010: 146-148) menemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum terkesan adanya upaya pemerintah untuk mengembangkan persoalan pertanahan yang dihadapi petani. Secara politis upaya ini mampu melemahkan semangat perjuangan petani. Soliditas perjuangan kembali seperti semula menjadi

terpatah-pecah dan terpisah-pisah antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru, ketika mereka kembali bergejolak maka akan mudah diredam dan dilokalisir (diblokir) baik dengan cara persuasif maupun represif. Sebagian besar kasus pertanahan terutama pada komunitas petani anggota organisasi basishingga saat ini belum terselesaikan. Sebagai contoh beberapa kasus adalah: (1) tanah bekas *erfpacht* di desa Gunung Rejo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang sudah dikelola oleh masyarakat setempat sejak tahun 1940, hingga saat ini BPN masih belum mau memberikan sertifikat tanah karena masih berurusan dengan pihak TNI. Proyek serifikasi tanah oleh BPN (yang katanya menjadi agenda *aset reform*) masih sebatas pada tanah-tanah yang dikuasai rakyat dan tidak ada konflik di dalamnya; (2) di Register 40 Gedung Wani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan meskipun sudah dibentuk Tim Koordinasi Antar Desa (TKAD) untuk meningkatkan status tanah yang sudah dikuasai petani menjadi bersertifikat, sampai saat ini masih diambangkan; (3) tanah pertanian di desa Air Panas Lampung Selatan yang sudah dikuasai petani sekarang digugat kembali oleh perusahaan yang dulu menguasainya; (4) pembagian tanah obyek transmigrasi di wilayah Rawasragi sampai saat ini juga belum jelas.

2. Melemahnya soliditas perjuangan petani berjalan seiring dengan menguatnya serangan balik dari pihak lawan dan pihak lain yang berkepentingan. Serangan balik antara lain dapat berupa uang, kedudukan, menciptakan isu penak-lukan, pengkaburan kebijakan pertanahan, dan mencitrakan kondisi petani yang tidak aman melalui adu domba, dan sebagainya. Hasil wawancara dari berbagai sumber dinyatakan bahwa:
 - a. Uang dan kedudukan lebih bersifat individual diberikan kepada para elit organisasi tani. Dampaknya cukup kuat terhadap lemahnya organisasi tani. Mereka cenderung tidak dapat berbuat apa-apa kecuali berkiblat pada kepentingan pemberi uang dan kedudukan. Ketika terjadi persoalan petani mereka cenderung menghindar dan menyerahkan persoalan kepada pemerintah. Organisasi tani semakin tidak memiliki kekuatan sebagai wadah perjuangan nasib petani.
 - b. Isu penanaman jarak, sertifikasi komunal dan penjualan tanah oleh tokoh petani yang dikembangkan oleh para pemegang otoritas dan perusahaan tertentu yang berujung saling menyalahkan dan membuka kedok organisasi tani yang sudah tidak punya gigi (kekuatan legitimatif) lagi.

- c. Diterbitkan SK tentang luas wilayah pertanahan lebih dari satu yang masing-masing berbeda ukurannya dan hingga saat ini belum jelas batas-batasnya.
 - d. Diisukan petani yang melakukan reklamasi di wilayah kehutanan sekaligus melakukan *illegal logging*. Dibangun pos-pos penjagaan di wilayah kehutanan dengan menyingkirkan tokoh petani tertentu dan merangkul tokoh petani lain di wilayah yang sama.
3. Terbentuknya Tim 13 memiliki dua posisi strategis (gerakan) bagi petani dan posisi taktis (peredaman) bagi penguasa. Posisi strategis karena petani memiliki kekuatan setara, sedangkan posisi taktis karena persoalan petani bisa cairkan, di “wadahi”, dilokalisir, ketegangan dapat dikurangi dan reaksi petani dapat disumbat. Proses penyumbatan perjuangan petani antara lain ketika wakil dari petani di dikeluarkan dari keanggotaan Tim 13 (dianggap duri dalam daging) dan pada tahun 2002 dan kedudukan Tim 13 dari SK Gubernur dikuatkan dengan SK Menteri. Sejak terbentuknya tahun 1998 kerja Tim 13 sudah menghasilkan banyak rekomendasi penyelesaian konflik pertanahan, tetapi tidak banyak yang sampai ditindaklanjuti di lapangan. Ada kesan dibentuknya Tim 13 sebagai upaya untuk menampung persoalan pertanahan berhadapan dengan petani. Rekomendasi yang dihasilkan bukan untuk diselesaikan tetapi sebagai upaya pengembosan amarah petani. Hasil rekomendasi disimpan dimasukkan ke dalam “lemari es”, tidak dihilangkan tetapi dibekukan. Hingga tahun 2001 kinerja Tim 13 mandul dan pada tahun yang sama petani kembali memprotes dan berhasil melakukan perombakan susunan keanggotaan Tim 13. Hasil perubahan hanya berjalan kurang dari satu tahun, anggota wakil dari petani disingkirkan karena dianggap sebagai “duri dalam daging” dan orientasi kerja Tim 13 semakin tidak berpihak pada kepentingan petani. Dengan tidak ada penghalang dari wakil petani maka penyelesaian kasus konflik pertanahan semakin kuat dapat diarahkan sesuai dengan hukum positif. Proses penyelesaian yang demikian syarat dengan kepentingan pihak lawan (penguasa dan pengusaha) dan karena itu penyelesaian secara penal (jalur hukum) ditentang oleh para wakil petani.

6.4.3. Stagnasi Gerakan Petani

Istilah stagnasi secara umum berarti terjebak dalam rutinitas, berada pada situasi yang monoton, lesu, tidak produktif, tertekan, semangat yang rendah, berada dalam kesedihan, dalam kondisi tak

bergerak atau terhenti, melempem, dan kebingungan. Dalam konteks gerakan petani, berarti tidak mampu bergerak maju, gagal dalam pengembangannya, dan tidak menghasilkan perubahan struktural agraria yang berarti bagi perbaikan nasib petani. Efeknya dalam dimensi gerakan petani adalah telah muncul kembali derajat tekanan-tekanan sosial-psikologis tertentu bagi para elit aktor gerakan. Strategi gerakan petani kembali pada pendekatan proaktif atau konsensus, dan organisasi gerakan semakin kehilangan kepercayaan dan legitimasi, baik oleh pemerintah maupun oleh konstituennya.

Para elit gerakan cenderung berpandangan sama bahwa aksi massa petani tidak lagi sebagai strategi gerakan yang efektif. Persoalan agraria bukan lagi menjadi agenda kerja organisasi tetapi diintegrasikan dalam tata kerja pemerintah desadan pemerintah daerah. Kondisi ini melemahkan ciri organisasi gerakan ke dalam posisi stagnan, menjadi penunggu dan berharap akan datang kebaikan hati para pemegang otoritas. Legitimasi organisasi dalam hubungannya dengan derajat kepercayaan (*trust*) konstituensi semakin melemah. Posisi tawarnya dengan negara dan dengan sektor swasta menjadi kurang kuat sebagai senjata perjuangan penguatan dalam struktur hubungan agraria.

Pada kondisi seperti itu, masih sangat jauh jika kita manaruh harapan kepada organisasi tani sebagai organisasi gerakan untuk dapat mewujudkan kedaulatan petani dan meningkatkan daya tahan petani baik secara ekonomi, sosial, politik, psikologis maupun kultural. Menurut Hartoyo (2010: 148-149), eksistensi beberapa organisasi tani dalam kondisinya hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak bertahan lama dan sampai saat ini berada dalam kondisi “mati suri”. Ini terjadi ketika elit aktornya berhasil ditekan oleh kelompok pesaingnya untuk tidak memiliki akses di ruang publik. Kemudian sebagian anggota basisnya menyatu membentuk organisasi gerakan petani baru.
2. Berada dalam kondisi pasif. Irama gerak organisasi gerakan sebenarnya lebih dekat dengan tujuan praktis petani daripada tujuan strategis gerakan. Kondisinya yang pasif tersebut terjadi sejak dikeluarkan dari keanggotaan Tim 13 tahun 2002, karena di anggap “duri dalam daging”. Pada tahun 2005 upaya penyelesaian status tanah di 6 (enam) desa diserahkan kepada pemerintah desa melalui TKAD. Jaringan dengan salah satu organisasi gerakan petani nasional masih sebatas komitmen, sedangkan realisasinya belum ada. Gairah untuk bangun hingga saat ini baru sebatas wacana.

3. Baru sembuh dari sakit kronis setelah berubah menjadi organisasi unitarian. Elemen organisasi masih dalam kondisi sakit dan dalam proses pembenahan. Para elitnya masih sering berbenturan terkait dengan pemahaman dan praktik kerja sebagai organisasi petani yang baru dengan beberapa anggota basis yang juga baru.
4. Dalam posisi menunggu belas kasihan dari pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menyelesaikan persoalan pertanahan. Idealisme yang semua dipegang teguh oleh organisasi gerakan semakin lama semakin terdesak dengan kepentingan-kepentingan pragmatis dan transaksional.

Hartoyo (2010: 140-151) lebih lanjut menjelaskan bahwa sejak aksi-aksi kolektif petani melemah, tidak diproduksi lagi isu-isu kritis gerakan, tidak ada kaderisasi, konsolidasi antar organisasi melemah, dan kontrol negara terhadap gejala petani menguat. Hal ini dapat disimak dari beberapa kelemahannya sebagai berikut:

- a. Lemahnya upaya kaderisasi dalam keberlanjutan organisasi gerakan sebagai indikasi semakin lemahnya keberlanjutan gerakan petani. Meskipun ada satu organisasi tani yang sudah melakukan perubahan model, tetapi kondisinya sama dengan pada awal berdirinya. Perubahan itu terkesan adanya unsur pengkarbitan kembali dan sebagai alat legitimasi normatif dalam mencapai kepentingan status quo para elit aktor organisasi gerakan petani di pusat (nasional) daripada kepentingan para kader petani dalam tubuh organisasi gerakan petani di daerah. Pada pihak lain, ada dua arah kecenderungan sifat organisasional antara sistem federatif dan unitarian dalam hubungannya dengan organisasi tingkat nasional. Sistem federatif masih dipegang kuat oleh konstruksi gerakan dari bawah, sedangkan sistem unitarian digunakan oleh konstruksi gerakan dari atas. Dengan mempertahankan sistem federasi membuat organisasi tani di daerah larut dalam kehidupan petani basis dan semakin jauh dari irama kehidupan organisasi tani tingkat nasional. Sedangkan sistem unitarian membuat organisasi petani di daerah semakin tergantung (bahkan terkesan sebagai bember) dalam irama kehidupan organisasi tani tingkat pusat.
- b. Kondisi organisasi gerakan di daerah semakin melemah. Ada yang “mati suri”, menjadi kelompok gerakan (*movements association*) atau kelompok swalayan (*self-help groups*). Perhatian tidak lagi tertuju pada kapabilitas produksi isu-isu kritis dalam menjawab persoalan substantif petani dalam jangka panjang dan umum, tetapi lebih tertuju pada persoalan kejelasan status tanah dan bersifat kasuistik. Karena pendekatan proaktif atau konsensus, maka mekanisme institusional cenderung kembali digunakan.

Hubungan dengan pemegang otoritas dan perusahaan menjadi tergantung (tidak setara lagi). Dominasi sumberdaya agraria kembali sepenuhnya berada pada para pemegang otoritas yang tetap lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha.

“ Ketika masih memiliki posisi tawar yang kuat dan berada dalam hubungan kekuasaan yang setara (1998-2002) para wakil petani sering berdialog dengan pejabat pemerintah daerah dan dengan para pengusaha untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di daerah. Sekarang posisi tawar petani seperti itu tidak dimiliki lagi dan bahkan beberapa organisasi tani lokal (atau basis) semakin tidak solid dan tidak mampu menghadapi setiap gangguan baik dari dalam apalagi dari luar, meskipun pada sebagian kasus belum sampai pada titik kritis yang mengusik kebutuhan dasar mereka sebagai petani.

- c. Kepentingan ego kelompok atau ego organisasi masih tetap mengemuka berada di atas kepentingan substantif petani yang menjadi titik inti tujuan gerakan petani. Sebagai aktor gerakan mestinya semua bermuara pada tujuan yang sama, yakni perubahan sistem sosial agraria (transformasi struktural agraria) sebagai basis utama ideologi gerakan. Meskipun secara tekstual tujuan strategis dari masing-masing organisasi adalah sama, tetapi dalam praktiknya tidak terjadi konsolidasi dalam menyatukan visi, misi dan gerak langkah perjuangan bersama.
- d. Kesadaran politik petani hanya sampai pada tataran elit dan tidak sampai pada tataran akar rumput (petani basis). Elit petani mampu memobilisir petani basis karena mereka menginginkan tercapainya tuntutan-tuntutan praktis. Ketika tuntutan mereka sudah terpenuhi maka komitmen perjuangan menjadi melemah sejalan dengan semakin melemahnya hubungan struktural perjuangan. Disini peran elit petani menjadi berada di antara dua sisi, yakni berada pada ruang bermain para elit organisasi gerakan atau berada pada ruang petani basis.
- e. Meskipun peluang politik tetap terbuka bagi gerakan petani, tetapi kontrol negara terhadap perjuangan petani semakin menguat kembali dan berjalan seiring dengan semakin melemahnya kinerja organisasi gerakan. Akibatnya adalah setiap terjadi gejolak petani di tingkat akar rumput dapat dengan mudah dilokalisir sedemikian rupa, sehingga solidaritas di antara mereka semakin sulit dikuatkan kembali. Hingga saat ini persoalan pertanahan masih banyak yang dihadapi petani dan belum tahu kapan dapat terselesaikan.

Tabel 7. Ciri-Ciri Perkembangan Organisasi Gerakan Petani

Aspek	Uraian
Isu kritikal	<ul style="list-style-type: none"> Masih tetap terkonsentrasi pada persoalan material (tanah pertanian). Tanah dikuasai oleh petani penggarap.
Orientasi gerakan	Pada awalnya bersifat populis kemudian berubah menjadi bias sebagai gerakan yang bersifat elitis.
Orientasi organisasi gerakan petani	<p>a. Orientasi klien (komunitas petani basis): sebagai organisasi sukarela atau yang memperjuangkan kepentingan lokal sendiri melalui jalur pemerintah.</p> <p>b. Orientasi otoritas: kembali berciri sebagai kelompok kepentingan ikut berpartisipasi dalam dinamika politik lokal.</p>
Strategi gerakan	Aksi-aksi kolektif tidak dilakukan lagi dan cenderung menggunakan pendekatan konsensus (akomodatif) .
Hubungan antar organisasi gerakan petani	Tidak terjadi kesamaan pandangan dan kesatuan gerak-langkah perjuangan (<i>common platform</i>).
Posisi kelompok aktor pendukung (Non petani)	Lemah, kembali sebagai advokasi hukum, tidak mendukung aktivitas organisasi gerakan petani.
Struktur organisasi	Federatif, hanya SPL yang berubah dari federatif menjadi unitaris (SPI-Lampung).
Strategi perjuangan	Kembali menggunakan pendekatan institusional
Regenerasi/kaderisasi	Minim, tidak ada kaderisasi (kecuali SPL); masih mengandalkan figur ketokohan.
Orientasi tindakan elit aktor	Menjadikan organisasi tani dan sumberdaya basis sebagai alat mobilisasi dan komoditas dalam dinamika politik lokal.
Hubungan dengan Pemerintah daerah	Semakin berjarak, tidak masuk dalam Tim 13.
Dukungan petani basis	Banyak komunitas petani basis yang secara de facto keluar dari keanggotaan dan tidak terurus.
Hasil pendudukan lahan	Distribusinya tidak tepat sasaran, banyak <i>free rider</i> , dan belum jelas statusnya.

Sumber: Hartoyo, 2010: 151-152.

Tabel 8 menunjukkan bahwa hingga pada puncak gerakan, yaitu dalam melakukan aksi-aksi protes dan reklamings para pemimpin organisasi gerakan petani dan para pendukungnya menjadi aktor idealis. Aksi-aksi kolektif yang mereka lakukan berorientasi pada

penerapan program *land reform by leverage* dan dapat tersosialisasikan ide tersebut. Dalam jangka pendek, melalui gerakan sosiopolitik, mereka berupaya mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan agraria dengan memperhatikan aspirasi petani. Atau mereka berupaya mendesak pemerintah agar dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan agraria dengan melibatkan petani secara langsung. Upaya ini dimaksudkan agar kebijakan agraria yang semua bersifat antagonis terhadap petani perlu diubah menjadi bersifat simbiosis (pro) mutualisme antara negara (pemerintah) dan swasta (perusahaan) dengan petani.

Pasca dilakukan aksi-aksi kolektif, terutama reklamasi, banyak dari kelompok elit aktor gerakan yang berubah menjadi berorientasi oportunistik. Sikap dan perilaku oportunistik didasari oleh kepentingan praktis dan pragmatis masing-masing kelompok aktor untuk dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya organisasi dan petani basis. Dalam maknanya yang lebih luas, berdasarkan perubahan perilaku mereka itu dapat dimasukkan dalam kelompok "*free riders*". Sikap dan perilaku mereka yang tadinya menjadi bagian utama dalam memperkuat aksi-aksi kolektif dalam gerakan petani, kemudian berubah menjadi sikap dan perilaku yang memanfaatkan sumberdaya gerakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan praktis dan pragmatisnya.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para elit aktor gerakan cenderung semakin berkembang ke arah transaksional. Banyak di antara mereka yang kemudian bekerjasama dengan para aktor pendatang baru dan dengan lembaga-lembaga penyandang dana dari luar untuk dapat memanfaatkan sumberdaya mobilisasi potensial, yakni organisasi tani dan petani basis. Fungsi manifestasinya adalah untuk memperkuat gerakan dan organisasi gerakan agraria, tetapi tujuan latennya adalah untuk dalam mencapai kepentingan ekonomi dan politik tertentu.

Perubahan orientasi tindakan kelompok aktor gerakan tersebut terkait dengan semakin tidak terfokusnya gerakan agraria dalam mencapai tujuan-tujuan substantif petani. Akibat lebih lanjut adalah struktur gerakan petani mengalami deformasi, *decoupling* dan akhirnya mengalami stagnasi. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa semakin melemahnya kekuatan gerakan petani, selain dipengaruhi oleh perkembangan situasi eksternal juga oleh faktor internal. Pengaruh faktor eksternal, antara lain menguatnya struktur politik pusat dan daerah yang semakin membatasi peluang dilakukan aksi-aksi kolektif non institusional, dan tindakan para penentu kebijakan yang juga membatasi ruang gerak organisasi tani dalam melakukan aksi-aksi kolektifnya. Sedangkan pengaruh faktor

internal, antara lain berupa berubahnya orientasi perilaku para elit aktor gerakan yang semakin jauh dari tujuan semula gerakan petani.

Tabel 8. Tipe Aktor Gerakan Petani dan Orientasinya

Elemen	Tipe Aktor			
	Masa Reklamimng	Pasca Reklamimng	Materialis	Opportunis
	Idealis	Opportunis		
Status	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan organisasi gerakan petani • LSM • Mahasiswa aktivis 	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan organisasi gerakan petani • LSM • Mahasiswa aktivis 	Petani pengikut	<ul style="list-style-type: none"> • Free riders • Aktivis partai politik • Penguasa formal
Orientasi Utama	Penerapan Program <i>land reform (norm oriented)</i>	Kekuasaan sosial-politik dan ekonomi	<i>Land property (resource-oriented)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabatyan g baik hati • <i>Social-political power.</i>
Capaian Langsung	Tersosialisasikan nya ide <i>land reform</i> sebagai sesuatu yang bisa dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Citra sebagai pejuang dan pahlawan petani. • Kekuasaan sosial-politik dan ekonomi 	Pemilikan aset tanah untuk kepentingan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Citra sebagai pejuang dan pahlawan petani. • Kekuasaan sosial politik

Sumber: Hartoyo (2010: 154), yang diadaptasi dari Wahyudi (2005: 198).



7 Pergeseran Arah Perkembangan Gerakan Petani

7.1. Pendahuluan

Pada Bab 7 ini menfokuskan pada penjelasan tentang pergeseran arah perkembangan gerakan petani atau gerakan agraria yang terjadi di Lampung. Pergeseran arah perkembangan gerakan petani terjadi, yakni semula sebagai gerakan konterkultural yang berciri sebagai gerakan yang berada pada jalur radikal, kemudian bergeser sebagai gerakan subkultural yang masuk pada jalur involusi.

Dalam perkembangan gerakan petani telah terjadi strukturasi internal, berada pada siklusnya, karena pengaruh faktor internal dan eksternal. Pada tahap awal perjuangan petani dalam penguasaan kembali tanah pertanian yang diambil alih oleh negara dan swasta, belum ada elemen aktor pendukung dari luar. Kemudian berkembang pada puncak gerakan petani dengan mendapat dukungan kuat dari berbagai elemen aktor dari luar. Dalam perjalannya hingga saat ini, kondisi gerakan dan organisasi gerakan petani kembali seperti semula, yaitu sudah mulai ditinggalkan oleh berbagai elemen aktor pendukung dari luar.

Sejalan dengan realitas perkembangan gerakan petani tersebut, sistem sosial agraria dominan yang antagonis terhadap eksistensi petani semakin menguat kembali. Gerakan petani dalam menggugat kebijakan agraria kembali mengalami hambatan yang kuat, dan dalam jangka panjang program-program gerakan semakin sulit untuk dapat terlembagakan dalam ikut mewarnai keberlakuan sistem sosial agraria dominan agar menjadi bersifat simbiosis terhadap keberlanjutan eksistensi kehidupan petani. Perubahan struktur legitimasi kebijakan agraria memang terasa ada perubahan, tetapi sangat gradual dan belum dapat berlaku umum dan terlembagakan. Perubahan kebijakan agraria yang sangat gradual itu tidak tampak secara signifikan dipengaruhi secara langsung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh petani dan segenap elemen pendukungnya.

Uraian tentang pergeseran arah perkembangan gerakan petani atau gerakan agraria di Lampung pada bab ini dikembangkan terutama

dari hasil karya Hartoyo (2010). Fenomena terakhir menunjukkan bahwa perjuangan petani melalui wadah organisasi tani ada yang gagal, seperti terkait dengan Proyek Pembangunan Kota Baru Lampung (Hartoyo, 2013). Tetapi, ada juga yang masih dalam proses perjuangan, seperti dalam penguasaan lahan pertanian di wilayah Register 45. Bahkan situasinya saat ini dihadapkan pada permasalahan yang semakin “rumit”, berkembang terjadi konflik antar elemen aktor pendukung dari luar dan rentan terjadi konflik horizontal.⁶⁹

7.2. Makna Konsep Involusi Dalam Analisis Perkembangan Gerakan Petani

Konsepsi involusi dalam perubahan sosial berada pada dimensi struktural, yakni menunjuk pada suatu kondisi struktur yang stagnan (tetap, tidak berubah), sehingga eksistensi dan perkembangannya tidak mampu memproduksi sistem gerakan sebagai wadah institusional perubahan sosial. Clifford Geertz memakai konsepsi “involusi” sebagai alat analitik terhadap usaha tani sawah di Jawa. Konsepsi tersebut diperoleh dari Alexander Goldenweiser, seorang antropolog Amerika, yang digunakan untuk melukiskan pola kebudayaan yang ketika sudah mencapai bentuknya yang pasti kemudian dia tidak berhasil menstabilkannya atau mengubahnya menjadi suatu pola yang baru, tetapi terus berkembang ke dalam sehingga menjadi semakin rumit, seperti tampak pada seni dekoratif Maori dan dalam Gothik akhir Geertz (1983: 85-86).⁷⁰

Makna konsep “involusi” dari Alexander Goldenweiser yang menjadi alat analisis Clifford Geertz, oleh Sajogyo (Geertz, 1983: xxiii) digambarkan lebih jelas dalam suatu kiasan sebagai berikut:

“Kemandegan atau kemacetan pola pertanian yang ditunjukkan oleh tidak adanya kemajuan yang hakiki. Jika pun ada gerak, misalnya orang berjalan, berlari, atau menunjukkan gerakan lain di dalam lingkungan air, tidak ada gerakan yang menghasilkan kemajuan: orang tetap berada di tempat sama, misalnya di perairan, berenang di tempat menjaga diri tidak tenggelam tanpa mencapai tujuan lain”.

Pada sisi lain Nomani and Behdad menggunakan konsepsi “involusi struktural” untuk melihat terjadinya erosi serius dalam hubungan produksi kapitalis di Iran yang berjalan seiring dengan munculnya

⁶⁹ Informasi terakhir diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa aktivis pendukung perjuangan petani dalam penguasaan tanah pertanian di wilayah Register 45.

⁷⁰ Geertz mendefinisikan konsep “*Involution*” menunjuk pada “*overdriving of an established form in such a way that it becomes rigid through an inward overelaboration of detail*” (Geertz, 1963: 82).

produksi komoditas kecil (*petty-comodity production*). Hasil kajian Nomani and Behdad (2006) terhadap perkembangan kekuatan produksi di Iran menyimpulkan bahwa telah terjadi erosi serius dalam hubungan produksi kapitalis berjalan seiring dengan munculnya produksi komoditas kecil (*petty-comodity production*). Proses ini disebut degeneratif “invokasi struktural”, karena terjadi kekusutan dalam kemunculan struktur ekonomi, terganggunya proses akumulasi, dan terjadi krisis ekonomi yang semakin intensif. *Pertama*, proses “*involutioner*” terjadi ketika jumlah borjuis kecil dan para fungsionaris politik meningkat, sedangkan jumlah kelas pekerja menurun. *Kedua*, proses “*deinvolutioner*” terjadi ketika jumlah borjuis kecil dan fungsionaris politik menurun, sedangkan jumlah kelas pekerja meningkat.

Mengacu pada pandangan Goldenweiser, Geertz, Sajogyo dan Nomani and Behdad tersebut, maka konsepsi “invokasi gerakan petani” dapat dimaknai menunjuk pada suatu kondisi gerakan petani yang stagnan (tetap, tidak berubah) atau lemahnya peran organisasi gerakan petani dalam melakukan perubahan struktur sosial agraria yang simbiosis sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan petani sejalan dengan perkembangan upaya-upaya yang telah dilakukan. Memang selama proses perjuangan petani terjadi inovasi-inovasi strategi dan taktik gerakan, berupaya memperkuat jaringan, akan tetapi kehadiran dan perannya tetap saja tidak mampu menghasilkan perubahan substantif nasib petani sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan.

Konsepsi invokasi gerakan petani (agraria) juga dapat dilihat dari perkembangan organisasinya. Mengacu pada pandangan Kriesi (McAdam, McCarthy and Zald, 1996: 156), bahwa organisasi gerakan petani dapat bertahan dalam ranah radikalisme, tetapi juga dapat berubah menjadi organisasi formal lainnya ketika karakteristik dan aktifitasnya berubah, sehingga gerakannya bisa masuk pada jalur invokasi, institusionalisasi atau komersialisasi.

Pertama, radikalisme merupakan jalur organisasi gerakan petani yang memperkuat struktur mobilitasi sumberdaya. *Kedua*, invokasi menekankan secara eksklusif pada aspek “insentif sosial”. Organisasi gerakan petani dapat berubah menjadi asosiasi ketika aktifitasnya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggotanya. Organisasi gerakan petani tersebut mendukung mobilisasi konstituen tetapi hanya sebatas melayani kebutuhan mereka atau menggunakan strategi berorientasi klien. *Ketiga*, institusionalisasi menunjuk pada keseluruhan transformasi yang memungkinkan organisasi gerakan petani berubah menjadi partai politik atau menjadi kelompok

kepentingan. Eksistensinya masuk dalam sistem intermediasi kepentingan lembaga yang sudah mapan. Keempat, komersialisasi adalah proses transformasi yang mengarah sebagai organisasi layanan komersial, yakni layanan yang dibayar oleh para anggotanya.

Pada sisi lain, intensitas mobilisasi komitmen menjadi penting karena organisasi gerakan petani menghasilkan berbagai alternatif strukturasi internal dalam menjaga stabilitasnya dalam jangka panjang. Tetapi, sebagai gerakan instrumental maka pelembagaan arus sumberdaya gerakan secara khusus menjadi problematik bagi gerakan petani yang memiliki isu spesifik tinggi dan terfokus pada isu-isu internasional yang siklusnya cukup pendek. Suatu gerakan yang semakin terfokus pada isu tunggal maka secara eksternal semakin tergantung pada siklus perhatian terhadap isu tersebut.

Gerakan petani sebagai gerakan instrumental sangat mungkin terlembagakan menjadi gerakan subkultural yang berpeluang masuk pada jalur involusi atau komersialisasi, sedangkan gerakan petani yang konterkultural secara khusus bersifat radikal. Faktor eksternal juga berpengaruh terhadap perkembangan gerakan petani seperti faktor ekonomi, kultural dan politik. Faktor politik seperti struktur peluang politik secara umum sangat berpengaruh terhadap perkembangan organisasi gerakan petani. Dengan tidak mengabaikan faktor ekonomi dan prakondisi kultural, maka tidak dapat diabaikan bahwa bergesernya gerakan petani dari jalur radikalisisasi ke jalur involusi, dipengaruhi oleh struktur relasi kekuasaan dalam sistem sosial agraria dominan yang semakin mapan.

Dalam perspektif teori konflik klasik dinyatakan bahwa sistem sosial selalu melekat unsur dominasi dan hegemoni, dan selalu berada pada arus kepentingan kelompok atas dengan memperkuat unsur kontradiksi dan negasi terhadap kelompok bawah (Friedman, 1961; Carver, 1982). Akan tetapi, secara umum teori konflik mendasarkan pada tiga asumsi utamanya, yakni berkenaan dengan: (1) kepentingan dasar yang selalu harus diperjuangan untuk dipenuhi, (2) relasi kekuasaan sebagai inti struktur sosial dan ini melahirkan perjuangan untuk mendapatkannya, (3) nilai dan gagasan sebagai senjata konflik (Fakih, 2004: 43). Akan tetapi, gerakan-gerakan petani kontemporer tidak hanya terkonsentrasi pada orientasi material, tidak terpolarisasi hanya dalam dua kelas, dan bisa keluar dari determinisme material. Perubahan sistem sosial agraria dalam masyarakat kontemporer lebih kompleks dan melibatkan keragaman dimensi kehidupan yang menyebar ke segala penjuru, tidak terkonsentrasi pada satu arah. Dalam perkembangannya seperti itu, maka gerakan-gerakan petani dalam melakukan perubahan struktur dan sistem sosial agraria yang

didasarkan pada asumsi determinisme yang bersifat reduksionis dan esensialis, perlu dikritisi derajat keberlakuannya. Sepakat dengan pendapat Fakhri (2004:47), bahwa kerangka asumsi dasar yang kemudian dianggap lebih sesuai dalam menganalisis perubahan struktur dan sistem sosial agraria adalah proses “*over determination*”, yakni yang non reduksionis dan anti esensialis.

Mengadopsi konsepsi Griffin (Berbstein, dkk., 2008), proses dialektika materialisme berada pada ranah inter-sektoral (kelas) bukan pada ranah intra-sektoral. Padahal di dalam sektor (kelas) itu sendiri juga terdapat peluang kontradiksi dan bernegasi yang melekat unsur dominasi dan hegemoni. Negasi struktural intra dan inter-sektoral bukan hanya dapat memperlemah kapabilitas elemen sistem tetapi juga dalam hubungan antar elemen sistem sosial agraria. Dinamika hubungan antar elemen sistem sosial agraria bersifat dinamis dan dialektis. Dialektika negatif terjadi karena diabaikan kemungkinan dikembangkan unsur bermediasi antar elemen sistem, yakni antara negara dan swasta dengan petani. Perubahan formal tidak berjalan seiring dengan perubahan substantif, sehingga kelompok bawah meskipun perjuangannya dapat merubah bentuk dan kualitas organisasi sistem, tetapi sebenarnya lebih merupakan bentuk adaptasi terhadap kepentingan kelompok atas. Involusi gerakan petani terjadi ketika petani yang direpresentasikan oleh organisasi tani sebagai elemen bawah tetap berada pada arus kuat kepentingan kelompok atas (negara dan swasta), sedangkan kondisi petani sebagai salah satu elemen sistem sosial agraria tetap pada posisi “*underdog*”, lemah, terpinggirkan dan “*menderita*”.

Gerakan transformasional terhadap struktur sosial agraria sebenarnya mengandung tuntutan-tuntutan mediasi yang harus dipenuhi yang menghasilkan imperatif-imperatif etis. Mengikuti pandangan Giddens (2005: 216), bahwa gerakan perubahan struktur sosial agraria tersebut masuk dalam kerangka politik emansipatoris dan politik kehidupan. Namun realisasi tujuan di dalamnya seringkali tergantung kepada intervensi agen-agen yang mendukung strata atas. Dari perspektif realisme utopis, bahwa gerakan transformasi struktur sosial agraria tersebut diakui menjadi basis perubahan menuju realitas yang lebih aman dan manusiawi. Tetapi, mungkin terjadi bahwa ketika unsur utopis tampak nyata, para aktor gerakan dapat menjadi samar dalam melihat kedalaman intervensi pihak lain (luar) yang sebenarnya juga ikut ambil bagian dalam menyeret ke arah yang mungkin dapat melemahkan posisi gerakan dan organisasi gerakan petani itu sendiri.

7.3. Strukturasi Internal: Persoalan Siklus Gerakan Petani

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa perjuangan petani di Lampung mulai dari era Orde Baru sampai saat ini telah berhasil mengembangkan struktur gerakan, mulai dari aksi protes klasik, gerakan konsensus, gerakan lokal-tradisional, sampai dengan gerakan sosiopolitik. Perjuangan petani terutama berbasis pada klaim-klaim material (tanah), kemudian dengan hadirnya elemen pendukung dari luar dalam gerakan sosiopolitik maka orientasi gerakan petani tidak lagi hanya terkokus pada dimensi material tetapi juga sampai pada tuntutan keadilan dan demokrasi agraria. Rendahnya kualitas sumberdaya petani dalam mengendalikan struktur gerakan petani di Lampung semakin membuka peluang bagi elemen aktor pendukungnya untuk menduduki posisi strategis dalam struktur gerakan skala wilayah provinsi.

Struktur sumberdaya petani dan segenap elemen aktor pendukungnya memiliki posisi yang sama pentingnya dalam dinamika gerakan petani meskipun keduanya memiliki sifat-sifat struktural yang berbeda. Dilihat dari sudut pandang diferensiasi-integrasi, perbedaan tersebut cenderung mengarah pada pola pembagian tugas masing-masing dalam satu kesatuan irama kerja gerakan sesuai dengan sifat-sifat strukturalnya. Elemen aktor pendukung gerakan cenderung berperan aktif dalam melakukan tekanan ke atas dan berhubungan dengan struktur otoritas, sedangkan elemen aktor petani cenderung berperan dalam menjaga dan mengembangkan jaringan hubungan ke bawah hingga sampai pada komunitas petani basis.

Tidak dapat dihindari bahwa untuk menjaga kekuatan struktur sumberdaya mobilisasi, maka kepemimpinan yang semakin dekat dengan jalur komunitas petani basis, selain semakin dikuasai oleh elemen aktor petani juga semakin terikat pada sistem otoritas tradisi setempat. Oleh karena itu, secara umum struktur sumberdaya mobilisasi dalam gerakan petani terjadi dua kutub pola organisasi dan kepemimpinan moderen (tingkat wilayah provinsi yang diwarnai oleh elemen aktor pendukung) dan tradisional (tingkat komunitas petani basis, yang diwarnai oleh elemen aktor petani).

Akan tetapi, isu gerakan petani masih tetap dominan berkuat pada persoalan klasik (material). Misalnya di wilayah kehutanan, basis isu faktualnya masih tidak beranjak dari persoalan pertarungan kuasa atas tanah pertanian antara komunitas petani melawan dominasi negara yang masih melekat ruh asas *domeinverklaring*. Jika gerakan petani tersebut dimasukkan sebagai gerakan reforma agraria dari bawah (*agrarian reform by leverage*) maka hingga saat ini masih tidak beranjak dari persoalan *asset reform*, belum sampai pada *access reform*.

Keberhasilan pendudukan lahan bisa diklaim sebagai prestasi gerakan. Akan tetapi, prestasi tersebut pada kenyataannya tidak berjalan seiring dengan keberhasilan dalam menjalankan *asset reform* sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani miskin. Padahal, peran strategis organisasi tani bukan hanya sebagai katalis gerakan, tetapi juga sebagai wadah penyelesaian persoalan agraria dan wadah pemberdayaan petani dalam dimensi politik, ekonomi dan kultural. Masih banyak kasus konflik pertanahan di Lampung yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan secara tuntas, bahkan berkembang persoalan baru dan rentan terhadap konflik horizontal.

Meskipun gerakan petani pada tahapan awal bisa dikatakan berhasil dalam melakukan reklamasi, tetapi secara umum banyak pihak yang menganggapnya gagal. Pembagian lahan hasil reklamasi diserahkan sepenuhnya kepada organisasi tani di bawah (Posko Induk dan Posko Basis), dan hasilnya justru malah kacau, ada yang dijual dan dimiliki oleh orang-orang yang tidak pernah ikut berjuang. Dalam perkembangannya banyak pihak luar yang ikut bermain di dalamnya.

Organisasi tani skala provinsi pada masa pra dan pada masa berlangsungnya aksi-aksi kolektif petani dikendalikan oleh elemen petani bersama dengan elemen aktor pendukungnya. Tetapi, pasca aksi-aksi kolektif petani di antara mereka terjadi rebutan sumberdaya mobilisasi, sehingga persoalannya yang semakin “blunder”, terjadi cek-cok dan kental dengan kepentingan ekonomi dan politik transaksional. Karena kepentingan elemen aktor pendukung tidak terpenuhi, banyak di antara mereka yang kemudian meninggalkan organisasi tani begitu saja. Jika ada beberapa organisasi tani basis yang masih didukung perjuangannya oleh elemen aktor dari luar, tetapi kebanyakan lebih menonjolkan dukungan yang bersifat pribadi.

Sekarang organisasi tani di Lampung sudah tidak memiliki kekuatan yang cukup sebagai organisasi gerakan. Roda organisasi banyak yang dipegang oleh petani sendiri, dan tidak didukung sepenuhnya oleh elemen aktor dari luar seperti yang terjadi pada awal-awal gerakan dulu. Dilihat dari karakteristik dasarnya sebagian besar petani di Lampung berpendidikan rendah, lebih suka bertahan, lebih membutuhkan tanah untuk bertani, tidak memiliki pengalaman berorganisasi, banyak “okol” tapi kurang “akal”, sehingga jika tidak digerakkan oleh elemen aktor dari luar melalui wadah organisasi tani, maka mereka tidak bisa bergerak.”

Dalam perkembangannya, kekuatan struktur organisasi gerakan petani semakin melemah. Legitimasi dan kredibilitasnya semakin menurun baik dihadapan konstituen petani basis maupun dihadapan

para pemegang otoritas. Isu-isu kritis sudah tidak diproduksi, dan bahkan terjadi komodifikasi sumberdaya. Kondisi ini menambah *distrust* petani basis terhadap peran organisasi gerakan petani sebagai wadah perjuangan petani. Keberadaan struktur organisasi gerakan dianggap tidak mampu lagi mengartikulasikan kepentingan petani dan dalam menggugat kebijakan agraria kepada para pemegang otoritas. Secara obyektif aksi-aksi kolektif petani terorganisir sudah menurun sangat drastis dan secara subyektif memang sudah dianggap tidak lagi menjadi pilihan strategi gerakan yang utama.

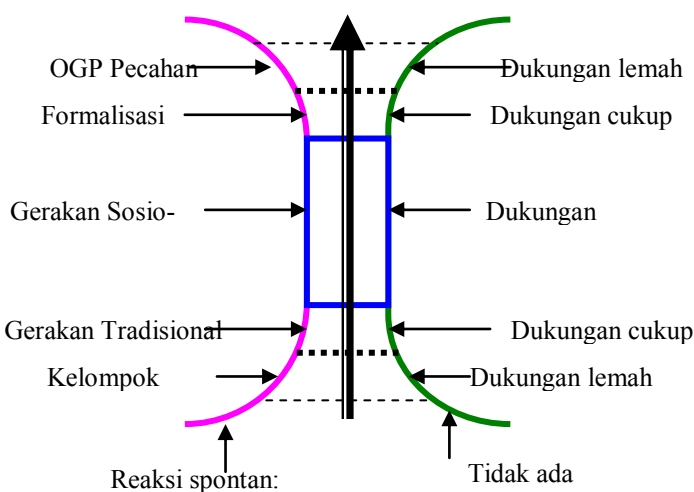
Aktivitas gerakan oleh kalangan konstituennya juga dianggap sudah jauh mengalami disorientasi akibat perilaku para elitnya untuk mencapai kepentingan sesaat. Pada sisi lain, pasca formalisasi gerakan petani maka keberadaannya selain semakin mengerucut terdiri dari unsur petani juga semakin tidak didukung sepenuhnya oleh elemen aktor non petani. Kondisi ini semakin memperkuat posisi gerakan secara organisasional semakin lekat dengan irama dan kultur kehidupan komunitas petani basis di pedesaan, semakin kehilangan karakternya sebagai organisasi gerakan, dan keberadaannya semakin menyempit terkonsentrasi di wilayah sekitar tempat tinggal pengurus inti. Misalnya IPL wilayahnya kerjanya menyempit hanya terkonsentrasi di desa Sinar Rejeki dan sekitarnya; Mirak Nadai terkonsentrasi di wilayah Padang Ratu; dan SPL/SPI sebagian besar basisnya sudah lepas dan kemudian mencari anggota baru yang bukan dari komunitas petani basis di wilayah konflik. Bukti ini menunjukkan bahwa struktur sumberdaya gerakan cenderung kembali terkonsentrasi di wilayah komunitas petani basis yang terikat dengan otoritas tradisi setempat. Posisi basis selain terlepas dari struktur induknya juga dukungan elemen aktor non petani semakin melemah dan menjauh.

Menurunnya derajat legitimasi dan kredibilitas organisasi gerakan petani juga terjadi dihadapan para pemegang otoritas. Kekuatan posisi tawar dalam struktur hubungan agraria menurun sejalan dengan perubahan momentum peluang politik. Ketika momentumnya mendukung (saat krisis politik pada awal reformasi) maka dukungan sebagian para pemegang otoritas terhadap keberadaan organisasi gerakan petani cukup kuat. Tetapi saat ini, para pejabat di daerah yang dulu mendukung sudah berganti, momentum peluang politik sudah terlewati, keanggotaan petani sudah dikeluarkan dari tim kerja yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga posisi tawarnya menurun pada posisi terendah. Aktivitasnya tidak lagi menunjukkan sebagai organisasi gerakan, tetapi sebagai organisasi tani yang berkarakter konservatif berjalan mengikuti arus sistem sosial agraria yang mapan.

Semakin mandulnya peran organisasi gerakan petani skala provinsi, maka kekuatan gerakan dan persoalan petani di Lampung kembali berada pada posisinya semula, yakni menyebar, terlokalisasi, dan terkonsentrasi pada lokus wilayah komunitas lokal (petani basis) masing-masing. Sebagian besar basis-basis petani yang dulunya menjadi anggota organisasi tani sekarang mereka berjuang sendiri-sendiri. Bahkan persoalan yang muncul di dalam juga dihadapi sendiri, dan banyak yang tidak selesai sampai sekarang. Para petani yang sudah dapat tanah asyik dengan urusannya sendiri, dan terjadi jual beli. Organisasi tani sudah tidak mampu lagi mengontrolnya.

Penjelasan di atas memperkuat kesimpulan bahwa dilihat dari rentang historis gerak perjuangan petani berangkat dari kesendirian dan saat ini kembali dalam kesendirian. Gambar 9 menunjukkan struktur perjuangan petani mulai masa Orde Baru hingga saat ini. Dilihat dari derajat integratif antara petani dengan segenap elemen aktor pendukungnya selama perkembangan perjuangan petani telah terjadi tiga tahapan perubahan struktur sumberdaya mobilisasi, yakni: tahapan pra-struktur (*unintegrated*), penguatan struktur (*integrated*), dan pecahnya struktur (*disintegrated*).

1. Tahap pra-struktur (*unintegrated*). Tahap ini terjadi pada awal gerak perjuangan petani dalam bentuknya yang paling sederhana. Seperti dalam aksi-aksi protes baik langsung berhadapan dengan pihak lawan maupun secara tidak langsung (terselubung atau tersembunyi) semuanya relatif masih murni dilakukan oleh petani korban dan belum mendapat dukungan dari elemen aktor non petani. Perilaku kolektif petani ini masih dalam lingkup lokal-kasuistik, tidak terorganisir (*amorph*), emosional, sporadis, spontan, dan sebagainya.
2. Tahap penguatan struktur (*integrated*). Awal penguatan struktur mobilisasi sumberdaya dengan dukungan elemen aktor non petani terjadi ketika petani korban secara kolektif mulai berjuang untuk mendapatkan haknya atas tanah melalui jalur institusional (gerakan konsensus). Elemen petani bekerjasama dengan elemen aktor non petani untuk mendapatkan advokasi hukum. Karena dengan menggunakan strategi ini tidak berhasil maka struktur perjuangan petani semakin diperkuat dengan melibatkan elemen aktor non petani yang lebih banyak untuk melakukan gerakan lokal-tradisional. Puncak penguatan struktur terjadi dalam gerakan sosiopolitik merespon terbukanya peluang politik seiring dengan jatuhnya rezim Orde Baru. Dalam gerakan ini dukungan elemen aktor non petani sangat kuat terdiri atas berbagai kalangan masyarakat sipil dan partai politik, tingkat lokal dan nasional.



Keterangan: OGP (Organisasi Gerakan Petani)

Gambar 9. Strukturasi Internal Gerakan Petani

Sumber: Hartoyo, 2010.

3. Tahap pecahnya struktur (*disintegrated*). Ini terjadi pasca aksi-aksi kolektif dan dalam proses penguatan organisasi gerakan petani. Pada masa ini terjadi perebutan kepentingan dan kekuasaan, terjadi konflik antar elemen struktur sumberdaya gerakan yang diikuti dengan fragmentasi organisasi. Akhirnya terjadi deformasi, yakni terjadi perubahan struktur gerakan baru yang tidak mengarah pada penguatan formasi gerakan tetapi justru terjadi konflik internal, pembelahan elemen struktur gerakan dan akhirnya mengarah para perpecahan dalam tubuh organisasi gerakan petani tingkat wilayah provinsi dan bercerai-berainya organisasi petani basis. Selain itu juga terjadi *decoupling*, yakni terjadi suatu pemisahan antara persoalan substantif petani dengan kepentingan para elit aktor gerakan. Antara elemen petani dan non petani terpisah atau tidak menyatu lagi dalam satu kesatuan struktur gerakan. Masing-masing bergerak menurut arahnya sendiri sesuai dengan sifat-sifat strukturalnya masing-masing. Elemen petani bergerak mengarah pada sifat-sifat struktural (dalam sosiokultural) tradisional, sedangkan elemen non petani bergerak mengarah pada sifat-sifat struktural (dalam sosiokultural) moderen. Fenomena tersebut berpengaruh terhadap keberlanjutan gerakan karena entitas strukturnya menjadi terpecah dan bergerak sendiri-sendiri. Pada kondisi ini orientasi

masing-masing elemen aktor semakin tidak dapat disatukan lagi dalam suatu struktur gerakan yang solid dan *integrated* seperti yang terjadi sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebab dan konsekuensi terjadinya destrukturisasi internal (*disintegrated*) gerakan dan organisasi gerakan petani, paling tidak dapat dijelaskan dari dua aspek. Pertama, karena tindakan para elit aktor yang cenderung saling mempertajam kontradiksi dan saling menegasikan. Kondisi ini jelas berkonsekuensi pada kecil kemungkinan dapat dikembangkan unsur mediasi. Kedua, akibatnya adalah terjadi degradasi struktur sumberdaya mobilisasi dalam gerakan petani. Organisasi tani semakin kehilangan karakternya sebagai organisasi gerakan yang *legitimate* dan *credible* dalam mengemban amanah mengentaskan nasib petani miskin.

7.4. Pola Hubungan Kekuasaan Dalam Struktur Gerakan Petani

Strukturisasi internal gerakan petani tidak terlepas dari konsistensi perspektif dan keyakinan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam struktur makna kekuasaan dalam dinamika organisasi gerakan petani. Gangguan struktur gerakan muncul ketika makna kekuasaan tidak lagi berhimpitan dengan makna pembelaan dan pemberdayaan petani. Ini terjadi di dalam kompleksitas hubungan konfliktual antar kelompok aktor gerakan, yakni antar aktor petani, antar aktor non petani, dan antara aktor petani dan non petani.

Praktik hubungan kekuasaan di antara pihak-pihak yang berperan aktif dalam penguatan struktur gerakan yang tadinya mengarah pada pola "*generative power*" kemudian berubah mengarah pada pola "*distributive power*". Perubahan ini menunjukkan bahwa dalam proses penguatan struktur gerakan di mana masing-masing pihak memandang pihak lain sebagai elemen penting dalam suatu bangunan atau struktur gerakan. Kemudian, struktur gerakan tersebut berubah di mana masing-masing pihak menganggap bahwa pihak lain sebagai lawan yang dapat menghambat pencapaian kepentingannya, dan oleh karena itu, mereka harus ditundukkan atau bahkan disingkirkan. Mendominasi struktur gerakan merupakan cara utama agar pihak lain yang dianggap sebagai lawan tersebut dapat mengikuti atau berjalan sesuai dengan kemauannya.

Kekuasaan dalam struktur hubungan tersebut di atas dimaknai sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak pada pihak lain. Karena itu, makna kekuasaan dalam perkembangan gerakan sejalan dengan konflik kepentingan, saling memaksakan garis perjuangan, dan terjadi benturan kepentingan. Kepentingan masing-masing pihak

dibalut dengan ideologi yang berbeda secara diametral. Masing-masing memiliki garis perjuangan yang berbeda, tetapi orientasi tindakannya adalah sama, yakni lebih berorientasi karikatif (*developmentalism*) daripada berjuang untuk melakukan perubahan struktur sosial agraria.

Perbedaan garis perjuangan yang semakin dipertajam dan semakin menutup ruang bermediasi, sehingga semakin sulit mencari titik temu guna memperkuat kembali struktur gerakan yang sudah terbelah. Ini berarti bahwa pola hubungan kekuasaan cenderung "zero-sum" atau saling bernegasi. Artinya, jika kelompok yang satu memiliki atau memperoleh tambahan kekuasaan berarti kelompok yang lain tidak memiliki atau kehilangan derajat kekuasaannya. Sehingga masing-masing pihak saling mencegah pihak lain dan tindakannya cenderung berjarak dari upaya bermediasi, karena akan mengurangi derajat kekuasaan yang dimiliki.

Sifat ambivalensi peran elemen aktor pendukung dalam gerakan petani selain memperkuat juga melemahkan ketika terjadi disorientasi tindakan. Pengaruh negatifnya adalah, pertama, keputusan organisasi gerakan syarat campur tangan luar, sehingga tidak independen; kedua, organisasi gerakan menjadi tidak bebas mengatur diri sendiri, sehingga tidak otonom dan semakin berjarak dengan basisnya; dan ketiga, terjadi benturan kepentingan yang mengganggu stabilitas organisasi tani sebagai organisasi gerakan. Kuatnya unsur-unsur bernegasi tersebut berakibat antar elemen struktur gerakan (antar petani, antar non petani, dan antara petani dan non petani) menjadi terpisah dan sulit disatukan kembali.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa beragamnya organisasi gerakan petani yang berkembang terutama bukan sebagai akibat dari keterbatasan jangkauan kontrol masing-masing tetapi lebih sebagai produk fragmentasi akibat konflik internal, yang pada tataran wilayah provinsi lebih diwarnai oleh tindakan-tindakan elemen aktor pendukung daripada oleh elemen aktor petani itu sendiri. Oleh karena itu, selain masing-masing organisasi tani mengalami penurunan derajat perannya sebagai organisasi gerakan, interaksi di antara mereka juga tidak dilandasi *common platform* dalam memperjuangkan kepentingan substantif petani.

7.5. Kuatnya Keberlakuan Sistem Sosial Agraria Dominan

Srukturasi eksternal menunjuk pada integrasi gerakan petani di dalam lingkungan organisasionalnya. Pada tataran meso dapat dilihat hubungannya dengan jaringan pendukung, dengan aliansinya, dan dengan para pemegang otoritas. Realitas menunjukkan bahwa semakin terkonsentrasinya struktur sumberdaya gerakan pada komunitas

petani basis ternyata sejalan dengan semakin renggang hubungannya dengan jaringan pendukung. Realitas ini difahami berbeda antara sisi petani dan non petani.⁷¹ Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan terjadi trauma jejaring antara elemen petani dan pendukungnya. Selain itu, dalam perjalanannya memang pernah terjadi tindakan para elit aktor pendukung yang menodai perjuangan petani untuk mencapai kepentingan sesaat, sedangkan kepentingan substantif petani menjadi terabaikan.

Semakin mudarnya jaringan (*networks*) pendukung sejalan dengan mudarnya hubungan aliansi dengan berbagai pihak, karena aksi-aksi kolektif petani non institusional sudah tidak dilakukan lagi. Momentumnya sudah terlewati dan biaya yang harus ditanggung untuk membangun kembali struktur gerakan seperti dulu terlalu besar, terlalu beresiko dan tidak sebanding dengan hasil-hasil yang akan dicapai terutama yang menguntungkan bagi elemen aktor pendukung. Sementara itu menurut para aktor pendukung, bahwa para petani sekarang ini sudah menjadi “borjuis kecil” (sudah mendapatkan tanah yang cukup) sehingga susah untuk diajak berjuang lagi. Ritme kehidupan petani kembali pada karakternya yang mengarah pada pola (pandangan, sikap dan perilaku) yang cenderung konservatif.

Demikian juga hubungan antara organisasi gerakan petani dengan para pemegang otoritas semakin melemah (kehilangan legitimasi dan kredibilitas) dan kembali berada pada posisi subordinat dalam struktur sosial agraria. Selain terkesan ada sikap “pembiaran” oleh pemerintah dalam penyelesaian persoalan pertanahan, aspirasi petani secara politik juga semakin tidak mampu lagi terartikulasikan melalui wadah organisasi tani. Bercerai-berainya elemen struktur gerakan juga berarti bahwa kekuatan perjuangan petani kembali terkonsentrasi pada struktur sumberdaya petani di tingkat basis.

Dilihat dari dimensi makro struktural juga menunjukkan bahwa strukturasi eksternal gerakan petani berhubungan dengan kekuatan sistem sosial agraria dominan. Ketegangan struktural di Lampung yang berbasis pada akumulasi dan persebaran persoalan pertanahan berakar pada sistem agraria antagonistik, dan kondisi ini sudah berlangsung lama sejak masa kolonial Belanda.⁷² Kondisi ini tetap

⁷¹ Menurut kalangan petani, mereka tidak mau lagi “diatur-atur” oleh pihak lain seperti yang dialami ketika masih gencar melakukan aksi-aksi kolektif. Sekarang posisi petani adalah sejajar dan sudah waktunya untuk mengatur diri sendiri, tidak tergantung pada siapapun dan dengan organisasi manapun. Sedangkan menurut kalangan non petani bahwa sikap petani seperti itu karena mereka merasa sudah menjadi “borjuis kecil” sehingga sulit disatukan lagi dalam struktur sumberdaya gerakan yang lebih besar.

⁷² Sistem agraria “antagonistik” adalah kebalikan dari “simbiosis mutualisme”. Dimaksud dengan sistem agraria simbiosis mutualisme menunjuk pada pola hubungan antar elemen sistem (negara,

terkonsentrasi pada dimensi politik-ekonomi dan eksis dalam setiap episode kekuasaan rezim.⁷³ Fakta historis membuktikan bahwa selama sistem sosial agraria terkonsentrasi pada dimensi politik-ekonomi dan mengabaikan dimensi sosio-kultural, maka institusi ekonomi moderen (swasta) akan tetap berkolaborasi kuat dengan institusi politik (negara). Realitas ini sekaligus menunjukkan bahwa dimensi sosio-kultural tradisional yang melekat pada petani akan terus-menerus terpinggirkan atau terus terperangkap masuk dalam putaran arus utama sistem sosial agraria dominan yang antagonistik terhadap eksistensi petani.

Gerakan petani pada awal jatuhnya rezim Orde Baru hanya berpengaruh sementara (sesaat) dalam menggoncang sistem sosial agraria dominan yang antagonis terhadap petani. Katakanlah iklim gerakan tersebut bersifat momental yang terjadi pada lima tahun pertama setelah era reformasi bergulir (1998-2002). Gerakan petani pada masa ini mampu mempengaruhi para pemegang otoritas untuk memenuhi sebagian klaim-klaim yang diperjuangkan. Pada lima tahun kemudian (2003-2007), hingga saat ini (2008-2014), di mana struktur politik negara semakin stabil, ternyata peluang politik gerakan di daerah terasa semakin tertutup sejalan dengan semakin melemahnya kekuatan sosiopolitik organisasi gerakan petani.

Peluang politik pasca jatuhnya rezim Orde Baru oleh para elit aktor cenderung dimaknai sebagai suatu ruang yang secara struktural menjanjikan penyelesaian persoalan agraria yang responsif terhadap kepentingan petani, tanpa harus diikuti dengan aksi-aksi kolektif. Ini sebenarnya merupakan kesadaran palsu yang tertanam di dalam schemata para aktor gerakan petani. Pada kenyataannya sistem sosial agraria dominan kembali pada jalannya sendiri dan tetap tidak responsif terhadap eksistensi dan kepentingan petani.

Melemahnya aksi-aksi kolektif dalam gerakan petani di Lampung selain berarti melemahnya kekuatan posisi tawar petani juga berarti terbuka kembali ruang gerak bagi pihak swasta bersinergi dengan negara. Sikap pemerintah yang dianggap mengambangkan persoalan pertanahan yang dialami petani jelas tampak antara lain karena sulitnya untuk merubah pola hubungan agraria dengan pihak swasta

perusahaan, dan masyarakat petani) dengan meminimalisir sifat-sifat struktural kontradiktif dan mengembangkan unsur bermediasi. Sedangkan dimaksud dengan sistem agraria antagonistik menunjuk pada pola hubungan antar elemen sistem agraria dengan mengembangkan sifat-sifat struktural kontradiktif dan mengembangkan unsur bernegasi.

⁷³ Pada episode: 1) rezim kolonial Belanda dapat dilihat dari hasil penelitian Kartodirdjo (1973; 1984); 2) rezim imperialisme Jepang dapat dilihat dari hasil penelitian Kurasawa (1993); dan 3) rezim orde lama dapat dilihat dari hasil penelitian Padmo (2000).

dan belum terselesaikannya persoalan pertanahan secara tuntas terkait dengan penguasaan petani atas tanah pertanian.

Dengan demikian, gerakan petani selama ini nampak lebih sebagai luapan ungkapan ketidakpuasan kolektif petani (dengan segenap elemen aktor pendukungnya) secara terorganisir terhadap keberlakuan sistem sosial agraria dominan yang sudah kokoh. Perkembangan gerakan agraria semakin tidak menunjukkan dirinya sebagai kekuatan penyeimbang dalam mengontrol konstruksi dan keberlakuan sistem sosial agraria dominan yang masih antagonis. Gerakan-gerakan agraria tetap saja tidak mampu menembus (merubah) sifat-sifat struktural sistem sosial agraria dominan menjadi lebih responsif terhadap persoalan substantif petani.⁷⁴

7.6. Disinstitusionalisasi Program Gerakan

Secara umum dapat dinyatakan bahwa gerakan petani yang menguat pada akhir dasawarsa tahun 1990 sampai dengan awal dasawarsa tahun 2000-an dianggap sebagai gelombang gerakan petani kedua setelah gelombang gerakan petani pertama tahun 1960-an. Keduanya sama-sama menuntut dilaksanakan pembaruan struktur sosial agraria. Tetapi, hasilnya juga sama-sama tidak mampu merubah struktur sosial agraria dominan yang responsif terhadap kepentingan petani. Gelombang gerakan petani pertama ternyata bias kepentingan para elit organisasi tani dan partai politik. Program *landreform* akhirnya kandas di tengah jalan, mengalami kemampatan karena pengeroposan dari dalam dan penyumbatan dari luar. Gerakan-gerakan petani dari bawah (*landreform by leverage*) akhirnya berhasil dilumpuhkan.⁷⁵ Tumbangnya rezim Orde Lama dan berkuasanya rezim Orde Baru, maka program *landreform* menjadi terabaikan dan tidak terlembagakan.

⁷⁴ Kesimpulan tersebut tidak mengabaikan telah terjadi perubahan-perubahan struktur hubungan agraria pada level normatif, seperti telah disahkannya Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang reforma agraria dan Keppres Nomor 34/2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian. Menurut kalangan aktivis, kedua kebijakan tersebut saling terkait dan berpengaruh terhadap kekuatan sistem agraria dominan. Justru keduanya ditengarai memiliki pengaruh negatif terhadap reforma agraria, yakni semakin berada pada kondisi ketidakpastian. *Pertama*, lahirnya Tap MPR tersebut pada satu sisi menutup peluang penerapan UUPA 1960 secara konsisten, dan pada sisi lain membuka peluang perubahan atas UUPA 1960. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Keppres Nomor 34/2003. *Kedua*, kelahiran Tap MPR No. IX/MPR/2001 telah membuka peluang yang semakin besar bagi rejim neoliberal untuk mengarahkan kebijakan agraria yang selaras dengan kepentingannya

⁷⁵ Gerakan agraria berhasil dilumpuhkan karena terjebak pada ideologi kelas yang dikembangkan oleh partai politik. Dari dalam petani menjadi instrumen mobilisasi aktif organisasi tani dan partai politik (Kuntowijoyo, 1997). Pelaksanaan program *landreform* juga gagal mengubah ketidakadilan agraria (Padmo, 2000). Di balik kacaunya demokrasi terpimpin (1960-1965) terjadi konflik antar elit yang upaya menggagalkan program *landreform*. Pada tataran interna-sional terjadi perebutan pengaruh antara negara-negara blok sosialis dan blok kapitalis terhadap Indonesia.

Pada tahun 1990-an isu-isu *landreform* dibangkitkan mulai kembali dalam kajian diskursus pembangunan. Pada masa ini isu *landreform* mengalami metamorfosis beririsan dengan paradigma neoliberal, terkait dengan kelompok dominan dalam lingkaran akademisi dan praktisi kebijakan (Berstein, dkk.,2008: 28). Berjalan seiring dengan kegagalan pembangunan Orde Baru, terjadi gelombang gerakan kedua. Gelombang gerakan kedua ini juga mengalami bias kepentingan para elit aktornya. Dalam beberapa hasil studi disimpulkan bahwa gerakan petani menjadi stagnan, yakni tidak mampu memelihara struktur gerakan yang solid (*integrated*), menjadi wadah aspirasi dan partisipasi petani, dan menjadi kekuatan penekan dalam melakukan pembaharuan struktur sosial agraria yang responsif terhadap kepentingan petani.⁷⁶

Dalam kasus di Lampung ditemukan bahwa meskipun aktivitas organisasi gerakan petani semakin masuk pada arus utama struktur sosial agraria dominan, tetapi program-program gerakan sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan belum terlembagakan sebagai bagian dari program utama pembangunan pertanian. Belum muncul kemauan pemerintah yang kuat dan dengan jelas mengarah pada komitmennya untuk menuntaskan persoalan agraria (pertanahan) yang selama ini bersinggungan dengan kepentingan komunitas petani lokal terhadap penguasaan tanah pertanian, apalagi memberdayakan.

Arah perkembangan aktivitas organisasi gerakan petani cenderung masuk pada ruang konservatif dan bersifat akomodasionis.⁷⁷ Posisinya cenderung memelihara jalinan hubungan dengan pimpinan organisasi petani basis, dengan para penyandang dana, dengan segenap organisasi pendukung, semuanya diperlukan untuk keberlangsungan hidup organisasi gerakan petani. Tetapi perannya sebagai pengimbang kekuatan negara dan swasta dalam struktur hubungan sosial agraria, sebagai kekuatan gerakan pemberdayaan petani, dan sebagai lembaga perantara antara petani dengan negara dan swasta maupun dengan segenap lembaga pendukung baik dalam konteks jejaring (*networks*) maupun koalisi, semakin menurun. Fenomena tersebut semakin kuat mengindikasikan

⁷⁶ Hasil kajian Ngadisah (2003.), tentang gerakan sosial rakyat Papua yang diarahkan pada PT Freport tidak membuahkan hasil yang berarti sehingga berkembang menjadi gerakan politik ingin memisahkan diri dari NKRI. Hasil kajian Silaen (2006), tentang perlawanan rakyat lokal pada kasus Indorayon di Toba Samosir juga belum menunjukkan hasil yang jelas: "*perlawanan itu, entah sampai kapan*". Hasil kajian Wahyudi (2005) dan Mustain (2007) terhadap gerakan petani di Malang, Jawa Timur juga masih dihantui oleh ketidakjelasan status tanah pertanian yang telah dikuasai kembali oleh petani.

⁷⁷ Contohnya seperti sikap IPL dalam penyelesaian kasus konflik pertanahan di Register 40 Gedung Wani, dan sikap organisasi tani Mirak Nadai dalam penyelesaian kasus konflik pertanahan di Padang Ratu.

bahwa mulai terjadi penguatan tekanan sosiokultural eksternal terhadap kemungkinan dapat dikuatkan kembali struktur gerakan, meskipun tampak dipermukaan bahwa arah aktivitas gerakan masih dapat dikontrol oleh para elit aktornya.

Bahkan ketika fungsi organisasional diarahkan sebagai suatu komoditas politik dan ekonomi yang menjadi tujuan praktis para elit aktor gerakan, maka sebenarnya telah terjadi “proses pembiasaan” antara kepentingan organisasi gerakan dengan kepentingan individu atau kelompok aktor. Arah perubahan orientasi gerakan ini berkaitan dengan perubahan perilaku organisasional (diarahkan oleh para elit aktornya) yang cenderung menjadi lebih moderat, bersifat karikatif bahkan pragmatis. Pada sisi lain, beberapa organisasi tani mengalami eksklusifisme ditandai dengan berubahnya konsentrasi tindakan elit aktor yang mengarah pada bentuk oligarkhi (konsentrasi kekuasaan di tangan para elit minoritas). Kondisi ini dengan sengaja dilanggengkan, sehingga berkonsekuensi tidak terjadi proses kaderisasi. Persoalan pertanahan di tingkat petani basis terkait dengan pembagian lahan hasil aksi reklamasi juga semakin rumit, yakni distribusinya masih belum beres, banyak dikuasai *free rider*, dan belum jelas statusnya.

7.7. Arah Perkembangan Organisasi Gerakan Petani

Peran utama elemen aktor non petani dalam gerakan petani di Lampung memperkuat suatu tesis bahwa secara historis sesuai dengan karakteristiknya yang khas perilaku petani lokal lebih konservatif (Eckstein, 1989: 13). Mereka cenderung adaptif terhadap kondisi lingkungannya dan tidak akan bergerak secara terorganisir meskipun peluang politik telah terbuka jika tidak ada yang menggerakannya. Mereka lebih kuat digerakkan oleh mitos yang menyediakan sebuah visi bersama, tetapi pada sisi lain belum mampu mengorganisir diri sendiri (Sztompka, 2004:349). Peran utama elemen aktor non petani tersebut juga akan tampak kemana gerakan dan organisasi gerakan petani akan diarahkan.

Perkembangan yang terjadi di Lampung menunjukkan bahwa terjadinya stagnasi gerakan yang direpresentasikan oleh peran organisasi tani, lebih banyak diwarnai oleh berbagai kesalahan konsekuensi dari tindakan beberapa kelompok aktor pendukungnya. Mereka saling berebut sumberdaya mobilisasi gerakan (termasuk komunitas petani basis) dengan berusaha melembagakan garis perjuangan masing-masing dan saling memanfaatkan sumberdaya gerakan tersebut untuk mencapai kepentingan praktisnya. Disorientasi tindakan tersebut menyebabkan stagnasi peran organisasi gerakan petani sebagai wadah perjuangan substantif petani. Oleh karena itu,

kekuatan struktur sumberdaya gerakan sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya momentum, seperti peluang krisis politik negara, luapan ketidakpuasan petani, dan semangat perjuangan yang membara. Momentum gerakan ini tidak berbasis pada *common plattform* perjuangan dan kesiapan sumberdaya manusia yang memadai. Isu gerakan yang semakin mengarah pada lawan yang abstrak (neo-kolonialisme, imperialisme dan neo-liberalisme) sangat sulit difahami oleh kalangan petani basis. Selain itu, membuat para aktor gerakan semakin samar melihat kedalaman intervensi pihak lain (yang dianggap lawan) yang sebenarnya juga ikut ambil bagian dalam menyeret ke arah yang mungkin dapat melemahkan posisi gerakan petani itu sendiri.

Secara historis kekuatan politik-ekonomi pada tataran makro struktural menentukan strukturasi gerakan petani, sampai pada kondisinya yang stagnan. Beberapa studi di Amerika Latin, Afrika, Asia Tenggara, termasuk Indonesia terkait dengan perubahan struktural agraria di aras lokal akibat desakan kepentingan supra lokal (Scott, 1979,1989, dan 2000; Wolf, 1967; Popkin, 1979; Bates, 1984; Ghimire, 2001 ; dan Landsberger dan Alexandrov,1984). Bahkan akibat pengaruh gerakan kapitalisme global (neo-liberalisme) yang terus berlangsung sampai saat ini (Widjajanto, dkk., 2007). Sehingga gerakan petani semakin dihadapkan pada kendala makro struktural yang mampu menghambat atau bahkan melemahkannya.

Ketidampungan organisasi tani dalam menghadapi kendala internal dan eksternal yang hadir, membuat eksistensinya mengalami krisis kredibilitas, krisis legitimasi, diskontinuitas, destrukurasi internal dan eksternal, dan deinstitutionalisasi. Organisasi gerakan petani tetap tidak memiliki corak genuin lagi sebagai katalis gerakan. Posisinya semakin dekat dengan iklim konservatif, semakin tertutup mengarah pada pendekatan berorientasi klien (terutama komunitas petani basis), kembali mengandalkan pendekatan institusional (konsensus), dan mengalami krisis produksi isu-isu kritis. Sementara itu program-program perjuangan masih belum terlembagakan meskipun sering melakukan bargaining politik dalam dinamika politik lokal. Kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa gerakan petani berada pada kondisi stagnan (tetap, tidak berubah) dan tidak mampu berperan dalam transformasi struktural agraria meskipun terjadi inovasi-inovasi cara-cara gerakan yang semakin berkualitas.

Secara keseluruhan terjadi perkembangan yang relatif tetap dalam gerakan petani yang direpresentasikan oleh peran organisasi tani. Pertama, semakin diformalkan organisasi tani justru perannya sebagai organisasi gerakan semakin menurun. Kedua, semakin

terdiferensiasi struktur internal justru semakin rentan terhadap konflik. Ketiga, akhirnya terjadi pemisahan dan fragmentasi organisasi tani dan semakin sulit disatukan kembali.

Kondisi yang sama terjadi dilihat dari aspek organisasionalnya, bahwa sebagian besar aspek organisasi gerakan petani cenderung berkembang negatif. Oleh karena itu, jika mengacu pada konsepsi Farhad Nomani and Sohrab Behdad (Nomani and Behdad, 2006), dapat dinyatakan bahwa gerakan petani di Lampung berada pada kondisi “involusi struktural”, atau jika mengacu pada konsepsi Geertz disebut dengan “involusi gerakan petani”. Involusi tersebut terjadi pada peran organisasi gerakan dalam melakukan transformasi struktural agraria. Involusi gerakan petani secara internal lebih disebabkan oleh disorientasi tindakan para elit aktor gerakan petani itu sendiri.

Organisasi gerakan petani yang semula terkonstruksi dengan kuat sebagai organisasi gerakan sosiopolitik, kemudian melemah. Sebagai konsekuensinya adalah terjadi penurunan peran organisasi tani sebagai organisasi gerakan konterkultural pada jalur radikalisasi. Saat ini, organisasi tani kuat mengarah sebagai organisasi sukarela yang berorientasi konstituen, dan sebagai organisasi gerakan subkultural. Karakteristiknya sebagai organisasi gerakan petani masih tampak, tetapi miskin reproduksi isu-isu kritis, dan strategi gerakan yang dilakukan berada pada gerakan konsensus yang semu atau “kuasi gerakan konsensus”.

Disebut sebagai kuasi gerakan konsensus karena posisinya saat ini berada di antara dua sisi atau memiliki dua kaki yang berfungsi berbeda. Pada satu sisi mereka terus berjuang untuk melakukan transformasi agraria, tetapi pada sisi lain mereka dihadapkan pada kondisi struktur sosial agraria antagois yang semakin menguat. Pilihan sebagai organisasi gerakan subkultural lebih memungkinkan mereka eksis, tetapi sebagai konsekuensinya tidak dapat leluasa bergerak atau semakin sempit peluangnya dalam melakukan gerakan *countercultural* (Hartoyo, 2013)

Perkembangan peran berbagai organisasi tani skala provinsi memang berbeda satu dengan yang lainnya. Secara khusus, disebabkan masing-masing organisasi tani memiliki karakteristik permasalahan dan dinamika yang berbeda-beda. Jika dilihat secara umum bahwa arah perkembangan organisasi saat ini semua telah bergeser masuk pada jalur involusi. IPL masih diperlukan dan berperan aktif dalam mempertahankan tanah pertanian yang berhasil dikuasai kembali oleh petani, tetapi arah perkembangannya organisasi tani berada pada jalur involusi (Hartoyo, dkk., 2010; Hartoyo, 2011b). Arah perkembangan peran SPL/SPI Lampung sebagai organisasi gerakan petani juga masuk

pada jalur involusi. Perannya tidak lagi mampu memproduksi isu-isu kritis gerakan, derajat otoniminya rendah ketika masih berbentuk feredasi (Serikat Petani Lampung/SPL). Sejak berubah menganut sistem unitarian tahun 2007, keberadaannya semakin tergantung pada organisasi tani nasional yang menjadi payungnya. Aktivitasnya sekedar memelihara konstituen di beberapa wilayah yang menjadi basis anggotanya. Selain itu, sistem kaderisasi tidak berjalan dengan baik, sehingga keberlangsungannya sangat tergantung pada komitmen para kader seniornya (Hartoyo, 2010).

Sebagaimana disajikan pada Tabel 9 tampak bahwa arah perkembangan gerakan petani di Lampung, yang direpresentasikan oleh peran organisasi gerakan petani, semakin cenderung kuat berada pada jalur involusi dibanding berada pada jalur radikalisasi, institusionalisasi, dan komersialisasi. Indikasinya bahwa aktivitasnya semakin terfokus pada orientasi konstituen dan masuk pada ruang konservatif mendukung sistem sosial agraria yang mapan.

Tabel 9. Arah Perkembangan Organisasi Gerakan Petani di Lampung

Aspek	Orientasi Klien/ Konstituen	Orientasi Otoritas
Partisipasi Konstituensi Langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Kuat mengarah sebagai organisasi sukarela yang berorientasi konstituen. • Sebagai organisasi gerakan subkultural 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemah sebagai gerakan sosiopolitik. • Lemah sebagai gerakan konterkultural yang berciri sebagai gerakan radikal
	Jalur involusi	Jalur Radikalisasi
Partisipasi Konstituensi Tidak Langsung	Belum mengarah menjadi organisasi layanan, sebagai organisasi subkultural	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai merespon peluang politik institusional dalam dinamika politik lokal dan nasional. • Sebagai kelompok kepentingan atau gerakan instrumental dalam rangka pelebagaan program-programnya
	Jalur Komersialisasi	Jalur Institusionalisasi

Sumber: Hartoyo, 2010. Diadaptasi dari McAdam, McCarthy and Zald (Editor's), 1996: 152-157.

Pada sisi lain, memang ada tanda-tanda organisasi tani diarahkan masuk pada jalur institusionalisasi, tetapi derajatnya rendah. Ada

upaya untuk memperkuatnya menjadi kelompok kepentingan dalam merespon dinamika politik lokal, terutama dalam merespon peluang politik institusional. Konsekuensinya adalah arah perkembangan perannya yang semula berada pada jalur radikalisme semakin melemah, dan aksi-aksi kolektif *countercultural* semakin menurun. Meskipun posisinya semakin kuat menjadi organisasi tani yang berorientasi konstituen, tetapi kekuatan sumberdaya mobilisasi di tingkat petani basis secara potensial masih ada, meskipun derajat kekuatannya bervariasi.

Kekuatan potensial itu dapat diaktifkan kembali menjadi sumberdaya mobilisasi aktual dalam aksi-aksi kolektif petani ketika muncul gangguan dari luar dalam derajat kekuatan tertentu, baik dalam menggugat kebijakan agraria maupun dalam melakukan aksi reklamasi. Penjelasan ini tentunya hanya terbatas pada konsentrasi analisis faktor internal, dengan tidak mempertimbangkan kekuatan faktor eksternal. Pada sisi lain, kekuatan variabel makro struktural yang memungkinkan dapat dimobilisir kekuatan sumberdaya petani basis juga penting dipertimbangkan. Perbandingan antara kekuatan internal dan eksternal, seperti terbukanya struktur peluang politik, perlu diperhatikan karena dapat menjadi dasar pertimbangan bagi kemungkinan muncul atau tidak munculnya aksi-aksi kolektif petani.

Contohnya, organisasi DTL dilihat secara *de facto* hingga saat ini kondisinya sudah mati suri. Sebagian petani basis dan aktor intinya sudah lama memisahkan diri, mengalami perpecahan dan mendirikan organisasi tani yang baru, yaitu IPL. Meskipun, sebagian aktivis gerakan menganggap bahwa keberadaan DTL sudah mati, tetapi sebagian yang lain menganggap bahwa DTL masih bisa dibangkitkan kembali karena persoalan pertanahan di beberapa wilayah petani basis masih belum dapat diselesaikan secara tuntas. Selain itu, sebagian petani basis juga mengharap agar DTL dapat diaktifkan kembali.

Keberadaan DTL secara organisatoris juga masih tetap eksis, tetapi kekuatannya sebagai organisasi gerakan petani konterkultural sudah sangat menurun. Memang sebagian aktivis gerakan tidak mengakui keberadaannya sebagai organisasi tani, tetapi organisasi ini mengkalim memiliki konstituen petani di beberapa wilayah basis. Ada wilayah basis yang masih dipelihara sendiri dan ada yang tumpang tindih dengan klaim wilayah basis oleh organisasi petani yang lain. Secara umum, saat ini aktivitasnya sudah menurun dalam melakukan tekanan-tekanan politik kepada para pemegang otoritas dan dalam memelihara kekuatan petani basis. Sama dengan organisasi petani lainnya, bahwa sebagian sumberdaya petani basis dapat dimobilisir

untuk mencapai kepentingan para elit aktornya dalam merespon kepentingan politik dan ekonomi dalam dinamika politik lokal.

Semakin menurunnya kekuatan organisasi tani sebagai organisasi gerakan konterkultural, juga dialami oleh organisasi tani lainnya, seperti Mirak Nadai (sebagai organisasi tani pecahan dari SPL), dan Pramukti (sebagai organisasi pecahan dari IPL), dan GPL. Termasuk di dalamnya kekuatan organisasi tani di wilayah Register 45 yang didukung oleh AGRA dan Yabima, yang mulai goyang. Soliditas dan komitmen perjuangan para elit aktornya mulai terganggu, konflik internal mulai mencuat, sehingga situasi ini berpotensi mengganggu kelangsungan perjuangan petani basis dalam mencapai kepentingan substantifnya.

Carut marutnya keberadaan organisasi-organisasi tani sebagai organisasi gerakan petani dengan segenap dinamikanya di atas sudah berlangsung cukup lama, dan nampaknya sulit untuk dapat dibangun dan persatukan kembali dalam suatu wadah organisasi tani yang kuat skala provinsi. Sistem kaderisasi ada yang jalan seadanya dan bahkan ada yang tidak jalan sama sekali. Semua sangat tergantung pada elit aktornya yang sebagian besar sudah sangat senior. Pada kondisinya yang demikian, maka keberadaan organisasi tani di Lampung sangat rentang mengalami disorientasi tindakan yang dilakukan oleh para elit aktornya. Berbagai manufer politik transaksional yang dilakukan sebenarnya berpotensi mengandung berbagai kesalahan tindakan. Tindakan-tindakan ini rentan terhadap berbagai konsekuensi negatif yang dapat semakin memperburuk keberadaan, keberlanjutan dan arah perkembangan organisasi sebagai organisasi gerakan petani.

Rekonstruksi Arah Baru Gerakan Petani: Sebuah Usulan Hasil Refleksi

8.1. Pendahuluan

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa tidak berubahnya kondisi petani dari masa ke masa, karena mereka hidup di dalam alam atau lingkungan (sistem sosial agraria) yang berbeda secara diametral dari yang dipikirkan dan yang diharapkan. Jika disimak secara historis di dalam setiap episode kekuasaan rezim di Indonesia, secara umum dalam dimensi struktural bahwa posisi petani selalu berada pada pusaran arus sistem sosial agraria dominan yang antagonis. Sejalan dengan pandangan Bhozman (1996), bahwa kondisi petani dalam sistem sosial agraria yang demikian ini secara sosial sebagai elemen sistem yang termarginalkan, secara politik tidak memiliki hak suara, dan secara kultural sebagai elemen yang terancam eksistensinya.

Sistem sosial agraria yang diharapkan petani hadir dalam tata kehidupan nyata adalah seperti yang sampaikan oleh para pemikir utopia klasik masa lalu melalui ungkapan bijaknya. Para pemikir utopia klasik masa lalu telah mengangankan suatu tata kehidupan masyarakat ideal melalui ungkapan simbolik. Misalnya, para pemikir utopia klasik di Jawa mengangankan terwujudnya tata kehidupan masyarakat ideal, melalui ungkapan bijak: *"Toto titi tentrem kerto raharjo"* dan *"Gemah ripah loh jinawe"*. Intinya, ungkapan ini mengangankan terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang serba indah, yaitu warganya merasa aman, tenteram, sejahtera dan serba kecukupan.

Dalam perspektif sosiologi, pada satu sisi, ungkapan tersebut dapat dilihat sebagai suatu instrumen fungsional dalam menjaga tata kehidupan masyarakat pada masa itu, sekaligus guna memperkuat dan melanggengkan posisi struktural para penguasanya. Pada sisi lain, ungkapan tersebut dapat dilihat sebagai kritik terhadap perilaku dzolim para penguasanya pada masa itu yang menciptakan kehidupan rakyat bawah (termasuk petani) sangat terkekang dan serba kekurangan. Terlepas dari dua sisi pandangan tersebut, bahwa ungkapan bijak para pemikir klasik masa lalu itu penting difahami untuk melihat kondisi kehidupan petani pada masa kini.

Realitas kehidupan petani yang tetap berada pada posisi lemah dalam setiap episode kekuasaan rezim, dalam struktur sosial agraria dominan berjalan seiring dengan kondisi gerakan petani saat ini yang berada pada jalur involusi. Gerakan petani bersifat stagnan, berjalan ditempat, tidak berubah dan tidak mampu mengubah struktur sosial agraria sebagai landasan bagi perbaikan kehidupan petani. Pertanyaannya adalah: Apakah dengan melihat kondisi gerakan petani saat ini yang involutif, berarti pada masa mendatang tidak ada celah bagi upaya stransformasi agraria, yaitu upaya melakukan perubahan mendasar tatanan agraria dan lebih baik? Seberapa jauh struktur sumberdaya gerakan dapat dimaksimalkan dalam mengendalikan sistem sosial agraria, atau paling tidak ikut mengarahkan sedemikian rupa, sehingga dapat memaksimalkan peluang yang dapat ditawarkan bagi peningkatan kesejahteraan petani? Dengan mengembangkan ide-ide yang dituangkan dalam karya ilmiah Hartoyo (2010) ditambah perkembangan data dan informasi yang diperoleh, serta berdasarkan hasil analisis yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka uraian pada bab ini difokuskan pada hasil refleksi, implikasi dan proyeksi dalam upaya transformasi struktur sosial agraria ke depan.

8.2. Kondisi Petani Dalam Sistem Sosial Agraria Dominan

Kekuatan sistem sosial agraria dominan di Indonesia tidak hanya dilihat pada tataran praksis dalam memenuhi kepentingan praktis elemen-elemen institusionalnya, tetapi juga perlu dilihat pada tataran struktural-ideologis dalam memenuhi kepentingan strategis mereka. Sifat-sifat strukturalnya dapat disimak dari arah perkembangannya yang cenderung tetap antagonis terhadap petani daripada bersifat simbiosis mutualisme. Kondisi ini termanifestasi dalam praktek pembangunan yang kontra produktif dan kurang berorientasi populis.

Pola hubungan agraria sehari-hari antara negara dan swasta dengan petani cenderung tetap diwarnai oleh unsur bernegasi daripada unsur bermediasi. Hubungan sosial agraria antara negara dan swasta cenderung tetap berada dalam pola hubungan simbiosis mutualisme, sedangkan hubungan antara keduanya cenderung dengan petani tetap antagonis. Dengan mengadopsi tiga elemen struktural menurut Giddens yang terdiri atas struktur signifikasi, struktur dominasi (otoritatif dan alokatif) dan struktur legitimasi, maka sifat-sifat struktural sistem agraria yang secara institusional menentukan keterpurukan nasib petani dapat dijelaskan.⁷⁸

⁷⁸ Menurut Giddens (2004: 39), struktur (*rules* dan *resources*) itu terdiri dari tiga kategori abstrak, yakni struktur signifikansi, dominasi dan legitimasi. Pada struktur signifikansi domain teoritisnya adalah teori pengkodean dan tatanan institusionalnya adalah tatanan simbolis/mode wacana. Pada

Pertama, struktur signifikasi agraria terdiri atas gugus pengetahuan ideologis dan praksis yang dapat meningkatkan kesadaran aktor strategis dan sejalan dengan ide-ide modernisme, pembangunanisme dan pertumbuhan ekonomi. Struktur signifikasi agraria ini dominan dikonstruksi dan direkonstruksi berbasis kolaborasi antara aktor negara dan swasta. Konsepsi ini berkiblat pada ideologi kapitalisme-liberalisme yang secara kultural sudah melekat kuat (menghegemoni) dalam struktur *shemata* aktor di semua elemen sistem sosial agraria. Termasuk struktur *schemata* aktor intelektual gerakan yang seharusnya posisi mereka berada pada lingkungan (ruang) masyarakat sipil (*civil society*), di mana petani berada di dalamnya. Sejalan dengan pandangan Fakih (2004) bahwa realitas ini tidak hanya berada pada tataran praksis tetapi sudah sampai pada tataran paradigmatik, yakni *deveopmentalism-modernism*.

Kedua, struktur dominasi sumberdaya otoritatif (politik) dan alokatif (ekonomi) terhadap obyek agraria yang masih sangat timpang. *Pertama*, eksistensi petani dalam struktur politik agraria selalu berada pada posisi ter subordinasi. Sifat atau karakter politik petani tetap lemah dan terlembagakan pada posisi subordinat (*underdog*) dalam struktur sumberdaya otoritatif. Pada ruang masyarakat sipil, petani menjadi terkotak-kotak dalam berbagai kelompok di mana masing-masing masuk pada arus kepentingan politik dan ekonomi. Pada situasi tertentu petani sering dimobilisir untuk mendukung pencapaian penting mereka. Kedua, alokasi sumberdaya ekonomi terhadap obyek agraria juga masih sangat timpang. Kondisi sumberdaya agraria (tanah pertanian) yang bergerak ke arah komersialisasi berdampak pada banyaknya tanah pertanian yang *absentee* dan banyaknya petani tunakisma. Kondisi ini memperlebar terjadinya kesenjangan ekonomi, ketimpangan aset, akses dan kontrol atas tanah pertanian bagi petani.

Ketiga, struktur legitimasi agraria yang timpang (deskriminatif). Ini menunjuk pada *schemata* normatif agraria yang pada tataran praktis terwujud dalam kebijakan-kebijakan agraria yang belum cukup responsif terhadap eksistensi petani. *Schemata* normatif demikian jelas melahirkan kebijakan agraria yang merugikan kepentingan substantif petani. Jika demikian maka pola penguasaan tanah oleh negara masih kuat ruh "*domeinverklaring*" (Sitorus, 2006: 24), sehingga meskipun UUPA/1960 oleh Mendagri pada tahun 1978 dinyatakan tetap berlaku, pada kenyataannya secara sistematis dikebiri atau dimandulkan

struktur dominasi ada dua: (1) yang domain teoritisnya adalah teori otoritas sumberdaya, tatanan institusionalnya adalah institusi politik; dan (2) yang domain teoritisnya adalah alokasi sumberdaya, tatanan institusionalnya adalah institusi ekonomi. Pada struktur legitimasi domain teoritisnya adalah regulasi normatif dan tatanan institusinya adalah institusi legal.

(Adiwibowo, Sanito dan Kolopaking. 2008: 100). Simbol-simbol legitimasi dalam kerangka kerja pembangunanisme dimitoskan untuk menjaga konsistensi sistem komunikasi, kekuasaan dan kebijakan agraria.

Dalam kondisi struktur sosial agraria yang demikian itu, jelas bahwa lingkungan sosiokultural tradisional semakin ditinggalkan oleh semakin berkembangnya dimensi ekonomi dan politik dalam sistem sosial agraria dominan. Jika mengikuti perspektif pesimistis, di mana hegemoni *developmentalism* dan *modernism* yang masih begitu kuat mengakar dan menghegemoni seluruh sistem sosial agraria dominan, maka rasanya tetap sulit ditembus hanya dengan gerakan lokal, daerah, bahkan nasional.

8.3. Kegagalan Organisasi Gerakan Dalam Memperjuangkan Kepentingan Substantif Petani

Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli dalam setiap episode kekuasaan rezim di Indonesia, pada dasarnya sepakat bahwa gerakan petani menjadi instrumen penting dalam perjuangan untuk merubah kebijakan agraria, atau lebih luas merubah struktur sosial agraria. Hal ini berarti bahwa gerakan petani selalu hadir ketika penguasa tidak peduli terhadap perbaikan nasib petani. Menyimak fenomena gerakan petani (atau yang mengatasnamakan petani) yang berlangsung pada masa pasca runtuhnya rezim Orde Baru hingga saat ini, tidak cukup lagi jika hanya difahami dengan cara pandang lama (perspektif teori klasik).

Struktur sumberdaya mobilisasi dalam gerakan petani saat ini kapasitasnya semakin lemah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain sebagai berikut:

1. Para aktor gerakan memiliki kapasitas interpretasi yang lebih luas tetapi pesimis dalam menghadapi perkembangan struktur sosial agraria dominan.
2. Semakin sulitnya membangun kekuatan sumberdaya mobilisasi.
3. Semakin sulitnya memahami dan merespon perkembangan situasi sosiopolitik agraria.
4. Semakin sulit memanfaatkan peluang politik untuk melakukan transformasi agraria.

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa dengan terbangunnya sub kultur oposisi petani, kuatnya struktur mobilisasi sumberdaya, terbukanya peluang politik, dan proses produktif pembingkai kolektif, maka aksi-aksi kolektif petani dengan mudah dapat dilakukan. Hasilnya terjadi perubahan kebijakan agraria dan tanah pertanian dapat dikuasai kembali oleh petani. Tetapi dalam perkembangan

berikutnya gerakan petani mengalami deformasi, *decoupling* dan stagnasi, sehingga saat ini arah gerakannya berada pada jalur involusi.

Belajar dari pengalaman di Lampung, ternyata dalam dinamika gerakan petani selain mengalami tekanan-tekanan eksternal yang kuat, pada sisi internal juga mengalami *discontrol*. Artinya, banyak tindakan para aktor gerakan yang tidak dikehendaki konsekuensi yang ditimbulkannya dan tidak dapat dikendalikan akibat-akibat negatifnya (disorientasi). Gerakan yang demikian tidak mampu memelihara karakter, visi dan misinya terkait dengan tujuan transformasi agraria. Terjadi pergeseran arah dari gerakan populis menjadi gerakan elitis, sehingga tidak jelas arahnya hendak di bawa ke mana.

Pada kondisi perkembangan gerakan petani seperti ini, telah terjadi pembiasan, yaitu antara tindakan sadar yang terfokus pada peningkatan posisi tawar petani di dalam arus sistem sosial agraria dominan yang antagonis dan tindakan para aktor gerakan yang secara kultural terkooptasi oleh kerangka ideologis tertentu yang bersifat karikatif, bahkan pragmatis. Struktur gerakan yang tadinya solid (*integrated*) kemudian terbelah dan mengelompok berdasarkan latar belakang dan kepentingannya. Terjadinya disorientasi tindakan para elit aktor sebagai petanda bahwa antara tujuan praktis dan strategis gerakan mengalami diskontinum. Seharusnya keberhasilan mencapai tujuan praktis merupakan proses akumulatif tercapainya tujuan strategis gerakan. Realitasnya justru berlawanan, yaitu kegagalan mencapai tujuan praktis petani berjalan seiring dengan kegagalannya dalam mengentaskan nasib petani dari kubangan arus sistem sosial agraria yang antagonis. Pada konteks pencapaian tujuan strategis gerakan berarti bahwa gerakan petani telah gagal dalam melakukan transformasi agraria.

Menurut Hartoyo (2010) dapat dinyatakan bahwa alasan-alasan mendasar kegagalan gerakan petani di Lampung dalam melakukan transformasi agraria, sehingga berada pada jalur involusi, dapat dilihat dari beberapa indikator yang saling terkait.

1. Gerakan petani masih didasarkan pada momentum terbukanya peluang politik ekstrim, yaitu jatuhnya rezim Orde Baru. Ini berarti gerakan petani memanfaatkan terjadinya dekonstruksi struktur politik negara. Mekuatnya kembali struktur politik negara secara konsisten berhubungan dengan semakin lemahnya dukungan sosiopolitik, dan kondisi ini berjalan seiring dengan semakin melemahnya kekuatan sumberdaya gerakan.
2. Tidak terumuskannya *common platform* sebagai acuan gerakan nasional dan daerah. Sampai saat ini tidak terjadi kesatuan gerak

- langkah antar organisasi gerakan petani dalam membangun visi, misi, tujuan dan program-program perjuangan.
3. Kualitas sumberdaya gerakan yang kurang memadai. Struktur gerakan yang dibangun dalam menangkap momentum terbukanya peluang politik lebih didasarkan pada semangat perjuangan, sehingga aspek kualitas organisasi dan kepemimpinan menjadi terabaikan.
 4. Lawan-lawannya yang abstrak seperti melawan imperialisme, neokolonialisme dan neo-liberalisme, sulit difahami oleh mayoritas aktor gerakan dan belum dapat diartiklasikan pada level menengah ke bawah.
 5. Struktur gerakan tidak mampu menjaga dan mengatasi kendala-kendala yang bersumber dari lingkungan internal dan tekanan-tekanan yang bersumber dari lingkungan eksternal, sehingga posisinya semakin terjebak masuk pada arus kemapanan atau terjebak pada upaya memapankan hegemoni yang melanggengkan sistem sosial agraria antagonis.

8.4. Solusi Alternatif Penguatan Gerakan Petani

Upaya untuk membangun kekuatan gerakan petani pada masa mendatang dapat dilakukan dengan meningkatkan derajat mediasi. Pertanyaan ini mengikuti pandangan kelompok optimis yang berpihak pada kemungkinan dapat dilakukan transformasi agraria. Pandangan optimis didasarkan pada asumsi bahwa betapapun kuatnya sistem sosial agraria dominan yang antagonis terhadap petani, di dalamnya masih terdapat celah-celah keterbukaan dalam mengembangkan unsur-unsur simbiosis mutualisme.

Karena sistem sosial agraria dapat berfungsi sebagai instrumen institusional, maka apapun bentuknya dan siapapun aktornya secara sadar terarah pada suatu tujuan tertentu. Tetapi, tindakan para aktor dalam memelihara sistem sosial agraria dominan tidak sepenuhnya dapat dikontrol, dan karena itu, kesalahan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan tidak sepenuhnya dapat diprediksi dan tidak pernah membentuk lingkungan agraria yang stabil.

Eksistensi sistem sosial agraria berada dalam beragam pengaruh yang sama-sama penting, tidak bersifat reduksionis dan juga tidak deterministik. Oleh karena itu, suatu rezim yang sedang berkuasa tidak sepenuhnya dapat menguasai “sejarah” dan mengarahkan sistem sosial agraria secara konsisten sesuai dengan kepentingan atau tujuannya. Meskipun setiap rezim mereproduksi sistem sosial agraria, tetapi tetap saja mereka tidak dapat mengendalikan sepenuhnya konsekuensi-konsekuensi tindakan yang dilakukan.

Transformasi agraria jika diletakkan dalam posisi “mungkin berhasil”, berarti sedang membayangkan sistem sosial agraria yang simbiosis. Sistem sosial agraria yang demikian itu bersifat “*realisme utopis*”, karena transformasi agraria yang diharapkan mengandung makna teleologis yang mungkin terjadi. Realitas historis sistem sosial agraria yang tidak dikehendaki tidak difahami sepenuhnya bermakna teleologis dengan mengabaikan kemungkinan terjadi realitas lain yang dikehendaki. Ini didasarkan pada argumen bahwa para aktor pengendali utama sistem sosial agraria tidak sepenuhnya mampu mewujudkan nilai-nilai yang diharapkan. Disinilah ruang gerakan transformasi agraria itu selalu terbuka.

Sejalan dengan pandangan Gidens (2005) bahwa gerakan petani mendatang, di dalamnya mengandung keterkaitan timbal balik antara dua konsep, yakni “perjuangan” penguasaan atas sumber-sumber agraria dan “aktualisasi diri” petani dalam posisinya sebagai salah satu elemen utama sistem sosial agraria. Konsep pertama sejalan dengan konsep “*war of manuver*”, sedangkan konsep kedua sejalan dengan “*war of position*” yang dikemukakan oleh Gramsci (Fakih, 2004).

Dalam konteks perjuangan politik, maka konsep yang pertama disebut “politik emansipatoris” dan konsep yang kedua disebut “politik kehidupan”. Tujuan mendasar dari perjuangan adalah “pembebasan dari” ketidaksetaraan dan ketidakadilan, sedangkan tujuan aktualisasi diri mengarah pada berbagai upaya untuk memperbesar kemungkinan pemenuhan dan pemuasan kebutuhan hidup petani berbasis sumberdaya agraria. Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa diperolehnya kesetaraan, keadilan, kedaulatan, keberlanjutan hidup dan kebebasan aktualisasi diri petani dalam batas-batas tertentu juga sebagai akibat dari gerakan perubahan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Seperti gerakan petani yang marak terjadi di Indonesia pada awal reformasi tidak terlepas dari gerakan pro demokrasi yang mampu menjatuhkan rezim Orde Baru yang otoriter.

Peluang akses di era demokratisasi sudah terbuka dan aktor strategis gerakan dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan partisipasi petani, termasuk partisipasi kognitif, yakni partisipasi dalam mengambil berbagai keputusan khusus dan dalam merumuskan definisi situasi yang menjadi dasar dalam mengambil berbagai keputusan sosiopolitik dan sosiokultural di bidang agraria. Tetapi, empati pada persoalan agraria yang menyatu dengan konsep perjuangan mengentaskan nasib petani sering tergantung pada kekuatan intervensi pihak lain (termasuk pihak lawan).

Disini unsur utopis gerakan agraria semakin tampak di wujudkan melalui lawan yang abstrak (sejalan dengan semakin hilangnya sosok

lawan nyata) sebagai pengganti untuk menjaga kekuatan lingkungan internal. Hal ini berpotensi terbawa arus kepentingan pihak lain yang justru gencar ditentang seperti developmentalisme, neoliberalisme dan imperialisme. Para aktor gerakan dituntut mampu mengontrol dengan cermat seberapa jauh kekuasaan pihak lawan yang ikut ambil bagian dapat menyeret ke arah kecenderungan yang mungkin akan mampu melemahkan posisi gerakan petani itu sendiri.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa transformasi agraria yang berkonsekuensi pada perubahan organisasi sistem tidak harus berarti perubahan secara radikal dan revolusioner, tetapi bisa dalam bentuk reformatif. Satu-satunya pendekatan yang paling mungkin digunakan adalah dengan meningkatkan derajat bermediasi antar elemen sistem. Ini sekaligus berarti upaya bagaimana agar negara dan swasta dapat mengurangi derajat kontradiksi dan bernegasi dengan petani dalam melakukan reproduksi sistem sosial agraria sesuai dengan kehendak bersama. Transformasi agraria pada dasarnya merupakan perjuangan merubah sistem sosial agraria antagonis menjadi simbiosis-mutualisme yang responsif terhadap kepentingan petani.

Pendekatan mediasi dalam reproduksi sistem sosial agraria mencakup perubahan aturan dan sumberdaya. Ada empat ranah kelembagaan utama yang menjadi sasaran perubahan, yakni gugus pengetahuan, politik, ekonomi dan kebijakan agraria. Semua itu mengarah pada jawaban strategis tentang bagaimana perubahan struktural dapat diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Pertama, perjuangan bukan hanya ditujukan pada negara (politik) dan swasta (ekonomi) tetapi juga pada masyarakat petani (lebih luas - masyarakat sipil). Kedua, gerakan agraria bukan hanya dalam dimensi sosio-politik (jangka pendek) tetapi juga sosio-kultural (jangka panjang). Ketiga, sasaran secara individual adalah perubahan schemata melalui perubahan gugus pengetahuan dalam derajat kesadaran diskursif yang dapat diwujudkan dalam praktik sehari-hari.

Kasus gerakan petani di Lampung memberikan inspirasi perlu pemikiran ulang atas anggapan hanya terdiri atas kalangan petani dalam kasus gerakan reforma agraria dari bawah. Kasus ini merupakan tindakan kolaboratif petani dan non petani, dan pola ini memberikan keunikan tersendiri dalam gerakan petani di Indonesia pada era demokratisasi. Sesuai dengan peran gerakan petani dalam melakukan transformasi agraria, paling tidak dapat diajukan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan kontra-hegemoni, pendekatan oposisi, proposisi dan reposisi. Semuanya diperlukan soliditas dan komitmen tinggi, yakni derajat konsolidasi yang *integrated* dari tingkat nasional hingga tingkat lokal. Konsepsi reforma agraria yang didefinisikan oleh

negara sebenarnya masih terbatas pada bagian dari perubahan sistem sosial agraria, yakni terkonsentrasi pada ranah perubahan dominasi sumberdaya alokatif (ekonomi),⁷⁹ meskipun dalam jangka menengah program *landreform* semakin penting dilakukan untuk mengurangi masalah ekonomi (kemiskinan) dan dalam merevitalisasi nilai-nilai sosiokultural pedesaan yang tergerus.

Pertama, gerakan petani pada ranah gugus pengetahuan digunakan pendekatan kontra hegemoni, yakni perjuangan untuk menciptakan ruang bagi terjadinya diskursus, mendekonstruksi dan sekaligus merekonstruksi sistem sosial agraria ke arah yang responsif terhadap kepentingan petani (berbasis komunitas). Hasilnya adalah meningkatnya kesadaran diskursif para aktor (semua elemen sistem) dan berkemampuan dalam melakukan refleksi kritis terhadap kesetaraan dan keadilan agraria.⁸⁰

Kedua, gerakan pada ranah dominasi sumberdaya agraria digunakan pendekatan oposisi dan reposisi. Pendekatan oposisi menunjuk penguatan peran organisasi gerakan yang secara konsisten melakukan tekanan, kontrol terhadap kekuasaan, dan aksi-aksi kolektif. Sedangkan pendekatan reposisi ditujukan kepada para aktor strategis gerakan, baik dalam membangun dukungan negara, dalam partisipasi politik institusional, maupun dalam ruang masyarakat sipil (khususnya pada ranah masyarakat petani).⁸¹ Gerakan pada ranah kekuasaan ditujukan untuk mengurangi ketimpangan struktur dominasi sumberdaya dengan merespon peluang memasuki posisi-posisi strategis dalam institusi politik dan ekonomi.

Ketiga, gerakan pada ranah struktur legitimasi ditujukan untuk merubah orientasi substantif kebijakan agraria yang responsif terhadap kepentingan petani, dan juga mengeliminir praktik-praktik diskriminasi, alienasi dan marginalisasi. Perjuangan pada ranah ini

⁷⁹ Jika BPN (2007: 40-50) merumuskan reforma agraria (RA) berarti *asset reform* (Ass.R atau *land reform*) ditambah *access reform* (Acc.R) atau (RA = Ass.R + Acc.R), maka reforma agraria di dalam lingkup sistem agraria lebih terkonsentrasi pada perubahan dominasi sumberdaya alokatif (ekonomi) daripada sumberdaya otoritatif (politik).

⁸⁰ Kesadaran diskursif berarti kesadaran atas tindakan yang dilakukan seseorang disertai dengan kemampuan memberikan penjelasan yang runtut dan juga kemampuan memberikan alasannya (Giddens, 1995, di Indonesiakan oleh Adi Loka Sujono, 2004; 55).

⁸¹ Sebagai peringatan kita juga bisa belajar dari pengalaman gerakan petani di negara-negara Amerika Latin. Di Venezuela di bawah Chavez dapat dibangun hubungan saling menguntungkan antara aktivis para petani dengan pemerintah berbasis kepemimpinan populis. Sebaliknya di Ekuador, ketika COCAINE menggunakan strategi elektoral berkoalisi dengan partai pendukung presiden Guffierez, yang terjadi seluruhnya negatif. Gerakan petani mengalami kemunduran dalam tuntutan, strategi, organisasi, dan dukungan basis. Strategi elektoral terbukti hanya memberi peluang pada borjuasi dalam mengkonsolidasikan kekuatannya untuk kemudian menghantam balik gerakan petani hingga hancur (Lihat Petras, 2005).

terkait dengan perubahan schemata kebijakan agraria dan kontrol terhadap praktik kekuasaan dalam ruang institusi hukum.

Keempat, khusus pada lingkup internal (petani) selain diperlukan konsolidasi juga penguatan posisi aktor intelektual sebagai organ utama gerakan. Dalam stratifikasi kesadaran di mana para aktor strategis berada pada posisi elit atau berada pada barisan pelopor politis intelektual yang memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi. Mereka ini perlu dikembalikan pada posisi sebenarnya menjadi bagian integral masyarakat sipil, khususnya berada dalam kesatuan lingkungan masyarakat petani. Organ petani dan organ non petani sama-sama diperkuat berada dalam satu kesatuan gerak langkah dalam keberlanjutan gerakan agraria.

Kelima, masyarakat petani merupakan salah satu elemen utama dalam sistem agraria selain negara dan swasta, maka penguatan akses dan partisipasi aktif petani di dalam pembuatan dan implementasi kebijakan agraria adalah sangat penting dan mendasar. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan posisi tawar petani secara institusional yang diwujudkan melalui penguatan organisasi tani.

Data pada Tabel 10 menjelaskan secara rinci strategi gerakan petani mendatang. Pada dasarnya, gerakan petani mendatang harus mampu keluar dari jalur involusi dan kembali diarahkan pada gerakan konterkultural, meskipun tidak dominan radikal sebagaimana yang pernah dilakukan pada masa awal-awal jatuhnya rezim Orde Baru.

Pertama, struktur signifikasi tetap sejalan dengan pendekatan kontra hegemoni. Pendekatan ini berfungsi untuk melakukan perubahan *mindset* (*schemata*) elemen negara dan swasta pada level paradigmatis pembangunan yang terintegrasi dengan perilaku pada level praksis. Antara ideologi, teori dan praksis menjadi satu kesatuan struktur schemata antar elemen sistem sosial agraria yang dapat diwujudkan dalam konstruksi struktur sosial agraria yang secara sistemik lebih responsif terhadap eksistensi kehidupan petani. Misalnya, bagaimana struktur schemata tentang pembangunan pertanian yang dikonstruksi antara lain ke dalam suatu konsep “ketahanan” pangan, bisa dirubah struktur maknanya ke dalam suatu struktur *schemata* yang dikonstruksi ke dalam konsep “kedaulatan” pangan. Upaya perubahan struktur schemata ini bukan terbatas pada tataran perjuangan politik emansipatoris tetapi harus sampai pada perjuangan politik kehidupan substantif petani. Dalam konteks gerakan petani, yang pertama dapat dilakukan melalui gerakan sosiopolitik sedangkan yang kedua dapat dilakukan melalui gerakan sosiokultural.

Kedua, untuk mengubah struktur dominasi politik dapat menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan oposisi, pendekatan pro-posisi dan pendekatan reposisi sesuai dengan dinamika politik pusat dan daerah. Bagaimana struktur dominasi politik dalam struktur sosial agraria tetap didominasi oleh negara, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan UUPA 1960. Pada sisi lain, kekuatan politik yang selama ini juga dipegang oleh elemen swasta yang bersinergi dengan negara, dapat dikurangi sehingga posisinya menjadi sejajar dengan elemen petani dalam relasi kekuasaan terhadap sumber-sumber agraria.

Ketiga, dalam mengubah struktur legitimasi dikonsentrasikan pada perubahan kebijakan agraria pada level pusat dan daerah yang responsif terhadap kepentingan dan eksistensi petani sebagai salah satu elemen utama sistem sosial agraria. Upaya ini bukan hanya terbatas pada level perumusan kebijakan tetapi juga pada level implementasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan agraria yang tumpang tindih menjadi sistem kebijakan yang secara struktural terintegrasi dan responsif terhadap kepentingan substantif dan keberlanjutan eksistensi kehidupan petani.

Keempat, dalam rangka penguatan struktur internal gerakan petani, perlu melakukan penguatan posisi para aktor intelektual sebagai organ utama gerakan. Realitas membuktikan bahwa kehadiran para aktor intelektual sebagai agen pendukung utama gerakan petani sangat dibutuhkan. Banyak organisasi tani skala lokal atau basis, skala wilayah kabupaten, skala provinsi, dan skala nasional yang berjejaring dengan organisasi gerakan transnasional, yang berhasil dilahirkan. Kemudian yang lebih penting diperhatikan adalah bagaimana organisasi tani itu dijaga keberlangsungannya dan dikembangkan secara konsisten menjadi organisasi gerakan petani.

Kelima, petani sebagai elemen sistem sosial agraria perlu ditingkatkan posisi tawarnya secara institusional yang diwujudkan melalui penguatan organisasi tani. Penguatan elemen petani dalam sistem sosial agraria ini adalah bertujuan bagaimana petani secara sosial tidak lagi termarginalkan, secara politik memiliki wakil dalam parlemen, dan secara kultural menjadi elemen sistem yang tidak lagi terancam keberadaannya. Sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil, semestinya di era demokratisasi saat ini sudah waktunya mendapat dukungan dari negara sebagai organisasi yang mendukung program pemerintah dalam memperjuangkan nasib petani diberi ruang untuk ikut berpartisipasi merekonstruksi struktur dan keberlakuan sistem sosial agraria yang antagonis menjadi simbiosis mutualisme.

Tabel 10. Strategi Gerakan Agraria Mendatang

Aspek Struktural	Pendekatan	Strategi
Struktur Signifikasi	Kontra hegemoni	Memperluas ruang bagi terjadinya diskursus, mendekonstruksi dan merekonstruksi sistem agraria yang responsif terhadap kepentingan petani
Struktur Dominasi Politik	Oposisi	Penguatan dalam melakukan tekanan, kontrol terhadap kekuasaan, dan aksi-aksi kolektif
	Pro-posisi	Penguatan akses dalam partisipasi politik institusional.
	Reposisi	Penguatan ruang masyarakat sipil (masyarakat petani)
Struktur Legitimasi	Kebijakan	Merubah orientasi substantif kebijakan agraria yang responsif terhadap kepentingan petani, mengeliminir praktik-praktik diskriminasi. Perjuangan pada ranah ini terkait dengan perubahan schemata kebijakan agraria dan kontrol terhadap praktik kekuasaan dalam institusi hukum.
Struktur Internal	Reposisi	Penguatan posisi aktor intelektual sebagai organ utama gerakan. Mereka ini perlu dikembalikan pada posisi sebenarnya menjadi bagian integral masyarakat sipil (dalam kesatuan lingkungan masyarakat petani). Organ petani dan non petani sama-sama diperkuat berada dalam satu kesatuan gerak langkah dalam keberlanjutan gerakan agraria.
Elemen Petani	Pemberdayaan	Meningkatkan posisi tawar petani secara institusional yang diwujudkan melalui penguatan organisasi tani.

Sumber: Hartoyo, 2010.



Daftar Pustaka

- Abercrombie, Nicolas, Stephan Hill and Bryan S. Turner. 1988. *Dictionary of Sociology*. Australia: The Penguin Group
- Adiwibowo, Soerjo, Melanie A. Sanito dan Lala M. Kolopaking. 2008. *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan*. SMP Tjondronegoro. Bogor: DKPM-IPB.
- Andrews, Kenneth T., 1997. *The Impacts of Social Movements on the Political Proses: The Civil Rights Movement and Black Electoral Politics in Mississippi*. American Sociological Review, 1997, Vol.62 (October:800-819):<http://www.UNC.edu-cta1/ASR97.pdf>. pdf. Download 8 Juni 2007).
- Archetti, Eduardo, Egil Fossum and Per Olav Reiton,1970. *Agrarian Structure and Peasant Autonomy*. Journal of Peace Research 1970; 7; 185. On behave of International Peace Research Institute, Oslo. Sage Publications.
- Arendt, Hannah, 1951. *The Origin of Totalitarianism*. 1951. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2000. *Lampung Dalam Angka 2000*. Bandar Lampung: CV. Lima Saudara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2010. *Lampung Dalam Angka 2010*. Bandar Lampung: Kerjasama Badan Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung.
- Barkan, Steven E., and Lynne L. Snowden, 2001. *Collective Violence*. Allyn and Bacon.
- Bates, R.H., 1984. *Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Agricultural Policies*. Berkeley: University of California Press.
- Beasley, Jeffrey, 1997. *Social Movement Organizations and Collective Action in Mexico: a Comparative Analysis of Urban and Rural Cases*. University of Kansas. Diakses dari http://www.168.96.200.17/arlibros/97_beasley.pdf, pada tanggal 8 Juni 2007.
- Benford, Robert D., and David A. Snow, 2000. *Pembingkayaan Processes and Social Movements: An Overview and Assesment*. Annu. Rev.Sociol.26:611-39. Copyright @ 2000 by Annual Review s. All rights reserved.

- Berstein, Henry, T.J. Byress, S. Borras, dan Cristobal Kay. 2008. *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Berger, Peter and Thomas Luckmann, 1966. *The Social Construction of Reality*. Garden City, N.Y. : Doubleday & Company, Inc.
- Bevington, Douglas and Chris Dixon, 2005. *Movement-relevant Theory: Rethinking Social Movement Scholarship and Activism*. Social Movement Studies. Vol.4, No.3, 185-208, Desember 2005.
- Blummer, Herbert. 1969. *Social Movements. Dalam McLaughlin. Studies in Social Movement: A Social Psychological Perspective*. New York: The Free Press.
- BPN RI, 2007. *Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan "Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat"*. Jakarta: BPN RI.
- Brohman, John, 1996. *Popular Development: Rethinking the Theory and Practice of Development*. Blackwell Publishers Ltd.
- Burhanuddin, Jajat dan Subhan, Arief (Editor), 1999, *Sistem Siaga Dini Untuk Kerusakan Sosial*, Jakarta: Balitbang Agama Depag RI dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta.
- Canel, E. *New Social Movement Theory and Resource Mobilization Theory: The Need for Integration (continued)*. Diakses dari dalam http://www.idrc.ca/en/ev-69139-201-1-DO_TOPIC.html, tanggal 8 Juni 2007.
- Carmin, Joann and Deborah B. Balsler, 2002. *Selecting Repertoires of Action in Environmental Movement Organizations: An Interpretive Approach*. Sage Publication: <http://www.Sagepublications.com>.
- Carver, Terrell. 1982. *Marx's Social Theory*. Oxford University Press.
- Chen, Jin, 1995. *Get Green or Get Out: Decoupling Environmental From Economic Objectives in Agricultural Regulation*. The Nasional Agricultural Law Center: University of Arkansas School of Law NatAgLaw@uark.edu., atau www.NationalAgLawCenter.org.
- Chung, Tan, 1980. *A New Look at Peasant Rebellions in China*. Sage Publications., hal. 35. Downloaded from <http://chr.sagepub.com> by hartoyo on November 19, 2007.
- Cohen, Jean L., 1985. *Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements*. Dalam "Social Movements", Journal "Social Research: An International Quarterly of The Social Sciences", Vol. 52 No.4 (Winter 1985).
- Culla, Adi Suryadi, 2006. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi LSM di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Dewi, Oetami, 2006. *Resistensi Petani Terhadap Perkebunan Kelapa Sawit: Studi kasus perlawanan petani terhadap perkebunan*

- kelapa sawit PTPN XIII (Persero) PIR V Ngabang, di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.* Jakarta: FISIP Departemen Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Ringkasan Disertasi.
- Dubet, F., and H.L. Thaler, 2004. *Introduction: The Sociology of Collective Action Reconsidered.* *Corrent Sociology*, July 2004, Vol. 52(4): 557-573 SAGE Publications. Download dari www.sagepublications.com.
- Eckstein, Susan. 1989. *Power and Popular Protest: Latin American Social Movements.* Los Engeles: University of California Press.
- Fahrudin, Wawan. 2003. *Akuntabilitas dan Transformasi LSM dalam Proses Transformasi Social Menuju Masyarakat Demokratis di Indonesia.* Jakarta: *Journal for Civil Society Empowerment*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Penerbit Pacivis, Depok.
- Fakih, Mansour. 1995. *Tanah, Rakyat dan Demokrasi*, Yogyakarta: Forum LSM.
- Fakih, Mansour. 2004. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pegolakan Ideologi LSM Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, Noer. 1999. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Pilitik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: INSIST, KPA, Pustaka Pelajar.
- Fisher, Simon, Dekha Ibrahim Abdi, Richard Smith, Jawed Ludin, Steve Williams, Sue Williams. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak.* Edisi Kedua. Jakarta: SMK Grafika Desa Putra.
- Freedman, Robert (Editor). 1961. *Marx On Economics.* New York: A Harcourt, Brace & World, Inc.
- Fuller, Abigail A. 1989. *The Structure and Process of Paece Movement Organizations: Effects on Participation.* Departemen of Sociology, University of Colorado, Boulder. Diakses dari http://www.colorado.edu/conflict/full_text_search, tanggal 15 Juni 2007.
- Geertz, Clifford. 1963. *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia.* Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian: Proses perubahan ekologi di Indonesia.* Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Ghimire, Krishna B. (Editor). 2001. *Land Reform and Peasant Livelihoods: The Social Dynamics of Rural Poverty and Agrarian Reforms in Developing Countries.* London: ITDG Publishing.
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society.* Cambridge: Polity Press.
- Giddens, Anthony. 1997. *Sociology.* Third Edition. Polity Press.

- Giddens, Anthony. 2004. *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Penerjemah Adi Loka Sjono. Pasuruan: Pedati Press.
- Giddens, Anthony. 2005. *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ginneken, Jaap van. 2003. *Collective Behavior And Public Opinion: Rapid Shifts in Opinion and Communication*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Gurr, Ted Robert. 1970. *Why Men Rebel*. Princeton: Princeton University Press.
- Hall, Derek, Philip Hirsch, and Tania Murray Li. 2011. *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press. ISBN: 978-0-8248-3603-0
- Hardiyanto, Andik dan Gunawan Wiradi. Penyusun. 2001. *Land Reform Berdasarkan Inisiatif Rakyat*. Seri Panduan Organisasi Tani Jilid I. Bandung: KPA.
- Harper, Charles L. 1989. *Exploring Social Change*. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Hartoyo, 2011a. *Problematika dan Solisusi Percepatan Pembangunan Kota Baru Lampung*. Makalah disampaikan dalam kegiatan Lokakarya yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, Selasa 21 Juni 2011.
- Hartoyo, Endriatmo Soetarto, Arya Hadi Dharmawan, dan Robert MZ Lawang. 2010. Dekonstruksi Struktur Politik Pusat dan Penguatan Sumberdaya Mobilisasi di Wilayah Pinggiran Sebagai Basis Munculnya Gerakan Petani di Lampung. *Jurnal Agrisep: Kajian Masalah Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian*. Vol. 11 No. 2 Maret 2010. ISSN: 1412-8837. Bengkulu: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.
- Hartoyo, Endriatmo Soetarto, Arya Hadi Dharmawan, dan Robert MZ. Lawang. 2008. Ketegangan Struktural dan Perjuangan Petani Terhadap Kuasa Atas Tanah di Pedesaan Lampung. *KOMUNITAS: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya*. Vol. 11 No. 2 Juni 2008. ISSN: 0854-8455. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Hartoyo. 2006. Praktek Gadai Tanah Pertanian Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin. *KOMUNITAS: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya*. Vol. 10 No. 1 Desember 2006. ISSN: 0854-8455. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

- Hartoyo. 2010. *Involusi Gerakan Agraria dan Nasib Petani: Studi Tentang Dinamika Gerakan Petani di Provinsi Lampung*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Disertasi.
- Hartoyo. 2011b. Tekanan Struktural, Peluang Politik dan Sukses Gerakan Petani di Lampung. *Jurnal Agrisep: Kajian Masalah Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian*. Vol. 10 No. 1 Maret 2011. ISSN: 1412-8837. Bengkulu: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.
- Hartoyo. 2013. Resistensi Petani Terhadap Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung. *ADMINISTRATIO: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*. Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2013. ISSN: 2087-0825. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Hashim, Wan. 1984. *Petani Dan Persoalan Agraria*. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti SDN. BHD.
- Hjlmars, Ulf. 1996. *Constructivist Analysis and Movement Organizations: Conceptual Clarifications*. Acta Sociologica 1996 Vol. 39, pp. 169-186. Sage Publications dalam <http://www.sagepublications.com>. Diakses tanggal 20 Nopember 2007.
- Jenkins, J. Craig. 1983. *Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements*. Columbia: Departemen of Sociology, University of Missouri. Annual Review of Sociology.
- Jenkins, J.Craig and Bert Klandermans (Editor's). 1995. *The Politics of Social Protest Comparative Perspective on States and Social Movement*. Menneapolis: University of Minnesota Press.
- Johnston, Hank and Bert Klandermans (Editor's). 1995. *Social Movements and Cultur*. Monnieapolis: University of Minnesota Press.
- Kadushin, Charles. 2004. *Linton C. Freeman. The Development of Social Network Analysis: A Study in The Sociology of Science*. <http://www.booksurge.com> (download tanggal 4 April 2007).
- Kartodirdjo, Sartono. 1973. *Pretest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centeries*. Singapore: Oxford University Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, jalanperistiwa, dan kelanjutannya (Sebuah studi kasus mengenai gerakan sosial di Indonesia)*. Terjemahan Hasan Basri. Cetakan pertama. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kauffman, M and Alfonso, HD (eds). 1997. *Community Power and Grassroots Democracy: The Transformation of Social Life*. Zed Book.

- Kilby, Patrick. 2004. *Accountability for empowerment: Dilemmas facing non-governmental organizations*. Asia Pacific School of Economics and Government, The Australian National University. <http://www.apseg.anu.edu.au>.
- King, Brayden. 2008. *A Social Movement Perspective of Stakeholder Collective Action and Influence*. Dimuat dalam Jurnal *Busines and Society*: <http://bas.sagepub.com>. Sage Publication.
- Kleden, Ignas. 2004. *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*. Magelang: Indonesiatara.
- Kompas. 2004. *Lembaga Swadaya Masyarakat: Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Kornhauser, W.1959. *The Politics of Mass Society*. New York: Free Press.
- Kriesi, Hanspeter. 1988. *The Interdependence of Structure and Action: Some Reflections on the State of the Art*. JAI Press Inc.
- Kriesi, Hanspeter. 1996. "The organizational Structure of New Social Movements in a Political Context", dalam "Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing", diedit oleh D.McAdam, J.D. McCarthy, and M.N. Zald. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kuntowijoyo. 1997. *Esei-Esei Sejarah Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama.
- Kurasawa, Aiko.1993. *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang perubahan sosial di pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grasindo.
- Kurtz, Marcus J. 2000. *Understanding Peasant Revolution: From Concept to Theory and Case*. *Theory and Society* 29: 93-124, 2000. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.
- Landman, Todd. 1999. *Organization and Impact: The Green Movement in Comparative Perspective*. <http://www.essex.ac.uk/UCPR/events/joints/ses-sions/paper/archivemennheim/w21/landman.pdf.pdf>. Download 8 Juni 2007.
- Landsberger, Henry A., dan YU.G. Alexandrov. 1984. *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Leonela, Anu dan R. Yando Zakaria (Editor). 2002. *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta: Insist dan Karsa.
- Lichbach, Mark. 1994. *What Makes Retional Peasants Revolutionary*. *World Politics* 46 (April 1994).
- Lockie, Stewart. 2004. *Collective Agency, Non-Human Causality and Envirounmental Social Movements: A Case Study of The Australian 'Landcare Movement'*. *Journal of Sociology @ 2004 The Australian*

- Sociological Association, Volume 40(1): 41-58, DOI:10.1177/1440783304040452 www.sagepublications.com.
- Lofland, John. 1996. *Social Movement Organizations: Guide to Research on Insurgent Realities*. New York: Aldine de Gruyter.
- Malik, Ichsan, Boedi Wijardjo, Noer Fauzi, dan Antoinette G Royo. 2003. *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumberdaya Alam*, Jakarta: Yayasan Kemala.
- Mamay, Gergey. *Theories of Social Movements and Their Current Development in Soviet Society*, di download dari <http://www.lucy.ukc.ac.uk/csacpub/russian/mamay.html>.
- Mauss, Armed L. 1975. *Social Problems as Social Movements*. Philadelphia: Lippincott.
- McAdam, Doug and David A. Snow. 1997. *Social Movements: Reading on The Emergence, Mobilization, and Dynamics*. Los Angeles, California: Roxbury Publishing Company.
- McAdam, Doug and W. Richard Scott, 2002. *Organization and Movements*. Paper presented at the Annual Meetings of the American Sociological Association, Chicago, IL, August, 2002. Revised draft of a paper prepared for an invitational Conference on Organizations and Social Movements held at the University of Michigan, Ann Arbor, May 10 -11, 2002.
- McAdam, Doug, John D. McCarthy and Mayer N. Zald (editor's). 1996. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing*. USA: Cambridge University Press.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow and Charles Tilly. 2001. *Dynamics of Contention*. New York: Cambridge University Press.
- McCarthy, John D. and Mayer N. Zald. 1977. *Resource Mobilization and social movements: A partial theory*. In *American Journal of Sociology* 82, 1977, 6.
- Miall, Hugh, Oliver Ramsbothan dan Tom Woodhouse. 2000. *Resolusi Konflik Kontemporer: Penyelesaian, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Migdal, Joel. 1979. *Peasant Politics and Revolutions Pressure to World Political and Social Change in the Third World*. Princenton: Princenton University Press.
- Miller, Valerie dan Jane Covey. 2005. *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Morris, Aldon D., and Carol McCurg Muller (Editors). 1992. *Frontier in Social Movement Theory*. New. Haven and London: Yale University Press.

- Mustain. 2007. *Petani vs Negara: Gerakan Petani Melawan Hegemoni Negara*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muukkonen, Martti. 1999. *From Deviant Phenomenon to Collective Identity: Paradigm Shifts in Social Movement Studies*. Master Thesis. Departemen of Sociology University of Joensuu. Diakses dari <http://www.cc.joensuu.fi/~muukkone/Smstudy.rtf>, diakses tanggal 9 Juli 2007.
- Nasikun. 1991. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasikun. 1997. *Domestikasi Peran Cendekiawan dan Perkembangan Sosiologi di Indonesia*. *Jurnal Unisia*, No.32/XVII/April 1997.
- Ngadisah. 2003. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Yogyakarta: Pustaka Raja.
- Nomani, Farhad and Sohrab Behdad. 2006. *Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter?* Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press.
- Nurhasim, Moch.1997. *Konflik Tanah di Jenggawah: Tipologi dan Pola Penyelesaiannya*. Jakarta: Prisma 7, Juli-Agustus 1997.
- Nurhayati, Dedeh. 2007. *Pengembangan Sistem Pendidikan Kader pada Organisasi Rakyat untuk Memperkuat Kerja Pengorganisasian dan Pemberdayaan Kelompok Rakyat Marjinal*. Diakses tanggal 31 Agustus 2007.
- Olzak, Susan and Emily Ryo. 2004. *Organization Diversity, Vitality and Outcomes in the Civil Right Movement: Running Head: Organizational Diversity in the Civil Rights Movement*. Makalah disampaikan pada "Annual Meeting of the American Sociological Association in San Francisco, 2004. Download dari <http://www.stanford.edu/dept/soc/people/faculty/olzak/diversity.paper06.pdf>, 8 Juni 2007.
- Padmo, Soegijanto. 2000. *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Paige, Jeffery M. 1978. *Agrarian Revolution: Social Movement and Export Agricultural in the Underdeveloped World*. New York: The Free Press.
- Paradakis, Elim. 1988. *Social Movements, Self-Limiting Radicalism and the Green Party in West Germany*. *Sociology*. Vol.22. No.3: 433-454. From the SAGE Social Science Collections. All Rights Reserved.
- Petras, James. 1998. *The Political and Social Basis of Regional Variation in Land Occupation in Brazil*. *Journal of Oeasant Studies*.
- Petras, James. 2005. *Strategi-Strategi Perjuangan: Sentralisasi Gerakan Tani di Amerika Latin*. Dalam <http://coenponto.wordpress.com/2005/06/26/strategi-strategi-perjuangan-sentralisasi-gerakan-tani-di-amerika-latin/> diunduh tanggal 25 Februari 2008.

- Phongpaichit, P. 1999. *Theories of Social Movements and Their Relevance for Thailand*. Position Paper for Thailand Research Fund.
- Popkin, Samuel. 1979. *The Rational Peasant*. Berkeley: The University of California Press.
- Priyono, B. Herry. 2003. *Anthony Giddens Suatu Pengantar*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Razif. 1991. *Penguasaan Tenaga Kerja dan Perkebunan Besar di Sumatera Timur: Tinjauan Historis*. Prisma "Industri Perkebunan: Kemakmuran untuk Siapa?". Jakarta: LP3ES No.4 Tahun XX, April 1991.
- Rochman, Meuthia Ganie. 2002. *An Uphill Struggle: Advocacy NGO's under Soeharto's New Order*, Jakarta: LabSosio, FISIP-Universitas Indonesia.
- Rusmiardi, Slamet. 1995. *Kepeloporan Transmigran Dalam Pembangunan dan Motivasinya di Provinsi Lampung*, dalam Seri Monografi: "Transmigrasi dan Pembangunan Daerah". Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Sajogyo. 1973. *Modernization Without Development*. Bogor: Anonymous, 2003.
- Sanderson, Stephen K. 2000. *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sayogyo. 1982. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Schlager, Edella. 1995. *Policy Making And Collective Action: Defining coalition within the advocacy framework*. Dalam "Policy Sciences: An International Journal Devoted to the Improvement of Policy Making". Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
- Schrijvers, Joke. 2000. *Kekerasan "Pembangunan": Pilihan untuk Kaum Intelektual*. Jakarta: Kalyanamitra.
- Scott, James C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant*. New Haven: Yale University Press.
- Scott, James C. 1989. *Everyday Form of Resistance: Peasant Resistance*. New York: Rmunk Mc Shape.
- Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shanin, Theodore (Ed). 1979. *Peasants and Peasant Societies*. New York, Auckland: Penguin Books, Middlesex.
- Siahaan, Hotman M. 1999. *Anarkhi Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi Pedesaan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.2, Nomor 3 Maret 1999, FISIP UGM.

- Silaen, Victor. 2006. *Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir: Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: IRE Press.
- Sitorus, MT. Felix. 2004. *Kerangka dan Metode Kajian Agraria*. Jurnal Analisis Sosial Vol.9 No.1 April 2004.
- Sitorus, MT. Felix. 2006. *Reklam Tanah Hutan: Tipe-tipe Reforma Agraria dari Bawah di Dataran Tinggi Sulawesi Tengah*. Dalam Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria. *Sumberdaya Agraria*. Bogor: IPB-Lapera Pustaka Utama, Volume III/Tahun III/2006.
- Situmorang, Abdul Wahib. 2007. *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Smelser, Neil. 1962. *The Theory of Collective Behavior*. New York: Free Press.
- Smith, William A. 2001. *Conscientizacao: Tujuan Pendidikan Paulo Freire*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetarto, Endriatmo. 2005. *Reforma Agraria Di Indonesia: Agenda Kebangsaan Yang Harus Dituntaskan*. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.
- Suhartono. 1991. *Agroindustri dan Petani: Multi Pajak di Vorstenlanden 1850-1900*, dalam Prisma. 1991. *Industri Perkebunan: Kemakmuran Untuk Siapa?* Jakarta: LP3ES No.4 Tahun XX, April 1991.
- Suhartono. 1995. *Bandit-Bandit Pedesaan: Studi Historis 1850-1942 di Jawa*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suhendar, Endang dan Yohana Budi Winarni. 1998. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Sunarto, D.M. 2007. *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Swasono, Sri Edi dan Masri Singarimbun. 1985. *Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*. Jakarta: UI-press.
- Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. (Terjemahan). Jakarta: Prenada Media.
- Tarrow, Sydney. 1998. *Power in Movement Social Movement and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Taukhid, M. 1952. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Djakarta: Tjakrawala.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Amerika Serikat: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Toch, Hans. 1965. *The Sosial Psychology of Social Movements*. Indianopolis, IN: Bobbs-Merrill Co.

- Törn-quist, Olle. 2008. *Workers in politics: Why is organised labour missing from the democracy movement* ?diakses dari <http://www.cetri.be/spip.php?article572> tanggal 2 Nopember 2012.
- Triwibowo, Darmawan (editor). 2006. *Gerakan Sosial: Wacana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta LP3ES.
- Turner JH. 1998. *The Structure of Sociological Theory*. Sixth Edition. Wadsworth Publishing Company.
- Wahyudi. 2005. *Formasi dan Struktur Gerakan petani: Studi Kasus Reklamasi/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*. Malang: UMM Press.
- Watala, Tim PSDHBM. 2004. *Kepastian Pengelolaan di Kawasan Hutan Negara: Pengalaman Belajar Bersama di Sumber Jaya*. Bandar Lampung: Watala.
- Webster, Neil. 2004. *Understanding the Evolving Diversity and Originalities in Rural Social Movements in the Age of Globalization: Civil Society and Social Movements*. Paper No. 7, United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD).
- Weick, Karl E. 1976. "Educational Organizations as Loosely Coupled Systems." *Administrative Science Quarterly*.
- White, Benjamin. 1996. *Optimisme Makro, Pesimisme Mikro ? Penaksiran Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia, 1967-1987*. Tulisan dimuat satu bab dalam buku Prof Sajogyo 70 Tahun. 1996. *Memahami dan menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo
- Widgren, Örjan. 1997. *Social Solidarity and Social Exchange*. *Sociology*. Vol. 31. No.4: 755-771. SAGE Social Science Collections. All Rights Reserved).
- Widjanto, Andi, F. Monika, H.D Kusumastuti dan Y. Pangastuti. 2007. *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara.
- Wijardjo, Boedhi dan Herlambang Perdana. 2001. *Reklamasi dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: YLBHI dan Raca.
- Wiradi, Gunawan. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wiradi, Gunawan. 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan yang belum berakhir*. Yogyakarta: Insist.
- Wolf, Eric J. 1967. *Peasant Wars of the Twentieth Century*. New York: Harper and Row.
- Wolf, Eric J. 1983. *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: Radjawali Press.

- Wood, James I., and Maurice Jackson. 1982. *Social Movements: Development, Participation, and Dynamic*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Zakaria, Yando. 2001. *Mensiasati Otonomi Daerah demi Pembaruan Agraria*. Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Zald, Mayer N. and John D. McCarthy. 2003. *Social Movements in an Organizational Society*. New Jersey: New Brunswick, Transaction Publishers.



Glosarium

- Agraria** : Lebih khusus menunjuk pada tanah pertanian dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya.
- Common Platform** : Sebuah konsensus bersama untuk mengawal proses pencapaian tujuan perubahan dalam jangka pendek dan jangka panjang, yang diwujudkan dalam berbagai inovasi strategi kerja dan agenda kerja yang telah disepekatinya bersama.
- Decoupling** : Terjadi suatu pemisahan (terputus) antara persoalan substantif petani dengan kepentingan para elit aktor gerakan petani
- Dualisme** : Antara struktur dan tindakan aktor dapat dianalisis secara terpisah, mengandung unsur saling mengabaikan, mengakui keberadaan yang satu dengan menyederhanakan keberadaan yang lain.
- Dualitas** : Antara struktur dan tindakan aktor bukan dilihat sebagai dua konsep yang berlawanan, melainkan seperti dua sisi dalam satu mata uang, sehingga tidak dapat dianalisis secara terpisah.
- Formasi sosial agraria** : Susunan konseptual struktur dan sistem sosial agraria yang dikonstruksi dan yang berlaku baik pada tataran diskursus maupun dalam praktek kehidupan sehari-hari.
- Fragmentasi Gerakan Petani** : Antar kelompok aktor dan antar organisasi tani sudah tidak solid lagi. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri, bahkan sampai dengan mendirikan organisasi baru.
- Free-riders** : Disebut “para penunggang bebas”, yaitu orang-orang atau kelompok orang luar yang sengaja memanfaatkan situasi konfliktual dan gerakan petani untuk mencapai tujuannya sendiri.
- Gerakan konsensus** : Komunitas petani lokal berjuang bersama bertujuan menyelesaikan persoalan pertanahan baik melalui jalur hukum maupun dengan cara mediasi dan negosiasi.
Hasilnya banyak yang tidak terselesaikan.
- Gerakan lokal tradisional** : Aksi-aksi kolektif non institusional dengan ciri-ciri sederhana dalam organisasi, data dan strategi aksi;

- terikat oleh struktur otoritas tradisi setempat; berlokus lokal (wilayah komunitas petani tertentu); tujuannya berorientasi material (tanah kembali atau mendapat ganti rugi).
- Gerakan Petani : Proses tindakan kolektivitas aktor yang bertindak bersama melalui wadah organisasi tani berbasis isu ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang berorientasi pada perubahan tatanan agraria yang adil dan demokratis, dengan menggunakan saluran non-institusional.
- Gerakan Sosial : Merupakan: (1) upaya sekelompok aktor yang secara sadar bertindak bersama melalui jaringan (informal atau formal); (2) berorientasi atau berbasis isu konfliktual; (3) berada di ruang kelembagaan yang mapan; (4) dilakukan untuk melanjutkan kepentingan bersama atau menjamin tujuan bersama; dan (5) menggunakan berbagai bentuk protes dalam rangkaian interaksi berkelanjutan dengan pihak lawan.
- Gerakan sosiopolitik : Gerakan petani terorganisir dengan menekan para pemegang otoritas yang diorientasikan pada perubahan kebijakan agraria (penguasaan tanah pertanian).
- Hubungan Antagonis : Pola atau bentuk hubungan yang cenderung mengarah pada pola hubungan konfliktual.
- Hubungan Simbiosis Mutualistik : Pola atau bentuk hubungan yang cenderung berjalan berdampingan dan sinergis antar elemen sistem (konsensus dan integratif).
- Hubungan Sosial Agraria : Hubungan antara petani, pemerintah, dan perusahaan dalam praktek penguasaan tanah pertanian sehari-hari.
- Hubungan Teknis Agraria : Hubungan antara tanah pertanian (obyek agraria) dengan petani, pemerintah dan perusahaan (subyek agraria).
- Involusi gerakan Petani (Agraria) : Suatu kondisi gerakan petani yang stagnan (tetap, tidak berubah) atau lemahnya peran organisasi gerakan petani dalam melakukan perubahan struktur sosial agraria yang setara dan adil sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan petani sejalan dengan perkembangan upaya-upaya yang telah dilakukan. Memang selama proses perjuangan petani terjadi inovasi-inovasi strategi

- dan taktik gerakan, berupaya memperkuat jaringan, akan tetapi kehadiran dan perannya tetap saja tidak mampu menghasilkan perubahan substantif nasib petani sesuai dengan klaim-klaim yang diperjuangkan.
- Kemandirian : Kemampuan organisasi tani dalam mengembangkan diri tanpa tergantung pada pihak lain, yakni: 1) kemampuan dalam mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan pihak lain; dan 2) kondisi, reaksi atau perkembangan organisasi yang mampu mengelola dan mengatur diri sendiri secara bebas.
- Kesadaran proaktif : Menunjuk pada derajat penerimaan petani terhadap keberlakuan sistem sosial agraria. Pada tahapan ini kesadaran petani tidak dikonstruksi mengarah pada suatu kondisi bahwa dirinya menerus termarginalkan dan mengalami tekanan-tekanan struktural. Petani yang masuk pada kesadaran ini masih kuat memiliki pandangan proaktif terhadap keberlakuan sistem sosial agraria.
- Kesadaran oposisional (*oppositional consciousness*) : Seperangkat ide-ide dan kepercayaan “memberontak” yang dikonstruksi dan dikembangkan oleh kelompok tertekan dengan tujuan mengarahkan perjuangannya untuk merusak atau meruntuhkan, merubah atau menggulingkan suatu sistem dominasi.
- Kesadaran sosial konfliktual : Petani mulai mampu membaca kondisi tekanan struktural yang dihadapi. Mereka sudah memiliki konsepsi-konsepsi pandangan kritis terhadap praktek dominasi agraria. Tetapi, pada tahap ini petani merasa tidak memiliki cukup kekuatan (sumberdaya) untuk melakukan perlawanan, dan takut pada tindakan represif yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus oleh aparat keamanan.
- Kesadaran sosiopolitik : Petani aktif membangun dan mengembangkan solidaritas ke dalam (antar petani) dan ke luar (dengan para pendukungnya), dan mereka memiliki komitmen tinggi untuk melakukan perubahan kebijakan pertanahan dan mengantisipasi tindakan balik dari pihak lawan.
- Ketegangan : Ketegangan (ambigu yang dirasakan, deprivasi,

- Struktural : inkonsistensi, tekanan) yang muncul dalam kaitannya dengancarabahaya strukturyang kondusifitu dirasakan. Contoh: ketimpangan yang terjadi di dalam sistem sosial agraria merupakan suatu faktor kondusif yang dapat atau tidak dapat menghasilkan ketegangan.
- Ketegangan struktural : Semua bentuk gangguan atau kondisi-kondisi sosial yang penuh ketidakpastian yang dapat menjadi stimulan bagi tumbuhnya gerakan petani.
- Kontradiksi struktural : Struktur sosial agraria yang berlaku bersifat semi kapitalistik berlawanan dengan struktur sosial agraria neo populis yang diharapkan berlaku oleh petani.
- Kredibilitas : Menunjuk pada hubungan antara organisasi tani dengan konstituennya, ukuran konstituen, dan seberapa jauh organisasi tani bertanggung jawab kepada konstituennya.
- Land reform by leverage* : Upaya mendorong pemerintah melakukan reforma agraria sesuai dengan aspirasi petani. Atau upaya melibatkan petani secara langsung dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan agraria yang pro petani dan kelompok miskin.
- Legitimasi : Menunjuk pada siapa saja yang secara nyata menjadi anggota organisasi tani dan sejauh mana mereka mengakui keberadaan organisasi gerakan tersebut
- Liberasi Kognitif (*cognitive liberation*) : Menunjuk pada transformasi kesadaran antar partisipan potensial dalam melakukan aks-aksi kolektif.
- Negasi struktural : Struktur sosial agraria yang berlaku memposisikan petani sebagai elemen sistem yang lemah, marginal, subordinat, dan underdog, dibandingkan dengan posisi negara (pemerintah) dan swasta (perusahaan).
- Organisasi Tani : Jaringan (dari informal sampai formal) internal suatu kelompok berbasis massa petani yang dibentuk dan diarahkan untuk mengejar tujuan bersama melalui tindakan bersama. Dalam konteks gerakan agraria, organisasi tani berada dalam dimensi waktu dan dalam ruang, serta bukan dipandang sebagai bagian dari sumberdaya

- mobilisasi, tetapi dipandang sebagai alat untuk memobilisir sumberdaya gerakan.
- Peluang Politik : Derajat keterbukaan ruang politik suatu pemerintahan, keragaman sikap para elit politik, toleransi pemerintah terhadap protes, dan kapasitas implementasi kebijakan pemerintah. Jadi berarti derajat keterbukaan suatu rezim terhadap tuntutan-tuntutan baru atau lebih khusus derajat keterbukaan iklim politik yang memungkinkan dilakukan aksi-aksi protes petani.
- Pembingkaihan Kolektif (*Collective Framing*) : Upaya mengkonstruksi makna-makna dan pemahaman para aktor gerakan petani, pihak lawan, dan masyarakat yang melekatkan keluhan-keluhannya pada gerakan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dan pembenaran terhadap aksi-aksi kolektif yang dilakukan.
- Protes : Keberatan terhadap peristiwa, kebijakan, atau situasi tertentu yang diungkapkan secara bersama-sama (kolektif) baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan mempengaruhi opini publik atau kebijakan pemerintah untuk melakukan perubahan yang diinginkan.
- Protes klasik : Gerakan tak berbentuk, berupa reaksi-reaksi spontan, emosional, sporadis baik sembunyi maupun terbuka (biasanya dalam bentuk kekerasan fisik atau amuk massa). Hasilnya selalu gagal dan dengan mudah ditekan dan dilemahkan.
- Rekonstruksi : Membangun kembali hubungan sosial antar elemen petani, pemerintah dan perusahaan dalam penguasaan sumberdaya agraria. Dalam arti luas, seperti pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan.
- Sistem Sosial Agraria : Saling hubungan, saling ketergantungan dan saling pengaruh antara elemen petani, pemerintah dan perusahaan dalam penguasaan sumberdaya agraria.
- Stagnasi Gerakan Petani : Gerakan petani yang mengalami kemandegan, berjalan ditempat, tidak ada isu kritis dan strategis yang diproduksi, sehingga tidak produktif dalam melakukan aksi-aksi. Ibaratnya “hidup enggan mati tak mau” atau ada yang “mati suri”.

- Struktur Dominasi : Pada struktur dominasi ada dua, yaitu dominasi politik dan ekonomi: (1) yang domain teoritisnya adalah teori otoritas sumberdaya, tatanan institusionalnya adalah institusi politik; dan (2) yang domain teoritisnya adalah alokasi sumberdaya, tatanan institusionalnya adalah institusi ekonomi.
- Struktur Legitimasi : Struktur regulasi normatif dan tatanan institusinya adalah institusi legal.
- Struktur Mobilisasi Sumberdaya : Aturan dan sumberdaya material dan non material yang dapat digunakan untuk melakukan aksi-aksi kolektif petani.
- Struktur Signifikasi : Pada struktur signifikasi domain teoritisnya adalah teori pengkodean dan tatanan institusionalnya adalah tatanan simbolis/mode wacana.
- Struktur Sosial Agraria : Aturan dan sumberdaya sosial dalam pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumberdaya agraria, antara petani, pemerintah dan perusahaan.
- Sub Kultur Oposisi Petani : Realitas sosio-kultural melawan dominasi yang direproduksi secara aktif dalam struktur skemata petani, di dalam ruang-ruang interaksi dan berkembang selama persoalan pertanahan struktural berlangsung. Sub Kultur Oposisi Petani lebih dinamis dibanding kultur dominan, tetapi sifatnya kurang cair (*fluid*) dibanding pembedaan kolektif (*collective framing*). Didalamnya selain terdapat akumulasi ketidakpuasan juga terdapat penguatan kesadaran konfliktual sejalan dengan kegagalan atas berbagai strategi perjuangan petani yang pernah ditempuh.
- Swadaya : Tingkat partisipasi anggota organisasi tani dalam kegiatan tertentu berdasarkan prakarsa sendiri disertai kemampuan memobilisasi sumberdaya materi sendiri tanpa harus tergantung pada pihak lain atau sumberdaya dari luar.
- Swasembada : Tingkat kemampuan organisasi tani dalam memenuhi kebutuhan sendiri berdasarkan sumberdaya yang dimiliki.

Indeks Subyek

A
Accommodationist, 61

B

Breakdown theory, 92

C

Centralized bureaucratic model, 54, 58

Common platform, 19, 151, 176, 191

Countercultural, 170, 195

D

Decentralized informal model, 47, 52

Decoupling, 41

Deformasi, 33

Degenerasi, 1

Deideologisasi, 11,12, 66

Delegitimasi, 35

Demise, 47

Depolitisasi, 7

Deprivasi absolut/obyektif, 38

Deprivasi relatif/subyektif, 3, 105, 190

Determinisme, 170, 195

Developmentalism, 137, 155

Dialektika, 61

Differential benefit, 76

Differential control, 31, 43, 49

Diffuse, 127

Domein verklaring, 155, 167, 177

E

Enclave, 10, 25

Episode kekuasaan rezim, 10, 25

Erfpacht, 47, 52

Evolutioner, 3, 12

Expressive, 49

F
Farmer, 1, 189, 200, 201, 209

Floating mass, 96

Fluid, 96

Frame alignment, 59

Frame ideological, 9, 36, 38, 40

Framing process, 35, 36, 37

Free rider, 30, 31, 32, 33, 115, 129, 216

Frustrasi aktif, 30, 48

G

Gemeenschappen, 110

Generalized belief system, 36

H

Hidden agendas, 53

I

Involusi struktural, 166, 167, 183

K

Kesadaran sosiopolitik, 82, 87, 88, 90, 213

Kontradiksi, 77

L

Land reform by leverage, 59, 108, 109, 110, 112, 116, 170, 173, 183, 211

Landless, 211

Legitimasi, 32, 36, 62

Liberasi kognitif, 53, 57

Life cycle, 59

M

Maintream, 2, 3, 15, 59, 65, 68, 69, 79, 81, 99, 116, 131, 180, 212

Makro kosmos, 2, 212

Marga, 42
Marxian, 7, 8, 64, 94
Mass discontent, 51, 57
Massa mengambang, 59
Masyarakat sipil, 53
Mediasi, 41
Mikro kosmos, 33, 106, 131
Mindset, 167
Minimalis, 167
Mobilisasi konsensus, 132, 167, 184
Mobilisasi tindakan, 110
Mobilization for action, 43
Mobilizing resources, 62
Modal sosial, 62
Monocropped, 41
Moral ekonomi, 42
Movements association, 166, 167, 168,
 169, 183, 184, 191, 196, 201, 203,
 212

N

Natural history, 38
Neo-populis, 107, 109, 117, 123
New boom crops, 3, 12, 70
New social movement theory, 59, 60,
 213
Non institusional, 80, 86, 88, 113, 114,
 116, 126, 130, 216
Normative, 82, 84, 85, 86, 88

O

Onderneming, 2, 47
Ontologis, 12, 76, 77, 93, 102, 118, 167,
 168, 184, 189
Oportunis, 4, 19, 140, 145, 172
Oppositional consciousness, 60, 119,
 120, 126, 133
Oppotunity loss, 24, 31, 38, 49
Organizational-entrepreneurial model,
 195, 196, 198

P

Potential beneficiaries, 47, 52

R

Reclaiming, 128, 133
Resource mobilization theory, 38

S

Simbiosis, 68, 69, 74, 79, 90, 163, 177,
 188, 192, 194, 212
Social constructionistperspective, 15
Socially embedded actor, 169
Spirit de corps, 31
Stagnasi, 18, 152, 158, 163, 181, 191,
 215
State corporatism, 3, 4, 70, 180
State-sponsored violence, 3
Stigma politik, 64
Stock of knowledge, 5, 6, 8, 132, 199,
 200, 201, 204, 205, 207, 209
Structural condusiveness, 7
Structural-strain, 33
Struktur federatif, 33
Struktur schemata, 33
Struktur sosial agraria, 1, 2, 6, 8, 12,
 13, 14, 17, 19, 23, 36, 63, 64, 65, 67,
 72, 74, 75, 76, 78, 94, 97, 98, 102,
 103, 104, 105, 108, 110, 122, 123,
 131, 136, 138, 148, 153, 189, 193,
 212, 215, 216
Strukturasi internal, 11, 117
Sub kultur opsisi petani, 11
Subordinasi, 38, 43
Substratum, 38, 43
Swadaya, 42, 66, 201
Swasembada, 39

T

Tangible assets, 41
Teknokratis, 35, 37
Tim wali songo, 4, 6, 63, 65, 67, 68, 72,
 75, 76, 79, 90
Tool kit, 181, 191
Transformasi, 47
Transmigrasi lokal, 108, 109, 117, 118
Transnasional, 16, 18, 22
Tujuan intrumental, 167, 184, 204
Tujuan substantif, 40, 95

U

Underdog, 170, 194

Underprivileged, 14, 17, 101, 102, 105,
121, 133, 134, 135, 143, 157, 180

Utilitarian, 4, 5, 18, 48, 187, 200, 215

V

Value-added, 7, 8

W

War of maneuver, 33

War of position, 160

Weberian, 46

Z

Zero-sum, 25, 30, 47

Indeks Nama

A

Adiwibowo, 13, 190, 199

Alexandrov, 76, 93, 96, 182, 204

Alfonso, 50, 55, 203

Andrews, 43, 199

Archetti, 94, 199

Arendte, 38, 199

Aristoteles, 26

Asch, 61

Ash, 53, 57

B

Baharudin, 5

Balser, 48, 200

Barkan, 26, 27, 29, 30, 38, 40, 46, 109, 199

Bates, 7, 8, 95, 182, 199

Beasley, 31, 42, 52, 55, 59, 199

Behdad, 166, 167, 182, 206

Benford, 32, 33, 199

Berbstein, 168, 200

Bevington, 31, 200

Blummer, 35, 200

Borras, 200

BPN, 13, 17, 20, 135, 157, 195, 200

Brohman, 13, 39, 40, 200

Byress, 200

C

Canel, 41, 200

Carmin, 48, 200

Carver, 168, 200

Chen, 150, 200

Chung, 96, 200

Cloward, 11

Cohen, 38, 46, 48, 200

Covey, 59, 65, 205

H

Hall, 94, 202

Hardiyanto, 60, 202

Harper, 27, 28, 29, 35, 37, 59, 61, 92, 202, 209

Hartoyo, 63, 66, 71, 74, 78, 79, 96, 111, 115, 118, 117, 118, 123, 130, 131, 136, 137, 153, 156, 159, 160, 162, 164, 165, 174, 183, 184, 188, 191, 198, 202, 203

Hashim, 7, 13, 203

Hejden, 42

Herring, 43

Hine, 54, 58

Hirsch, 94, 202

Hjlmarr, 32, 42, 43, 203

Hoper, 59

Huiser, 93

J

Jackson, 29, 210

Jasper, 31

Jelin, 39

Jenkins, 38, 41, 42, 44, 54, 55, 58, 203

Jinks, 150

John Dollar, 26

Johnston, 11, 49, 203

K

Kadushin, 62, 203

Kartodirdjo, 20, 177, 203

Kauffman, 50, 55, 203

Kay, 200

Kilby, 61, 204

King, 49, 204

Kitscheldt, 42

Klandermans, 11, 30, 38, 42, 44, 48, 203

Kleden, 4, 5, 71, 115, 204

Kolopaking, 13, 190, 199

Kompas, 19, 204

Koopmans, 42

Kornhauser, 38, 204

Kriesi, 9, 44, 50, 55, 60, 62, 167, 204

Kuntowijoyo, 179, 204

Kurasawa, 177, 204
Kurtz, 6, 7, 8, 94, 204

P

Paige, 8, 94, 206
Paradakis, 61, 206
Perdana, 16, 209
Petras, 20, 195, 206
Pettigrew, 28
Phongpaichit, 40, 207
Pieterse, 3, 70
Piven, 11
Popkin, 7, 8, 64, 65, 95, 182, 207
Porta, 9

R

Rahmat, 59
Razif, 3, 207
Reiton, 94, 199
Rochman, 16, 21, 207
Rogers, 41
Rothschild, 51, 57
Rucht, 42

Rusmialdi, 100, 207
Ryo, 44, 206

S

Sajogyo, 13, 166, 167, 207, 209
Sanito, 13, 190, 199
Schrijvers, 3, 12, 70, 76, 207
Scott, 7, 8, 31, 32, 43, 45, 51, 55, 56, 94,
121, 182, 205, 207
Shanin, 5, 8, 63, 207
Siahaan, 95, 207
Silaen, 21, 180, 208
Singarimbun, 99, 208
Sitorus, 2, 5, 72, 189, 208
Situmorang, 20, 208
Smelser, 35, 36, 37, 38, 91, 92, 208
Snow, 9, 11, 29, 30, 32, 33, 47, 48, 92,
199, 205
Snowden, 26, 27, 29, 30, 38, 40, 46,
109, 199
Soetarto, 16, 202, 208
Stephan, 13, 199
Subhan, 5, 15, 200

BIODATA PENULIS



Hartoyo adalah staf pengajar Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Lampung. Dia lebih banyak mendalami kajian tentang manajemen konflik, gerakan sosial, teori sosiologi kontemporer, psikologi sosial, sosiologi ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Dia adalah sarjana sosiologi dari FISIPOL UGM (1989), sarjana Bimbingan Konseling (BK) dari IKIP/UNY Yogyakarta (1989), master sosiologi dari Departemen Sosiologi FISIP UI (1996), dan Doktor dalam bidang Sosiologi Pedesaan dari Departemen Ekologi Manusia di IPB (2010). Topik tesisnya adalah “Keserasian Hubungan Antaretnik dan Faktor Pendorong dan Pengenolaannya”, sedangkan topik disertasinya adalah “Involusi Gerakan Agraria dan Nasib Petani”.

Pada tahun 1996-2004 aktif sebagai Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung. Selain aktif mengajar Sosiologi pada Program Sarjana Strata I Jurusan Sosiologi, juga aktif mengajar Sosiologi Hukum dan Metode Penelitian Hukum pada Program Pascasarjana Magister Hukum/MH (2010-2013) FH Universitas Lampung dan mengajar Politik Agraria dan Menejemen Konflik pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan (MIP), FISIP Universitas Lampung.

Aktif dalam kegiatan penelitian, seminar dan pengabdian kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial, Pengarusutamaan Gender (PUG), dan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2003-sekarang aktif melakukan sosialisasi PUG bidang pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota. Tahun 2013-sekarang menjalin kerjasama dengan Kementerian PU Bidang Sosekling untuk mengkaji dampak sosial, ekonomi dan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur PU dan permukiman. Tahun 2013 pernah menyampaikan gagasan mengenai penanganan konflik sosial sebanyak 2 kali di Kemenkopolkukam. Tahun 2013-2014 melakukan penelitian tentang “Daerah Rawan Konflik Sosial di Provinsi Lampung” bekerjasama dengan Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung. Tahun 2013 melakukan penelitian tentang “Jenis dan sumber konflik sosial di Provinsi Lampung” bekerjasama dengan Kesbangpol Provinsi Lampung.

Aktif memberikan materi dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Polda Lampung. Pada tahun 2014 bekerjasama dengan Polda Lampung melakukan penelitian tentang “Manajemen Operasional Polsek Dalam Rangka Restrukturisasi Organisasi Guna Mengoptimalkan Tugas Bhabinkamtibmas”. Tahun 2014 juga berhasil menjalin kerjasama dengan Sub Direktorat Internalisasi Nilai, Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan workshop berjenjang sebanyak 3 (tiga) kali tentang internalisasi nilai-nilai budaya damai kepada para pemuda yang tinggal di daerah rawan konflik sosial di Kabupaten Lampung Selatan.

Tahun 2003-sekarang sebagai ketua Tim Pakar PUG Bidang Pendidikan dan Anggota Tim Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi Lampung. Selain itu, saat ini dia juga sebagai ketua Pusat Studi Resolusi Konflik (*Centre for Research on Conflict resolution/CCR*) FISIP Universitas Lampung, dan ketua Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Handphone penulis No. 08127937553, dan alamat e-mail: htyiluh@yahoo.co.id.